



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019 serta adanya perubahan kebijakan dan program prioritas Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 148);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 35 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

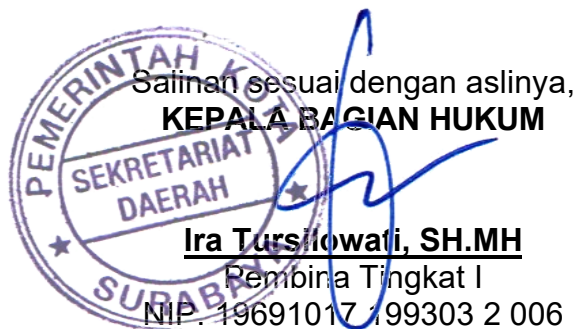
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Perubahan Kota Surabaya Tahun 2019 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 348 yang terdiri atas :

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Perubahan RKPD dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan.

Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya meliputi :

A. Sinergi Perencanaan Pusat – Daerah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8).

B. Sinergi Perencanaan dengan Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 139);

C. Ketentuan Pendukung Lainnya

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

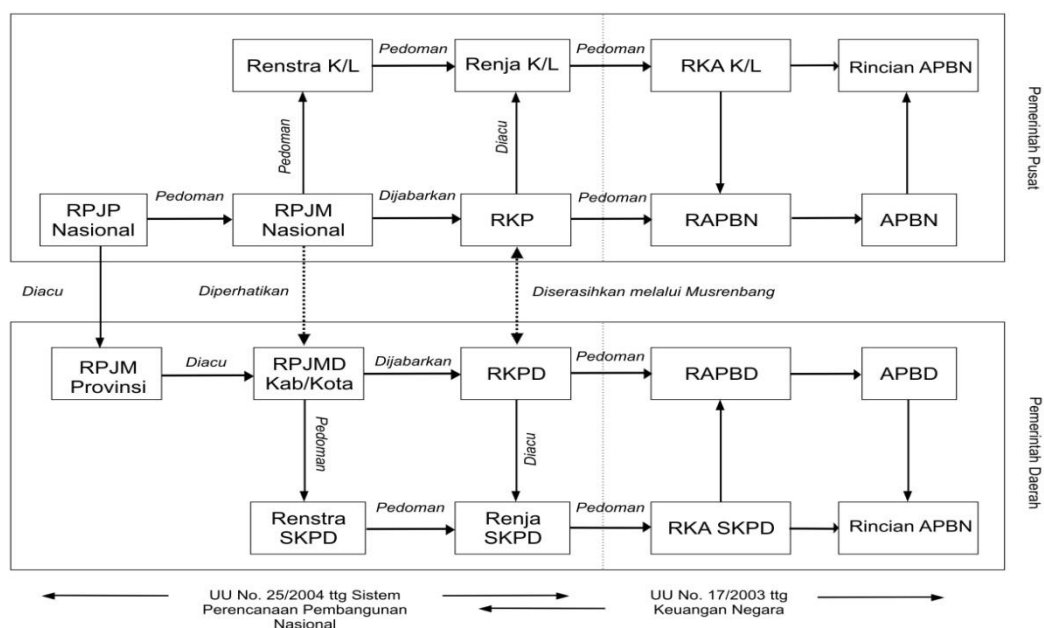
Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Surabaya dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2019 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019.

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2019;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

RKPD Kota Surabaya ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN**
- II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019**
- III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
- IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
- V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
- VI. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota

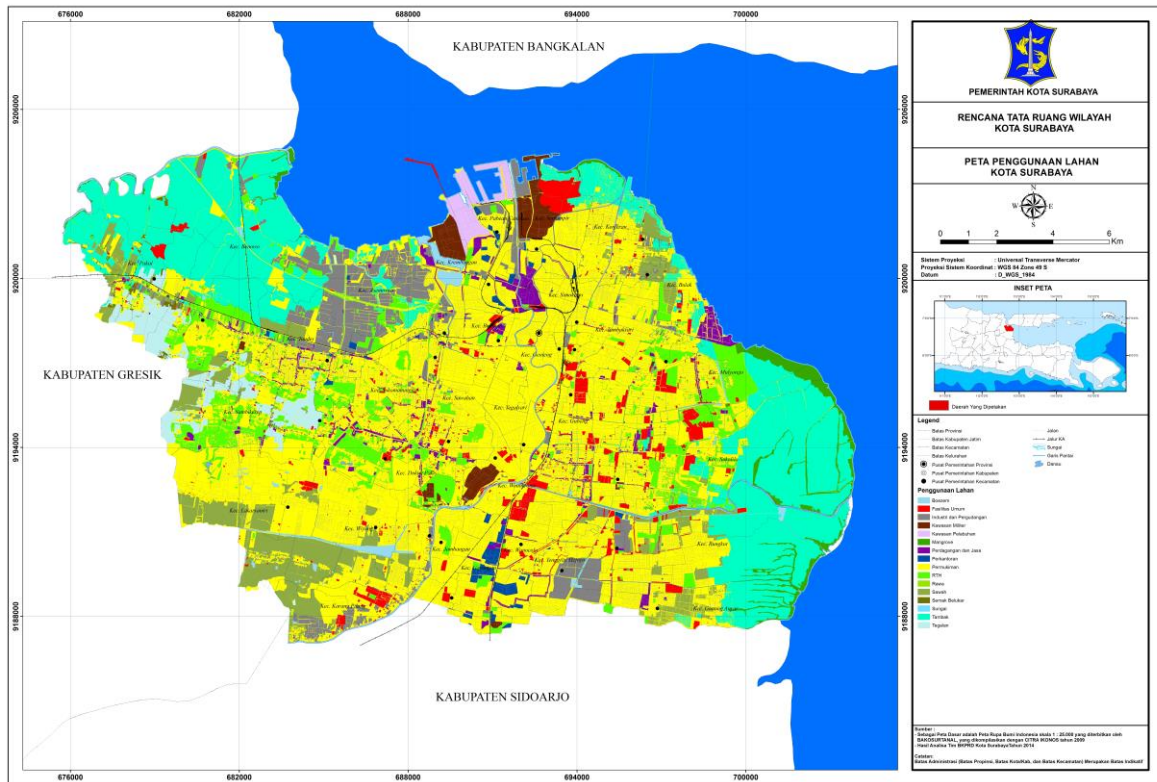
Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

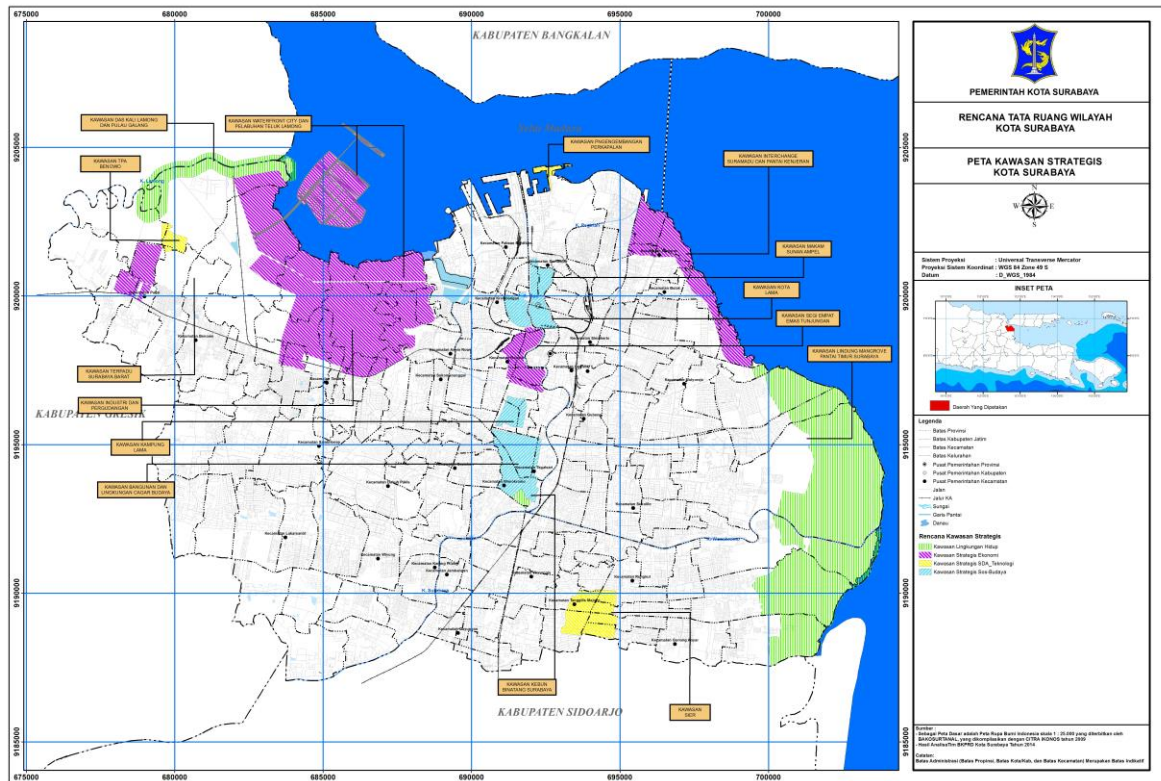
Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan

kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.



Gambar II. 1 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta kawasan strategis kota Surabaya.



Gambar II. 2 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Beberapa kawasan strategis yang dimaksud diantaranya adalah:

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak menyumbang kontribusi PDRB pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdag. Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II. 1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Pabean Cantian	29
2	Krembangan	50
3	Genteng	64
4	Sawahan	9
5	Wonokromo	21
6	Gubeng	11
7	Tegalsari	27
8	Bubutan	30
9	Semampir	14
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	8
12	Dukuh Pakis	1
13	Lakarsantri	2
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1
Jumlah		273

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: "*Waste to Energy*".

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.3



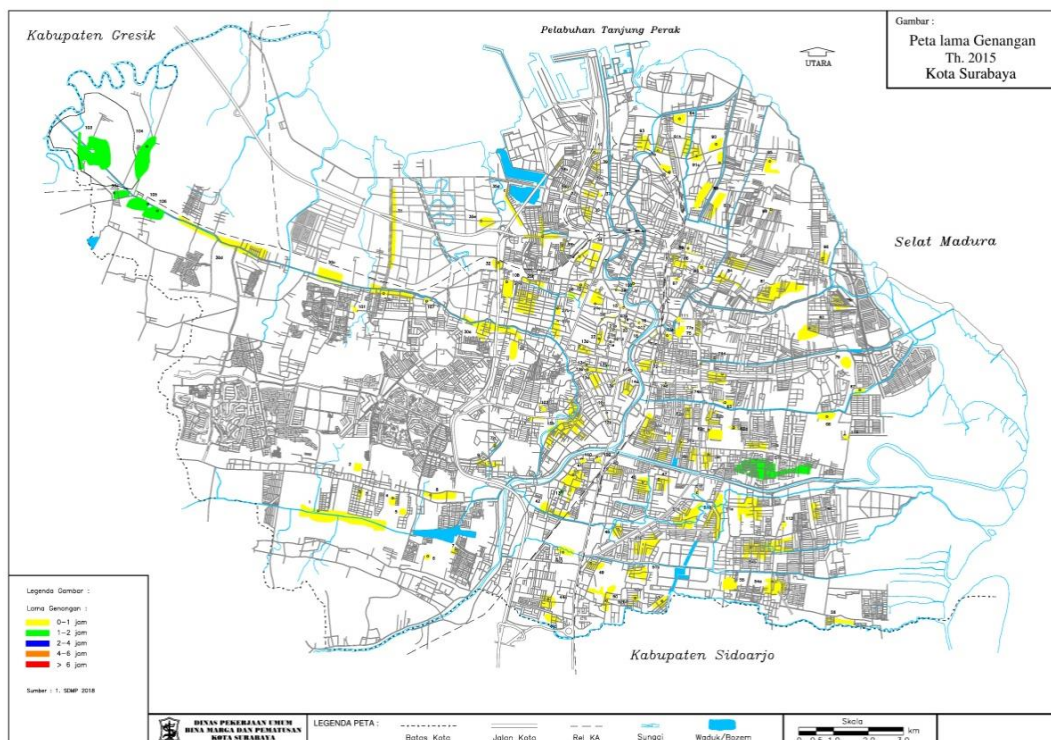
Gambar II. 4
Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

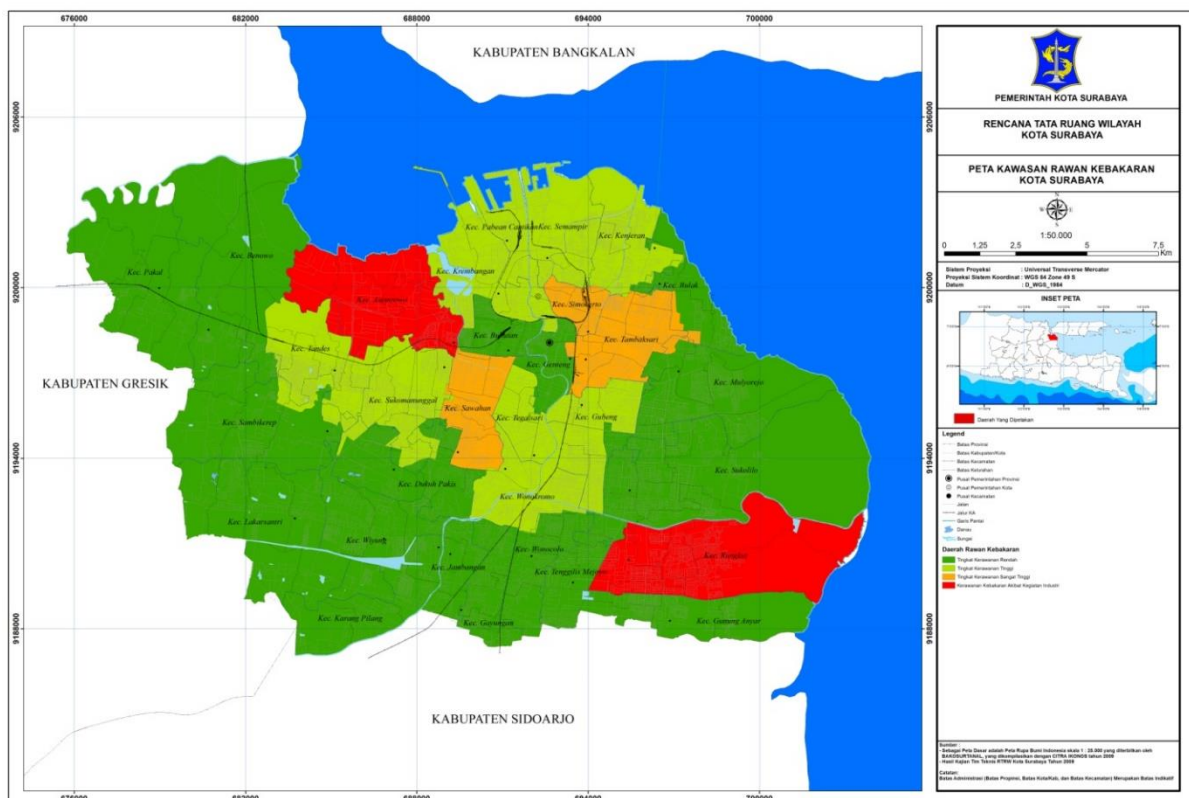
Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:



Gambar II. 5
Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara



Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar II. 7
Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II. 2
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Banjir	10	1	0	0
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	12	3	3	5
3	Kebakaran	300	589	496	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2018 sebesar 3.094.732 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II. 3. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II. 3 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II. 3
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Asemrowo	15,3241	48.744	3.181
2	Benowo	25,106	66.062	2.631
3	Bubutan	3,947	106.399	26.957
4	Bulak	5,6633	45.211	7.983
5	Dukuh Pakis	10,9526	62.520	5.708
6	Gayungan	5,5139	46.958	8.516
7	Genteng	14,1224	61.934	4.386
8	Gubeng	7,8009	141.768	18.173

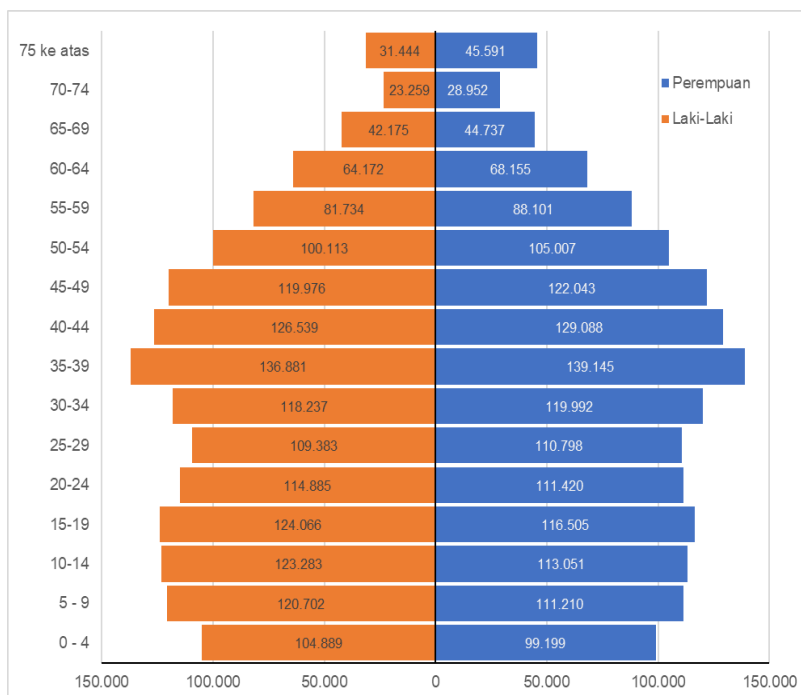
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
17	Pakal	19,0729	56.453	2.960
18	Rungkut	22,7359	117.591	5.172
19	Sambikerep	16,7174	64.947	3.885
20	Sawahan	7,0668	213.760	30.248
21	Semampir	8,7024	202.040	23.217
22	Simokerto	2,7723	102.764	37.068
23	Sukolilo	28,7225	114.309	3.980
24	Sukomanunggal	9,2935	105.917	11.397

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
9	Gunung Anyar	9,7686	58.714	6.010
10	Jambangan	4,5385	52.376	11.540
11	Karang Pilang	9,9754	75.658	7.584
12	Kenjeran	8,7314	172.174	19.719
13	Krembangan	8,7253	124.419	14.260
14	Lakarsantri	19,2742	59.930	3.109
15	Mulyorejo	12,7742	89.510	7.007
16	Pabean Cantian	5,5762	84.907	15.227

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
25	Tambaksari	9,3023	234.473	25.206
26	Tandes	9,7564	94.810	9.718
27	Tegalsari	4,2905	106.646	24.856
28	Tenggiling Mejoro	5,8474	59.555	10.185
29	Wiyung	11,3889	72.720	6.385
30	Wonocolo	6,5355	83.743	12.814
31	Wonokromo	8,3176	167.720	20.164

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019 (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.552.994 jiwa atau 50,18% dan penduduk laki-laki sebesar 1.541.738 jiwa atau 49,82%. Dari piramida penduduk seperti pada gambar menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia 35-39 tahun. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.759.442 jiwa atau 52,64 persen dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.008.567 jiwa atau 30,17 persen, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 370.637 atau 11,09 persen. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II. 8

Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2018

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan IV tahun 2017 yaitu usia 0-4 tahun sebanyak 203.945 jiwa, usia 5-9 tahun sebanyak 252.438 jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 257.533 jiwa dan usia 15-19 tahun sebanyak 256.366 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan IV tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah
Tahun 2018

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.160	5.143	2.434	2.466
2	Benowo	4.244	6.733	3.314	3.346
3	Bubutan	5.921	9.678	4.923	5.146
4	Bulak	2.864	4.557	2.314	2.368
5	Dukuh Pakis	3.546	5.599	2.698	2.822
6	Gayungan	2.596	3.971	2.033	2.188
7	Genteng	3.214	5.193	2.652	2.869
8	Gubeng	7.541	12.284	6.216	6.514
9	Gunung Anyar	3.623	5.481	2.633	2.641
10	Jambangan	3.262	4.895	2.437	2.376
11	Karang Pilang	4.343	6.787	3.380	3.679
12	Kenjeran	11.181	17.806	8.635	8.859
13	Krembangan	7.142	11.287	5.679	5.856
14	Lakar Santri	3.662	5.936	2.837	3.023
15	Mulyorejo	5.065	7.806	3.942	4.162
16	Pabean Cantian	4.451	7.534	3.781	3.814
17	Pakal	3.465	5.758	2.883	2.898
18	Rungkut	7.080	10.725	5.215	5.614
19	Sambikerep	3.990	6.232	3.028	3.035
20	Sawahan	12.106	19.868	9.863	10.172
21	Semampir	12.446	19.778	9.712	9.827
22	Simokerto	5.887	9.123	4.592	4.742
23	Sukolilo	6.682	10.351	5.050	5.151
24	Sukomanunggal	6.213	9.729	4.779	4.783
25	Tambak Sari	13.365	21.257	10.486	10.948
26	Tandes	5.662	9.146	4.301	4.245
27	Tegalsari	5.687	9.299	4.590	4.936
28	Tenggilis Mejoyo	3.291	5.370	2.495	2.623
29	Wiyung	4.213	6.648	3.269	3.571
30	Wonocolo	4.750	7.463	3.617	3.907
31	Wonokromo	8.737	14.936	7.766	8.048
Jumlah		179.389	286.373	141.554	146.629

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II. 4 tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 5
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

AGAMA	2016	2017	2018	TW II 2019
1. Islam	85,04%	85,11%	85,35%	N/A
2. Katholik	4,00%	3,96%	3,94%	N/A
3. Kristen	9,14%	9,12%	8,98%	N/A
4. Hindu	0,28%	0,28%	0,26%	N/A
5. Budha	1,51%	1,50%	1,45%	N/A
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	N/A
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	N/A

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dilihat dari Tabel II. 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,35% sedangkan sebesar 14,65% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,14 persen. Posisi kedua ditempati oleh belum/tidak bekerja sebesar 25,22 persen dan di posisi ketiga adalah

mengurus rumah tangga sebesar 18,68 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II. 6.

Tabel II. 6
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah	%	No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum Tidak Bekerja	780.504	25,22	46	Juru Masak	76	0,00
2	Mengurus Rumah Tangga	578.118	18,68	47	Promotor Acara	2	0,00
3	Pelajar Mahasiswa	523.811	16,93	48	Anggota Dpr Ri	10	0,00
4	Pensiunan	23.408	0,76	49	Anggota Dpd	1	0,00
5	Pegawai Negeri Sipil	46.093	1,49	50	Anggota Bpk	1	0,00
6	Tentara Nasional Indonesia	12.781	0,41	51	Presiden	-	0,00
7	Kepolisian Ri	5.285	0,17	52	Wakil Presiden	-	0,00
8	Perdagangan	2.998	0,10	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0,00
9	Petani Pekebun	3.256	0,11	54	Anggota Kabinet Kementerian	5	0,00
10	Peternak	26	0,00	55	Duta Besar	1	0,00
11	Nelayan Perikanan	1.164	0,04	56	Gubernur	1	0,00
12	Industri	517	0,02	57	Wakil Gubernur	-	0,00
13	Konstruksi	277	0,01	58	Bupati	-	0,00
14	Transportasi	271	0,01	59	Wakil Bupati	1	0,00
15	Karyawan Swasta	870.758	28,14	60	Walikota	1	0,00
16	Karyawan Bumn	5.640	0,18	61	Wakil Walikota	2	0,00
17	Karyawan Bumil	571	0,02	62	Anggota DPRD Provinsi	16	0,00
18	Karyawan Honorer	1.588	0,05	63	Anggota DPRD Kabupaten Kota	17	0,00
19	Buruh Harian Lepas	5.714	0,18	64	Dosen	5.964	0,19
20	Buruh Tani Perkebunan	365	0,01	65	Guru	24.377	0,79
21	Buruh Nelayan Perikanan	101	0,00	66	Pilot	18	0,00
22	Buruh Peternakan	19	0,00	67	Pengacara	203	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	709	0,02	68	Notaris	189	0,01
24	Tukang Cukur	38	0,00	69	Arsitek	116	0,00
25	Tukang Listrik	124	0,00	70	Akuntan	67	0,00
26	Tukang Batu	1.447	0,05	71	Konsultan	181	0,01
27	Tukang Kayu	290	0,01	72	Dokter	6.499	0,21
28	Tukang Sol Sepatu	64	0,00	73	Bidan	776	0,03
29	Tukang Las Pandai Besi	167	0,01	74	Perawat	2.649	0,09
30	Tukang Jahit	507	0,02	75	Apoteker	353	0,01
31	Tukang Gigi	7	0,00	76	Psikiater Psikolog	47	0,00
32	Penata Rias	68	0,00	77	Penyiar Televisi	8	0,00
33	Penata Busana	21	0,00	78	Penyiar Radio	15	0,00
34	Penata Rambut	65	0,00	79	Pelaut	327	0,01
35	Mekanik	382	0,01	80	Peneliti	34	0,00
36	Seniman	144	0,00	81	Sopir	1.971	0,06
37	Tabib	13	0,00	82	Pialang	10	0,00
38	Paraji	4	0,00	83	Paranormal	4	0,00
39	Perancang Busana	15	0,00	84	Pedagang	8.429	0,27
40	Penterjemah	19	0,00	85	Perangkat Desa	7	0,00
41	Imam Masjid	16	0,00	86	Kepala Desa	2	0,00
42	Pendeta	498	0,02	87	Biarawati	158	0,01
43	Pastor	30	0,00	88	Wiraswasta	168.897	5,46
44	Wartawan	216	0,01	89	Lainnya	4.625	0,15
45	Ustadz Mubaligh	77	0,00	Jumlah		2.868.186	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 7. Penduduk Kota Surabaya paling banyak, yakni sebesar 28,82 persen, merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 21,81 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sebanyak 16,59 persen.

Tabel II. 7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	674.846	21,81
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	225.231	7,28
3.	SD/ sederajat	513.384	16,59
4.	SLTP/ sederajat	402.379	13,00
5.	SLTA/ sederajat	891.913	28,82
6.	D I / D II	21.054	0,68
7.	Akademi D III/ Sarjana Muda	40.013	1,29
8.	D IV/ S1	303.549	9,81
9.	S2/ S3	22.363	0,72
10.	LAIN-LAIN	-	0
JUMLAH		3.094.732	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 8
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
IPM	80,38	81,07	81,74	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, April 2019

*Proyeksi BAPPEKO

2.1.2.1.3 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp547.769.496.960.000,- yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp495.043.304.500.000,-. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2018 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp154.687.454.960.000,- atau meningkat sebesar 12,65% dibanding dengan tahun 2017 sebesar Rp137.322.725.100.000,-. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp101.871.621.070.000,- di tahun 2018 atau meningkat sebesar 9,82% dibanding tahun 2017 sebesar Rp92.762.070.100.000,- sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada tabel II.9.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp364.714.819.500.000,- meningkat menjadi sebesar Rp387.292.704.090.000,- di tahun 2018. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp109.871.557.540.000,- diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp73.033.402.380,- serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp58.460.906.750.000, seperti dapat dilihat pada tabel tabel berikut ini.

Tabel II. 9
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2019 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**		TW I 2019	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	808.811,90	0,18	883.177,30	0,18	913.484,74	0,17	255.295,71	0,18
B	Pertambangan dan Penggalan	29.145,20	0,01	30.638,60	0,01	31.562,67	0,01	8.531,44	0,01
C	Industri Pengolahan	85.213.283,80	18,87	92.762.070,10	18,74	101.871.621,07	18,60	26.814.415,47	18,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.144.720,80	0,48	2.263.680,00	0,46	2.238.366,85	0,41	575.879,59	0,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	678.586,70	0,15	740.173,40	0,15	771.856,00	0,14	191.748,81	0,13
F	Konstruksi	45.103.247,10	9,99	49.603.609,40	10,02	52.770.743,61	9,63	13.321.114,98	9,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124.579.579,50	27,59	137.322.725,10	27,74	154.687.454,96	28,24	40.867.276,03	28,43
H	Transportasi dan Pergudangan	23.647.508,70	5,24	26.215.295,80	5,30	29.211.518,37	5,33	7.896.183,76	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.854.863,30	15,69	78.971.933,90	15,95	88.834.803,18	16,22	23.397.361,74	16,28
J	Informasi dan Komunikasi	24.457.105,40	5,42	26.571.784,80	5,37	29.039.867,68	5,30	7.723.185,35	5,37

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**		TW I 2019	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24.105.835,20	5,34	25.631.465,10	5,18	28.132.150,09	5,14	7.281.193,07	5,07
L	Real Estate	11.614.141,30	2,57	12.495.064,20	2,52	14.186.426,67	2,59	3.832.648,72	2,67
M,N	Jasa Perusahaan	10.926.169,80	2,42	12.098.851,20	2,44	13.339.657,11	2,44	3.653.079,21	2,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.221.289,50	1,38	6.768.287,70	1,37	7.171.019,61	1,31	1.689.178,36	1,18
P	Jasa Pendidikan	11.036.182,80	2,44	11.958.097,20	2,42	12.661.378,86	2,31	3.105.959,53	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.389.778,00	0,75	3.730.513,90	0,75	4.053.988,68	0,74	1.073.922,75	0,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.676.541,90	1,48	6.995.936,80	1,41	7.853.596,80	1,43	2.047.396,95	1,42
Produk Domestik Regional Bruto		451.486.791,00	100,00	495.043.304,50	100,00	547.769.496,96	100,00	143.734.371,48	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019, *) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Tabel II.10

**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2019 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**		TW I 2019	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	570.789,40	0,17	589.909,40	0,16	587.185,38	0,15	157.294,98	0,16
B	Pertambangan dan Penggalan	20.028,10	0,01	20.544,80	0,01	20.121,43	0,01	5.174,43	0,01
C	Industri Pengolahan	66.582.825,60	19,38	69.881.287,90	19,16	73.033.402,38	18,86	19.222.826,05	19,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.514.658,20	0,44	1.541.129,00	0,42	1.540.006,38	0,40	413.717,92	0,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	528.322,40	0,15	564.406,80	0,15	583.121,24	0,15	145.718,61	0,15
F	Konstruksi	33.864.739,10	9,85	36.208.179,00	9,93	38.371.797,07	9,91	9.565.996,21	9,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	97.443.597,60	28,36	103.301.112,80	28,32	109.871.557,54	28,37	27.650.974,19	27,99
H	Transportasi dan Pergudangan	16.569.183,70	4,82	17.707.950,20	4,86	19.276.049,86	4,98	5.130.818,28	5,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.881.297,70	14,52	54.192.882,20	14,86	58.460.906,75	15,09	14.793.397,04	14,98
J	Informasi dan Komunikasi	22.421.127,20	6,52	23.974.911,30	6,57	25.925.129,71	6,69	6.802.966,54	6,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.184.785,50	5,00	17.685.808,00	4,85	18.536.478,96	4,79	4.649.202,76	4,71

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**		TW I 2019	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
L	Real Estate	9.145.630,80	2,66	9.610.228,80	2,63	10.165.858,67	2,62	2.519.170,34	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	7.761.412,10	2,26	8.278.199,90	2,27	8.867.969,79	2,29	2.313.987,75	2,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.789,40	0,17	4.597.265,30	1,26	4.585.695,63	1,18	1.078.725,25	1,09
P	Jasa Pendidikan	20.028,10	0,01	8.531.781,70	2,34	8.843.385,71	2,28	2.123.315,25	2,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.582.825,60	19,38	2.804.625,20	0,77	3.023.872,00	0,78	786.930,95	0,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.514.658,20	0,44	5.224.597,00	1,43	5.605.165,63	1,45	1.418.143,84	1,44
Produk Domestik Regional Bruto		343.652.595,00	100,00	364.714.819,50	100,00	387.297.704,13	100,00	98.778.360,38	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018, *) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Tabel II. 10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		TW I 2019	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,17	0,18	0,16	0,17	0,15	0,18	0,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	18,87	19,38	18,74	19,16	18,60	18,86	18,66	19,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	0,44	0,46	0,42	0,41	0,40	0,40	0,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,13	0,15
F	Konstruksi	9,99	9,85	10,02	9,93	9,63	9,91	9,27	9,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,59	28,36	27,74	28,32	28,24	28,37	28,43	27,99
H	Transportasi dan Pergudangan	5,24	4,82	5,30	4,86	5,33	4,98	5,49	5,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,69	14,52	15,95	14,86	16,22	15,09	16,28	14,98
J	Informasi dan Komunikasi	5,42	6,52	5,37	6,57	5,30	6,69	5,37	6,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,34	5,00	5,18	4,85	5,14	4,79	5,07	4,71
L	Real Estate	2,57	2,66	2,52	2,63	2,59	2,62	2,67	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	2,42	2,26	2,44	2,27	2,44	2,29	2,54	2,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	0,17	1,37	1,26	1,31	1,18	1,18	1,09
P	Jasa Pendidikan	2,44	0,01	2,42	2,34	2,31	2,28	2,16	2,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	19,38	0,75	0,77	0,74	0,78	0,75	0,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,48	0,44	1,41	1,43	1,43	1,45	1,42	1,44
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018,

*) data sangat sementara

**) data proyeksi Bappeko Surabaya

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Disamping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2016-2018 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15-16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar

pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 11. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Tabel II. 11
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2019

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	TW I 2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,36	3,35	3,85	3,36
B	Pertambangan dan Penggalian	3,14	2,58	1,37	0,22
C	Industri Pengolahan	4,91	4,95	4,81	7,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	1,75	3,90	1,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,92	6,83	4,18	5,55
F	Konstruksi	5,01	6,92	6,45	6,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,82	6,01	5,50	7,94
H	Transportasi dan Pergudangan	4,89	6,87	7,91	9,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,63	8,64	8,81	9,47
J	Informasi dan Komunikasi	6,98	6,93	6,75	9,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,65	2,92	5,72	3,20

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	TW I 2019
L	Real Estate	5,32	5,08	4,92	4,17
M,N	Jasa Perusahaan	5,05	6,66	6,88	6,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,09	4,85	4,61	5,77
P	Jasa Pendidikan	6,02	5,95	5,34	7,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,87	7,85	5,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,99	2,89	5,25	6,67
PDRB		5,97	6,13	6,15	7,62
PDRB TANPA MIGAS		5,97	6,13	6,15	7,62

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019,
*) data sangat sementara

Di tengah berlangsungnya pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga kestabilitasannya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih tumbuh positif. Beberapa permasalahan diindikasikan beresiko menghambat kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi cenderung semakin terbatas. Kendati demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun, yakni pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

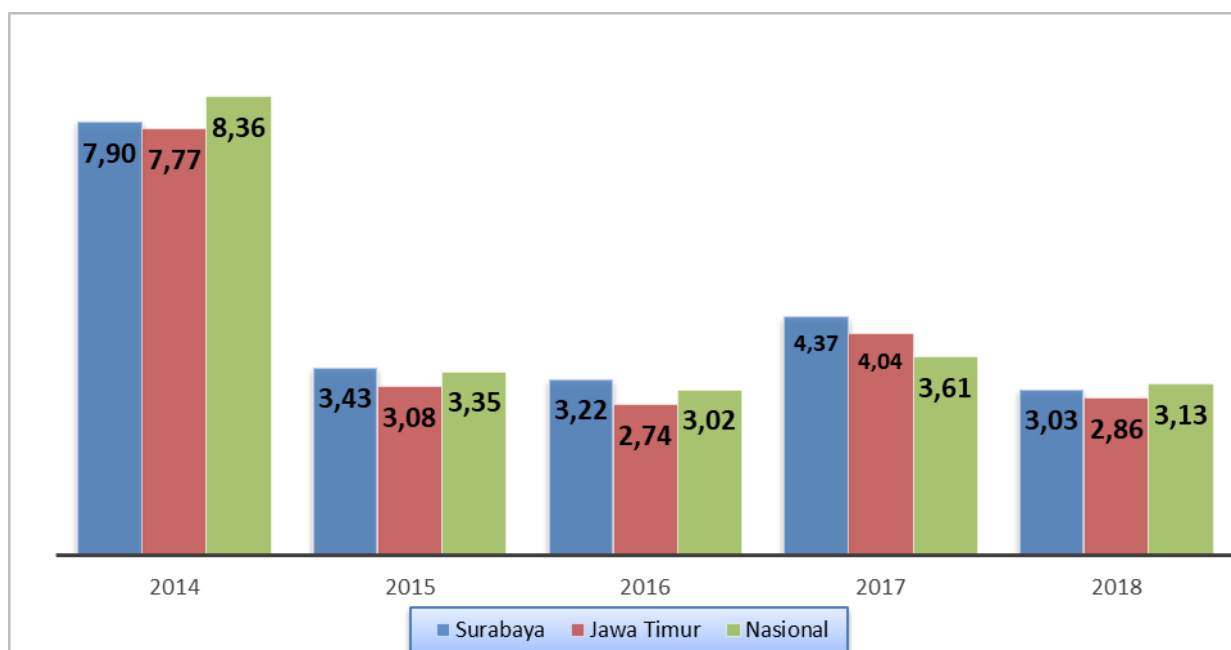
Tabel II. 12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016 – 2019 (%)

Pertumbuhan Ekonomi	2016	2017	2018*	TW I 2019
Surabaya	6,00	6,13	6,19	6,15
Jawa Timur	5,57	5,45	5,50	N/A
Nasional	5,03	5,07	5,17	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya Februari 2019 diolah
*) Angka sementara

2.1.2.1.5 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2018 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 3,03 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2017 sebesar 4,37 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2018 juga sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2018 sebesar $3,5 \pm 1$ persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah



Gambar II. 9
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2014-2018

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019,

Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2018 cukup baik, dimana dalam 3 (tiga tahun terakhir) umumnya inflasi Kota Surabaya selalu lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, namun kali ini meskipun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,86% namun lebih rendah dibandingkan Nasional yakni sebesar 3,13 persen.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2018 antara lain: bensin, daging ayam ras, beras, kontrak rumah, rokok kretek filter, sekolah dasar, akademi/perguruan tinggi, bawang merah, emas perhiasan dan tukang bukan mandor.

Jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Surabaya tahun 2018 paling banyak dikontribusi oleh inflasi pada kelompok inti dan kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*).

Selain komoditas dari kelompok *administered price*, komoditas dari kelompok *volatile food* turut mendorong inflasi akibat tidak seimbangnya antara ketersediaan dan permintaan. Beras menjadi komoditi yang turut andil memicu inflasi tinggi di tahun 2018. Hal itu terjadi karena selain faktor cuaca yang mempengaruhi turunnya produksi beras serta jumlah pasokan beras yang sedikit tersendat, disamping itu juga, adanya penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras oleh pemerintah turut memicu kenaikan harga sampai akhir tahun 2018. Selain beras, komoditi bawang putih sempat menjadi pemicu inflasi di tahun 2018 dikarenakan disebabkan kelangkaan produksi, mengingat sebagian besar bawang putih yang beredar dipasaran berasal dari impor. Harga bawang putih kembali normal setelah impor kembali dibuka dan dilakukan operasi pasar di beberapa titik pasar.

Sementara komoditas yang menahan laju inflasi di tahun 2018 sebagai dampak terjaganya pasokan yakni bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, kembang rebus. Komoditas bawang merah selama tahun 2018 mengalami beberapa kali penurunan harga dikarenakan melimpahnya ketersediaan serta pengaruh cuaca yang membaik membuat harganya relatif stabil.

Inflasi yang lebih tinggi dibanding nasional dan Jawa Timur dari sisi kelompok harga diatur pemerintah memberikan analisa seperti dua mata uang, komposisi penggunaan listrik dan BBM maupun banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Kota Surabaya disatu sisi akan menyebabkan namun disisi lain, komposisi tersebut mengindasikan bahwa masyarakat Kota Surabaya akan kemampuannya memiliki.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat Surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II. 13
Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok
Tahun 2017 – Triwulan II 2019

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun					
		2017		2018*		TW II 2019	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
BERAS							
Beras IR.64 Kwalitas I	Kg	0,87%	182,6%	2,2%	156,4%	N/A	N/A
Beras IR.64 Kwalitas II	Kg	1,60%	168,0%	5,4%	92,0%	N/A	N/A
Beras IR.64 Kwalitas III	Kg	1,60%	167,9%	3,1%	138,1%	N/A	N/A
GULA							
Gula Pasir Lokal Curah	Kg	4,82%	103,5%	3,0%	139,8%	N/A	N/A
MINYAK GORENG							
Minyak Goreng Curah (Bening)	Kg	2,49%	150,3%	3,5%	131,0%	N/A	N/A
DAGING							
Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	4,31%	113,8%	0,8%	184,3%	N/A	N/A
Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	1,74%	165,1%	0,9%	181,3%	N/A	N/A
Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	1,28%	174,3%	0,9%	182,3%	N/A	N/A
Daging Ayam Broiler	Kg	5,17%	96,5%	7,2%	56,1%	N/A	N/A
I K A N							
Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,51%	109,7%	-	-	N/A	N/A
Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	11,63%	32,64%	-	-	N/A	N/A

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun					
		2017		2018*		TW II 2019	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	6,45%	71,0%	-	-	N/A	N/A
Ikan Lele Segar (Ukuran Sedang)	Kg	2,15%	157,1%	-	-	N/A	N/A
Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	3,93%	121,3%	-	-	N/A	N/A
Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	2,79%	144,2%	-	-	N/A	N/A
TELUR							
Telur Ayam Broiler	Kg	9,62%	7,5%	8,2%	36,0%	N/A	N/A
Telur Ayam Kampung	Butir	14,68%	93,54%	3,8%	124,1%	N/A	N/A

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah dan Dinas Perdagangan, diolah Bappeko, 2019

*) Angka sementara

2.1.2.1.6 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat.

Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2016–2018.

Tabel II. 14
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018**	TW I 2019
ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
PDRB (Milyar Rp)	451.486,79	495.043,31	547.769,49	143.734.371,48
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	149,68	160,99	177,00	N/A
ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
PDRB (Milyar Rp)	343.652,59	364.714,82	387.292,71	98.778.360,38
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	113,93	118,61	125,15	N/A
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019,

*) data sangat sementara

**) data proyeksi Bappeko Surabaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.7 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang, namun pada tahun 2015 tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial

dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya- upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel II. 15
Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2016 – Triwulan II 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Gini Ratio	0,42	0,387	0,387	N/A

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah, Februari 2019

2.1.2.1.8 Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode Williamson *Index* yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

Tabel II. 16
Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018	TW II 2019
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun dasar 2010)	0,67	0,669	0,669	N/A

Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2019

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam PDRB yaitu yang awalnya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 maka terjadi perubahan besaran indeks Williamson dapat disajikan pada Tabel II. 16. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Surabaya relatif tinggi dengan nilai indeks sekitar 0,6 namun mempunyai kecenderungan yang terus meningkat.

2.1.2.1.9 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

Tabel II. 17
Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok
Pendapatan Kota Surabaya

Tahun	40 % terbawah	40 % menengah	20 % tertinggi
2012	21,38	32,01	46,61
2013	23,55	36,62	39,83
2014	19,74	31,64	48,62
2015	17,81	32,34	49,85
2016	17,96	33,80	48,24

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 diolah

Seperti disajikan pada Tabel II. 17, pada tahun 2015 ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40% penduduk termiskin mencapai lebih dari 17% dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai 17,81%.

2.1.2.1.10 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp474.365,- dan meningkat menjadi Rp530.178,- pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018, sehingga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,54%. Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 18
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Kemiskinan	2016	2017	2018	TW II 2019
Angka Kemiskinan (persen)	5,63	5,39	4,54	N/A
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	438.283	474.365	530.178	N/A
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	161,01	154,71	140,81	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.361.908 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 2.408.552 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 2.157.098 dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 19
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.361.908	2.408.552	2.157.098	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.361.908	2.408.552	2.157.098	2.442.405
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dari data pada Tabel II. 19 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM pada tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 92,38 persen, jenjang SMP/MTs sebesar 90,93 persen. APM pada tahun 2017 jenjang SD/MI sebesar 100,54 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 75,09 persen. Sedangkan pada tahun 2018 APM jenjang SD/MI sebesar 95,71 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 83,80 persen Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	TW II 2019
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	255.142	282.604	274.104	274.104
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373	300.960
	APM SD/MI (persen)	92,38	100,54	95,71	91,08
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	128.810	108.231	118.636	118.636
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554	146.042
	APM SMP/MTs (persen)	90,93	75,09	83,80	81,23

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 21
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	97,78	99,76	101,73%	N/A
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	90,42	94,52	105,49%	N/A

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2015 - 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	PAUD (KB,TK, PPT, TPA)				
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	123.925	119.747	119.047	119.047
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	192.239	177.009	179.389	187.956
	APK PAUD (persen)	64,46	67,65	66,36	63,34
2.	SD/MI				
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.310	287.406	287.830	300.960
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373	287.380
	APK SD/MI (persen)	101,86	102,25	100,50	95,64
3.	SMP/MTs				
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	135.283	143.426	129.136	129.136
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554	146.042
	APK SMP/MTs (persen)	95,50	99,51	91,22	88,42

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 23
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2019

Indikator	2016	2017	2018	TW II 2019
Rata-Rata Lama Sekolah	10,44	14,48	14,7	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 24
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Indikator	2016	2017	2018	TW II 2019
Angka Harapan Lama Sekolah	13,99	10,64	10,59	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

2.1.2.2.3 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 25
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Indikator	2016	2017	2018	TW II 2019
Angka Harapan Hidup (persen)	73,87	73,88	73,89	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 73,88 tahun dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 73,89 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,16 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,15 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2015 - 2017.

Tabel II. 26
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	280	278	254	0
2	Jumlah balita yang ditimbang	176.439	179.662	181.842	181.799
3	Persentase (persen)	0,16	0,15	0,14	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 27
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2018

No.	Uraian	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	16.627	15.274	0
2	Jumlah balita yang ditimbang	179.662	181.842	181.799
3	Persentase (persen)	9,25	8,39	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 28
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)
Tahun 2016 – 2018

No.	Kecamatan	2016			2017			2018		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	5	3.629	0,14%	0	3.633	0,00%	4	3.369	0,12%
2	Kec. Benowo	2	4.198	0,05%	4	4.506	0,09%	4	4.559	0,09%
3	Kec. Bubutan	3	6.153	0,05%	4	6.361	0,06%	3	5.989	0,05%
4	Kec. Bulak	5	2.887	0,17%	3	2.770	0,11%	4	2.839	0,14%
5	Kec. Dukuh Pakis	3	2.849	0,11%	5	3.436	0,15%	4	3.293	0,12%
6	Kec. Gayungan	11	2.291	0,48%	3	2.449	0,12%	2	2.338	0,09%
7	Kec. Genteng	3	2.974	0,10%	8	3.203	0,25%	11	3.257	0,34%
8	Kec. Gubeng	7	7.327	0,10%	2	7.164	0,03%	0	7.268	0,00%
9	Kec. Gunung Anyar	0	2.672	0,00%	2	3.321	0,06%	2	3.483	0,06%
10	Kec. Jambangan	6	3.562	0,17%	6	3.586	0,17%	3	3.587	0,08%
11	Kec. Karangpilang	4	3.759	0,11%	2	4.155	0,05%	2	4.347	0,05%
12	Kec. Kenjeran	4	10.888	0,04%	7	11.251	0,06%	13	11.822	0,11%
13	Kec. Krembangan	5	7.533	0,07%	7	7.597	0,09%	2	7.987	0,03%
14	Kec. Lakarsantri	2	3.760	0,05%	2	5.148	0,04%	9	3.670	0,25%
15	Kec. Mulyorejo	5	5.624	0,09%	2	5.373	0,04%	4	5.589	0,07%
16	Kec. Pabean Cantian	9	4.462	0,20%	3	4.425	0,07%	5	4.357	0,11%
17	Kec. Pakal	48	4.496	1,07%	44	4.576	0,96%	16	4.394	0,36%
18	Kec. Rungkut	9	6.210	0,14%	11	6.803	0,16%	8	7.304	0,11%

No.	Kecamatan	2016			2017			2018		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
19	Kec. Sambikerep	6	4.282	0,14%	2	2.864	0,07%	5	4.229	0,12%
20	Kec. Sawahan	12	12.865	0,09%	16	12.390	0,13%	14	12.380	0,11%
21	Kec. Semampir	16	11.456	0,14%	21	11.651	0,18%	25	11.740	0,21%
22	Kec. Simokerto	14	5.868	0,24%	16	5.807	0,28%	14	5.694	0,25%
23	Kec. Sukolilo	11	5.751	0,19%	7	6.246	0,11%	2	6.540	0,03%
24	Kec. Sukomanunggal	47	6.791	0,69%	63	6.775	0,93%	60	6.657	0,90%
25	Kec. Tambaksari	7	10.520	0,07%	12	11.482	0,10%	18	12.229	0,15%
26	Kec. Tandes	3	6.282	0,05%	4	5.989	0,07%	4	6.108	0,07%
27	Kec. Tegalsari	7	5.991	0,12%	9	5.911	0,15%	7	5.884	0,12%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	1	3.121	0,03%	1	2.820	0,04%	0	3.022	0,00%
29	Kec. Wiyung	8	4.125	0,19%	5	4.364	0,11%	3	4.318	0,07%
30	Kec. Wonocolo	2	5.111	0,04%	7	5.037	0,14%	5	4.859	0,10%
31	Kec. Wonokromo	15	9.005	0,17%	16	8.569	0,19%	5	8.730	0,06%
Total		280	176.439	0.16%	278	179.332	0.15%	254	181.842	0.14%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada Tabel II. 29 dan Tabel II. 30 sebagai berikut:

Tabel II. 29
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

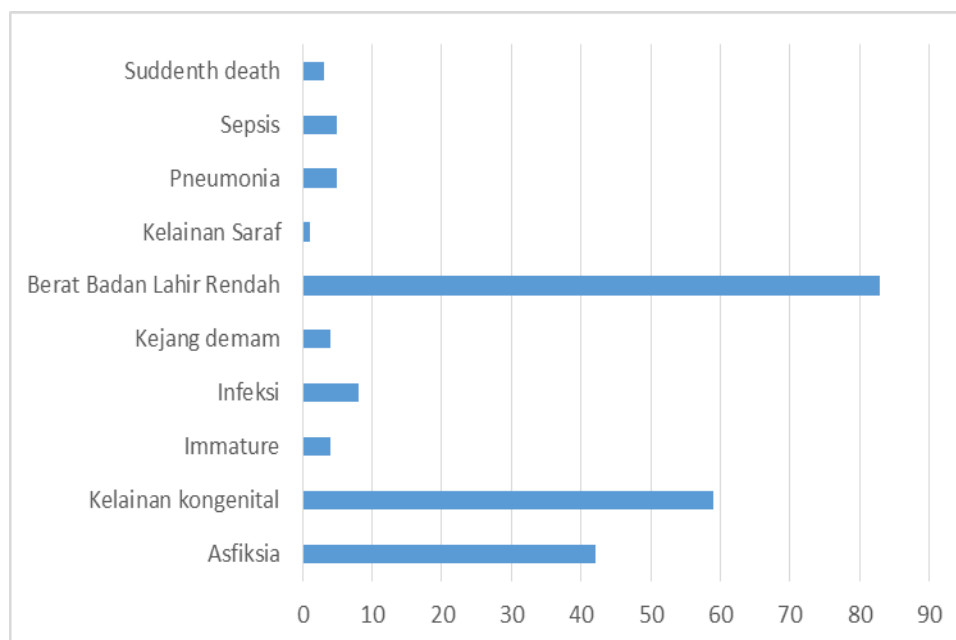
No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	37	34	31	4
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474	42.145
3	AKI per 100.000 KH	85,72	79,40	72,99	9,49

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 30
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah bayi lahir meninggal	276	219	214	38
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474	42.145
3	AKB per 1.000 KH	6,39	5,11	5,04	0,90

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II. 10
Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018 diolah

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun dari tahun 2016 sebesar 85,72 menjadi 72,99 pada tahun 2018. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 6,39 menurun menjadi 5,04 pada tahun 2019. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital.

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi dibawah target bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.1.2.2.4 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2018 mempunyai trend meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,12%. Adapun data tahun 2016 belum tersedia dikarenakan anggaran Sakernas Besar (Bulan Agustus) berdasarkan kebijakan pemerintah pusat digeser untuk kegiatan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sampai dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	89.479	93.096	N/A
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.468.094	1.520.041	2.222.469
3	Persen Pengangguran Terbuka	7,01%	6,12%	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2019

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.468.094 menjadi 1.520.041 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 32
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Grup Kesenian	498	591	611	320
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	42	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebanyak 498 grup kesenian, tahun 2017 meningkat menjadi 591 grup kesenian dan sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi 611 grup kesenian.

Jumlah cabang olahraga sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 cabang olahraga, dan yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sebanyak 41 cabang olahraga. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2018, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya *Sport Center* (SSC). Selain itu, terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan cabang-cabang olahraga milik KONI Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.1.2 Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang

merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 telah disajikan di atas pada tabel berikut ini.

Tabel II. 33
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.160	1.693	53,58%	5.143	3724	72,41%	2.434	1742	71,57%
Benowo	4.244	3.432	80,87%	6.733	6821	101,31%	3.314	2476	74,71%
Bubutan	5.921	3.654	61,71%	9.678	8964	92,62%	4.923	2224	45,18%
Bulak	2.864	1.809	63,16%	4.557	6152	135,03%	2.314	2631	113,70%
Dukuh Pakis	3.546	2.838	80,03%	5.599	6454	115,31%	2.698	3012	111,68%
Gayungan	2.596	1.732	66,72%	3.971	6138	154,57%	2.033	2355	115,84%
Genteng	3.214	2.655	82,61%	5.193	6587	126,84%	2.652	5210	196,46%
Gubeng	7.541	5.159	68,41%	12.284	13617	110,85%	6.216	3843	61,82%
Gunung Anyar	3.623	3.127	86,31%	5.481	4747	86,61%	2.633	1358	51,58%
Jambangan	3.262	2.042	62,60%	4.895	4801	98,08%	2.437	4048	166,11%
Karangpilang	4.343	3.165	72,88%	6.787	6794	100,10%	3.380	3623	107,19%
Kenjeran	11.181	6.005	53,71%	17.806	16891	94,87%	8.635	8692	100,66%
Krembangan	7.142	4.365	61,12%	11.287	12843	113,79%	5.679	8064	142,00%
Lakarsantri	3.662	3.250	88,85%	5.936	8183	137,95%	2.837	4535	159,91%
Mulyorejo	5.065	4.970	98,12%	7.806	10082	129,16%	3.942	5435	137,87%
Pabean Cantian	4.451	2.083	46,80%	7.534	4377	58,10%	3.781	1823	48,21%
Pakal	3.465	2.827	81,59%	5.758	7132	123,88%	2.883	3091	107,21%
Rungkut	7.080	5.204	73,50%	10.725	10824	100,92%	5.215	5077	97,35%
Sambikerep	3.990	2.291	57,42%	6.232	5699	91,46%	3.028	3658	120,81%

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Sawahan	12.106	6.374	52,65%	19.868	16050	80,79%	9.863	3801	38,55%
Semampir	12.446	6.093	48,96%	19.778	20524	103,77%	9.712	5741	59,11%
Simokerto	5.887	4.047	68,74%	9.123	6717	73,63%	4.592	3539	77,09%
Sukolilo	6.682	4.850	72,58%	10.351	12143	117,31%	5.050	6788	134,42%
Sukomanunggal	6.213	4.658	74,98%	9.729	10107	103,91%	4.779	5493	114,99%
Tambaksari	13.365	8.488	63,51%	21.257	17544	82,53%	10.486	5755	54,88%
Tandes	5.662	4.834	85,38%	9.146	11251	123,02%	4.301	3608	83,89%
Tegalsari	5.687	3.611	63,50%	9.299	10199	109,68%	4.590	3536	77,07%
Tenggiling Mejoyo	3.291	2.609	79,28%	5.370	5464	101,75%	2.495	2800	112,22%
Wiyung	4.213	3.271	77,66%	6.648	6831	102,81%	3.269	2892	88,47%
Wonocolo	4.750	2.634	55,45%	7.463	8393	112,46%	3.617	4675	129,25%
Wonokromo	8.737	5.277	60,40%	14.936	11777	78,86%	7.766	7611	98,00%
Jumlah	179.389	119.047	66,36%	286.737	287.830	100,52%	141.554	129.136	91,23%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019 diolah

2.1.3.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 telah disajikan di atas pada Tabel II. 20 dan APM per kecamatan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 34
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2018

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.143	3.573	69,47%	2.434	1619	66,52%
Benowo	6.733	6.657	98,87%	3.314	2284	68,92%
Bubutan	9.678	8.682	89,71%	4.923	2033	41,30%
Bulak	4.557	5.958	130,77%	2.314	2440	105,45%
Dukuh Pakis	5.599	6.075	108,54%	2.698	2789	103,41%
Gayungan	3.971	5.830	146,81%	2.033	2191	107,77%
Genteng	5.193	6.319	121,68%	2.652	4826	181,98%
Gubeng	12.284	12.992	105,76%	6.216	3544	57,01%
Gunung Anyar	5.481	4.559	83,18%	2.633	1231	46,75%
Jambangan	4.895	4.542	92,79%	2.437	3757	154,16%
Karangpilang	6.787	6.465	95,26%	3.380	3309	97,90%
Kenjeran	17.806	16.296	91,52%	8.635	7975	92,36%
Krembangan	11.287	12.179	107,90%	5.679	7443	131,06%
Lakarsantri	5.936	7.589	127,93%	2.837	4183	147,50%
Mulyorejo	7.806	9.298	119,11%	3.942	5030	127,60%
Pabean Cantian	7.534	4.144	55,00%	3.781	1682	44,49%
Pakal	5.758	6.807	118,24%	2.883	2869	99,51%
Rungkut	10.725	10.388	96,86%	5.215	4726	90,62%
Sambikerep	6.232	5.397	86,62%	3.028	3333	110,07%
Sawahan	19.868	15.391	77,47%	9.863	3521	35,71%
Semampir	19.778	19.384	98,01%	9.712	5281	54,38%
Simokerto	9.123	6.451	70,71%	4.592	3280	71,44%
Sukolilo	10.351	11.470	110,81%	5.050	6302	124,79%
Sukomanunggal	9.729	9.527	97,94%	4.779	5096	106,68%
Tambaksari	21.257	16.913	79,56%	10.486	5244	50,01%
Tandes	9.146	10.729	117,31%	4.301	3282	76,31%
Tegalsari	9.299	9.673	104,02%	4.590	3194	69,62%
Tenggiling	5.370	5.257	97,90%	2.495	2558	102,53%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTs		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Mejoyo						
Wiyung	6.648	6.421	96,64%	3.269	2588	79,17%
Wonocolo	7.463	7.927	106,22%	3.617	4193	115,92%
Wonokromo	14.936	11.211	75,07%	7.766	6833	87,99%
Jumlah	286.737	286.355	95,72%	141.554	118.636	83,81%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 34 dan Tabel II. 34 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan.

Dari data diatas terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.2. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2016 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,97 persen, dan meningkat pada tahun

2017 dan 2018 menjadi 100 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 35
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	SD/MI				
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	40.849	42.621	44.223	44.223
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	40.849	42.621	44.223	44.223
	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100
2.	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	39.570	41.834	42.282	42.282
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	39.580	41.834	42.282	42.282
	AL SMP/MTs (persen)	99,97	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada tabel menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus.

2.1.3.1.2. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak

mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2016 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2018. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 36
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	SD/MI				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	281.310	282.408	287.830	287.830
	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0
2.	SMP/MTs				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs	135.283	130.505	129.136	129.136
	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

2.1.3.1.2. Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 95,03% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,51%. Penurunan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2016 sebesar 116,54% dibandingkan tahun 2017 yang

sebesar 96,68%. Pada tahun 2018, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 92,35% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 100%. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 37
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Indikator	2016	2017	2018	TW II 2019
1	(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs				
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMP/MTs	43.099	40.503	40.841	40.841
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	40.849	42.621	44.223	44.223
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	105,51	95,03	92,35	92,35
2	(AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK				
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMA/MA/SMK	46.116	40.445	42.282	42.282
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Sebelumnya	39.570	41.834	42.282	42.282
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK (persen)	116,54	96,68	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

2.1.3.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 38
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	TW II 2019
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	733	900	846	983
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	304.652	281.089	286.373	287.380
1.3.	Rasio	1 : 415	1 : 312	1 : 339	1 : 293
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah gedung sekolah	341	393	404	346
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	158.893	144.127	141.554	146.042
2.3	Rasio	1 : 465	1 : 367	1 : 350	1:422

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

*Sekolah negeri

Tabel II. 39
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut
Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jmlh SD	Jmlh MI	Total	Jmlh Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jmlh SMP	Jmlh MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	8	9	17	5.143	1 : 303	4	3	7	2.434	1 : 348
Benowo	12	5	17	6.733	1 : 396	3	2	5	3.314	1 : 663
Bubutan	29	2	31	9.678	1 : 312	8	0	8	4.923	1 : 615
Bulak	13	6	19	4.557	1 : 240	5	1	6	2.314	1 : 386
Dukuh Pakis	24	1	25	5.599	1 : 224	11	1	12	2.698	1 : 225
Gayungan	14	1	15	3.971	1 : 265	6	1	7	2.033	1 : 290
Genteng	17	1	18	5.193	1 : 289	11	0	11	2.652	1 : 241
Gubeng	25	5	30	12.284	1 : 409	14	0	14	6.216	1 : 444
Gununganyar	13	1	14	5.481	1 : 392	7	0	7	2.633	1 : 376
Jambangan	7	5	12	4.895	1 : 408	7	0	7	2.437	1 : 348
Karangpilang	12	3	15	6.787	1 : 452	9	0	9	3.380	1 : 376
Kenjeran	23	20	43	17.806	1 : 414	14	9	23	8.635	1 : 375
Krembangan	32	7	39	11.287	1 : 289	17	1	18	5.679	1 : 316
Lakarsantri	21	5	26	5.936	1 : 228	11	2	13	2.837	1 : 218
Mulyorejo	25	0	25	7.806	1 : 312	16	0	16	3.942	1 : 246
Pabean Cantian	14	4	18	7.534	1 : 419	7	1	8	3.781	1 : 473
Pakal	14	6	20	5.758	1 : 288	7	2	9	2.883	1 : 320
Rungkut	24	4	28	10.725	1 : 383	9	2	11	5.215	1 : 474
Sambikerep	15	6	21	6.232	1 : 297	15	3	18	3.028	1 : 168
Sawahan	46	0	46	19.868	1 : 432	14	1	15	9.863	1 : 658
Semampir	36	32	68	19.778	1 : 291	17	14	31	9.712	1 : 313

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jmlh SD	Jmlh MI	Total	Jmlh Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jmlh SMP	Jmlh MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Simokerto	20	6	26	9.123	1 : 351	10	2	12	4.592	1 : 383
Sukolilo	33	1	34	10.351	1 : 304	17	1	18	5.050	1 : 218
Sukomanunggal	28	1	29	9.729	1 : 335	17	2	19	4.779	1 : 252
Tambaksari	41	10	51	21.257	1 : 417	21	3	24	10.486	1 : 437
Tandes	21	10	31	9.146	1 : 295	12	2	14	4.301	1 : 307
Tegalsari	31	2	33	9.299	1 : 282	12	0	12	4.590	1 : 383
Tenggilis Mejoyo	16	1	17	5.370	1 : 316	7	0	7	2.495	1 : 356
Wiyung	15	1	16	6.648	1 : 416	11	0	11	3.269	1 : 297
Wonocolo	19	2	21	7.463	1 : 355	9	1	10	3.617	1 : 362
Wonokromo	34	7	41	14.936	1 : 364	19	3	22	7.766	1 : 353

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada Tabel II. 39 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD semakin meningkat, sedangkan pada jenjang SMP mengalami penurunan di tahun 2018. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II.40 pada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Karangpilang dengan nilai rasio sebesar 1:452, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:224. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:663 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:168.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2018 terdapat 337 sekolah SMP yang telah terakreditasi, terdiri dari 215 sekolah yang terakreditasi A, 105 sekolah terakreditasi B dan terdapat 17 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/MI /Sederajat terdapat 777 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 504 sekolah yang terakreditasi A, 240 sekolah terakreditasi B dan 33 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2018 terdapat 264 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 110 lembaga kursus/pelatihan, dan sebanyak 154 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2018 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 654 peserta, namun hanya 528 peserta yang lulus. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1357 peserta, namun hanya 1091 peserta yang lulus. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 2870 peserta, tetapi hanya 2354 peserta yang lulus.

2.1.3.1.2. Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II. 40
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	TW II 2019
1	SD/MI				
1.1	Guru	12.642	12.797	14.132	N/A
1.2	Murid	281.310	282.408	287.830	287.830
1.3	Rasio	1:22	1 : 22	1 : 21	N/A
2	SMP/MTs				
2.1	Guru	7.167	7.231	7524	N/A
2.2	Murid	135.283	128.471	129.136	129.136
2.3	Rasio	1:19	1:18	1 : 18	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 41
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	15		12	1	-	259	31	-	318
SD	155	1	92	13	-	3616	573	1	4451
SMP	26	6	6	15	-	1527	437	5	2022
TOTAL	196	7	110	29	-	5402	1041	6	6791

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 42
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	730	10	63	44	4	6455	299	3	7608
SD	382	4	4	29	4	3706	319	1	4449
SMP	1315	55	126	53	2	3984	126	4	5665
TOTAL	2427	69	193	126	10	14145	744	8	17722

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 43
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2018

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah
1	SD	3535	1756	5291	4451	7608	12059	916	5852	6768
2	SMP	1699	1045	2744	2022	4449	6471	323	3404	3727
Jumlah		5.234	2.801	8.035	6.473	12.057	18.530	1.239	9.256	10.495

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 10.495 guru di jenjang pendidikan dasar yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah guru yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan.

2.1.3.1.3 Kesehatan

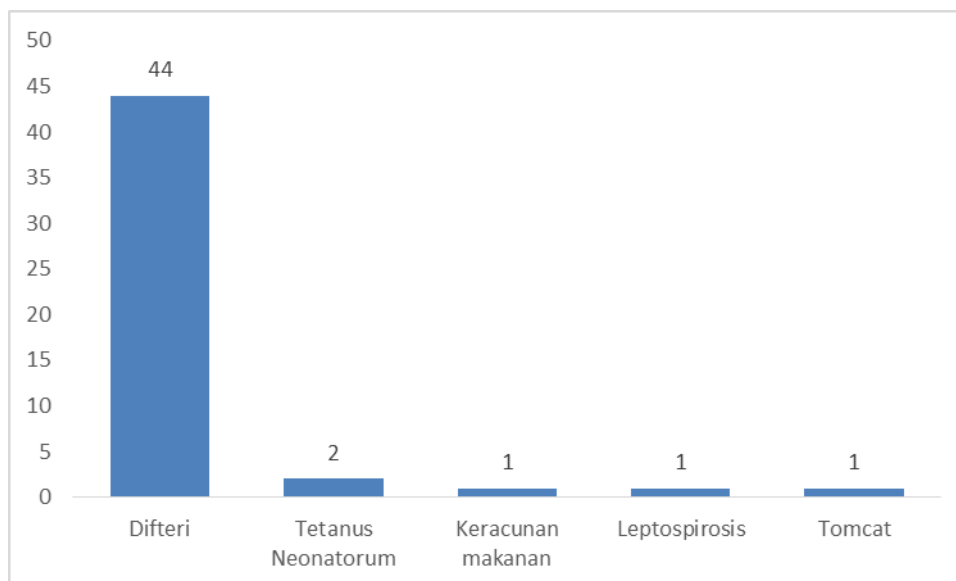
Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 44
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	38	30	49	1
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	38	30	49	1
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II. 11
Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2019

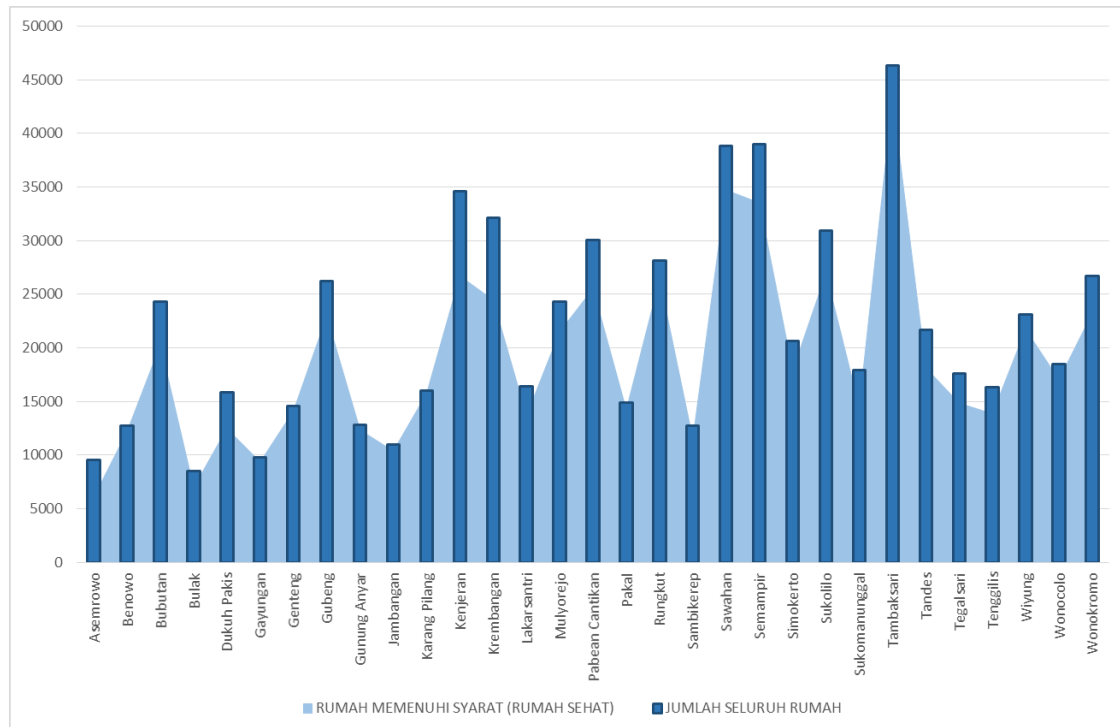
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Kejadian Luar Biasa tahun 2018 terbanyak adalah Difteri yang terjadi di 42 kelurahan, diikuti tetanus neonatorum yang terjadi di 2 kelurahan, serta leptospirosis, keracunan makanan dan tomcat masing-masing terjadi di 1 kelurahan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi <20 jam.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m²/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase

rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II. 12
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat darurat kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2018, seluruh kelurahan telah memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 45
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

*) Angka sementara

Tabel II. 46
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016 – 2019

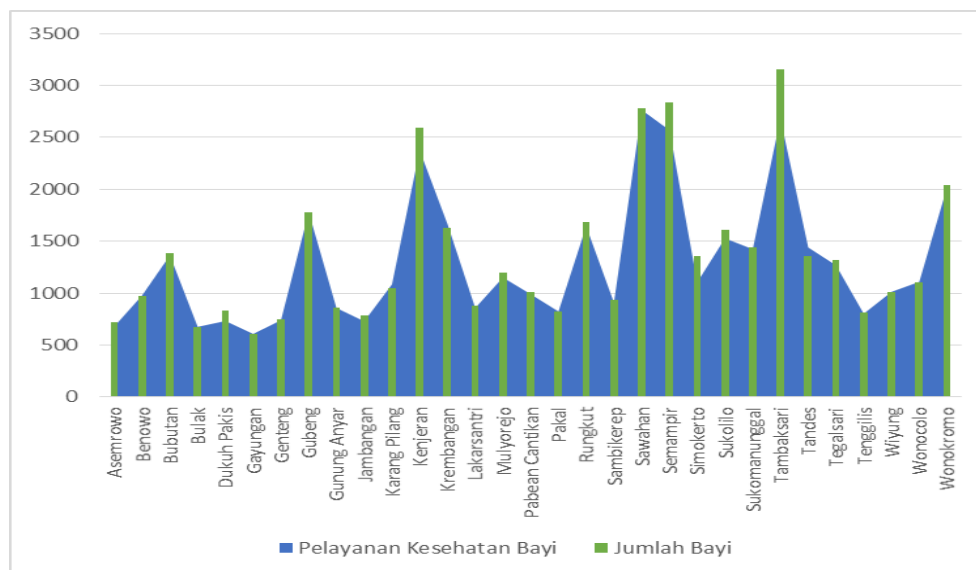
No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.548	42.502	42.791	10.082
2	Jumlah ibu nifas	45.322	44.963	44.598	44.252
3	Persentase (persen)	93,88%	94,65%	95,95%	22,78%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 47
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	40.086	40.668	41.070	10.167
2	Jumlah bayi	42.767	42.377	42.003	41.646
3	Persentase (persen)	93,73%	95,97%	97,78%	24,41%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II. 13
Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar II.13 adalah di Kecamatan Tambaksari. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Gayungan.

Tabel II. 48
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	280	278	254	0
2	Jumlah balita gizi buruk	280	278	254	0
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	0%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2016 jumlah Posyandu balita sebanyak 2.824 posyandu, pada tahun 2017 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita diwilayahnya masing-masing, dan di 2018 jumlah posyandu balita sebanyak 2.804. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam Tabel II. 50.

Tabel II. 49
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah posyandu	2.824	2.797	2.804	N/A
2	Jumlah balita	215.713	219.367	211.564	N/A
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,09	12,75	13,25	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Dari data diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas

rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 59 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2018 sejumlah 3.094.247 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 23.362 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya masih mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II. 50
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	296	241	352	N/A
3	Jumlah pustu	59	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 51
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah Penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	4	3	3
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	4	4
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	43	42	43	43
Jumlah Rumah Sakit		59	59	59	59
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0178	0,0179	0,0191	0,0191

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2016, jumlah dokter di kota Surabaya sebanyak 7.358 orang, dengan rasio sebesar 2,22 dokter per 1.000 penduduk atau 22,2 dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah dokter sebanyak 5.195 orang, dengan rasio 1,55 per 1000 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 4.295 orang, dengan rasio 1,38 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 52
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947
2	Jumlah dokter	7.358	5195	4295	N/A
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	2,22	1,55	1,38	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II. 53. Pada tahun 2017, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat akan dilaksanakan pada bulan April.

Tabel II. 53
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

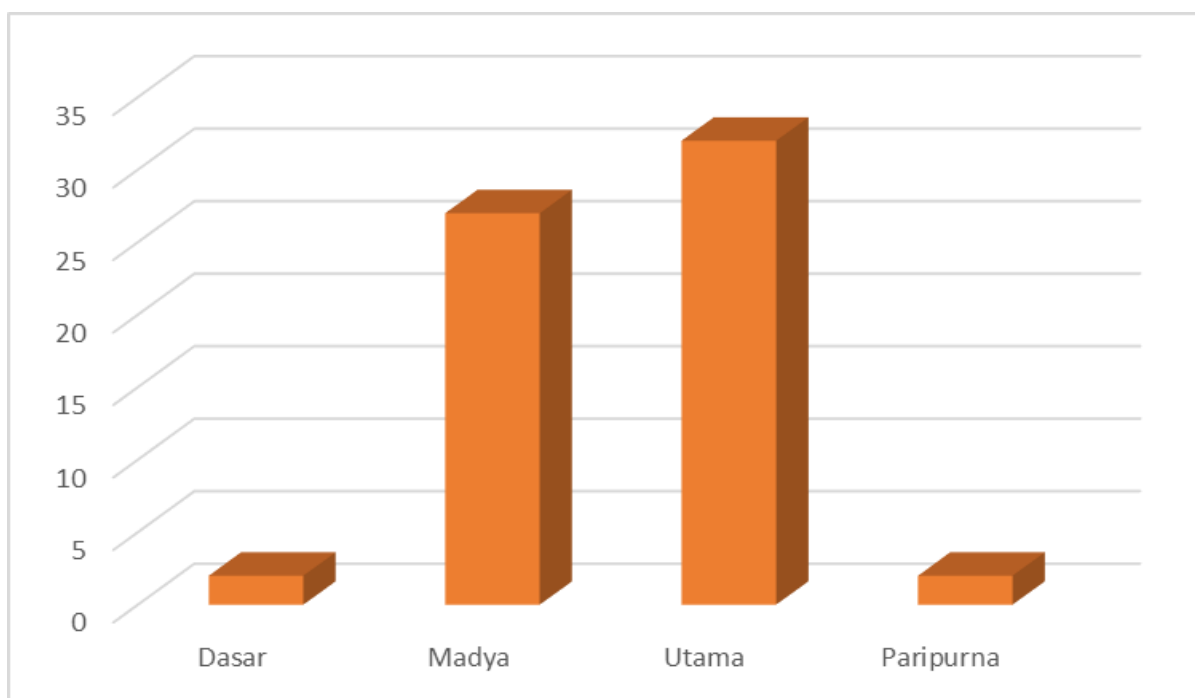
Instansi	2016	2017	2018	TW II 2019*
RSUD Bhakti Dharma Husada	78,91	78,73	86,41	N/A
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	77,02	81,12	87,72	N/A

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2018 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna.

Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar II. 14
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019 diolah

2.1.3.1.4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.4. Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2017, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,51; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.689.290 meter melayani jumlah penduduk sebesar 3.342.627 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Sedangkan pada Tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 54
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.662,99	1.667,78	1.678,86	N/A
Panjang Jalan (Km)	1.686,38	1.689,29	1.692,53	N/A
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,61%	98,73%	99,19%	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

2.1.3.1.4. Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 55
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Rumah Tinggal	7.196	7.638	4.923	N/A
2	Non Rumah Tinggal	1.762	1.717	1.773	N/A
3	Reklame	2.450	1.576	1.148	N/A
Total		11.408	10.931	7.844	N/A

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 56
Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	
11	Mulyorejo	Kalisari	PRIORITAS II
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 57
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	749	1.629	1.648	0

Sumber: Dinas Sosial, 2019

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan-tau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat

meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 58
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018	TW II 2019*
Jumlah Pemohon Rusun	801	1.287	1.588	N/A

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi dan pada 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Sedangkan pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 59
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41. 044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan	Kel Penjaringan	18	3	± 32.350	Dibangun th.

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
	Sari	Sari Kec. Rungkut				1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
16.	Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBN)
17.	Keputih	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo	36	4	±258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBN)
			36	2		Dibangun 2018 (APBN)
Total				93		

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

2.1.3.1.6 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

2.1.3.1.6. Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan

masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 60
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019*
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	648	663	677	N/A
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,14	2,15	2,18	N/A

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2019

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Pada tahun 2016, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 168 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 189 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, dan pada tahun 2018 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 192 patroli.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 47.067, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 61
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095	2.083
2	Jumlah pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095	2.083
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 82 personil Linmas. Pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63 personil Linmas, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 64-65 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 62
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Linmas	24.859	19.372	20.033	N/A
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	82,41	63,00	64,73	N/A

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain

peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 1 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.6. Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II. 64 berikut.

Tabel II. 63
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	57	64	74	74
2	Jumlah Penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	93%	93%	93%	93%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu

penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II. 64
Kejadian Kebakaran per Penyebab

No	Penyebab	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Hubungan Listrik	142	114	107	27
2	Api Terbuka	125	239	301	85
3	Api Mekanis	3	0	4	0
4	Dalam Penyelidikan	30	234	70	60
5	Tidak Ada Keterangan	0	2	14	0
Total		300	589	496	172

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2017, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 65
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 Menit	300	589	496	1
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	300	589	496	1

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2019

Sepanjang tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran yaitu 300 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 300 kejadian. Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 534 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 534 kejadian. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah kejadian kebakaran yaitu 496

kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 496 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan response time yang telah ditentukan.

Tabel II. 66
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	20	20	21	N/A
2	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.139.947

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6. Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2016 –2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 67
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Ormas Aktif	51	32	25	N/A
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167	N/A

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2018, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 25 lembaga.

2.1.3.1.7 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.7. PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanaan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II. 68
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah PMKS yang ada	50.222	47.633	58.129	28.634
2	Jumlah PMKS yang ditangani	30.468	28.643	36.098	150
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	60,67	60,13	62,09	0,26

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2019

Secara umum, walaupun jumlah PMKS meningkat dari tahun 2017-2018 sebanyak 47.633 orang menjadi 58.129 orang pada tahun 2018. Namun prosentase yang ditangani semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.2.2 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.495.837 pada tahun 2017 menjadi 1.520.041 pada tahun 2018. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 69
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2019

No.	Uraian	2017	2018	TW II 2019
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.495.837	1.520.041	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.254.188	2.269.293	2.442.405
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,67	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, April 2019

2.1.3.2.2. Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 70
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	275	280	226	N/A
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Rasio sengketa	2,15	2,19	1,77	N/A

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2016 sebanyak 275, meningkat pada tahun 2017 menjadi 280 sengketa. Sengketa pada tahun 2017 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak- hak pekerja yang belum terpenuhi. Jumlah sengketa kembali menurun menjadi sebesar 226 pada tahun 2018 sebagai dampak dari upaya pemeliharaan hubungan industrial yang baik.

2.1.3.2.2. Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 71
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2018
1	Tidak/belum pernah sekolah	14.001
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	6.264
5	SMA	28.608
6	SMK	22.724
7	Diploma I/II/III/Akademi	3.012
8	Universitas	18.487

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Melalui adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan 3.803 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada 2017 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305 orang. Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 72
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.803	4.305	5.805	2.040
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	7.502	8.035	8.288	3.097

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2.1.3.2.2. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 73
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	5.174	5.215	6.689	975
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	40,48	40,80	52,33	13,10

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2019

Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.174 perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.215 perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.3.2.3. Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125 orang dan di tahun 2018, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 8.003 orang sebagai PNS dan 13.362 orang sebagai tenaga kontrak yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 74
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Pekerja Perempuan	-	583.772	587.684	N/A
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.159	12.125	21.365	N/A
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	-	2,07	3,63	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Diklat dan Bagian Administrasi Pembangunan, 2019

Dari data pada Tabel II. 745 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.3. Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2017, sebesar 583.772 orang atau 95,23% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan meningkat di 2018 menjadi sebesar 587.684 orang. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 75
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	612.988	617.096	N/A
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	583.772	587.684	N/A
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	95,23	95,23	N/A

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2019

2.1.3.2.3. Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 76
KDRT Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Rumah Tangga	-	-	-	N/A
2	Jumlah KDRT	77	26	37	N/A
3	Rasio KDRT	-	-	-	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2019

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel II. 76 di atas jumlah KDRT menurun dari tahun 2016-2017 namun mengalami peningkatan di tahun 2018. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan

terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II. 78.

Tabel II. 77
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	263	138	123	N/A
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	263	138	123	N/A
3	Persen penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2019

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman).

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 3 kecamatan yang

responsif gender. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 6 kecamatan yang responsif gender dan 15 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2016, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak. Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II. 78
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66***	93,65***	93,66***	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

*** Angka Sangat Sementara, Bappeko, diolah

2.1.3.2.4 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Pada tabel menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat sejak tahun 2016 yaitu pada tahun 2016 sebesar 145,01 kg/kapita/th dan pada tahun 2017 menjadi 167,946 kg/kapita/th, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan Surabaya merupakan pasar yang potensial yang dapat memberikan harga yang cukup baik sehingga banyak daerah penghasil pangan yang memasok hasil panennya ke kota Surabaya.

Tabel II. 79
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	479.602.970	561.380.280	1.613.871.200	N/A
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	N/A
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	145,01	167,946	521,49	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tingkat konsumsi beras masyarakat di Kota Surabaya pada tahun 2018 rata-rata sebesar 101,54 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan data ketersediaan pangan sebesar 521,49 kg/kapita/th maka ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2018 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Surabaya.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan tabel dapat disampaikan bahwa Pola pangan harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 maka capaian kinerjanya mencapai 101,32%. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi masyarakat sudah semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Tabel II. 80
Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Pola Pangan Harapan	95,28	95,62	96,76	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2019

2.1.3.2.5 Pertanian

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga

dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tabel dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Sedangkan pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Tabel II. 81
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	744	1076	1317	N/A
Total aset pemerintah	1567**	6497	6497	6497
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	47,48%	16,56%	20,27%	N/A

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, 2019

***) Total aset 2016 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Total aset 2017-2018 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya

Tabel II. 82
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	29	24	30	N/A
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	6	2	2	N/A
3.	Persen Kasus yang Diselesaikan	20,68%	8,33%	6,67%	N/A

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.6 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan m³/hari yaitu pada tahun 2016 sebanyak 9.710,61 m³/hari, pada tahun 2017 sebanyak 10.674,63 m³/hari, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 7.143,36 m³/hari, sebagaimana rekap data pada tabel berikut ini.

Tabel II. 83
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Volume Produksi Sampah (m ³ /hari)	9.710,61	10.674,63	7.143,36	N/A
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m ³ /hari)	5.237,7	5.539,15	5.501,12	N/A
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	53,94%	51,89%	77,01%	N/A

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 84
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	N/A
2	Jumlah TPS (unit)	187	187	183	N/A

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan

fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27 Ha. Sedangkan pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 85
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016 – 2019

NO.	JENIS RTH PUBLIK	2016	2017	2018	TW II 2019
1	RTH makam	283,53	283,53	283,53	N/A
2	RTH lapangan dan stadion	350,34	352,50	355,19	N/A
3	RTH telaga/waduk/boezem	191,86	191,86	191,86	N/A
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	204,61	204,61	204,61	N/A
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.548,59	4.548,59	N/A
6	RTH hutan	45,23	48,01	88,88	N/A
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.643,55	1.646,17	1.649,27	N/A
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		7.267,72	7.275,27	7.321,93	N/A
Luas Kota Surabaya		33.451	33.451	33.451	33.451
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		21,73	21,75	21,89	N/A

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 75 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2017, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 54 kasus, dan sebanyak 54 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 66 kasus, dan sebanyak 66 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 86
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	75	54	66	0
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	75	54	66	0
3	Persentase Permasalahan Lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan

baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.

Tabel II. 87
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya

Indeks	Tahun			
	2016	2017	2018	TW II 2019
Indeks Pencemaran Air (IPA)	54,9	57,5	57,62	N/A
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	89,57	90,26	90,26	N/A
Indeks Ruang Terbuka Hijau (ITH)	42,38	42,38	42,44	N/A
Indeks Persampahan	69,27	74,96	74,98	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2019

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, da-tau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat

yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II. 88
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-2018

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun			
		2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah PJU LED	Unit	2.747	8.127	13.499	N/A
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	18	22	22	N/A
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	3	7	7	N/A
Kincir Angin	Unit	8	8	8	N/A
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	26	21	18	N/A
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	0	9	24	N/A

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

2.1.3.2.7 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 89
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2014	2.160.362	2.026.310
2015	2.218.411	2.066.693
2016	2.267.213	2.057.533

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2017	2.313.440	2.040.526
2018	2.348.598	2.020.291
TW II 2019	N/A	N/A

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Dari data pada Tabel II. 890 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

2.1.3.2.8. Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96 persen dari jumlah PUS 504.416. Di tahun 2017, Jumlah akseptor KB sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 90
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412	513.717
2	Jumlah Akseptor KB	40.349	66.425	67.972	N/A
3	Rasio Akseptor KB (persen)	7,96	12,97	13,23	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019

2.1.3.2.8. Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 91
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412	513.717
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	415.241	414.571	412.170	N/A
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,99	80,96	80,28	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2014 terdapat 481.687 PUS, tahun 2015 terdapat 508.380 PUS, dan pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS. Sampai dengan 2017, terdapat 512.066 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 414.571.

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR

dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 92
Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Total Fertility Rate (TFR)	1,78***	1,79***	1,73***	1,73

Sumber : Bappeko, 2019 diolah

***angka sangat sementara

Catatan : Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.8. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2016, sebanyak 233 BKB, 31 BKR, dan 31 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2017, terdapat 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan, dan sampai dengan 2018, terdapat 1000 BKB, 232 BKR dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.8. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Selain itu, kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 % yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta atau sebesar 82,68%. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 93
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1.824	695	335	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 934 diatas kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari Terminal Purabaya, Terminal Tambak Oso Wilangun, Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2016 sejumlah 10.202. Sampai dengan tahun 2017, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.444 kendaraan. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.001 kendaraan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi.

Tabel II. 94
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2015	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Terminal Bis	4	4	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	10.202	8.444	8.001	N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian ijin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II. 95
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.139.947
2	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	7.017	3.699	3.341	N/A
3	Rasio Ijin Trayek	0,0021	0,0011	0,0011	N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Pada tahun 2016, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0023. Sementara tahun 2017, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0011. Sedangkan untuk tahun 2018, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.341 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0011.

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2016 sebanyak 123.830 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 131.256 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 150.494 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II. 96
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	37.575	39.610	46.989	N/A
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	97.377	99.983	155.450	N/A
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	133.463	148.528	158.619	N/A
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	123.830	131.256	150.494	N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun,

di mana sampai dengan tahun 2016 mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.337 unit. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II. 97
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	12.775	13.974	16.337	N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Pada tahun 2017 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 997 unit. Sedangkan pada tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 29 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.542 unit. Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II. 98
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Menara (Tower) (unit)	88	88	29	N/A
Alat Komunikasi (HT)	802	997	1.542	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel II. 99
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 setiap tahunnya terdapat penambahan sebanyak 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 100
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	6	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	7	5	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.11. Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya sebanyak 261.799 orang, pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi juga meningkat menjadi 262.153 orang, serta ditahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 101
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah anggota koperasi	261.799	262.153	266.396	238.381

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.726 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.461 koperasi. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.747 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.484 koperasi, pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 102
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah koperasi	1.726	1.747	1.750	1.753
2	Jumlah koperasi aktif	1.461	1.484	1.487	1.490
3	Persen koperasi aktif	84,65	84,95	84,97	84,99

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah sebesar 1,657 milyar dari 1.463 koperasi, pada tahun 2017, volume usaha koperasi meningkat menjadi 1,797 milyar dari 1.484 koperasi, di tahun 2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2,092 milyar dari 1.487 koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 103
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah Koperasi Aktif	1.463	1.484	1.487	1.753
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.657	1.797	2.092	1.824
Rasio	1,13	1,21	1,41	1,04

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.2.11. Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Sampai dengan tahun 2018 jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.854 di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 104
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah seluruh UMKM	26.854	26.854	26.854	2670
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	22.924	22.924	22.924	2082
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,37	85,37	85,37	77,98

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.12. PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 105
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah Proyek PMDN	16	10	27	90
Jumlah Proyek PMA	43	34	109	19
Total	20	59	122	109

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota Surabaya pada tahun 2015 sebanyak 20 investasi dan pada tahun 2016 tercatat sejumlah 58 investasi. Tahun 2017 realisasi investasi di Kota Surabaya sejumlah 44 PMA dan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.3.972,13 Milyar sedangkan pada

tahun 2018 nilai investasi sebanyak 122 investasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp.4.854,57 Milyar. Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2015 realisasi investasi PMA sebanyak 12 investasi dan PMDN sebanyak 6 investasi dan pada tahun 2016 realisasi PMA sebanyak 43 investasi dan PMDN sebanyak 15 investasi. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi investasi PMA sebanyak 34 investasi dan PMDN sebanyak 10 investasi dan pada tahun 2018 realisasi PMA sebanyak 109 investasi dan realisasi PMDN sebanyak 13 investasi. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 107 di bawah ini.

Tabel II. 106
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Persetujuan				
1.1	Jumlah Proyek	109	82	136	109
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	2.371,45	4.964,37	10.379,22	N/A
	(USD Juta)	351,62	-	774,57	N/A
2	Realisasi				
2.1	Jumlah Proyek	59	44	122	75
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	3.797,87	3.972,13	4.854,57	3.999,55
	(USD Juta)	209,65	166,45	362,28	N/A

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II. 108 di bawah ini.

Tabel II. 107
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah PMA/PMDN	59	44	122	75
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	6.897	10.627	10.607	8.862
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	116,90	241,52	86,94	118,16

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang dari 59 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 116,90. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 241,52. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 428 lapangan olahraga. Pada tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah

aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 108
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

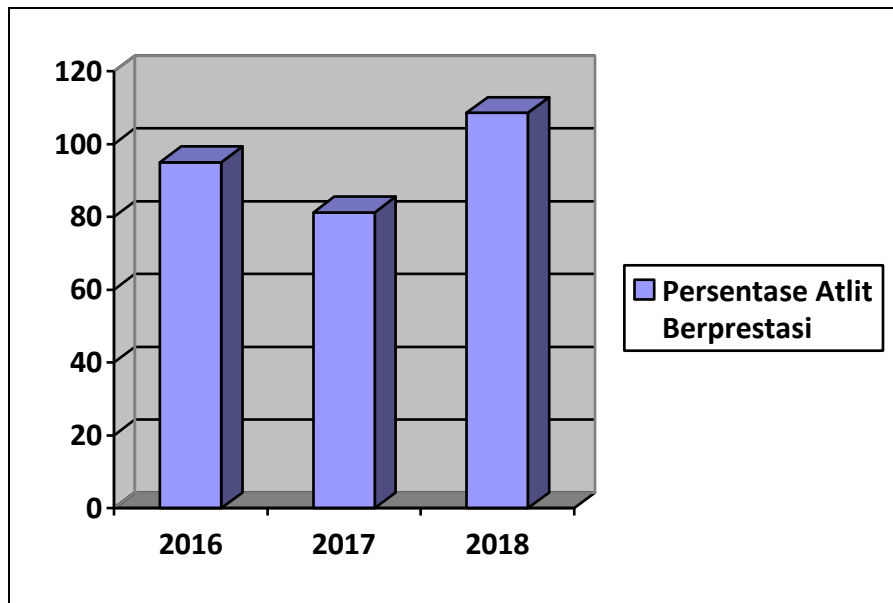
No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah lapangan olahraga	428	393	479	N/A
2	Jumlah penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.139.947
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 7.727	1 : 8.505	1 : 6461	N/A

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Kepemudaan & Olahraga, 2019

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, nilai persentasi atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlet yang dibina dan sejumlah 472 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 108,56% terdapat 2307 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2125 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional.



Gambar II. 15
Persentase Atlet Berprestasi

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2016 terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai dengan tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun

buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II. 109
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Dokumen	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	-	Ada	-
2.	PDRB Kecamatan	Ada	-	Ada	-
3.	Informasi Data Pokok Surabaya	Ada	Ada	Ada	-
3.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	-

Sumber : Bappeko Surabaya, 2019

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.15. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah

secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 110
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	887	445	984	N/A

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 887 festival, dan pada tahun 2017 sebanyak 445 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Sedangkan di 2018, jumlah festival seni dan budaya meningkat menjadi sebanyak 984 kali. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya.

2.1.3.2.15. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.15. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda

yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II. 111
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	273	273	273	277
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	273	273	273	277
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM, menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta menyediakan layanan TBM yang tersebar secara merata, menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota, menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM, melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba

pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, *banner*, *billboard*, media cetak dan elektronik, melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan, melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan bukan hanya di Pemerintah Kota, namun ada perpustakaan milik non pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel II. 112.

Tabel II. 112
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61	61
3	Total	63	63	63	63

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Untuk menambah kunjungan di Perpustakaan diperlukan buku yang variatif dan koleksi baru. Jumlah koleksi buku pada tahun 2017 terdapat penambahan 54.326 buku sehingga sampai dengan tahun 2017 jumlah koleksi buku sebanyak 898.466 buku. Pada tahun 2018, terdapat penambahan buku sebanyak 21.924 buku, dengan persentase penyediaan koleksi buku sampai dengan tahun 2018 sebesar 87,45% atau 2.326.889 buku dari target sebanyak 2.660.695 di tahun 2021, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100,95%. Data koleksi buku sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 113
Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah judul buku	133.281	-	323.342	N/A
2	Jumlah buku	844.140	898.466	920.390	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 11415. Pada tahun 2018, salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukur kinerja adalah persentase pengunjung layanan baca

yang meminjam buku. Pada tahun 2018, sebanyak 1.762.516 pengunjung di layanan baca dan seluruhnya meminjam buku meningkat dari tahun 2017 yang sebanyak 729.877 pengunjung. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling.

Pada tahun 2018, pengembangan minat dan budaya dilaksanakan dengan kegiatan bedah buku, fesival budaya pustaka dan pameran buku.

Tabel II. 114
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Kunjungan layanan baca per bulan (orang)	4.762.438	5.496.517	7.259.033	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditekankan pada peningkatan jumlah kunjungan. Selanjutnya perlu diukur peningkatan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah, yang diukur melalui tes *reading text leveling*. Tes *reading text leveling* bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa sesuai dengan level standar usia siswa. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 55.871 siswa atau sebesar 40,92% dari target 289.166 siswa di tahun 2021 telah mengikuti tes *reading text levelling*. Dan dari 55.871 siswa yang mengikuti tes di tahun 2018, seluruh siswa kemampuan membacanya sesuai dengan *reading text levelling*.

Tabel II. 115
Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah siswa mengikuti <i>reading text levelling</i>	3.041	59.438	55.871	N/A
Jumlah siswa yang kemampuan membacanya sesuai dengan <i>reading text levelling</i>	2.219	59.438	55.871	N/A
Persentase (%)	72,97	100	100	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.1.3.2.17 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapny dapat dilihat pada Tabel II.117

Tabel II. 116
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib
Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri	224	684	899	899
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	24	154	284	N/A
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	10,71%	22,51%	43,89%	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Pada tahun 2016 sebanyak 24 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 154 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan pada tahun

2018 menjadi 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip dari target 1.725 arsip diakuisisi di tahun 2021. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip dari target 1.725 arsip diakuisisi di tahun 2021. Dengan demikian persentase arsip diakuisi sebesar 50,78%.

Untuk mendorong pelaksanaan sistem tata kearsipan yang tertib sesuai ketentuan, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2017 peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi pelaksanaan sistem tata kearsipan pada 2 Perangkat Daerah, 7 Kecamatan, 11 Kelurahan; serta pelatihan/Bintek/Inhouse training kepada 50 SMPN di kota Surabaya. Sedangkan di tahun 2018, peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi pelaksanaan sistem tata kearsipan pada 40 lembaga; serta pelatihan/Bintek/Inhouse training kearsipan kepada 90 lembaga pendidikan di kota Surabaya

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 117 dan Tabel II.119.

Tabel II. 117
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.242,07	495.043.304,5	547.769.497,0	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	721.552,58	786.764,6	814.659,3	N/A
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	0,16%	0,16%	0,15%	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2019

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 0,16% atau sebesar Rp. 786.764,6 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp. 495.043.304,5 juta rupiah. Di tahun 2018, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,15% atau sebesar Rp.814.659,3 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp.547.769.497,0 juta rupiah.

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,15-0,16%. Kontribusi sub kategori perikanan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,15%, hal tersebut dikarenakan peningkatan nilai tambah PDRB lebih besar daripada peningkatan nilai tambah sub kategori perikanan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 118
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)			
		2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Perikanan Laut	10.578,30	8.416,60	8.151,50	N/A
2.	Perikanan Tambak	6.915,03	6.798,68	6.956,58	N/A
3.	Perairan umum	93,38	94	91,80	N/A
4.	Kolam	1.116,48	1.133,33	1.104,94	N/A
5.	Jaring Apung	144,82	134,22	138	N/A
Jumlah		14.954,15	18.849,44	16.576,83	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II. 119, terlihat bahwa jumlah produksi perikanan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 16.478,82 ton. Penurunan jumlah produksi terjadi pada jenis usaha perikanan laut, perairan umum dan kolam. Menurunnya produksi perikanan laut karena sumber daya ikan semakin berkurang serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sedangkan kenaikan terjadi pada jumlah produksi perikanan tambak dan jaring apung, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan teknologi tepat guna dan fasilitasi penyediaan sarana produksi dalam budidaya perikanan.

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 45,85 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 90,52% dari yang ditargetkan nasional yaitu 50,65 kg/kapita/th. Adapun upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Surabaya melalui memasyarakatkan gemar makan ikan, sosialisasi/penyuluhan, dan pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 119
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	40,33	43,23	45,85	N/A
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	43,88	47,12	50,65	N/A
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	91,91	91,74	90,52	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

2.1.3.3.3 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendorong jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II. 120 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 21.352.786 wisatawan dengan rincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 772.058 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 20.580.728

wisatawan. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 24.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.569.130 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 22.713.892 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan

Tabel II. 120
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	772.058	1.569.130	1.728.194	N/A
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	20.580.728	22.713.892	27.575.125	N/A
Jumlah		21.352.786	24.283.022	29.283.022	2.906812

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada Tabel II. 1211 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data table tersebut dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-

obyek wisata pada tahun 2016 sebanyak 5.622.177 orang. Sedangkan tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 5.811.227 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 7.215.914 orang dan selama 3 tahun terakhir obyek wisata yang paling banyak pengunjungnya adalah kawasan religi Ampel.

Tabel II. 121
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 – 2018

Uraian	2016		2017		2018	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
THP Kenjeran	747.950	13,30	511.227	8,79	490.353	6,79
Kenjeran Park	549.144	9,77	950.195	16,35	725.790	10,06
Taman Prestasi	41.925	0,75	55.156	0,95	98.085	1,36
Taman Hiburan Rakyat	18.725	0,33	11.115	0,19	9.696	0,13
Taman Remaja Surabaya	157.470	2,80	71.043	1,22	147.554	2,04
Monumen Tugu Pahlawan	246.400	4,38	264.501	4,55	324.290	4,49
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.513.076	26,91	1.845.913	31,76	2.502.546	34,68
Masjid Al-Akbar	75.123	1,34	89.299	1,54	63.966	0,89
Masjid Cheng Ho	20.918	0,37	17.200	0,29	19.643	0,27
Kebun Binatang	1.157.643	20,59	1.220.669	21,01	1.996.738	27,67
Monumen Kapal Selam	333.122	5,93	219.654	3,78	265.783	3,68
Monumen Jalesveva Jayamahe	-	-	-	-		
Loka Jala Srana	48.247	0,86	35.222	0,61	36.816	0,51
Rumah wafat WR. Soepratman	804	0,01	1.244	0,02	6.425	0,09
Makam DR. Soetomo	5.101	0,09	18.755	0,32	8.029	0,11
Patung Djoko Dolog	5.399	0,10	1.170	0,02	1.438	0,02
Balai Pemuda	252.299	4,49	176.792	3,04	213.020	2,95
House Of Sampoerna	212.100	3,77	165.200	2,84	186.447	2,58
Ciputra Water Park	227.704	4,05	147.457	2,54	110.477	1,53
Museum Kesehatan	9.027	0,16	9.395	0,16	8.818	0,12
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	5.622.177	100	5.811.227	100	7.215.914	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

2.1.3.3.4 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya. Sebagaimana Tabel II. 1223 sampai dengan Tabel II. 123 berikut:

Tabel II. 122
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.242,07	495.043.304,5	547.769.497,0	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian	98.797,92	96.412,8	98.825,4	N/A
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB	0,02%	0,02%	0,02%	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Tabel II. 123
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	N/A
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	2.289	2.017	1.844	N/A
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,16	5,24	5,44	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II. 1234 disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,1% dari tahun 2017 atau menurun dari 10.568,57 ton menjadi 10.130,64 ton. Penurunan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya penurunan luas areal penanaman. Namun, produktivitas mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 5,44 ton/ha, hal ini dikarenakan adanya pembinaan terhadap petani melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan, serta fasilitasi penyediaan sarana prasarana produksi.

Tabel II. 124
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	N/A
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	519,2	503,05	400,49	N/A
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	406,9	174,11	471	N/A
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	757,2	773,60	352,24	N/A
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	4.466,57	26,80	3.182,5	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2018 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu lombok dan buah, sedangkan jagung, padi dan sayur mengalami penurunan. Produksi padi, jagung dan sayur mengalami penurunan antara lain disebabkan berkurangnya luas areal penanaman karena pengurukan lahan serta alih komoditi ke tanaman buah, dan alih fungsi tanah menjadi tambak. Sedangkan jumlah produksi lombok mengalami kenaikan karena petani beralih komoditi ke tanaman lombok, serta adanya target tanam dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk komoditi lombok. Selanjutnya, produksi buah meningkat dikarenakan alih komoditi dari tanaman padi ke tanaman buah. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana Tabel II. 12425.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari

26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut..

Tabel II. 125
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Jenis Pasar Modern	Tahun			
		2016	2017	2018	TW II 2019
1	Supermarket	61	61	67	N/A
2	Minimarket	566	566	593	N/A
3	Departement Store	9	9	12	N/A
4	Mall/Plaza	33	33	34	N/A
Total		603	669	669	N/A

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2019

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II. 126
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2019

No	Tahun		
	2017	2018	TW II 2019
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)		N/A
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)		
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	
4	Pasar Penjaringansari		
5	Pasar Keputih		
6	Pasar Dukuh Menanggal		
7	Pasar Jambangan		
8		Pasar Kapasari	
9		Pasar Kutisari	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Tabel II. 127
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – 2019

Cabang	Tahun			
	2016	2017	2018	TW II 2019
Selatan	17	17	17	N/A
Timur	22	22	22	N/A
Utara	28	28	28	N/A
Total	67	67	67	N/A

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2019

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan ijin usaha perdagangan sebagaimana pada Tabel II. 128 berikut.

Tabel II. 128
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Jenis Perusahaan	Tahun			
		2016	2017	2018	TW II 2019
1	Perdagangan	12.849	12.791	13.887	2758
2	Industri	275	330	185	46
T o t a l		14.975	13.124	13.121	2.804

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2019

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic.

Aktivitas perdagangan di kota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari Tabel II. 129.

Tabel II. 129
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Nilai Ekspor (US \$)	17.901.405.669	18.268.869.178	19.165.996.010	N/A
2	Nilai Impor (US \$)	15.632.269.630	16.956.900.232	19.612.835.745	N/A

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	2.269.136.039	1.311.968.946	-446.839.735	N/A

Sumber: Bank Indonesia dan Bappeko Surabaya, 2019

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2016 dan tahun 2017 tercatat surplus sebesar US \$2.269.136.039 dan US \$1.311.968.946 dan pada tahun 2018, defisit menjadi -446.839.735. Hal tersebut didorong oleh permintaan eksternal, yaitu sebesar US \$19.165.996.010 dan impor sebesar US \$19.612.835.745. Permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mempengaruhi terhadap net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2018.

2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.4.2 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2016, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 130
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Jenis Dokumen	2016	2017	2018	TW II 2019
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	-
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Review RPJMD	-	-	-	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2015 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program, tahun 2016 sebanyak 79 program dan pada tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel II. 131
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	79	102	102	102
2	Jumlah Program RKPD	79	102	102	102
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

Tabel II. 132
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	TW II 2019
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	94,94%	91,18%	90,05%	N/A

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2018 mencapai 90,19% sehingga dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat berjalan secara optimal.

Tabel II. 133
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	89,29	87,29	90,19	48,80

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2019

2.1.3.4.3 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.3.4.3. Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II. 13435.

Tabel II. 134
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	N/A
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	63,08	68,86	72,47	N/A

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada tahun 2017, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017 meningkat yaitu 68,86 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Sedangkan di tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan yaitu 72,47 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak

267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II. 135
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	329	N/A
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	267	267	267	N/A
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP	81,16%	81,16%	81,16%	N/A

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II. 136.

Tabel II. 136
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah rancangan produk hukum	73	79	89	70
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	73	79	89	39
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	55,7%

Sumber : Bagian Hukum, 2019

2.1.3.4.3. Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 137/38 berikut.

Tabel II. 137
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	82,67	76,30	83,74	N/A

Sumber: Bagian Organisasi, 2019

*) Survey Kepuasan Masyarakat di Tahun 2019 masih berlangsung

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2018 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kategori Baik, UPTSA Surabaya Pusat dan UPTSA Surabaya Timur masuk kategori Baik, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 61 Puskesmas masuk kategori Baik, serta 2 Puskesmas masuk kategori Sangat Baik. Penilaian untuk 31 kecamatan, dengan hasil 15 kecamatan masuk kategori Baik dan 3 kecamatan masuk kategori Sangat Baik, sedangkan 13 kecamatan masuk kategori cukup. Sedangkan 14 kelurahan masuk kategori Sangat Baik dan 77 kelurahan masuk kategori Baik, sisanya masuk dalam kategori Cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Unit Pelayanan yang belum mencapai kategori Sangat Baik, dan kondisi tersebut secara umum menurun dari tahun 2017 di mana sebanyak 118 Unit Pelayanan masuk dalam Kategori Sangat Baik.

2.1.3.4.3. Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2018 terdapat 102 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 72 MoU atau 70,59% memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 15 MoU dan 12 MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari keseluruhan 117 MoU kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri, 65 MoU diantaranya telah dievaluasi. Pada tahun 2018, dari 4 MoU kerjasama yang memuat sektor perdagangan, 3 di antaranya terealisasi tindak lanjut, atau sebesar 75%.

Tabel II. 138
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga

No.	Uraian	2018	TW II 2019
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	72	30
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan	102	30
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	70,59%	100%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

Tabel II. 139
MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri

No.	Uraian	2018	TW II 2019
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	12	3
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri keseluruhan	15	3
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	80%	100%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

2.1.3.4.3. Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II. 1401 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.

Tabel II. 140
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur
Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2016	2017	2018	TW II 2019
Hukuman Disiplin Ringan					
1	Teguran Lisan	-	1	2	0
2	Teguran Tertulis	2	10	1	0
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2	3	2	2
	Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	4	14	5	2
Hukuman Disiplin Sedang					
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun	2	1	1	0
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun	1	0	2	0
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	1	3	0	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	4	4	3	0
Hukuman Disiplin Berat					
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	7	9	4	6
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	1	1	0
3	Pembebasan Dari Jabatan	8	4	2	4
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	5	3	3	2
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	1	1	0	0
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	-	1	0	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Berat	21	19	10	12
Hukuman Disiplin					
1	Pemberhentian Sementara (PP. No. 11 Tahun 2017)	3	2	1	2

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2016	2017	2018	TW II 2019
2	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS	0	0	3	1
3	Pencabutan Pemberhentian Sementara	0	0	0	0
4	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0	0	0
5	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0	0	0
6	Rehabilitasi	0	0	0	0
Jumlah		3	2	4	3
TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN		32	39	22	17

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2019

2.1.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan

Dasar

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II. 1412 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II. 141
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah pejabat struktural	1.638	1.577	1.577	1.577
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.135	1.134	1.255	1.527
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	69,29%	71,91%	78,24%	96,83%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang

berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 142
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya
Tahun 2015 – 2017

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2015	581.474	33,75	1.141.526	66,25	1.722.999	100
2016	727.886	39,94	1.094.588	60,06	1.822.474	100
2017	758.750	39,88	1.143.770	60,12	1.902.520	100

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut:

Tabel II. 143
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	TW II 2019
Angkatan Kerja (orang)	-	1.495.837	1.520.041	N/A
PDRB (Juta Rp)	451.486.791,00	503.824.868,16	547.769.496,96	N/A
Produktivitas (Juta per orang)	-	336,81	360,36	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2019

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II. 144
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan

Uraian		2016	2017	2018	TW II 2019
Nilai PDRB ADHB					
Transportasi dan Pergudangan		16.569.183,7	17.707.950,2	19.276.049,9	N/A
1	Angkutan Rel	92.201,6	100.269,3	107.866,6	N/A
2	Angkutan Darat	4.245.058,0	4.660.509,3	5.050.404,3	N/A
3	Angkutan Laut	2.474.710,6	2.617.501,4	2.913.643,7	N/A
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	59.816,2	61.096,3	61.125,1	N/A
5	Angkutan Udara	-	-	-	N/A
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	9.697.397,3	10.268.574,0	11.143.010,3	N/A
Laju Pertumbuhan					
Transportasi dan Pergudangan		4,89	6,87	8,86	N/A
1	Angkutan Rel	9,60	8,75	7,58	N/A
2	Angkutan Darat	8,06	9,79	8,37	N/A
3	Angkutan Laut	4,12	5,77	11,31	N/A
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,27	2,14	0,05	N/A
5	Angkutan Udara	-	-	-	N/A
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	3,73	5,89	8,52	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2019

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II. 145
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Tabel II. 146
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II. 147
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2019

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Data jumlah kendaraan hanya bisa didapatkan dari perhitungan jumlah kendaraan (kepemilikan) oleh BPKAD Provinsi Jatim (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya), sehingga Kota/Kabupaten tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut. Namun, melihat perkembangan jumlah kendaraan di Kota Surabaya yang semakin tahun semakin meningkat, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Tabel II. 148
Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Panjang Jalan (m)	1.686.380,5	1.689.289,1	1.678.857,7	1.836.814,5
Jumlah Kendaraan	-	-	-	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit

dan pada tahun 2017, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit. Sedangkan pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 9,56 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 149
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	52,98	25,03	9,56	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2018

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 13,37 cm. Sedangkan pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 2,66 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 150
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2015	2016	2018	TW II 2019
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	16,27	13,37	2,66	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2018

Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha dan pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Sedangkan pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 159,3 ha. sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 151
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
Luas Wilayah Genangan (ha)	1.257	765,12	159,3	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2018

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di

Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.10). Hingga sekarang, *smart water level* telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrengan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

Gambar II. 16
Perangkat *Smart Water Level*

2.1.4.2.5 Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada tabel berikut ini.

Tabel II. 152
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	3.127.782	3.137.496	3.306.059	N/A
2	Jumlah Penduduk*	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	103,69	102,04	106,82	N/A

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2019

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya sebesar hingga tahun 2016 telah mencapai 103,69 persen. Begitupun pula di tahun 2017 dan tahun 2018, dimana capaiannya telah mencapai diatas 100%. Walaupun telah mencapai target diatas 100 persen, namun pelayanan tetap terus dioptimalkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

2.1.4.2.6 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2017 sebanyak 5.380 titik, sedangkan pada tahun 2018, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang mencapai 5.372 titik dan dengan demikian sampai dengan tahun 2018 jumlah titik PJU sebanyak 95.449 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II. 153
Penerangan Jalan Umum Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	TW II 2019
Jumlah PJU terpasang (Titik)	5.293	5.380	5.372	5.372

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota. Hal tersebut terlihat bahwa sampai dengan tahun 2018, jumlah PJU hemat energi sebanyak 15.365 titik dari 95.449 titik PJU yang terpasang.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 154
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Bidang Politik	48	35	67	19
2	Ekonomi	126	84	64	31
3	Sosial Budaya	165	107	105	33
	Jumlah unjuk rasa	339	226	236	83

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, namun di 2018 mengalami sedikit kenaikan. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada Tabel II. 155 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel II. 155
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	1	0	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	0	0	1	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0

Sumber :Bagian Hukum, 2019

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.2 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II. 156.

Tabel II. 156
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah lulusan D4/S1	325.755	328.211	303.549	N/A
2	Jumlah lulusan S2	21.579	22.091	21.010	N/A
3	Jumlah lulusan S3	1.279	1.315	1.353	N/A
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	348.613	351.617	325.912	N/A
5	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.139.947
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,116	0,114	0,105	N/A

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.1.4.4.3 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II. 157
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	717.636	713.916	672.334	697,552
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	220.340	232.830	216.158	219,936
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	937.976	946.746	888.492	N/A
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.369.324	2.395.881	2.206.240	2,222,469
6	Rasio ketergantungan	0,396	0,395	0,402	N/A

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada tahun 2018 antara lain kelompok usia non produktif usia (15< th) sebesar 672.334 orang (21,72%), dan usia (>64 th) sebesar 232.830 orang (6,98%), sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64th) sebesar 2.206.240 orang (71,29%). Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,402 yaitu setiap 100

orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 dan realisasi tahun kedua RPJMD 2016-2021 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2018, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2018 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2018, secara umum disajikan pada Tabel II.159 berikut.

Tabel II. 158
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
dan Kinerja Hasil Program Tahun 2018

No.	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja hasil)		Kegiatan (indikator kinerja keluaran)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang direncanakan (capaian kurang dari 100%)	24	10,08%	196	16,23%
2	Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan (capaian 100% - 110%)	99	41,59%	629	52,11%
3	Realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang direncanakan (capaian lebih dari 110%)	115	48,31%	382	31,64%
Total		238		1207	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2019, dijelaskan pada Tabel II.160 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 berikut.

Formulir Evaluasi Hasil RKPD
Kota Surabaya
Periode Pelaksanaan : 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16													
		1	Urusan Pemerintahan																									
		1.1	Wajib																									
		1:01:01	Pelayanan Dasar																									
		1.1.1.01	Pendidikan																									
1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	1.1.1.01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan		5,296,023,077	1,756,482,869	810,589,704	74,933,913	152,062,157	0,00	0,00	226,996,070	28,00%	1,983,478,939	37,45%													
			Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya		79,21 %	97,41%	49,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,41 %	198,64%	97,41 %	122,98 %													
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI		100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	241,49 %	241,49%	100,00 %	100,00 %													
			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs		100,00 %	102,57%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	249,94 %	249,94%	102,57 %	102,57 %													
			Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar		75,77 %	89,44%	72,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	62,05 %	85,21%	90,03 %	118,82 %													
			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar		81,18 %	82,66%	78,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	82,66 %	105,93%	82,66 %	101,82 %													
			Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik		100,00 %	66,58%	77,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	76,75 %	98,55%	66,58 %	66,58 %													
		1.1.1.01.01.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi			94 bangunan	203,543,791	8	9,683,300	24	51,040,095	0	0	0	0	32	60,723,394	34,04%	29,83%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang					
		1.1.1.01.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun			40 dokumen	2,051,174	0	275	2	408,470	0	0	0	0	2	408,745	5,00%	19,93%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang					
		1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan			698 lembaga	185,993,461	695	30,513,651	549	45,032,253	0	0	0	0	697	75,545,905	99,86%	40,62%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan			317 lembaga	93,747,778	300	17,533,704	238	26,537,426	0	0	0	0	308	44,071,130	97,16%	47,01%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0005	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan			2 kali	855,395	0	5,200	2	115,884	0	0	0	0	2	121,084	100,00%	14,16%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0006	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar			301 lembaga	18,474,498	0	0	301	844,204	0	0	0	0	301	844,204	100,00%	4,57%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah			62 lembaga	10,734,574	0	14,300	62	700,042	0	0	0	0	62	714,342	100,00%	6,65%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0008	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah APE yang diberikan			447 paket	1,344,479	0	0	0	19,842	0	0	0	0	0	19,842	0,00%	1,48%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0009	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan			363 lembaga	86,077,559	365	14,628,111	365	21,269,394	0	0	0	0	365	35,897,505	100,55%	41,70%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan			2 lembaga	111,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0012	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan			301 lembaga	123,406,656	0	0	0	3,404	0	0	0	0	0	3,404	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0013	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan			62 lembaga	58,075,506	0	0	0	3,404	0	0	0	0	0	3,404	0,00%	0,01%			Dinas Pendidikan					
		1.1.1.01.01.0014	Pemeliharaan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Jumlah sistem yang dipelihara			1 sistem	675,555	0	0	0	81,800	0	0	0	0	0	81,800	0,00%	12,11%			Dinas Pendidikan					

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%										
		1.1.1.01.01.0015	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara			100 bangunan	21,605,638	15	2,555,371	15	6,005,940	0	0	0	0	30	8,561,312	30.00%	39.63%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.1.1.01.01.0016	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana dan rehabilitasi gedung pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan			6 lembaga	1,728,237	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	100.00%	0.00%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.01.0017	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan			8 lembaga	2,163,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.02	Program Penerapan Kurikulum			185,262,935		55,345,154		28,499,591		2,939,358		7,976,212		0,00		0,00		10,915,570		38,30%		66,260,723		35,77%	
			Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan		86,60 %		100.00%	68,69 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		145,58%		100,00 %		115,47 %				
			Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum		86,59 %		100.00%	83,23 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		120,15%		100,00 %		115,49 %				
			Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum		86,59 %		100.00%	83,23 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		120,15%		100,00 %		115,49 %				
		1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan			73 lembaga	14,361,551	55	965,688	73	4,140,637	0	0	0	0	73	5,106,325	100.00%	35.56%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan			37 lembaga	8,093,235	37	1,249,571	37	1,688,577	0	0	0	0	37	2,938,148	100.00%	36.30%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah			1 kali	835,997	0	375,552	0	344,904	0	0	0	0	0	720,456	0.00%	86.18%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar			2 kali	2,616,756	1	46,800	1	1,208,131	0	0	0	0	2	1,254,931	100.00%	47.96%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar			410 lembaga	524,803	62	0	236	110,130	0	0	0	0	298	110,130	72.68%	20.98%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0006	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah			297 lembaga	381,035	0	22,938	127	88,193	0	0	0	0	127	111,131	42.76%	29.17%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD			893 lembaga	454,818	0	17,500	886	288,005	0	0	0	0	886	305,505	99.22%	67.17%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0008	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar			729 lembaga	761,219	0	261,308	809	84,164	0	0	0	0	809	345,472	110.97%	45.38%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.02.0009	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah			286 lembaga	470,178	0	0	0	23,471	0	0	0	0	0	23,471	0.00%	4.99%					Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.03	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			888,580,311		255,541,759		148,311,515		64,747		37,877,106		0,00		0,00		37,941,852		25,58%		293,483,612		33,03%	
			Persentase guru PAUD yang kompeten		76,00 %		100.00%	69,09 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		144,74%		100,00 %		131,58 %				
			Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi		97,92 %		44.13%	82,81 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		44,33 %		45,28 %				
			Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi		94,78 %		45.95%	85,93 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		47,82 %		50,46 %				
			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar		100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,00 %				
			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4		100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,00 %				
			Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten		82,23 %		100.00%	67,93 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		147,21%		100,00 %		121,61 %				
			Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten		63,05 %		100.00%	54,71 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		182,78%		100,00 %		158,60 %				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)				K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16												
				Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	70,07 %		100.00%		60,95 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		164,07%	15,17%	100,00 %	142,71 %				
		1.1.1.01.03.0001	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan			2 dokumen	45,771,011	0	19,200	0	6,925,543	0	0	0	0	0	0	6,944,743	0.00%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan			12 kali	53,167,230	0	19,200	3	13,519,656	0	0	0	0	3	13,538,856	25.00%	25.46%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.03.0003	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan			957 lembaga	6,871,740	317	26,347	440	1,520,781	0	0	0	0	539	1,547,128	56.32%	22.51%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.03.0004	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			12010 orang	41,677,725	0	0	10286	15,907,255	0	0	0	0	10286	15,907,255	85.65%	38.17%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.03.0006	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan			1 kali	823,809	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	3,870	0.00%	0.47%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.04	Program Peningkatan Prestasi			109,900,117		36,774,597		32,758,048		6,119,908		6,544,152		0,00	0,00		12,664,060		38,66%		49,438,657	44,99%			
				Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	71,88 %		95.36%		62,50 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		95,36 %		152,57%	95,36 %	132,66 %					
				Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	70,59 %		98.93%		62,50 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		98,93 %		158,29%	98,93 %	140,15 %					
				Persentase PAUD beprestasi	3,36 %		5.20%		2,25 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		5,20 %		230,90%	5,75 %	171,07 %					
		1.1.1.01.04.0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini			1339 lembaga	473,512	330	53,158	0	42,702	0	0	0	0	330	95,860	24.65%	20.24%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.04.0002	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar			5 kali	1,447,303	3	232,526	0	193,419	0	0	0	0	3	425,945	60.00%	29.43%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.04.0003	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah			1 kali	652,874	1	426,322	0	89,318	0	0	0	0	1	515,640	100.00%	78.98%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.04.0004	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan			21 kali	3,172,303	11	219,832	5	843,743	0	0	0	0	8	1,063,575	38.10%	33.53%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.04.0005	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat			4 kali	23,306,138	3	4,191,876	0	5,026,922	0	0	0	0	3	9,218,798	75.00%	39.56%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.04.0007	Pemberian Makanan Tambahan PAUD	Jumlah lembaga penerima pemberian makanan tambahan PAUD			893 lembaga	3,705,917	845	996,193	775	348,048	0	0	0	0	846	1,344,241	94.74%	36.27%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan			8,230,190		1,184,965		1,055,181		100,224		70,406		0,00	0,00		170,631		16,17%		1,355,596	16,47%			
				Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	73,05 %		79.62%		64,94 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		98,37 %		151,48%	98,37 %	134,66 %					
				Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	53,02 %		90.24%		46,31 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		99,33 %		214,49%	99,33 %	187,34 %					
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	87,04 %		87.28%		83,70 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		111,03 %		132,65%	99,26 %	114,04 %					
				Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	79,59 %		87.93%		59,18 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		98,08 %		165,73%	98,08 %	123,23 %					
		1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah			4022 lembaga	1,055,181	363	100,224	2329	70,406	0	0	0	0	2692	170,631	66.93%	16.17%				Dinas Pendidikan			
2	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	1.1.1.01.06	Program Pendidikan Kesetaraan			11,389,676		14,533,943		4,188,589		343,946		1,355,869		0,00	0,00		1,699,815		40,58%		16,233,758	142,53%			
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	74,29 %		89.04%		72,14 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		89,04 %		123,42%	89,04 %	119,85 %					
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	89,66 %		89.65%		88,89 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		89,65 %		100,85%	89,65 %	99,99 %					
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91,37 %		91.06%		91,11 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		91,06 %		99,95%	90,78 %	99,36 %					
		1.1.1.01.06.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan			34 lembaga	4,188,589	0	343,946	0	1,355,869	0	0	0	0	0	1,699,815	0.00%	40.58%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.07	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan			216,006,145		92,479,279		57,033,897		172,400		24,043,240		0,00	0,00		24,215,640		42,46%		116,694,919	54,02%			
				Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	6,32 %		15.53%		5,93 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		15,53 %		261,89%	15,53 %	245,73 %					
				Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	4,17 %		10.36%		2,08 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		10,36 %		498,21%	10,36 %	248,51 %					

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1.1.1.01.07.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitas pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu			12000 orang	56,161,887	0	0	11913	23,947,524	0	0	0	0	11913	23,947,524	99.28%	42.64%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.07.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga			2 kali	224,776	0	0	0	34,435	0	0	0	0	0	34,435	0.00%	15.32%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.07.0003	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM			289 lembaga	647,234	0	172,400	0	61,282	0	0	0	0	0	233,682	0.00%	36.10%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.02	Kesehatan																								
3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	1.1.1.02.01	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			1,096,049,895		357,425,960		172,563,730		48,479,661		39,414,962		0,00		0,00		87,894,623		50.93%		445,320,583	40,63%		
				Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		99,98 %		99,98 %		
				Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	15,00 %		24.71%		13,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		24,71 %		190,04%		25,61 %		170,75 %		
		1.1.1.02.01.0001	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan			537252 orang	163,515,215	564742	39,431,162	575737	39,414,962	0	0	0	0	586576	78,846,124	109.18%	48.22%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.01.0002	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan			32784 orang	9,048,515	393413	9,048,499	0	0	0	0	0	0	393413	9,048,499	1200.02%	100.00%					Dinas Kesehatan		
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	1.1.1.02.02	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			204,193,800		67,856,056		32,340,705		7,446,608		5,193,163		0,00		0,00		12,639,771		39.08%		80,495,827	39,42%		
				Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,50 %		98.98%		98,48 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		24,38 %		24,76%		98,55 %		100,05 %		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinkes)	96,98 %		97.68%		96,96 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		26,61 %		27,44%		97,16 %		100,18 %		
				Cakupan kunjungan neonatal lengkap	95,00 %		98.53%		90,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		24,46 %		27,18%		92,51 %		97,38 %		
				Cakupan imunisasi dasar lengkap	94,00 %		97.77%		93,85 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		26,04 %		27,74%		89,74 %		95,47 %		
		1.1.1.02.02.0001	Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga			64 lembaga	30,673,705	64	7,446,608	64	5,193,163	0	0	0	0	64	12,639,771	100.00%	41.21%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.02.0002	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Ibu dan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan			428 kunjungan	1,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.03	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak			63,114,385		7,604,254		8,242,541		342,978		463,440		0,00		0,00		806,418		9.78%		8,410,672	13,33%		
				Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50 %		8.26%		9,50 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		200,00%		8,30 %		87,42 %		
				Prevalensi Balita gizi buruk	%		0.14%		%		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		200,00%		0,14 %		0,00 %		
				Persentase Penimbangan balita	81,70 %		85.95%		81,50 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		86,69 %		106.37%		85,49 %		104,64 %		
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,70 %		99.96%		94,66 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		24,29 %		25,66%		95,78 %		101,14 %		
		1.1.1.02.03.0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi			686 orang	5,582,824	220	342,978	0	463,440	0	0	0	0	220	806,418	32.07%	14.44%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.03.0002	Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	Jumlah obat gizi yang diadakan			3 item	2,659,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Kesehatan		
5	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	1.1.1.02.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu			296,371,729		253,815,161		139,945,474		17,655,993		32,704,571		0,00		0,00		50,360,564		35.99%		304,175,725	102,63%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	80,00 %		83.61%		78,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		54,92 %		70,41%		83,61 %		104,51 %		
				Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	100,00 %		83.61%		76,35 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		83,61 %		109,50%		83,61 %		83,61 %		
		1.1.1.02.04.0001	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer			64 lembaga	79,421,189	64	13,809,086	64	18,752,756	0	0	0	0	64	32,561,842	100.00%	41.00%					Dinas Kesehatan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14=7+13				15=14/6x100%				16			
		1.1.1.02.04.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan			1 sistem	929,294	0	76,308	0	100,639	0	0	0	0	0	176,947	0.00%	19.04%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.04.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan			54 jenis	27,356,287	82	305,083	1	9,872,226	0	0	0	0	4	10,177,309	7.41%	37.20%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.04.0004	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya			64 lembaga	19,112,520	64	3,465,240	64	1,810,608	0	0	0	0	64	5,275,848	100.00%	27.60%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.04.0005	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/ direhabilitasi			28 bangunan	8,924,819	0	0	1	2,107,423	0	0	0	0	1	2,107,423	3.57%	23.61%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.02.04.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun			11 dokumen	597,141	0	275	1	60,919	0	0	0	0	1	61,194	9.09%	10.25%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.02.04.0007	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan			1 jenis	949,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.04.0010	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan			4 jenis	2,654,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.05	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu		259,758,524	77,212,497		25,747,651	1,244,369	2,819,400	0,00	0,00		0,00		4,063,769		15,78%		81,276,265		31,29%					
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100,00 %	100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %				
		1.1.1.02.05.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan			173 jenis	22,615,290	7	1,244,369	11	2,401,406	0	0	0	0	18	3,645,775	10.40%	16.12%				Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.05.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan			34 jenis	3,132,361	0	0	4	417,994	0	0	0	0	4	417,994	11.76%	13.34%				Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		507,762,685	120,824,447		66,017,863	1,631,619	1,399,628	0,00	0,00		0,00		3,031,246		4,59%		123,855,693		24,39%					
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	90,00 %	98.15%	86,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		98,15 %		109,06 %				
				Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	90,00 %	98.27%	86,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		98,37 %		114,38%		98,27 %		109,19 %				
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	76,00 %	86.73%	74,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		86,98 %		117,54%		85,86 %		112,97 %				
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	79,50 %	82.65%	78,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		40,10 %		51,42%		81,82 %		102,92 %				
		1.1.1.02.06.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi			17 lembaga	3,984,048	0	686,474	0	396,612	0	0	0	0	0	1,083,087	0.00%	27.19%				Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.06.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi			134 lembaga	491,556	38	62,503	21	95,697	0	0	0	0	59	158,200	44.03%	32.18%				Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.06.0003	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan			45 kali	4,212,396	12	784,432	7	722,508	0	0	0	0	18	1,506,940	40.00%	35.77%				Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.06.0004	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan			9216 orang	3,599,980	3221	0	1984	0	0	0	0	0	5205	0	56.48%	0.00%				RSUD Bhakti Dharma Husada			
		1.1.1.02.06.0005	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik			2887 orang	2,676,776	651	5,060	412	10,120	0	0	0	0	1063	15,180	36.82%	0.57%				RSUD Bhakti Dharma Husada			
		1.1.1.02.06.0006	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan			96 kali	17,363,103	42	0	36	0	0	0	0	0	78	0	81.25%	0.00%				RSUD Bhakti Dharma Husada			
		1.1.1.02.06.0007	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan			134 kali	992,947	19	0	34	0	0	0	0	0	53	0	39.55%	0.00%				RSUD Bhakti Dharma Husada			
		1.1.1.02.06.0008	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan			26000 orang	6,911,686	7151	0	5465	0	0	0	0	0	12616	0	48.52%	0.00%				RSUD Dr. Mohamad Soewandhie			
		1.1.1.02.06.0009	Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan			115 kali	414,208	41	0	16	0	0	0	0	0	57	0	49.57%	0.00%				RSUD Dr. Mohamad Soewandhie			
		1.1.1.02.06.0010	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan			4 jenis	642,600	1	89,575	0	140,204	0	0	0	0	1	229,779	25.00%	35.76%				RSUD Dr. Mohamad Soewandhie			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%										
		1.1.1.02.06.0011	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja			200 orang	24,127,234	88	0	51	0	0	0	0	0	139	0	69.50%	0.00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie				
		1.1.1.02.06.0017	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan			5 dokumen	240,649	0	3,575	1	34,486	0	0	0	0	1	38,061	20.00%	15.82%			Dinas Kesehatan				
		1.1.1.02.06.0019	Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan)	Jumlah kegiatan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan) yang dilaksanakan			1 kali	360,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada				
		1.1.1.02.07	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit			910,265,321		159,774,700		109,724,583		1,580		630,865		0,00		0,00		632,445		0,58%		160,407,145	17,62%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	85,00 %		96.08%		82,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		96,08 %		117,17%		69,16 %	81,37 %					
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90,00 %		103.68%		90,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		103,68 %		115,20%		98,95 %	109,94 %					
				Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	3,00 hari		5.00 hari		5,00 hari	0,00 hari		0,00 hari	0,00 hari		0,00 hari		5,00 hari		100,00%		5,00 %	166,67 %					
				Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	40,00 menit		52.50 menit		43,00 menit	0,00 menit		0,00 menit	0,00 menit		0,00 menit		52,50 menit		77,91%		52,50 %	131,25 %					
				Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	36,00 hari		11.00 hari		45,00 hari	0,00 hari		0,00 hari	0,00 hari		0,00 hari		10,00 hari		177,78%		11,00 %	30,56 %					
		1.1.1.02.07.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhabilitasi			2 bangunan	2,593,988	0	0	2	621,007	0	0	0	0	2	621,007	100.00%	23.94%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.1.1.02.07.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya	Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta peralatannya yang disusun			2 dokumen	2,580,717	0	0	0	9,858	0	0	0	0	0	9,858	0.00%	0.38%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.1.1.02.07.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran			3 jenis	27,976,594	9	1,580	2	0	0	0	0	0	2	1,580	66.67%	0.01%			RSUD Bhakti Dharma Husada				
		1.1.1.02.07.0005	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial			1 jenis	4,925,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			RSUD Bhakti Dharma Husada				
		1.1.1.02.07.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara			3 jenis	16,424,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie				
		1.1.1.02.07.0007	Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan			1 jenis	5,223,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie				
		1.1.1.02.07.0010	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhabilitasi (Tahun Jamak / Multiyears)			1 bangunan	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.1.1.02.08	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit			476,425,200		189,237,057		94,978,677		2,032,292		3,096,888		0,00		0,00		5,129,180		5,40%		194,366,237	40,80%		
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100,00 %		100.00%		100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %	100,00 %					
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100,00 %		100.00%		100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %	100,00 %					
		1.1.1.02.08.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan			2 jenis	29,978,677	2	2,032,292	2	3,096,888	0	0	0	0	2	5,129,180	100.00%	17.11%			RSUD Bhakti Dharma Husada				
		1.1.1.02.08.0002	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan			2 jenis	65,000,000	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	200.00%	0.00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie				
6	Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	1.1.1.02.09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			437,361,497		194,338,270		103,217,946		21,109,937		16,178,405		0,00		0,00		37,288,342		36,13%		231,626,613	52,96%		
				Persentase rumah sehat	80,00 %		86.38%		78,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		86,38 %		110,75%		86,36 %	107,95 %					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13	15=14/6x100%	16		
				Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	85,00 %		84,84%		83,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		120,48%		84,84 %		99,82 %		
				Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	90,00 %		100,00%		86,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		116,28%		100,00 %		111,11 %		
		1.1.1.02.09.0001	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					64 lembaga	33,649,343	65	2,480,347	64	6,002,706	0	0	0	0	65	8,483,053	101.56%	25.21%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0002	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani					600 lokasi	1,206,277	60	111,565	101	236,541	0	0	0	0	161	348,106	26.83%	28.86%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0003	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular					154 lembaga	16,639,330	154	7,743,778	154	2,289,259	0	0	0	0	154	10,033,037	100.00%	60.30%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0004	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular					154 lembaga	3,408,452	155	484,559	154	1,069,954	0	0	0	0	155	1,554,512	100.65%	45.61%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional					64 lembaga	928,542	18	210,632	9	151,433	0	0	0	0	27	362,065	42.19%	38.99%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0006	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga					63 lembaga	3,929,766	63	1,049,320	63	370,909	0	0	0	0	63	1,420,228	100.00%	36.14%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0007	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan					63 lembaga	9,585,203	63	1,228,222	63	2,045,913	0	0	0	0	63	3,274,135	100.00%	34.16%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0008	Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi					63 lembaga	1,386,402	63	100,371	63	94,211	0	0	0	0	63	194,582	100.00%	14.04%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0009	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat					82 lembaga	26,963,405	63	7,701,144	63	3,917,479	0	0	0	0	63	11,618,623	76.83%	43.09%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.09.0010	Penyediaan Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan					6 item	5,521,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Kesehatan	
		1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
7	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	1.1.1.03.01	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota			3,815,252,120		835,937,347		427,089,552		17,010,846		70,107,081		0,00		0,00		87,117,927		20,40%		923,055,274		24,19%	
				Luas genangan (ha)	1,094,00 ha		159,30 ha		1.150,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		200,00%		159,30 %		14,56 %		
				Tinggi genangan (cm)	14,00 cm		2.66 cm		15,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		200,00%		2,66 %		18,98 %		
				Lama genangan (menit)	45,00 menit		9.56 menit		49,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		200,00%		9,56 %		21,25 %		
				Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80,00 %		100.00%		80,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		125,00 %				
		1.1.1.03.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong					20 dokumen	10,912,624	0	63,652	0	134,554	0	0	0	0	0	198,206	0.00%	1.82%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.01.0003	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak					56 unit	28,311,168	5	3,009,168	13	5,903,419	0	0	0	0	18	8,912,587	32.14%	31.48%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.01.0004	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan					21 lokasi	186,159,637	0	1,785,174	0	15,391,392	0	0	0	0	0	17,176,566	0.00%	9.23%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.01.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem					1025 lokasi	160,040,675	538	11,700,747	251	26,423,085	0	0	0	0	789	38,123,832	76.98%	23.82%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.01.0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun					65 dokumen	7,744,183	12	452,105	10	1,281,261	0	0	0	0	22	1,733,366	33.85%	22.38%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.01.0008	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan					2 lokasi	32,616,600	0	0	0	20,973,368	0	0	0	0	0	20,973,368	0.00%	64.30%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.01.0009	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong					2 dokumen	1,304,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
8	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.1.1.03.02	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan			1,889,861,158		549,387,449		575,047,898		6,205,451		56,353,948		0,00		0,00		62,559,399		10,88%		611,946,848		32,38%	
				Persentase jalan yang terbangun (%)	0,71 %		0.65%		0,48 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		0,65 %		91,42 %		
				Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	34,36 %		17.27%		22,91 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		17,27 %		50,26 %		
				Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	15,48 %		7.58%		10,32 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		7,58 %		73,46%		10,46 %		67,56 %		
				Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80,00 %		96.88%		80,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		96,88 %		121,09 %		
		1.1.1.03.02.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan					12 dokumen	13,058,730	0	70,590	0	132,331	0	0	0	0	0	202,921	0.00%	1.55%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak					200 unit	16,077,287	33	2,378,324	34	4,327,616	0	0	0	0	67	6,705,940	33.50%	41.71%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)					1 lokasi	10,025,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun					21 lokasi	256,023,227	0	269,759	0	27,627,579	0	0	0	0	0	27,897,338	0.00%	10.90%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi					1222 lokasi	39,530,682	4830	2,829,135	897	11,007,526	0	0	0	0	1795	13,836,661	146.89%	35.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun					55 dokumen	7,792,248	11	657,643	8	800,642	0	0	0	0	19	1,458,284	34.55%	18.71%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0007	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)	Jumlah lokasi Jalan yang dibangun					2 lokasi	212,641,000	0	0	0	12,458,255	0	0	0	0	0	12,458,255	0.00%	5.86%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0008	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)					2 dokumen	6,379,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0009	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun					1 lokasi	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.02.0010	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun					1 dokumen	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
9	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	1.1.1.03.03	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan			16,573,760		7,581,459		354,078		0		0		0,00		0,00		0		0,00%		7,581,459		45,74%	
				Persentase pelanggan baru PDAM (%)	16,59 %		7.66%		15,07 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		7,66 %		50,86%		7,66 %		46,20 %		
		1.1.1.03.03.0001	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum					2 dokumen	354,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
10	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU			1,129,650,703		448,259,011		239,634,078		28,470,477		46,079,166		0,00		0,00		74,549,643		31,11%		522,808,654		46,28%	
				Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2,780,250,0 0 m		2,902,320,0 0 m		2,660,250,0 0 m		0,00 m		0,00 m		0,00 m		0,00 m		3,063,480,0 0 m		115,16%		2,902,320,0 0 %		104,39 %		
				Persentase pemasangan PJU hemat energi	85,90 %		146.92%		79.81 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		146,92 %		184,09%		146,92 %		171,04 %		
		1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang					4800 titik	115,766,411	0	70,267	136	15,931,192	0	0	0	0	136	16,001,459	2.83%	13.82%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13	15=14/6x100%				16					
		1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan			6674 rekening	111,320,330	19738	27,823,329	19903	27,918,275	0	0	0	0	39641	55,741,604	593.96%	50.07%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara			73680 titik	12,547,336	239271	576,880	239271	2,229,699	0	0	0	0	478542	2,806,580	649.49%	22.37%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
11	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	1.1.1.03.05	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota			3,691,812		1,853,745		2,561,297		242,536		430,795		0,00		673,330		26,29%		2,527,076		68,45%			
				Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %				
		1.1.1.03.05.0001	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan			10 izin	1,393,602	7	142,639	3	182,455	0	0	0	0	10	325,094	100.00%	23.33%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			
		1.1.1.03.05.0002	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan			240 rekomendasi	1,167,695	60	99,896	50	248,340	0	0	0	0	110	348,236	45.83%	29.82%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			
12	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	1.1.1.03.06	Program Perencanaan Ruang Kota			37,561,991		12,679,577		8,245,314		912,541		2,022,621		0,00		2,935,162		35,60%		15,614,739		41,57%			
				Persentase rencana induk sektoral yang disusun	100,00 %		71.43%		85,71 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		71,43 %		83,34%		71,43 %		71,43 %				
				Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	73,33 %		60.00%		60,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		60,00 %		100,00%		60,00 %		81,82 %				
		1.1.1.03.06.0002	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan			3 dokumen	1,355,782	2	193,751	3	422,348	0	0	0	0	5	616,099	166.67%	45.44%				Badan Perencanaan Pembangunan			
		1.1.1.03.06.0003	Pendukung Perencanaan Rinci Ruang Kota	Jumlah dokumen perencanaan rinci ruang kota yang disusun			1 dokumen	5,283,703	0	579,778	0	1,094,617	0	0	0	0	1	1,674,395	100.00%	31.69%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.03.06.0004	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase			2 dokumen	1,605,828	0	139,012	0	505,656	0	0	0	0	0	644,668	0.00%	40.15%				Badan Perencanaan Pembangunan			
		1.1.1.03.07	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota			40,680,937		17,754,923		25,244,416		2,717,097		7,243,447		0,00		9,960,545		39,46%		27,715,467		68,13%			
				Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60,79 %		55.96%		56,93 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		56,59 %		99,41%		55,96 %		92,05 %				
				Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		119,20 %		119,20 %				
		1.1.1.03.07.0001	Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah arsip yang dipelihara			5 jenis	493,839	0	10,395	0	232,286	0	0	0	0	0	242,681	0.00%	49.14%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.03.07.0002	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan			6000 bangunan	1,632,126	1694	212,848	1156	424,098	0	0	0	0	2850	636,946	47.50%	39.03%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.03.07.0004	Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan			240 lokasi	1,456,869	111	148,128	156	254,440	0	0	0	0	257	402,568	107.08%	27.63%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13				15=14/6x100%				16		
		1.1.1.03.07.0005	Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah berkas pemanfaatan rencana ruang kota yang dilayani			7334 berkas	4,137,683	2037	475,439	1166	1,464,562	0	0	0	0	3203	1,940,001	43.67%	46.89%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.03.07.0006	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUIJK)	Jumlah Ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan			500 Ijin	216,456	319	0	156	174,339	0	0	0	0	163	174,339	32.60%	80.54%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.03.07.0007	Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun			9 dokumen	1,401,584	0	210,489	0	403,876	0	0	0	0	0	614,364	0.00%	43.83%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.03.07.0010	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan			12677 persil	12,074,335	3327	1,610,612	2150	4,123,183	0	0	0	0	5477	5,733,796	43.20%	47.49%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.03.07.0011	Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun			5 dokumen	3,831,524	0	49,187	0	166,664	0	0	0	0	0	215,850	0.00%	5.63%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
13	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,146,266,129		760,222,067		526,547,279		14,461,417		80,983,313		0,00		0,00		95,444,730		18,13%		855,666,797	39,87%		
				Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	100,00 %		91.06%		60,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		78,37 %		78,37 %		
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58,00 %		22.33%		35,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		-182,91 %		-522,61%		22,33 %			38,50 %			
				Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	73,80 %		62.65%		61,50 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		87,55 %		142,36%		62,65 %			84,89 %			
				Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	100,00 %		93.73%		72,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		81,76 %		113,56%		93,73 %			93,73 %			
		1.1.1.04.01.0001	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun			4 Lokasi	2,799,027	0	42,120	0	92,196	0	0	0	0	0	134,315	0.00%	4.80%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.01.0002	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun / direhabilitasi			12 bangunan	87,847,687	0	115,017	1	16,040,641	0	0	0	0	1	16,155,658	8.33%	18.39%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.01.0003	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan			1323 lokasi	329,059,899	31	4,521,834	96	38,171,075	0	0	0	0	122	42,692,908	9.22%	12.97%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun			178 dokumen	10,481,051	4	445,142	69	4,101,802	0	0	0	0	73	4,546,945	41.01%	43.38%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.01.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			3 dokumen	1,115,686	0	614	0	116,647	0	0	0	0	0	117,261	0.00%	10.51%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%										
		1.1.1.04.01.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun			10 dokumen	1,571,309	0	13,132	1	138,861	0	0	0	0	1	151,993	10.00%	9.67%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.1.1.04.01.0007	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola			3967 lokasi	15,628,997	3967	2,236,080	3967	3,807,439	0	0	0	0	3967	6,043,518	100.00%	38.67%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
		1.1.1.04.01.0009	Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola			91 blok	9,669,231	273	1,602,179	273	2,215,850	0	0	0	0	546	3,818,029	600.00%	39.49%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
		1.1.1.04.01.0010	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki			1000 unit	36,484,865	138	2,351,005	391	10,165,720	0	0	0	0	529	12,516,725	52.90%	34.31%			Dinas Sosial				
		1.1.1.04.01.0011	Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi perbaikan / pemeliharaan rusun dan paving			100 Lokasi	28,317,765	90	3,106,813	76	5,679,216	0	0	0	0	165	8,786,029	165.00%	31.03%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.1.1.04.01.0012	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban			1000 lokasi	3,571,763	0	27,482	48	453,866	0	0	0	0	48	481,348	4.80%	13.48%			Dinas Lingkungan Hidup				
		1.1.1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																								
14	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	1.1.1.05.01	Program Penegakan Peraturan Daerah		202,165,482	89,391,583	52,860,838	6,779,652	12,353,444	0,00		0,00	19,133,096		36,20%	108,524,679	53,68%										
				Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	99,65 %	99,65%	99,99 %	99,99 %											
				Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	100,00 %	100,00%	99,99 %	99,99 %											
				Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	100,00 %	100,00%	99,99 %	99,99 %											
				Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %	232,26 %	232,26%	100,00 %	100,00 %											
		1.1.1.05.01.0001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			288 kali	400,073	72	17,106	48	82,068	0	0	0	0	120	99,175	41.67%	24.79%			Kec. Asemrowo				
		1.1.1.05.01.0002	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			336 kali	524,529	84	54,872	56	103,876	0	0	0	0	140	158,748	41.67%	30.26%			Kec. Benowo				
		1.1.1.05.01.0003	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	543,125	90	48,300	61	107,507	0	0	0	0	151	155,807	41.94%	28.69%			Kec. Bubutan				
		1.1.1.05.01.0004	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	616,102	90	28,890	91	134,490	0	0	0	0	181	163,380	50.28%	26.52%			Kec. Bulak				
		1.1.1.05.01.0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	418,461	88	37,171	60	100,012	0	0	0	0	148	137,183	41.11%	32.78%			Kec. Dukuh Pakis				
		1.1.1.05.01.0006	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			300 kali	473,958	75	42,150	50	86,497	0	0	0	0	125	128,647	41.67%	27.14%			Kec. Gayungan				
		1.1.1.05.01.0007	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			348 kali	593,935	87	41,986	58	118,372	0	0	0	0	145	160,357	41.67%	27.00%			Kec. Genteng				
		1.1.1.05.01.0008	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	421,072	88	41,892	60	75,755	0	0	0	0	148	117,647	41.11%	27.94%			Kec. Gubeng				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16												
		1.1.1.05.01.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			420 kali	383,522	90	26,399	61	74,861	0	0	0	0	151	101,260	35.95%	26.40%				Kec. Gunung Anyar			
		1.1.1.05.01.0010	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	540,985	90	58,839	61	118,164	0	0	0	0	151	177,003	41.94%	32.72%				Kec. Jambangan			
		1.1.1.05.01.0011	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			312 kali	550,916	78	46,408	52	111,264	0	0	0	0	130	157,672	41.67%	28.62%				Kec. Karangpilang			
		1.1.1.05.01.0012	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			264 kali	568,094	66	38,132	66	110,311	0	0	0	0	132	148,443	50.00%	26.13%				Kec. Kenjeran			
		1.1.1.05.01.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	476,232	90	36,275	60	88,101	0	0	0	0	150	124,376	41.67%	26.12%				Kec. Krembangan			
		1.1.1.05.01.0014	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	597,555	90	85,305	60	111,823	0	0	0	0	150	197,128	41.67%	32.99%				Kec. Lakarsantri			
		1.1.1.05.01.0015	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			408 kali	554,254	90	41,835	61	112,841	0	0	0	0	151	154,676	37.01%	27.91%				Kec. Mulyorejo			
		1.1.1.05.01.0016	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	349,584	89	22,718	61	72,013	0	0	0	0	150	94,730	41.67%	27.10%				Kec. Pabean Cantian			
		1.1.1.05.01.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	499,645	90	53,458	60	105,229	0	0	0	0	150	158,687	41.67%	31.76%				Kec. Pakal			
		1.1.1.05.01.0018	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			336 kali	584,115	84	42,138	56	131,865	0	0	0	0	140	174,003	41.67%	29.79%				Kec. Rungkut			
		1.1.1.05.01.0019	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			312 kali	549,976	78	41,237	52	106,926	0	0	0	0	130	148,163	41.67%	26.94%				Kec. Sambikerep			
		1.1.1.05.01.0020	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	560,294	90	51,373	60	130,651	0	0	0	0	150	182,023	41.67%	32.49%				Kec. Sawahan			
		1.1.1.05.01.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			312 kali	541,510	89	34,017	61	116,066	0	0	0	0	150	150,083	48.08%	27.72%				Kec. Semampir			
		1.1.1.05.01.0022	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			312 kali	560,978	78	43,139	52	109,800	0	0	0	0	130	152,939	41.67%	27.26%				Kec. Simokerto			
		1.1.1.05.01.0023	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			408 kali	653,481	102	69,968	68	140,388	0	0	0	0	170	210,356	41.67%	32.19%				Kec. Sukolilo			
		1.1.1.05.01.0024	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	712,303	90	43,819	61	129,854	0	0	0	0	151	173,673	41.94%	24.38%				Kec. Sukomanunggal			
		1.1.1.05.01.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	627,779	89	51,876	61	120,830	0	0	0	0	150	172,706	41.67%	27.51%				Kec. Tambaksari			
		1.1.1.05.01.0026	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			312 kali	552,549	78	52,127	52	104,925	0	0	0	0	130	157,052	41.67%	28.42%				Kec. Tandes			
		1.1.1.05.01.0027	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			264 kali	573,086	66	42,161	44	114,328	0	0	0	0	110	156,488	41.67%	27.31%				Kec. Tegalsari			
		1.1.1.05.01.0028	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	527,099	90	37,677	90	98,629	0	0	0	0	180	136,306	50.00%	25.86%				Kec. Tenggilis Mejoyo			
		1.1.1.05.01.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	405,011	87	33,515	61	76,924	0	0	0	0	148	110,439	41.11%	27.27%				Kec. Wiyung			
		1.1.1.05.01.0030	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			312 kali	586,055	78	37,955	52	116,285	0	0	0	0	130	154,240	41.67%	26.32%				Kec. Wonocolo			
		1.1.1.05.01.0031	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	883,956	89	46,387	62	160,544	0	0	0	0	151	206,931	41.94%	23.41%				Kec. Wonokromo			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%										
		1.1.1.05.01.0032	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I			480 kali	2,460,042	122	156,253	114	398,937	0	0	0	0	236	555,190	49.17%	22.57%			Satuan Polisi Pamong Praja				
		1.1.1.05.01.0033	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II			192 Kali	813,508	48	102,998	32	158,675	0	0	0	0	80	261,674	41.67%	32.17%			Satuan Polisi Pamong Praja				
		1.1.1.05.01.0034	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III			1368 Kali	4,799,140	766	576,659	854	862,796	0	0	0	0	1620	1,439,454	118.42%	29.99%			Satuan Polisi Pamong Praja				
		1.1.1.05.01.0035	Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah penindakan pelanggaran Perda			84 Kali	565,647	13	87,258	6	109,653	0	0	0	0	19	196,911	22.62%	34.81%			Satuan Polisi Pamong Praja				
		1.1.1.05.01.0036	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa			228 Kali	1,207,429	1310	77,946	54	296,018	0	0	0	0	109	373,964	47.81%	30.97%			Satuan Polisi Pamong Praja				
		1.1.1.05.01.0037	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah tenaga penanggulangan keamanan kota yang disediakan			620 orang	26,184,841	574	4,429,417	612	7,156,164	0	0	0	0	623	11,585,582	100.48%	44.25%			Satuan Polisi Pamong Praja				
15	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1.1.1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman, Keterliban dan Kenyamanan Lingkungan		178,927,965	76,420,983	62,684,836	9,612,253	13,031,746	0,00	0,00	22,643,999	36,12%	99,064,982	55,37%												
				Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan keterliban umum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
				Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
		1.1.1.05.02.0001	Orientasi Kewaspadaan Nasional	Jumlah Kegiatan Orientasi Kewaspadaan Nasional			16 Kali	613,385	4	87,877	3	82,188	0	0	0	0	7	170,066	43.75%	27.73%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				
		1.1.1.05.02.0002	Pemantauan dan Pengendalian Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota			70 kali	601,999	9	77,839	37	99,387	0	0	0	0	46	177,226	65.71%	29.44%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				
		1.1.1.05.02.0003	Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota			194 kali	4,231,465	63	583,595	50	622,003	0	0	0	0	113	1,205,598	58.25%	28.49%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				
		1.1.1.05.02.0004	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama			30 kali	1,143,435	10	119,143	0	47,563	0	0	0	0	10	166,706	33.33%	14.58%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				
		1.1.1.05.02.0005	Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat			737 orang	39,643,887	728	5,774,028	790	9,012,614	0	0	0	0	839	14,786,643	113.84%	37.30%			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat				
		1.1.1.05.02.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan			102 kali	15,184,392	22	2,932,202	30	3,044,902	0	0	0	0	52	5,977,105	50.98%	39.36%			Dinas Sosial				
		1.1.1.05.02.0007	Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat			81 kali	810,983	258	37,568	36	99,052	0	0	0	0	54	136,620	66.67%	16.85%			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat				
		1.1.1.05.02.0008	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat			100 orang	455,291	0	0	0	24,036	0	0	0	0	0	24,036	0.00%	5.28%			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat				
16	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.	1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana		265,512,930	177,188,283	127,170,704	7,459,989	14,455,072	0,00	0,00	21,915,061	17,23%	199,103,344	74,99%												
				Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	52,00 kejadian	51.38 kejadian	53,00 kejadian	0,00 kejadian	0,00 kejadian	0,00 kejadian	0,00 kejadian	0,32 kejadian	199,40%	41,68 %	80,16 %												

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13		15=14/6x100%		16
				Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	108,00 kejadian		108,89 kejadian		109,00 kejadian		0,00 kejadian		0,00 kejadian		0,00 kejadian		0,00 kejadian		0,00 kejadian		200,00%		190,97 %		176,82 %		
				Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	99,00 %		100.00%		97,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		103,09%		100,00 %		101,01 %		
				Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,00 %		
				Persentase kelurahan tangguh bencana	100,00 %		40.91%		68,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		79,22 %		116,50%		40,91 %		40,91 %		
		1.1.1.05.03.0002	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana					2100 orang	1,741,907	552	211,334	532	272,681	0	0	0	0	1084	484,015	51.62%	27.79%					Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana					100%	1,959,735	100	95,759	100	297,956	0	0	0	0	100	393,714	100.00%	20.09%					Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0004	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan					25 jenis	2,002,591	0	0	2	192,256	0	0	0	0	2	192,256	8.00%	9.60%					Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0005	Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah					4 Kegiatan	2,204,344	1	317,786	1	498,283	0	0	0	0	2	816,069	50.00%	37.02%					Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0006	Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana					515 orang	799,266	86	76,086	289	134,419	0	0	0	0	375	210,505	72.82%	26.34%					Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0007	Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam Penanggulangan Bencana					4 Kegiatan	710,022	2	75,548	1	82,749	0	0	0	0	3	158,297	75.00%	22.29%					Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0008	Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya					832 orang	30,794,669	0	4,820,586	0	7,413,303	0	0	0	0	0	12,233,889	0.00%	39.73%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0009	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara					210 unit	4,480,855	65	853,214	26	766,832	0	0	0	0	91	1,620,046	43.33%	36.15%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0010	Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun					567 unit	70,024,331	43	323,471	152	2,157,801	0	0	0	0	195	2,481,272	34.39%	3.54%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0011	Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan					700 bangunan	5,900,667	25	86,298	13	924,560	0	0	0	0	38	1,010,858	5.43%	17.13%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0012	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran					199 kali	2,829,632	39	512,211	29	216,759	0	0	0	0	68	728,970	34.17%	25.76%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0013	Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah pelatihan pengendalian pemadaman kebakaran					48 kali	1,040,953	30	45,902	10	219,277	0	0	0	0	40	265,178	83.33%	25.47%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.03.0014	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhabilitasi					6 bangunan	2,444,629	0	41,794	0	1,266,888	0	0	0	0	0	1,308,682	0.00%	53.53%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.05.03.0015	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun					4 dokumen	237,103	0	0	1	11,309	0	0	0	0	1	11,309	25.00%	4.77%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.06	Sosial																								
17	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	1.1.1.06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			1,142,659,571		344,196,545		213,093,786		48,494,601		43,856,638		0,00		0,00		92,351,238		43,34%		436,547,783		38,20%	
				Persentase PMKS yang ditangani	60,00 %		62.10%		60,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,26 %		0,43%		62,10 %		103,50 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						K		Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13	15=14/6x100%	16									
		1.1.1.06.01.0002	Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi anak	Jumlah anak yang mendapat bantuan pemakanan			6000 orang	28,886,424	5635	7,960,629	5471	6,225,266	0	0	0	0	5871	14,185,896	97.85%	49.11%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0003	Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan pemakanan			20000 orang	93,668,972	17961	26,588,756	18131	21,168,419	0	0	0	0	19569	47,757,175	97.85%	50.99%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0004	Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang mendapat bantuan pemakanan			9414 orang	44,833,891	6022	8,946,632	6261	7,563,785	0	0	0	0	6261	16,510,417	66.51%	36.83%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0005	Pembinaan dan pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan PMKS			1235 orang	1,485,902	157	77,774	322	188,856	0	0	0	0	479	266,630	38.79%	17.94%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0006	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS			154 Kelurahan	1,695,453	0	66,608	0	523,468	0	0	0	0	0	590,076	0.00%	34.80%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri			45 orang	2,351,034	35	348,642	41	610,590	0	0	0	0	41	959,232	91.11%	40.80%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan			85 orang	2,655,990	65	335,666	68	702,980	0	0	0	0	68	1,038,646	80.00%	39.11%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat			95 orang	1,624,632	95	218,791	95	309,560	0	0	0	0	95	528,350	100.00%	32.52%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0010	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha			150 orang	6,118,102	150	613,974	150	1,240,989	0	0	0	0	154	1,854,962	102.67%	30.32%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0011	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih			1150 orang	19,824,541	1209	2,701,167	1063	3,571,135	0	0	0	0	1389	6,272,301	120.78%	31.64%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0012	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	148,330	12	4,744	8	34,102	0	0	0	0	20	38,846	41.67%	26.19%			Kec. Asemrowo			
		1.1.1.06.01.0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	142,735	12	3,963	8	38,707	0	0	0	0	20	42,670	41.67%	29.89%			Kec. Benowo			
		1.1.1.06.01.0016	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	219,937	15	11,670	10	46,263	0	0	0	0	25	57,932	52.08%	26.34%			Kec. Bubutan			
		1.1.1.06.01.0018	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	184,174	11	9,840	21	34,988	0	0	0	0	32	44,827	66.67%	24.34%			Kec. Bulak			
		1.1.1.06.01.0020	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	172,652	0	1,517	24	14,894	0	0	0	0	24	16,411	50.00%	9.51%			Kec. Dukuh Pakis			
		1.1.1.06.01.0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	157,779	16	2,273	0	27,041	0	0	0	0	16	29,314	33.33%	18.58%			Kec. Gayungan			
		1.1.1.06.01.0024	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	159,467	39	2,222	6	30,482	0	0	0	0	45	32,704	93.75%	20.51%			Kec. Genteng			
		1.1.1.06.01.0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	74,792	19	1,794	24	15,595	0	0	0	0	32	17,388	66.67%	23.25%			Kec. Gubeng			
		1.1.1.06.01.0028	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	147,890	16	1,966	8	29,245	0	0	0	0	24	31,211	50.00%	21.10%			Kec. Gunung Anyar			
		1.1.1.06.01.0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	147,277	3	4,756	9	22,810	0	0	0	0	12	27,566	25.00%	18.72%			Kec. Jambangan			
		1.1.1.06.01.0032	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	154,651	1	1,048	9	34,575	0	0	0	0	10	35,623	20.83%	23.03%			Kec. Karangpilang			
		1.1.1.06.01.0034	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	160,327	8	964	16	23,703	0	0	0	0	24	24,666	50.00%	15.38%			Kec. Kenjeran			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14=7+13				15=14/6x100%				16			
		1.1.1.06.01.0036	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	168,175	12	2,577	10	34,011	0	0	0	0	22	36,588	45.83%	21.76%			Kec. Krembangan				
		1.1.1.06.01.0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	211,458	8	3,314	10	42,192	0	0	0	0	18	45,506	37.50%	21.52%			Kec. Lakarsantri				
		1.1.1.06.01.0040	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	177,863	8	3,105	16	40,195	0	0	0	0	24	43,300	50.00%	24.34%			Kec. Mulyorejo				
		1.1.1.06.01.0042	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	198,600	20	10,050	8	40,568	0	0	0	0	28	50,618	58.33%	25.49%			Kec. Pabean Cantian				
		1.1.1.06.01.0044	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	160,165	12	1,475	0	34,688	0	0	0	0	12	36,163	25.00%	22.58%			Kec. Pakal				
		1.1.1.06.01.0046	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	201,987	16	8,148	0	38,756	0	0	0	0	16	46,904	33.33%	23.22%			Kec. Rungkut				
		1.1.1.06.01.0048	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	158,695	12	2,021	8	31,471	0	0	0	0	20	33,491	41.67%	21.10%			Kec. Sambikerep				
		1.1.1.06.01.0050	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	198,421	7	532	0	18,993	0	0	0	0	7	19,524	14.58%	9.84%			Kec. Sawahan				
		1.1.1.06.01.0052	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	151,489	15	1,395	10	32,071	0	0	0	0	25	33,466	52.08%	22.09%			Kec. Semampir				
		1.1.1.06.01.0054	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	140,743	17	2,605	15	33,121	0	0	0	0	32	35,726	66.67%	25.38%			Kec. Simokerto				
		1.1.1.06.01.0056	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	225,343	12	3,164	8	42,186	0	0	0	0	20	45,350	41.67%	20.12%			Kec. Sukotilo				
		1.1.1.06.01.0058	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	173,075	12	2,700	12	30,821	0	0	0	0	24	33,521	50.00%	19.37%			Kec. Sukomanunggal				
		1.1.1.06.01.0060	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	218,232	0	0	24	48,219	0	0	0	0	24	48,219	50.00%	22.10%			Kec. Tambaksari				
		1.1.1.06.01.0062	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	225,561	12	8,295	8	43,608	0	0	0	0	20	51,903	41.67%	23.01%			Kec. Tandes				
		1.1.1.06.01.0064	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	63,064	12	1,687	12	14,065	0	0	0	0	24	15,752	50.00%	24.98%			Kec. Tegalsari				
		1.1.1.06.01.0066	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	182,596	8	4,870	21	30,526	0	0	0	0	29	35,396	60.42%	19.39%			Kec. Tenggilis Mejoyo				
		1.1.1.06.01.0068	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	172,754	12	8,328	4	32,188	0	0	0	0	16	40,516	33.33%	23.45%			Kec. Wiyung				
		1.1.1.06.01.0070	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	203,780	12	4,960	12	35,393	0	0	0	0	24	40,353	50.00%	19.80%			Kec. Wonocolo				
		1.1.1.06.01.0072	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat			48 Kali	243,183	214	9,342	12	49,525	0	0	0	0	24	58,867	50.00%	24.21%			Kec. Wonokromo				
		1.1.1.06.01.0074	Penyelenggaraan layanan ambulance gratis	Jumlah kegiatan layanan ambulance gratis yang diselenggarakan			4416 kali	2,839,731	1540	421,970	919	563,754	0	0	0	0	2459	985,725	55.68%	34.71%			Dinas Sosial				
		1.1.1.06.01.0077	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan			17 lembaga	215,759	0	0	0	16,783	0	0	0	0	0	16,783	0.00%	7.78%			Dinas Sosial				
		1.1.1.06.01.0078	Fasilitasi pemakaman	Jumlah orang yang mendapat fasilitas pemakaman			960 orang	941,097	63	43,641	0	14,630	0	0	0	0	63	58,271	6.56%	6.19%			Dinas Sosial				
		1.1.1.06.01.0079	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi			4 kali	607,062	0	45,030	0	131,423	0	0	0	0	0	176,452	0.00%	29.07%			Dinas Sosial				
		1.1.1.06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			32,670,064		3,809,900		2,722,431		217,237		323,582		0,00		0,00		540,819		19,87%		4,350,719	13,32%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11		12		13			14=7+13	15=14/6x100%	16				
				Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	65,00 %		58.36%		55,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		29,30 %		53.28%		58,36 %		89,79 %			
		1.1.1.06.01	Koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan					24 kali	1,064,061	6	88,775	6	66,247	0	0	0	0	12	155,022	50.00%	14.57%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.02	Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia					34 kali	725,854	9	83,802	6	203,176	0	0	0	0	15	286,978	44.12%	39.54%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.03	Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan					1038 orang	932,515	408	44,660	368	54,159	0	0	0	0	776	98,819	74.76%	10.60%			Dinas Sosial		
		1.01.02	Non Pelayanan Dasar																								
		1.1.2.01	Tenaga Kerja																								
18	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			35,021,611		7,813,232		4,361,985		650,932		782,538		0,00		0,00		1,433,470		32,86%		9,246,703		26,40%	
				Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,00 %		5.04%		5,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		-57,16 %		-1.143,28%		5,04 %		100,72 %			
				Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15,00 %		35.19%		15,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		6,03 %		40,20%		35,19 %		234,57 %			
		1.1.2.01.01	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda					400 Orang	1,301,515	200	154,474	100	225,619	0	0	0	0	300	380,094	75.00%	29.20%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.01.01	Bimtek Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja					1050 orang	347,801	105	57,632	210	55,953	0	0	0	0	315	113,585	30.00%	32.66%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.01	Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri					250 orang	106,200	200	35,652	50	19,520	0	0	0	0	250	55,172	100.00%	51.95%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.01	Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja					150 orang	546,954	85	98,952	65	114,608	0	0	0	0	150	213,560	100.00%	39.05%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.01	Bimtek Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek					60 lembaga	145,006	0	0	0	16,733	0	0	0	0	0	16,733	0.00%	11.54%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.01	Bimtek Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang mengikuti bimtek					120 lembaga	103,388	0	0	55	17,480	0	0	0	0	55	17,480	45.83%	16.91%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.01	Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan					7 kali	1,177,719	110	130,241	2	294,045	0	0	0	0	2	424,285	28.57%	36.03%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.01	Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja					1000 orang	492,330	469	173,981	0	28,537	0	0	0	0	469	202,518	46.90%	41.13%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.01	Bimtek Persiapan Usaha Mandiri Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha					100 orang	141,072	0	0	0	10,044	0	0	0	0	0	10,044	0.00%	7.12%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas			91,289,389	26,563,503		14,967,525		1,468,102		3,585,797		0,00		0,00		5,053,899		33,77%		31,617,402		34,63%		
				Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	70,00 %		81.72%		66,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		84,63 %		128,22%		81,72 %		116,74 %			
				Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	85,00 %		100.00%		81,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		99,69 %		123,08%		100,00 %		117,65 %			
		1.1.2.01.02	Pembinaan Peningkatan Produktivitas Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas					200 lembaga	130,085	47	16,697	76	43,976	0	0	0	0	123	60,673	61.50%	46.64%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.02	Fasilitasi Magang Bagi Pencari Kerja Penyandang Cacat	Jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang					20 orang	132,513	12	31,530	8	23,568	0	0	0	0	20	55,098	100.00%	41.58%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.02	Fasilitasi Magang Bagi Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi yang difasilitasi magang					100 orang	257,756	0	0	15	20,012	0	0	0	0	15	20,012	15.00%	7.76%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.02	Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi					2290 orang	6,342,865	517	1,295,625	485	1,391,959	0	0	0	0	1002	2,687,583	43.76%	42.37%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.02	Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun					1 dokumen	131,802	0	0	0	7,957	0	0	0	0	0	7,957	0.00%	6.04%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.02	Bimtek Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mengikuti bimtek					50 lembaga	98,312	0	0	0	13,938	0	0	0	0	0	13,938	0.00%	14.18%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.02	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja					1136 orang	7,874,192	72	124,250	375	2,084,388	0	0	0	0	447	2,208,638	39.35%	28.05%				Dinas Tenaga Kerja	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
19	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			16,292,034		5,426,457		2,575,740		420,328		478,797		0,00		0,00		899,126		34,91%		6,325,583	38,83%		
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama		7,76 %		7,77%		7,26 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		7,77 %		107,01%		7,77 %		100,11 %	
		1.1.2.01.03.0001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					110 Kasus	357,264	34	46,020	24	58,469	0	0	0	0	58	104,489	52.73%	29.25%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.03.0002	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja					250 lembaga	394,850	83	95,956	0	95,203	0	0	0	0	83	191,158	33.20%	48.41%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.03.0003	Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah pelaksanaan koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit					12 kali	613,892	3	83,214	2	119,892	0	0	0	0	5	203,106	41.67%	33.08%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.03.0004	Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun					1 dokumen	1,014,824	3	172,088	0	164,387	0	0	0	0	1	336,475	100.00%	33.16%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.03.0005	Bimtek Hubungan Industrial Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh yang mengikuti bimtek hubungan industrial					300 orang	194,909	64	23,050	75	40,848	0	0	0	0	139	63,897	46.33%	32.78%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan			8,343,254		1,242,059		341,704		24,805		66,462		0,00		0,00		91,267		26,71%		1,333,326	15,98%		
				Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3		83,00 %		52.33%		61,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		52,33 %		85,79%		52,33 %		63,05 %	
		1.1.2.01.04.0001	Bimtek Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma ketenagakerjaan					500 lembaga	107,241	72	9,480	46	19,720	0	0	0	0	118	29,200	23.60%	27.23%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.04.0002	Bimtek Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					500 lembaga	234,463	70	15,326	58	46,742	0	0	0	0	128	62,067	25.60%	26.47%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																								
20	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	1.1.2.02.01	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan			10,570,239		4,071,040		3,304,838		375,446		429,309		0,00		0,00		804,756		24,35%		4,875,795	46,13%		
				Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi		100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,00 %			
		1.1.2.02.01.0001	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender					147 lembaga	959,833	134	105,828	219	98,973	0	0	0	0	291	204,801	197.96%	21.34%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0002	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan					25 kali	991,727	9	106,620	3	161,888	0	0	0	0	12	268,508	48.00%	27.07%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0005	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan					7 kali	572,357	401	63,090	0	79,184	0	0	0	0	2	142,273	28.57%	24.86%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0007	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun					3 dokumen	376,206	0	21,548	0	21,054	0	0	0	0	0	42,602	0.00%	11.32%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0008	Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat					1000 orang	404,714	510	78,361	0	68,210	0	0	0	0	510	146,571	51.00%	36.22%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	1.1.2.02.02	Program perlindungan perempuan dan anak			39,321,616		19,284,802		16,194,181		1,322,327		2,650,522		0,00		0,00		3,972,848		24,53%		23,257,651	59,15%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11		12		13				14=7+13		15=14/6x100%		16	
				Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00 %		100,00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %				
				Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPZA)	68,10 %		72,70%		66,86 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		72,70 %		106,75 %		
				Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	64,00 %		100,00%		35,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		285,71%		100,00 %		156,25 %		
				Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100,00 %		100,00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		144,29 %		144,29 %		
		1.1.2.02.02.0001	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak yang dilakukan pendampingan dan pembinaan					330 kasus	1,755,101	22	260,712	16	338,074	0	0	0	0	26	598,786	7.88%	34.12%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak					431 lembaga	916,363	258	75,461	23	79,026	0	0	0	0	281	154,486	65.20%	16.86%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1.1.2.02.02.0003	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building					926 orang	532,967	0	63,500	476	98,980	0	0	0	0	476	162,480	51.40%	30.49%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1.1.2.02.02.0004	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan					154 kampung	681,678	0	2,498	0	26,021	0	0	0	0	0	28,519	0.00%	4.18%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1.1.2.02.02.0005	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					16 Kali	256,951	6	18,875	9	61,864	0	0	0	0	15	80,740	93.75%	31.42%				Kec. Asemrowo	
		1.1.2.02.02.0006	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					14 Kali	244,256	9	18,356	6	56,208	0	0	0	0	14	74,564	100.00%	30.53%				Kec. Benowo	
		1.1.2.02.02.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					22 Kali	364,868	11	26,671	4	72,725	0	0	0	0	15	99,396	68.18%	27.24%				Kec. Bubutan	
		1.1.2.02.02.0008	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					32 Kali	325,780	7	29,088	6	62,721	0	0	0	0	13	91,809	40.63%	28.18%				Kec. Bulak	
		1.1.2.02.02.0009	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					20 Kali	274,259	4	13,504	6	48,701	0	0	0	0	10	62,205	50.00%	22.68%				Kec. Dukuh Pakis	
		1.1.2.02.02.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					21 Kali	316,586	5	27,320	4	53,056	0	0	0	0	9	80,376	42.86%	25.39%				Kec. Gayungan	
		1.1.2.02.02.0011	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					23 Kali	295,440	15	22,984	9	53,808	0	0	0	0	24	76,792	104.35%	25.99%				Kec. Genteng	
		1.1.2.02.02.0012	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					22 Kali	383,320	7	34,201	1	63,579	0	0	0	0	8	97,779	36.36%	25.51%				Kec. Gubeng	
		1.1.2.02.02.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					13 Kali	241,593	6	18,040	1	46,425	0	0	0	0	7	64,465	53.85%	26.68%				Kec. Gunung Anyar	
		1.1.2.02.02.0014	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					24 Kali	275,249	8	16,775	11	42,693	0	0	0	0	19	59,468	79.17%	21.61%				Kec. Jambangan	
		1.1.2.02.02.0015	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					21 Kali	293,413	4	12,162	3	51,412	0	0	0	0	7	63,574	33.33%	21.67%				Kec. Karangpilang	
		1.1.2.02.02.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					23 Kali	297,848	5	13,412	17	51,684	0	0	0	0	22	65,096	95.65%	21.86%				Kec. Kenjeran	
		1.1.2.02.02.0017	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					23 Kali	410,546	5	25,744	10	69,504	0	0	0	0	15	95,247	65.22%	23.20%				Kec. Krembangan	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%		16								
		1.1.2.02.02.0018	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			19 Kali	392,996	3	35,722	8	72,153	0	0	0	0	11	107,875	57.89%	27.45%			Kec. Lakarsantri				
		1.1.2.02.02.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			16 Kali	296,727	4	18,237	2	62,977	0	0	0	0	6	81,214	37.50%	27.37%			Kec. Mulyorejo				
		1.1.2.02.02.0020	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			20 Kali	385,720	5	25,747	3	59,464	0	0	0	0	8	85,211	40.00%	22.09%			Kec. Pabean Cantian				
		1.1.2.02.02.0021	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			10 Kali	255,067	2	4,405	2	49,727	0	0	0	0	4	54,132	40.00%	21.22%			Kec. Pakal				
		1.1.2.02.02.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			18 Kali	408,149	3	34,302	2	70,730	0	0	0	0	5	105,032	27.78%	25.73%			Kec. Rungkut				
		1.1.2.02.02.0023	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			20 Kali	275,900	3	13,156	2	54,577	0	0	0	0	5	67,733	25.00%	24.55%			Kec. Sambikerep				
		1.1.2.02.02.0024	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			16 Kali	362,933	10	25,744	9	91,277	0	0	0	0	18	117,021	112.50%	32.24%			Kec. Sawahan				
		1.1.2.02.02.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			12 Kali	269,420	2	11,015	2	53,936	0	0	0	0	4	64,951	33.33%	24.11%			Kec. Semampir				
		1.1.2.02.02.0026	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			20 Kali	263,064	6	10,667	3	51,461	0	0	0	0	9	62,129	45.00%	23.62%			Kec. Simokerto				
		1.1.2.02.02.0027	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			20 Kali	389,820	18	41,790	18	89,879	0	0	0	0	32	131,669	160.00%	33.78%			Kec. Sukolilo				
		1.1.2.02.02.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			22 Kali	344,548	6	15,810	12	60,268	0	0	0	0	18	76,077	81.82%	22.08%			Kec. Sukomanunggal				
		1.1.2.02.02.0029	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			22 Kali	433,311	6	35,787	4	55,570	0	0	0	0	10	91,357	45.45%	21.08%			Kec. Tambaksari				
		1.1.2.02.02.0030	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			24 Kali	407,333	6	34,746	4	63,293	0	0	0	0	10	98,039	41.67%	24.07%			Kec. Tandes				
		1.1.2.02.02.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			23 Kali	283,299	4	7,662	3	52,969	0	0	0	0	7	60,631	30.43%	21.40%			Kec. Tegalsari				
		1.1.2.02.02.0032	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			12 Kali	344,373	10	27,987	8	43,282	0	0	0	0	18	71,269	150.00%	20.70%			Kec. Tenggilis Mejoyo				
		1.1.2.02.02.0033	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			25 Kali	285,307	7	11,513	7	50,634	0	0	0	0	14	62,146	56.00%	21.78%			Kec. Wiyung				
		1.1.2.02.02.0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			21 Kali	374,436	8	41,315	3	62,296	0	0	0	0	11	103,611	52.38%	27.67%			Kec. Wonocolo				
		1.1.2.02.02.0035	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			25 Kali	412,778	7	44,023	5	79,694	0	0	0	0	12	123,717	48.00%	29.97%			Kec. Wonokromo				
		1.1.2.02.02.0037	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan			2 lembaga	1,228,795	2	203,397	2	244,854	0	0	0	0	2	448,251	100.00%	36.48%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		1.1.2.02.02.0038	Pengelolaan Tempat Penitipan Anak	Jumlah tempat penitipan anak yang dikelola selama 12 bulan			1 lembaga	913,982	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0.00%	0.55%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		1.1.2.03	Pangan																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
22	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan			33,234,068		11,573,412		7,887,187		435,269		1,052,313		0,00		0,00		1,487,582		18,86%		13,060,994	39,30%		
			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar		85,00 %		89,01%		83,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		120,48%		89,01 %		104,72 %		
			Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan		90,00 %		98,04%		86,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		95,22 %		110,72%		98,04 %		108,93 %		
			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)		96,50		96,76		96,00		0,00		0,00		0,00		0,00		96,76		100,79%		96,80 %		100,31 %		
		1.1.2.03.01.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa					8097 sampel	1,710,904	0	73,456	2056	630,924	0	0	0	0	2056	704,380	25,39%	41,17%				Dinas Kesehatan	
		1.1.2.03.01.0002	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam monitoring bidang ketahanan pangan					222 kali	299,677	54	61,990	55	47,467	0	0	0	0	109	109,457	49,10%	36,53%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0003	Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah pelaksanaan pembinaan keamanan pangan yang beredar					12 kali	223,588	9	27,575	7	21,941	0	0	0	0	16	49,515	133,33%	22,15%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0005	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelompok pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan					253 Kelompok	3,761,556	0	48,018	0	60,866	0	0	0	0	0	108,884	0,00%	2,89%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diawasi					2020 sampel	863,580	570	114,884	586	97,581	0	0	0	0	1156	212,465	57,23%	24,60%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0007	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan					59 kali	806,877	28	109,347	26	141,839	0	0	0	0	54	251,186	91,53%	31,13%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0008	Penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan					3 dokumen	221,004	0	0	0	51,694	0	0	0	0	0	51,694	0,00%	23,39%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.04	Pertanahan																								
23	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum			1,309,485,692		1,257,462,648		529,184,063		226,782,167		58,735,397		0,00		0,00		285,517,565		53,95%		1,542,980,213	117,83%		
			Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum		7,40 Ha		5,18 Ha		4,70 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		7,49 Ha		159,22%		5,18 %		69,92 %		
			Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum		48,05 Ha		24,56 Ha		41,75 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		23,140,48 Ha		55,426,30%		24,56 %		51,12 %		
		1.1.2.04.01.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur					5 lokasi	195,431,813	189	121,157,248	3	54,207,460	0	0	0	0	6	175,364,708	120,00%	89,73%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.2.04.01.0002	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan					6 dokumen	5,306,374	0	554,546	3	805,423	0	0	0	0	3	1,359,969	50,00%	25,63%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2.04.01.0006	Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan					6 lokasi	328,445,876	4	105,070,373	0	3,722,514	0	0	0	0	4	108,792,887	66,67%	33,12%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
24	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	1.1.2.04.02	Program pengamanan aset			43,026,498		40,615,575		17,126,971		1,954,903		2,548,535		0,00		0,00		4,503,439		26,29%		45,119,014	104,86%		
			Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok		21,18 %		16,21%		17,85 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		16,21 %		76,52 %		
			Persentase tanah aset yang tersertifikasi		14,52 %		20,27%		13,22 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		20,27 %		139,61 %		
			Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani		100,00 %		100,00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		
		1.1.2.04.02.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani					12 obyek	1,302,915	3	154,705	2	205,352	0	0	0	0	5	360,057	41,67%	27,63%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan RPJMD tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		1.1.2.04.02.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani			18 obyek	1,387,496	3	124,103	4	244,689	0	0	0	0	7	368,791	38.89%	26.58%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2.04.02.0003	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan			100 bidang	4,894,444	33	591,078	23	795,618	0	0	0	0	56	1,386,697	56.00%	28.33%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2.04.02.0004	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola			47350 berkas	1,211,623	23675	242,393	0	313,373	0	0	0	0	23675	555,766	50.00%	45.87%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2.04.02.0005	Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya			4 kali	1,624,100	1	161,039	0	244,532	0	0	0	0	1	405,571	25.00%	24.97%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2.04.02.0006	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan			75 dokumen	4,895,738	72	511,230	27	326,326	0	0	0	0	91	837,556	121.33%	17.11%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2.04.02.0007	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset Infrastruktur yang diamankan			40 bidang	1,810,655	10	170,356	11	418,645	0	0	0	0	21	589,001	52.50%	32.53%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman			
		1.1.2.04.03	Program pengelolaan aset			94,121,367		30,356,826		21,658,700		3,361,851		4,017,363		0,00		0,00		7,379,214		34,07%		37,736,040		40,09%	
				Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	100,00 %		65.52%		62,62 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		65,52 %		65,52 %				
		1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan			2 dokumen	1,575,920	0	254,106	0	348,553	0	0	0	0	0	602,658	0.00%	38.24%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.2.04.03.0002	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya			7000 izin	1,627,722	2273	569,288	1264	258,523	0	0	0	0	3537	827,811	50.53%	50.86%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.2.04.03.0003	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola			24 lokasi	14,683,708	24	2,404,455	24	2,900,567	0	0	0	0	24	5,305,023	100.00%	36.13%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.2.04.03.0004	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan			8000 lokasi	3,137,956	2384	95,734	1558	453,666	0	0	0	0	3942	549,400	49.28%	17.51%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.2.04.03.0005	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya			4 dokumen	633,394	0	38,268	0	56,054	0	0	0	0	0	94,322	0.00%	14.89%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.2.05	Lingkungan Hidup																								
25	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.1.2.05.01	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau		463,163,482	225,312,661	128,711,756	12,418,523	28,494,992	0,00	0,00	0,00	40,913,515	31,79%	266,226,176	57,48%											
				Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	10,24 %	10.34%	7,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,41 %	76,58%	10,34 %	100,93 %												
				Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	60,73 %	84.39%	50,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	44,21 %	87,10%	84,39 %	138,97 %												
		1.1.2.05.01.0001	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang dipelihara			401 lokasi	34,888,130	401	3,755,031	415	9,233,464	0	0	0	0	415	12,988,495	103.49%	37.23%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.01.0002	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman Rekreasi	Jumlah lokasi taman rekreasi yang dipelihara			35 lokasi	16,894,137	35	2,478,717	35	3,894,127	0	0	0	0	35	6,372,844	100.00%	37.72%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.01.0003	Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang ditata			71 lokasi	27,251,497	0	2,426,679	5	4,219,464	0	0	0	0	5	6,646,144	7.04%	24.39%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.01.0004	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi			15 lokasi	8,417,537	29	1,619,533	24	3,602,846	0	0	0	0	30	5,222,379	200.00%	62.04%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.01.0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara			13 lokasi	11,853,528	13	1,739,133	13	2,852,856	0	0	0	0	13	4,591,989	100.00%	38.74%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.01.0006	Pembangunan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang dibangun			4 lokasi	9,375,283	1	22,744	0	571,512	0	0	0	0	1	594,256	25.00%	6.34%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		1.1.2.05.01.0008	Pemeliharaan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang Dipelihara			12 lokasi	3,371,186	12	365,791	12	806,729	0	0	0	0	12	1,172,520	100.00%	34.78%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		1.1.2.05.01.0009	Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir			12 kali	1,039,068	4	3,094	3	141,923	0	0	0	0	7	145,017	58.33%	13.96%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		1.1.2.05.01.0010	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Makam	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi makam			63 Lokasi	15,621,390	0	7,800	19	3,172,071	0	0	0	0	19	3,179,871	30.16%	20.36%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
26	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	1.1.2.05.02.0008	Program pengelolaan kebersihan		1,834,156,720	692,358,043		404,278,141	52,896,524		87,899,832	0,00	0,00			140,796,356	34,83%		833,154,399		45,42%						
				Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38,46 %	14.81%	23,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	14,81 %	64,19%	14,81 %		38,52 %								
				Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	0,11 %	12.58%	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12,58 %	19.171,89%		12,58 %		11,503,13 %								
				Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	85,95 %	90.37%	83,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	90,37 %		105,15 %								
		1.1.2.05.02.0002	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan			1 lokasi	6,616,649	1	177,407	1	351,310	0	0	0	0	1	528,716	100.00%	7.99%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0003	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian			573 lokasi	91,757,899	645	15,141,193	556	24,153,468	0	0	0	0	645	39,294,661	112.57%	42.82%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0004	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran			300 lokasi	17,745,531	710	2,895,309	452	4,899,995	0	0	0	0	724	7,795,304	241.33%	43.93%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0005	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah			267 lokasi	72,198,333	267	10,550,883	267	17,370,877	0	0	0	0	267	27,921,759	100.00%	38.67%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0006	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan			7906 unit	25,687,038	4	931,142	2632	5,128,502	0	0	0	0	3187	6,059,644	40.31%	23.59%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0007	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar			1 rekening	119,293,629	3	19,947,454	1	28,348,949	0	0	0	0	1	48,296,403	100.00%	40.49%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0008	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola			19 unit	6,188,383	0	275,177	4	905,954	0	0	0	0	4	1,181,131	21.05%	19.09%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0009	Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola			183 lokasi	7,113,252	183	421,456	183	2,022,586	0	0	0	0	183	2,444,042	100.00%	34.36%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0010	Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah lokasi penyediaan sarana dan prasarana air limbah yang disediakan			3 lokasi	1,287,421	2	2,600	0	33,455	0	0	0	0	2	36,055	66.67%	2.80%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0011	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah pelaksanaan peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH			4 kali	1,548,533	1	226,422	1	243,723	0	0	0	0	2	470,145	50.00%	30.36%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0012	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan			104 kali	3,568,903	55	204,885	33	889,357	0	0	0	0	88	1,094,242	84.62%	30.66%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0013	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan			5 kali	3,475,050	2	96,767	1	165,255	0	0	0	0	3	262,022	60.00%	7.54%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2.05.02.0014	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSA/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSA/TPS 3R yang dikelola			33 lokasi	14,497,465	35	1,837,843	34	2,834,632	0	0	0	0	35	4,672,475	106.06%	32.23%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13	15=14/6x100%	16										
		1.1.2.05.02.0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			5 Kali 57,598	1	1,661	0	9,784	0	0	0	0	1	11,445	20.00%	19.87%			Kec. Asemrowo					
		1.1.2.05.02.0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			4 Kali 60,545	1	1,971	0	10,193	0	0	0	0	1	12,163	25.00%	20.09%			Kec. Benowo					
		1.1.2.05.02.0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			10 Kali 71,386	2	6,832	1	10,745	0	0	0	0	3	17,577	30.00%	24.62%			Kec. Bubutan					
		1.1.2.05.02.0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 95,500	2	5,830	1	11,150	0	0	0	0	3	16,980	50.00%	17.78%			Kec. Bulak					
		1.1.2.05.02.0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			4 Kali 64,584	2	4,989	1	7,938	0	0	0	0	3	12,928	75.00%	20.02%			Kec. Dukuh Pakis					
		1.1.2.05.02.0020	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 78,692	0	0	1	12,943	0	0	0	0	1	12,943	16.67%	16.45%			Kec. Gayungan					
		1.1.2.05.02.0021	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			12 Kali 68,524	3	4,334	2	13,209	0	0	0	0	5	17,542	41.67%	25.60%			Kec. Genteng					
		1.1.2.05.02.0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 191,453	1	2,567	2	43,435	0	0	0	0	3	46,002	50.00%	24.03%			Kec. Gubeng					
		1.1.2.05.02.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			3 Kali 60,106	1	2,870	0	10,653	0	0	0	0	1	13,523	33.33%	22.50%			Kec. Gunung Anyar					
		1.1.2.05.02.0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			3 Kali 74,389	6	5,124	8	14,420	0	0	0	0	12	19,543	400.00%	26.27%			Kec. Jambangan					
		1.1.2.05.02.0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			9 Kali 65,929	3	6,086	2	15,341	0	0	0	0	5	21,426	55.56%	32.50%			Kec. Karangpilang					
		1.1.2.05.02.0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 62,435	4	1,563	1	11,822	0	0	0	0	5	13,385	83.33%	21.44%			Kec. Kenjeran					
		1.1.2.05.02.0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			12 Kali 90,255	3	5,882	3	15,794	0	0	0	0	6	21,676	50.00%	24.02%			Kec. Krembangan					
		1.1.2.05.02.0028	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 78,919	1	3,473	1	16,260	0	0	0	0	2	19,733	33.33%	25.00%			Kec. Lakarsantri					
		1.1.2.05.02.0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 68,407	1	2,069	1	12,987	0	0	0	0	2	15,055	33.33%	22.01%			Kec. Mulyorejo					
		1.1.2.05.02.0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 101,642	1	3,029	1	16,258	0	0	0	0	2	19,287	33.33%	18.98%			Kec. Pabean Cantian					
		1.1.2.05.02.0031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 72,099	2	3,520	1	14,703	0	0	0	0	3	18,223	50.00%	25.27%			Kec. Pakal					
		1.1.2.05.02.0032	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			10 Kali 75,202	10	5,638	0	14,989	0	0	0	0	10	20,627	100.00%	27.43%			Kec. Rungkut					
		1.1.2.05.02.0033	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			3 Kali 65,763	1	2,824	0	9,795	0	0	0	0	1	12,619	33.33%	19.19%			Kec. Sambikerep					
		1.1.2.05.02.0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			12 Kali 96,795	3	11,625	3	16,904	0	0	0	0	6	28,529	50.00%	29.47%			Kec. Sawahan					
		1.1.2.05.02.0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			4 Kali 53,830	1	2,498	0	10,677	0	0	0	0	1	13,175	25.00%	24.48%			Kec. Semampir					
		1.1.2.05.02.0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			6 Kali 56,369	2	5,684	1	12,566	0	0	0	0	3	18,250	50.00%	32.38%			Kec. Simokerto					
		1.1.2.05.02.0037	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			4 Kali 52,507	1	1,481	0	10,340	0	0	0	0	1	11,821	25.00%	22.51%			Kec. Sukolilo					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.1.2.05.02.0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					4 Kali	65,025	0	0	2	13,346	0	0	0	0	2	13,346	50.00%	20.52%			Kec. Sukomanunggal		
		1.1.2.05.02.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					8 Kali	79,845	1	3,006	1	14,003	0	0	0	0	2	17,008	25.00%	21.30%			Kec. Tambaksari		
		1.1.2.05.02.0040	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					5 Kali	86,195	0	0	1	14,593	0	0	0	0	1	14,593	20.00%	16.93%			Kec. Tandes		
		1.1.2.05.02.0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					10 Kali	169,062	2	3,926	2	28,885	0	0	0	0	4	32,811	40.00%	19.41%			Kec. Tegalsari		
		1.1.2.05.02.0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					21 Kali	75,239	5	10,104	2	12,296	0	0	0	0	7	22,400	33.33%	29.77%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		1.1.2.05.02.0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					12 Kali	85,206	3	6,028	2	17,134	0	0	0	0	5	23,162	41.67%	27.18%			Kec. Wiyung		
		1.1.2.05.02.0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					2 Kali	55,655	1	2,770	0	6,748	0	0	0	0	1	9,518	50.00%	17.10%			Kec. Wonocolo		
		1.1.2.05.02.0045	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					10 Kali	73,903	2	5,607	1	12,828	0	0	0	0	3	18,435	30.00%	24.94%			Kec. Wonokromo		
		1.1.2.05.02.0051	Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan					2 Kegiatan	3,181,434	0	65,000	0	109,031	0	0	0	0	0	174,031	0.00%	5.47%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.02.0052	Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan (DAK)	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang disediakan					2 unit	753,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.02.0053	Layanan Pengolahan Sampah (DAK)	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar					1 Rekening	26,912,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
27	Meningkatkan kualitas udara dan air	1.1.2.05.03	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan			61,537,246		19,234,512		10,363,939		1,601,070		1,872,644		0,00		0,00		3,473,714		33,52%		22,708,226	36,90%		
			Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan		95,00 %		63.50%		70,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		63,50 %		66,84 %		
		1.1.2.05.03.0001	Penyusunan Kajian dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disusun					2 dokumen	442,656	0	58,749	1	117,738	0	0	0	0	1	176,487	50.00%	39.87%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0002	Pendukung Penilaian Adipura	Jumlah Kegiatan Pendukung Penilaian Adipura yang diselenggarakan					1 kali	177,149	0	8,516	0	61,812	0	0	0	0	0	70,328	0.00%	39.70%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0003	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah					50 lokasi	233,184	10	18,382	10	50,606	0	0	0	0	20	68,987	40.00%	29.58%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day					160 kali	2,400,226	41	532,530	36	378,416	0	0	0	0	77	910,946	48.13%	37.95%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0005	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pendidikan lingkungan yang diselenggarakan					14 kali	304,504	3	43,006	3	50,066	0	0	0	0	6	93,071	42.86%	30.56%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0006	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani					50 obyek	500,976	18	50,483	12	117,821	0	0	0	0	30	168,303	60.00%	33.60%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0007	Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang disusun					2 dokumen	199,410	0	13,032	1	28,962	0	0	0	0	1	41,994	50.00%	21.06%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0008	Inventarisasi dan Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen inventarisasi dan perencanaan penataan lingkungan hidup yang disusun					2 dokumen	286,565	0	22,408	0	65,020	0	0	0	0	0	87,429	0.00%	30.51%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0009	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya					254 lembaga	908,488	0	137,327	24	241,296	0	0	0	0	24	378,624	9.45%	41.68%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0011	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan					6 kali	650,615	4	222,118	1	129,139	0	0	0	0	5	351,256	83.33%	53.99%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0012	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa					224 sampel	612,863	57	35,345	26	105,848	0	0	0	0	83	141,193	37.05%	23.04%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03.0013	Pemantauan dan Sosialisasi Pengguna Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau					30 lembaga	190,966	0	29,910	8	29,597	0	0	0	0	8	59,507	26.67%	31.16%			Dinas Lingkungan Hidup		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.1.2.05.03. 0014	Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan					48 kali	2,175,242	12	307,635	8	157,506	0	0	0	0	20	465,141	41.67%	21.38%			Dinas Perhubungan		
		1.1.2.05.03. 0015	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut					48 sampel	407,366	12	68,841	12	95,333	0	0	0	0	24	164,173	50.00%	40.30%			Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.2.05.03. 0016	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah stasiun monitoring udara ambien yang dipelihara					2 unit	873,728	2	52,789	2	243,485	0	0	0	0	2	296,274	100.00%	33.91%			Dinas Lingkungan Hidup		
28	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	1.1.2.05.05	Program Upaya Konservasi Energi			1,615,560		809,968		509,489		87,570		100,582		0,00		0,00		188,152		36,93%		998,120	61,78%		
				Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164,00 kegiatan dan /atau usaha		245,00 kegiatan dan /atau usaha		144,00 kegiatan dan /atau usaha		0,00 kegiatan dan /atau usaha		0,00 kegiatan dan /atau usaha		0,00 kegiatan dan /atau usaha		0,00 kegiatan dan /atau usaha		163,00 kegiatan dan /atau usaha		113,19%		245,00 %		149,39 %		
		1.1.2.05.05. 0001	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi					120 lembaga	509,489	0	87,570	0	100,582	0	0	0	0	0	188,152	0.00%	36.93%				Dinas Lingkungan Hidup	
29	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	1.1.2.05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif			23,121,683		5,835,703		2,700,313		12,387		1,044,177		0,00		0,00		1,056,564		39,13%		6,892,267	29,81%		
				Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbaru	49,00 unit		45,00 unit		41,00 unit		6,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		42,00 unit		102,44%		54,00 %		110,20 %		
				Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	14,00 lingkungan		7,00 lingkungan		10,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00 lingkungan		7,00 lingkungan		70,00%		7,00 %		50,00 %		
		1.1.2.05.08. 0002	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan					11 unit	2,208,691	0	0	1	1,003,550	0	0	0	0	1	1,003,550	9.09%	45.44%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.2.05.08. 0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun					4 dokumen	247,141	0	0	0	11,309	0	0	0	0	0	11,309	0.00%	4.58%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.2.05.08. 0004	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif					2 lokasi	244,481	0	12,387	1	29,318	0	0	0	0	1	41,705	50.00%	17.06%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
		1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
30	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan			501,414,988		37,692,382		24,141,552		1,312,985		3,424,882		0,00		0,00		4,737,867		19,63%		42,430,249	8,46%		
				Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,94 %		100.00%		99,69 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,06 %		
				Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,94 %		100.00%		99,69 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,06 %		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00 %		99.46%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		99,46 %		99,46 %		
				Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	89,51 %		100.00%		87,55 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		114,22%		100,00 %		111,72 %		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,96 %		100.00%		93,94 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		106,43 %		
				Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		
				Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13	15=14/6x100%				16					
				Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00 %		99,14%		100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,40 %		100,40%		99,14 %		99,14 %			
		1.1.2.06.01.0001	Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el yang dilayani	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani					300000 berkas	807,493	193921	10,400	64553	114,476	0	0	0	0	258474	124,876	86.16%	15.46%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1.1.2.06.01.0003	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Musiman	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk musiman					40930 berkas	502,358	12346	128,666	7934	69,147	0	0	0	0	20280	197,812	49.55%	39.38%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1.1.2.06.01.0004	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara					6 sistem	1,139,088	6	162,736	6	164,864	0	0	0	0	6	327,599	100.00%	28.76%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1.1.2.06.01.0005	Pemberian Pelayanan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen layanan data kependudukan yang diberikan					12 dokumen	964,754	24	96,011	24	425,218	0	0	0	0	48	521,230	400.00%	54.03%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1.1.2.06.01.0006	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani					75130 berkas	478,555	25760	76,530	15700	55,166	0	0	0	0	41460	131,696	55.18%	27.52%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1.1.2.06.01.0007	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani					3250 berkas	455,643	1475	29,572	716	79,350	0	0	0	0	2191	108,922	67.42%	23.91%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1.1.2.06.01.0008	Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					7 dokumen	410,896	1	30,363	2	76,410	0	0	0	0	3	106,773	42.86%	25.99%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
No		1.1.2.06.01.0009	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan					200000 berkas	6,439,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1.1.2.06.01.0010	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					14412 berkas	222,941	3605	11,354	2246	49,204	0	0	0	0	5851	60,558	40.60%	27.16%				Kec. Asemrowo	
		1.1.2.06.01.0011	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					22340 berkas	241,188	7686	10,508	2512	59,544	0	0	0	0	10198	70,052	45.65%	29.04%				Kec. Benowo	
		1.1.2.06.01.0012	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					15057 berkas	438,801	3132	31,490	2418	87,368	0	0	0	0	5550	118,857	36.86%	27.09%				Kec. Bubutan	
		1.1.2.06.01.0013	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					11186 berkas	278,712	4036	13,328	1436	46,655	0	0	0	0	5472	59,982	48.92%	21.52%				Kec. Bulak	
		1.1.2.06.01.0014	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					12616 berkas	272,821	4864	14,102	1995	27,884	0	0	0	0	6859	41,986	54.37%	15.39%				Kec. Dukuh Pakis	
		1.1.2.06.01.0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					5326 berkas	289,771	1090	11,880	800	66,244	0	0	0	0	1890	78,124	35.49%	26.96%				Kec. Gayungan	
		1.1.2.06.01.0016	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					14463 berkas	359,360	4223	24,156	2500	75,264	0	0	0	0	6723	99,420	46.48%	27.67%				Kec. Genteng	
		1.1.2.06.01.0017	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					25178 berkas	575,837	6297	32,192	4198	117,368	0	0	0	0	10495	149,560	41.68%	25.97%				Kec. Gubeng	
		1.1.2.06.01.0018	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					11226 berkas	289,303	2716	11,544	1779	52,723	0	0	0	0	4495	64,267	40.04%	22.21%				Kec. Gunung Anyar	
		1.1.2.06.01.0019	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					12785 berkas	250,541	5010	13,108	2248	51,311	0	0	0	0	7258	64,419	56.77%	25.71%				Kec. Jambangan	
		1.1.2.06.01.0020	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					7397 berkas	273,975	4175	15,756	1876	57,134	0	0	0	0	6051	72,889	81.80%	26.60%				Kec. Karangpilang	
		1.1.2.06.01.0021	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					72000 berkas	282,852	5654	16,626	4017	63,744	0	0	0	0	9671	80,371	13.43%	28.41%				Kec. Kenjeran	
		1.1.2.06.01.0022	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					28440 berkas	383,963	4141	20,267	3428	81,340	0	0	0	0	7569	101,607	26.61%	26.46%				Kec. Krembangan	
		1.1.2.06.01.0023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					5336 berkas	373,473	3483	13,552	1495	65,184	0	0	0	0	4978	78,736	93.29%	21.08%				Kec. Lakarsantri	
		1.1.2.06.01.0024	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					16551 berkas	371,462	2849	19,807	1163	64,462	0	0	0	0	4012	84,269	24.24%	22.69%				Kec. Mulyorejo	
		1.1.2.06.01.0025	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					18209 berkas	339,103	6723	26,509	2642	73,669	0	0	0	0	9365	100,178	51.43%	29.54%				Kec. Pabean Cantian	
		1.1.2.06.01.0026	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					15500 berkas	307,729	2750	14,269	1452	55,607	0	0	0	0	4202	69,876	27.11%	22.71%				Kec. Pakal	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13	15=14/6x100%	16										
		1.1.2.06.01.0027	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			15963 berkas	484,697	5477	39,696	2949	93,876	0	0	0	0	8426	133,572	52.78%	27.56%			Kec. Rungkut				
		1.1.2.06.01.0028	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			9318 berkas	319,639	5114	16,791	1813	65,767	0	0	0	0	6927	82,558	74.34%	25.83%			Kec. Sambikerep				
		1.1.2.06.01.0029	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			40320 berkas	538,804	6991	54,308	4084	108,128	0	0	0	0	11075	162,436	27.47%	30.15%			Kec. Sawahan				
		1.1.2.06.01.0030	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			24931 berkas	403,946	13175	39,349	6449	90,092	0	0	0	0	19624	129,441	78.71%	32.04%			Kec. Semampir				
		1.1.2.06.01.0031	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			20400 berkas	406,502	4701	20,307	3446	80,483	0	0	0	0	8147	100,790	39.94%	24.79%			Kec. Simokerto				
		1.1.2.06.01.0032	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			22442 berkas	486,579	6841	28,345	4449	106,901	0	0	0	0	11290	135,246	50.31%	27.80%			Kec. Sukolilo				
		1.1.2.06.01.0033	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			26312 berkas	326,360	3187	17,952	1434	62,862	0	0	0	0	4621	80,814	17.56%	24.76%			Kec. Sukomanunggal				
		1.1.2.06.01.0034	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			39620 berkas	562,589	9893	43,955	6430	113,244	0	0	0	0	16323	157,199	41.20%	27.94%			Kec. Tambaksari				
		1.1.2.06.01.0035	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			20944 berkas	462,524	6201	36,287	5314	97,045	0	0	0	0	11515	133,332	54.98%	28.83%			Kec. Tandes				
		1.1.2.06.01.0036	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			14557 berkas	382,260	4519	20,931	1221	73,976	0	0	0	0	5740	94,907	39.43%	24.83%			Kec. Tegalsari				
		1.1.2.06.01.0037	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			17850 berkas	263,181	2244	16,734	1858	51,286	0	0	0	0	4102	68,021	22.98%	25.85%			Kec. Tenggilis Mejoyo				
		1.1.2.06.01.0038	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			7253 berkas	351,030	4515	18,090	1751	72,784	0	0	0	0	6266	90,874	86.39%	25.89%			Kec. Wiyung				
		1.1.2.06.01.0039	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			24000 berkas	375,934	5374	17,660	1815	76,526	0	0	0	0	7189	94,185	29.95%	25.05%			Kec. Wonocolo				
		1.1.2.06.01.0040	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani			32522 berkas	504,122	7400	29,678	5971	102,423	0	0	0	0	13371	132,101	41.11%	26.20%			Kec. Wonokromo				
		1.1.2.06.01.0041	Penyusunan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang disusun			2 dokumen	432,663	0	25,644	0	67,268	0	0	0	0	0	92,911	0.00%	21.47%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		1.1.2.06.01.0042	Pelayanan Informasi Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan			24 kali	716,728	0	52,533	1	31,458	0	0	0	0	1	83,991	4.17%	11.72%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		1.1.2.06.01.0043	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan			213 orang	224,170	213	0	0	29,983	0	0	0	0	213	29,983	100.00%	13.38%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		1.1.2.06.01.0044	Penyusunan Analisa Regulasi Bidang Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen analisa regulasi Bidang Administrasi Kependudukan yang disusun			1 dokumen	149,749	0	0	0	21,445	0	0	0	0	0	21,445	0.00%	14.32%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		1.1.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
31	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana		24,895,562		10,561,084	8,991,758	1,012,839		803,937		0,00		0,00		1,816,776		20,20%		12,377,861		49,72%				
				Persentase peserta KB baru	84,35 %		97,90%	82,75 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		97,90 %		118,31%		30,66 %		36,35 %				
				Persentase peserta KB aktif	80,95 %		80,28%	79,60 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		80,14 %		99,00 %				
				Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	4,90 %		3,20%	5,25 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		200,00%		0,16 %		3,17 %				
				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	19,95 %		19,78%	20,20 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		200,00%		19,19 %		96,19 %				
		1.1.2.08.01.0001	Pembinaan Saka Kencana	Jumlah Pembinaan Saka Kencana			1 kali	194,552	0	0	0	15,403	0	0	0	0	0	15,403	0.00%	7.92%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		1.1.2.08.01.0002	Facilitasi Penggerakan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana			1740 orang	1,844,640	1566	399,262	1566	152,858	0	0	0	0	1566	552,120	90.00%	29.93%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13		15=14/6x100%		16
		1.1.2.08.01.0003	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Keluarga Berencana					1718 orang	581,879	0	35,384	0	92,665	0	0	0	0	0	128,048	0.00%	22.01%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0004	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB					775 orang	1,289,058	184	192,365	140	330,316	0	0	0	0	324	522,681	41.81%	40.55%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0005	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana					2 unit	1,060,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0007	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)					32 lembaga	3,894,200	32	385,828	32	186,820	0	0	0	0	32	572,648	100.00%	14.71%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.01.0008	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen profil pengendalian penduduk yang disusun					1 dokumen	127,390	0	0	0	25,876	0	0	0	0	0	25,876	0.00%	20.31%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga			3,941,955		3,086,817		1,673,382		344,000		329,480		0,00		0,00		673,480		40,25%		3,760,296		95,39%	
				Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	100,00 %		100.00%		92,89 %	0,00 %		0,00 %			0,00 %		0,00 %		100,00 %		107,65%		100,00 %		100,00 %		
				Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,00 %		0.07%		3,20 %	0,00 %		0,00 %			0,00 %		0,00 %		0,00 %		200,00%		0,01 %		0,40 %		
		1.1.2.08.02.0001	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi					1350 orang	539,391	713	213,633	287	110,651	0	0	0	0	1000	324,284	74.07%	60.12%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.02.0002	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera					1280 orang	548,505	41	56,972	94	78,059	0	0	0	0	135	135,031	10.55%	24.62%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.02.0003	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan					2 lembaga	585,486	2	73,395	2	140,770	0	0	0	0	2	214,164	100.00%	36.58%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			105,496,444		12,967,874		3,798,708		489,732		697,047		0,00		0,00		1,186,779		31,24%		14,154,653		13,42%	
				Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75,00 %		100.00%		75,00 %	0,00 %		0,00 %			0,00 %		0,00 %		101,10 %		134,80%		100,00 %		133,33 %		
		1.1.2.08.03.0002	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri					300 orang	1,817,592	138	216,316	137	344,535	0	0	0	0	275	560,851	91.67%	30.86%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.08.03.0003	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi					63 lembaga	1,653,543	0	224,097	9	293,428	0	0	0	0	9	517,525	14.29%	31.30%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%		16								
		1.1.2.08.03.0004	Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri			12 dokumen	327,573	3	49,319	2	59,084	0	0	0	0	5	108,403	41.67%	33.09%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		1.1.2.09	Perhubungan																								
33	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	1.1.2.09.01	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi		1,068,216,370	402,787,693		277,095,020	33,915,576		50,581,263		0,00		0,00		84,496,840		30,49%		487,284,533		45,62%				
				Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	32,53 km/jam	49,73 km/jam		31,27 km/jam	0,00 km/jam		0,00 km/jam		0,00 km/jam		0,00 km/jam		0,00 km/jam		0,00%	50,65 %		155,71 %					
				Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2,00 %	11,71%		2,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		5,000,00%	20,24 %		1,011,86 %					
		1.1.2.09.01.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR			149069 unit	8,464,223	40047	1,053,266	28427	1,885,148	0	0	0	0	68474	2,938,413	45.93%	34.72%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0002	Pembangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun			2 bangunan	8,618,410	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	50.00%	0.00%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun (Tahun Jamak/Multiyears)			1 bangunan	116,027,674	1	22,240,850	0	23,273,279	0	0	0	0	1	45,514,129	100.00%	39.23%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0004	Pengawasan dan Pengendalian sarana Angkutan Jalan	Jumlah Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan			7 Jenis	3,511,104	12	485,788	15	697,000	0	0	0	0	19	1,182,788	271.43%	33.69%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0005	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara			5 Jenis	15,182,391	7	1,275,196	5	2,077,122	0	0	0	0	7	3,352,318	140.00%	22.08%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0006	Pemeliharaan Prasarana Transportasi yang Dipelihara	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara			36 lokasi	7,199,870	1	788,749	1	1,630,639	0	0	0	0	2	2,419,388	5.56%	33.60%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan			365 kali	15,225,184	90	1,530,635	61	2,348,271	0	0	0	0	151	3,878,906	41.37%	25.48%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0008	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan			2510 unit	55,962,804	301	682,612	455	11,317,588	0	0	0	0	756	12,000,199	30.12%	21.44%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0010	Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan			1684 Lokasi	19,413,594	1717	3,624,587	1716	3,710,442	0	0	0	0	1717	7,335,028	101.96%	37.78%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0011	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi			33 Paket	5,888,513	0	294,049	0	480,721	0	0	0	0	0	774,770	0.00%	13.16%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0012	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor			5 kali	10,136,241	0	686,486	0	1,173,886	0	0	0	0	0	1,860,372	0.00%	18.35%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0013	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun			17 dokumen	3,226,418	0	115,175	5	321,541	0	0	0	0	5	436,717	29.41%	13.54%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0014	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Jumlah sarana transportasi pelajar yang diselenggarakan selama 12 bulan			8 unit	1,235,084	24	187,485	24	245,596	0	0	0	0	48	433,081	600.00%	35.06%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.01.0016	Pengelolaan Parkir Tempat Khusus	Jumlah Tempat Khusus Parkir yang Dikelola selama 12 bulan			118 Lokasi	7,003,510	135	950,700	104	1,420,031	0	0	0	0	135	2,370,732	114.41%	33.85%			Dinas Perhubungan				
34	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	1.1.2.09.02	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan		178,518,294	108,583,102		49,551,361	7,049,458		9,500,494		0,00		0,00		16,549,952		33,40%		125,133,054		70,10%				
				Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	23,00 menit	26.84 menit		25,00 menit	0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		26,84 menit		92,64%	26,84 %		116,70 %					
				Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	40,54 menit	41.93 menit		42,50 menit	0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		41,93 menit		101,33%	41,93 %		103,44 %					
				Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100,00 %	100.00%		100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%	100,00 %	100,00 %						
		1.1.2.09.02.0001	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan			14 Lokasi	27,924,729	14	4,446,542	14	5,760,675	0	0	0	0	14	10,207,217	100.00%	36.55%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.02.0002	Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan	Jumlah Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan			20 unit	16,203,926	20	2,380,241	0	3,207,096	0	0	0	0	20	5,587,337	100.00%	34.48%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.09.02.0003	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Jumlah dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun			7 Dokumen	5,422,705	0	222,675	2	532,723	0	0	0	0	2	755,399	28.57%	13.93%			Dinas Perhubungan				
35	Peningkatan sistem manajemen city logistik	1.1.2.09.03	Program manajemen lalu lintas angkutan barang		2,447,798	2,268,479		803,190	0		0		0,00		0,00		0		0,00%		2,268,479		92,67%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	90,30 menit		100,22 menit		100,33 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		100,22 menit		100,11%		100,22 %		110,98 %				
		1.1.2.09.03.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang			2 kali	803,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika serta Persandian																								
36	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.10.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			319,294,870		100,589,030		64,065,620		1,279,242		6,397,160		0,00		0,00		7,676,402		11,98%		108,265,432		33,91%	
				Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	45,74 %		35,11%		38,65 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		35,11 %		90,83%		35,11 %		76,76 %				
				Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100,00 %		100,00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %				
		1.1.2.10.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengaduan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan					12 dokumen	330,140	3	12,932	3	42,044	0	0	0	0	6	54,976	50.00%	16.65%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Disusun					1 dokumen	342,501	0	29,017	0	45,506	0	0	0	0	0	74,522	0.00%	21.76%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0003	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persandian					930 unit	1,806,270	293	201,895	139	411,258	0	0	0	0	432	613,152	46.45%	33.95%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah Integrasi Sistem yang Dibangun					3 basis data	420,180	0	41,719	0	45,473	0	0	0	0	0	87,192	0.00%	20.75%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0005	Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK					5 jenis	12,360,454	1	0	0	1,420,502	0	0	0	0	1	1,420,502	20.00%	11.49%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0006	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun					15 aplikasi	828,941	0	125,087	4	164,391	0	0	0	0	4	289,478	26.67%	34.92%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0007	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan					134 sistem	1,127,681	134	169,742	134	237,190	0	0	0	0	134	406,932	100.00%	36.09%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0008	Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK					5 jenis	40,055,046	0	484,678	0	3,501,137	0	0	0	0	0	3,985,815	0.00%	9.95%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0009	Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola					2 Lokasi	2,866,231	2	11,258	2	47,981	0	0	0	0	2	59,239	100.00%	2.07%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0010	Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani					100 persen	3,460,900	100	177,837	100	421,153	0	0	0	0	100	598,990	100.00%	17.31%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.01.0011	Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola e-Gov yang disusun					1 dokumen	467,276	0	25,078	0	60,526	0	0	0	0	0	85,605	0.00%	18.32%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.02	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat			106,901,316		39,430,093		25,003,526		3,331,100		3,592,696		0,00		0,00		6,923,796		27,69%		46,353,888		43,36%	
				Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85,00 %		87,95%		84,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		87,18 %		103,79%		87,95 %		103,47 %				
				Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	10,254,00 kunjungan		42,303.67 kunjungan		9,481,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		654,82 kunjungan		6,91%		42,303,67 %		412,56 %				
		1.1.2.10.02.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah liputan kegiatan pemerintah kota Surabaya					1990 kali	7,307,333	466	1,410,417	445	910,866	0	0	0	0	911	2,321,283	45.78%	31.77%			Bagian Hubungan Masyarakat		
		1.1.2.10.02.0003	Penyelenggaraan Event Kehumasan	Jumlah pelaksanaan event kehumasan					20 kali	294,720	3	3,000	6	37,434	0	0	0	0	9	40,434	45.00%	13.72%			Bagian Hubungan Masyarakat		
		1.1.2.10.02.0004	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Komunikasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan KIM					4 Kali	1,166,410	1	68,893	1	135,963	0	0	0	0	2	204,856	50.00%	17.56%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.02.0005	Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun					5 dokumen	976,300	0	70,030	0	186,910	0	0	0	0	0	256,939	0.00%	26.32%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.02.0006	Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Jumlah dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik yang disusun					13 dokumen	1,000,583	3	149,458	2	146,986	0	0	0	0	5	296,444	38.46%	29.63%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.10.02.0007	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola					19 Saluran	990,583	19	87,611	19	159,292	0	0	0	0	19	246,902	100.00%	24.92%			Dinas Komunikasi dan Informatika		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019			K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)					K	Rp.(000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13	15=14/6x100%	16										
		1.1.2.10.02.0008	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi yang dilaksanakan			4 Jenis	1,357,558	2	204,974	0	45,559	0	0	0	0	2	250,533	50.00%	18.45%			Dinas Komunikasi dan Informatika				
		1.1.2.10.02.0009	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan			4 Jenis	3,479,721	3	289,529	4	878,194	0	0	0	0	4	1,167,723	100.00%	33.56%			Dinas Komunikasi dan Informatika				
		1.1.2.10.02.0010	Penyelenggaraan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah BLC yang melaksanakan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik			49 lembaga	5,652,987	49	623,069	49	704,727	0	0	0	0	49	1,327,797	100.00%	23.49%			Dinas Komunikasi dan Informatika				
		1.1.2.10.02.0011	Penyusunan Dokumentasi Profil Kota Surabaya	Jumlah dokumentasi profil kota Surabaya yang disusun			8 dokumen	874,911	2	107,530	2	66,001	0	0	0	0	4	173,531	50.00%	19.83%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		1.1.2.10.02.0012	Penerbitan Majalah Gapura	Jumlah majalah Gapura yang diterbitkan			40440 Eksemplar	1,093,981	10110	241,355	10110	255,022	0	0	0	0	20220	496,377	50.00%	45.37%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		1.1.2.10.02.0013	Penyusunan Data dan Informasi Publikasi	Jumlah dokumen penyusunan data dan informasi publikasi yang disusun			2 dokumen	175,858	0	15,500	0	19,626	0	0	0	0	0	35,126	0.00%	19.97%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		1.1.2.10.02.0014	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan			149 kali	533,505	17	52,035	39	31,373	0	0	0	0	56	83,407	37.58%	15.63%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		1.1.2.10.02.0015	Evaluasi Kinerja Kehumasan	Jumlah dokumen evaluasi kehumasan			1 dokumen	99,075	0	7,700	0	14,743	0	0	0	0	0	22,443	0.00%	22.65%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																								
37	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	1.1.2.11.02	Program perkuatan permodalan usaha mikro			1,181,387		401,357		259,558		41,550		64,714		0,00		0,00		106,264		40,94%		507,621		42,97%	
				Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	6,00 %		8.31%		5,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		6,23 %		124,68%		8,31 %		138,53 %				
		1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan			125 orang	259,558	89	41,550	36	64,714	0	0	0	0	125	106,264	100.00%	40.94%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.03	Program standarisasi produk usaha mikro			28,762,309		3,866,132		1,371,673		84,114		274,118		0,00		0,00		358,231		26,12%		4,224,363		14,69%	
				Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	40,00 %		44.42%		30,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		44,42 %		148,05%		44,42 %		111,04 %				
				Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutkan	40,00 %		35.06%		30,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		35,06 %		116,88%		35,06 %		87,66 %				
		1.1.2.11.03.0001	Fasilitasi Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi produk			25 orang	124,830	0	3,589	0	11,231	0	0	0	0	0	14,820	0.00%	11.87%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya			385 orang	614,228	385	80,525	0	138,198	0	0	0	0	385	218,723	100.00%	35.61%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.03.0003	Peningkatan Mutu Produk Bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi peningkatan mutu produk			125 orang	302,447	0	0	0	109,505	0	0	0	0	0	109,505	0.00%	36.21%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.03.0004	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk			140 orang	176,532	0	0	0	15,184	0	0	0	0	0	15,184	0.00%	8.60%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.03.0005	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (DAK)	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan			125 Orang	153,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
38	Meningkatkan produktivitas koperasi	1.1.2.11.04	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi			12,388,230		3,595,220		1,912,913		176,863		330,113		0,00		0,00		506,976		26,50%		4,102,197		33,11%	
				Persentase koperasi berklasifikasi AAB	77,05 %		65.98%		66,24 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		65,98 %		99,60%		65,98 %		85,63 %				
		1.1.2.11.04.0001	Pengawasan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pengawasan			450 lembaga	1,135,945	0	148,313	280	218,085	0	0	0	0	280	366,398	62.22%	32.25%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.04.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya			150 lembaga	282,321	0	4,175	0	36,883	0	0	0	0	0	41,058	0.00%	14.54%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.04.0004	Pelatihan Perkoperasian (DAK)	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pelatihan			200 lembaga	155,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.04.0005	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga			61 lembaga	338,847	0	24,375	5	75,146	0	0	0	0	5	99,521	8.20%	29.37%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.05	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi			21,035,265		3,837,577		1,597,777		149,525		302,013		0,00		0,00		451,538		28,26%		4,289,115		20,39%	
				Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	88,00 %		73.19%		78,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		47,73 %		61.19%		73,19 %		83,17 %				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.1.2.11.05. 0001	Penyelenggaraan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan					5 kali	184,751	0	2,442	5	83,230	0	0	0	0	5	85,672	100.00%	46.37%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.05. 0002	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, dengan Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan antar koperasi, distributor, dan/atau lembaga keuangan/perbankan					144 lembaga	123,574	37	6,608	0	19,428	0	0	0	0	37	26,036	25.69%	21.07%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.05. 0003	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi					60 lembaga	269,349	0	0	0	18,909	0	0	0	0	0	18,909	0.00%	7.02%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.05. 0004	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi (DAK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi					80 lembaga	158,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.05. 0005	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya					150 lembaga	265,340	0	26,216	82	56,342	0	0	0	0	82	82,558	54.67%	31.11%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.11.05. 0006	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis					144 lembaga	596,699	42	114,259	39	124,105	0	0	0	0	81	238,364	56.25%	39.95%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.12	Penanaman Modal																								
39	Peningkatan sistem manajemen city logistik	1.1.2.12.01	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik			207,815		596,211		227,606		4,568		16,522		0,00		0,00		21,090		9,27%		617,301		297,04%	
				Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	42,00 %		100.00%		30,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		350,00 %		1.166,67%		100,00 %		238,10 %		
		1.1.2.12.01. 0001	Temu Usaha Fasilitas Pendukung Logistik	Jumlah temu usaha fasilitas pendukung logistik yang dilaksanakan					1 kali	227,606	0	4,568	0	16,522	0	0	0	0	0	21,090	0.00%	9.27%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
40	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	1.1.2.12.03	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi			19,122,557		8,038,057		3,884,682		313,482		750,053		0,00		0,00		1,063,536		27,38%		9,101,593		47,60%	
				Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	24,00 %		20.59%		16,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		-72,82 %		-455,16%		14,59 %		60,80 %		
				Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	36,00 %		65.85%		24,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		-100,00 %		-416,67%		65,85 %		182,93 %		
		1.1.2.12.03. 0001	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal yang dilaksanakan					1 kali	209,578	0	332	0	12,749	0	0	0	0	0	13,081	0.00%	6.24%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.03. 0002	Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan					500 lembaga	317,537	340	68,228	160	52,381	0	0	0	0	500	120,608	100.00%	37.98%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.03. 0003	Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi					2700 lembaga	813,561	100	85,131	1000	235,207	0	0	0	0	1100	320,337	40.74%	39.37%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.03. 0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan					3 kali	791,249	0	25,007	0	87,908	0	0	0	0	0	112,915	0.00%	14.27%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.03. 0005	Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun					3 dokumen	232,821	0	575	0	13,596	0	0	0	0	0	14,171	0.00%	6.09%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.03. 0006	Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola					34403 data	544,300	10366	60,347	7233	93,171	0	0	0	0	17597	153,518	51.15%	28.20%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.1.2.12.03.0008	Pembinaan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang dibina					200 lembaga	234,959	0	0	50	114,192	0	0	0	0	50	114,192	25.00%	48.60%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.12.03.0009	Pendampingan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang didampingi					300 lembaga	451,775	100	47,524	100	84,424	0	0	0	0	200	131,947	66.67%	29.21%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.12.03.0010	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan					12 kali	288,901	2	26,340	0	56,427	0	0	0	0	2	82,766	16.67%	28.65%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
41	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.12.04	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			144,498,179		39,825,160		21,091,932		2,669,421		4,062,904		0,00		0,00		6,732,326		31,92%		46,557,485	32,22%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80,00 %			84.05%		76,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		87,61 %		115,28%		84,05 %		105,06 %	
		1.1.2.12.04.0001	Bimtek Penyusunan Laporan Industri	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek laporan Industri					200 orang	197,734	50	28,510	50	37,291	0	0	0	0	100	65,801	50.00%	33.28%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.04.0002	Bimtek Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek perizinan penanaman modal					100 lembaga	282,760	50	37,994	0	34,306	0	0	0	0	50	72,300	50.00%	25.57%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.04.0003	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan					60000 berkas	5,236,952	26392	714,443	25563	1,281,040	0	0	0	0	51955	1,995,483	86.59%	38.10%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.04.0004	Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah petugas layanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dibina					100 orang	209,665	100	11,221	0	32,512	0	0	0	0	100	43,733	100.00%	20.86%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.04.0005	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan tanda daftar perusahaan					500 orang	363,003	150	69,804	200	72,030	0	0	0	0	350	141,834	70.00%	39.07%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.04.0006	Pengawasan Perijinan Industri dan Tanda Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin industri dan tanda daftar perusahaan yang diawasi					10300 orang	378,547	2075	59,550	2211	71,477	0	0	0	0	4286	131,027	41.61%	34.61%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.12.04.0007	Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan					800 berkas	1,568,045	449	272,346	411	327,828	0	0	0	0	860	600,174	107.50%	38.28%				Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.12.04.0008	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan					50 izin	437,605	18	48,409	27	126,913	0	0	0	0	45	175,321	90.00%	40.06%				Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.12.04.0009	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi					45 izin	646,659	22	95,082	42	131,827	0	0	0	0	64	226,908	142.22%	35.09%				Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.12.04.0010	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses					400 berkas	119,550	175	6,050	90	27,976	0	0	0	0	265	34,026	66.25%	28.46%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2.12.04.0011	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses					169 berkas	117,830	93	6,050	37	24,241	0	0	0	0	130	30,291	76.92%	25.71%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2.12.04.0012	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Bangunan yang diproses					9467 berkas	5,742,868	2527	925,650	1617	1,316,711	0	0	0	0	4144	2,242,361	43.77%	39.05%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.2.12.04.0014	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan					5 Jenis	3,088,019	0	0	1	43,012	0	0	0	0	1	43,012	20.00%	1.39%				Dinas Perhubungan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.1.2.12.04.0015	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses					255 berkas	194,938	48	35,645	5	34,427	0	0	0	0	53	70,071	20.78%	35.95%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1.1.2.12.04.0016	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses					1000 berkas	123,340	116	15,863	138	23,370	0	0	0	0	254	39,233	25.40%	31.81%			Dinas Tenaga Kerja		
		1.1.2.12.04.0017	Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan					400 berkas	406,571	141	48,847	61	88,835	0	0	0	0	202	137,682	50.50%	33.86%			Dinas Perdagangan		
		1.1.2.12.04.0018	Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa dan sarana Pariwisata yang dimonitor					240 lokasi	365,666	76	80,712	67	60,960	0	0	0	0	143	141,673	59.58%	38.74%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		1.1.2.12.04.0019	Monitoring perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Usaha rekreasi dan hiburan Umum pariwisata yang dimonitor					240 lokasi	370,481	31	57,640	125	61,368	0	0	0	0	156	119,008	65.00%	32.12%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		1.1.2.12.04.0021	Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah koordinasi teknis pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu yang dilaksanakan					24 kali	822,332	6	116,668	7	145,567	0	0	0	0	13	262,234	54.17%	31.89%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.12.04.0022	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan					4 kali	23,297	2	11,640	2	10,939	0	0	0	0	4	22,579	100.00%	96.92%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.12.04.0023	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau					2 kali	11,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.12.04.0024	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan					1 kali	16,386	0	0	0	4,993	0	0	0	0	0	4,993	0.00%	30.47%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.12.04.0025	Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses					50 berkas	367,981	5	27,300	4	105,282	0	0	0	0	9	132,582	18.00%	36.03%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga																								
42	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan			31,085,054		6,665,954		3,191,529		499,809		435,750		0,00		0,00		935,559		29,31%		7,601,513	24,45%		
				Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80,00 %		99,78%		80,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		45,32 %		56,65%		99,78 %		124,73 %		
		1.1.2.13.01.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan					22 kali	1,817,866	2	181,672	3	260,152	0	0	0	0	5	441,825	22.73%	24.30%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.13.01.0003	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja					3600 peserta	1,373,663	971	318,137	436	175,597	0	0	0	0	1407	493,734	39.08%	35.94%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
43	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			804,337,286		220,651,802		154,060,036		3,385,883		16,112,560		0,00		0,00		19,498,443		12,66%		240,150,244	29,86%		
				Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	2,107,00 orang		2,307,00 orang		1.607,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		2,307,00 %		109,49 %				
				Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	154,00 kelurahan		124,00 kelurahan		130,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00 kelurahan		120,00 kelurahan		92,31%		124,00 %		80,52 %		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13				15=14/6x100%		16				
		1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi			4 bangunan	56,547,750	0	1,350	0	6,215,666	0	0	0	0	0	6,217,016	0.00%	10.99%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.2.13.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun			2 dokumen	924,721	0	0	0	11,309	0	0	0	0	0	11,309	0.00%	1.22%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.2.13.02.0003	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi			9 unit	8,112,271	10	1,102,982	10	1,480,468	0	0	0	0	12	2,583,451	133.33%	31.85%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0004	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan			90 unit	26,907,045	5	754,412	20	5,474,128	0	0	0	0	25	6,228,540	27.78%	23.15%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan			29 kali	2,086,739	852	329,651	2	171,692	0	0	0	0	13	501,342	44.83%	24.03%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0006	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan			36 kali	2,835,127	0	17,500	0	42,077	0	0	0	0	0	59,577	0.00%	2.10%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0007	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional yang diselenggarakan			25 kali	2,716,537	286	201,342	3	199,076	0	0	0	0	4	400,418	16.00%	14.74%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0008	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi			41 kali	25,564,613	66	285,049	3	1,486,376	0	0	0	0	6	1,771,425	14.63%	6.93%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0009	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan			2302 unit	5,853,894	0	0	0	23,532	0	0	0	0	0	23,532	0.00%	0.40%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0010	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki			133 unit	17,738,829	29	233,423	41	252,253	0	0	0	0	70	485,676	52.63%	2.74%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun			56 dokumen	2,654,097	6	275,540	17	616,479	0	0	0	0	23	892,020	41.07%	33.61%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.13.02.0012	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak yang diselenggarakan			26 kali	2,118,413	365	184,633	2	139,503	0	0	0	0	7	324,136	26.92%	15.30%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
		1.1.2.16	Kebudayaan																								
44	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	1.1.2.16.01	Program perlindungan budaya lokal			6,931,179		2,847,212		1,528,609		256,551		219,758		0,00		0,00		476,309		31,16%		3,323,521		47,95%	
				Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50 %		91.58%		91,50 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		91,58 %		100,08 %				
		1.1.2.16.01.0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian			250 lokasi	1,528,609	33	256,551	38	219,758	0	0	0	0	71	476,309	28.40%	31.16%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		1.1.2.16.02	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal			31,172,802		15,524,996		6,739,874		919,658		1,276,664		0,00		0,00		2,196,321		32,59%		17,721,318		56,85%	
				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	49,00 %		57.63%		47,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		64,26 %		136,72%		57,83 %		118,02 %				
				Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	100,00 %		100.00%		76,50 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		141,18 %		184,54%		100,00 %		100,00 %				
		1.1.2.16.02.0001	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah			546 kali	5,341,422	187	902,775	130	970,214	0	0	0	0	317	1,872,989	58.06%	35.07%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		1.1.2.16.02.0002	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring			14 lokasi	260,061	15	16,883	12	52,140	0	0	0	0	18	69,024	128.57%	26.54%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		1.1.2.16.02.0003	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal			3 kali	406,051	0	0	2	230,834	0	0	0	0	2	230,834	66.67%	56.85%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		1.1.2.16.02.0004	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar			668 lembaga	464,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan			
		1.1.2.16.02.0005	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah			267 lembaga	267,913	0	0	0	23,475	0	0	0	0	0	23,475	0.00%	8.76%				Dinas Pendidikan			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)				K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								K	Rp.(000)
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
45	Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	1.1.2.16.03	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal			78,801,277		30,799,813		16,542,052		1,571,331		2,990,628		0,00		0,00		4,561,959		27,58%		35,361,772	44,87%		
			Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan		17,00 %		29,63%		16,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		29,09 %		181,82%		29,63 %		174,31 %		
			Persentase kader wawasan kebangsaan		100,00 %		98,49%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		98,49 %		98,49 %		
		1.1.2.16.03.0001	Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan					31 lembaga	395,329	11	8,179	27	46,485	0	0	0	0	38	54,665	122.58%	13.83%					Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.2.16.03.0002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan					750 orang	609,446	102	18,345	0	32,182	0	0	0	0	102	50,527	13.60%	8.29%					Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.2.16.03.0003	Fasilitasi penyelenggaraan even peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan					11 kali	1,246,663	0	8,624	0	27,236	0	0	0	0	0	35,860	0.00%	2.88%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2.16.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan karakter Kebangsaan di Sekolah					376 lembaga	634,331	908	0	0	93,459	0	0	0	0	907	93,459	241.22%	14.73%					Dinas Pendidikan
		1.1.2.16.03.0005	Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah					245 lembaga	416,790	0	0	0	14,343	0	0	0	0	0	14,343	0.00%	3.44%					Dinas Pendidikan
		1.1.2.16.03.0006	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan					13 kali	2,453,289	2	181,852	1	160,570	0	0	0	0	3	342,422	23.08%	13.96%					Dinas Pendidikan
		1.1.2.16.03.0007	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepelawanan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepelawanan					62 kali	6,320,422	8	966,577	12	1,702,191	0	0	0	0	20	2,668,768	32.26%	42.22%					Dinas Sosial
		1.1.2.16.03.0008	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	74,527	0	0	1	18,857	0	0	0	0	1	18,857	50.00%	25.30%					Kec. Asemrowo
		1.1.2.16.03.0009	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	76,651	1	4,168	1	13,710	0	0	0	0	2	17,878	100.00%	23.32%					Kec. Benowo
		1.1.2.16.03.0010	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					7 Kali	87,010	2	6,237	1	15,695	0	0	0	0	3	21,932	42.86%	25.21%					Kec. Bubutan
		1.1.2.16.03.0011	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	95,718	1	3,679	0	14,845	0	0	0	0	1	18,523	50.00%	19.35%					Kec. Bulak
		1.1.2.16.03.0012	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	86,447	0	0	1	4,888	0	0	0	0	1	4,888	50.00%	5.65%					Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2.16.03.0013	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	62,875	1	2,350	1	14,719	0	0	0	0	2	17,070	66.67%	27.15%					Kec. Gayungan
		1.1.2.16.03.0014	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	59,531	1	4,600	0	10,533	0	0	0	0	1	15,133	50.00%	25.42%					Kec. Genteng
		1.1.2.16.03.0015	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	98,856	1	14,253	0	13,994	0	0	0	0	1	28,247	50.00%	28.57%					Kec. Gubeng
		1.1.2.16.03.0016	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	74,586	1	2,765	0	12,443	0	0	0	0	1	15,208	50.00%	20.39%					Kec. Gunung Anyar
		1.1.2.16.03.0017	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	70,769	1	3,575	1	18,758	0	0	0	0	2	22,333	100.00%	31.56%					Kec. Jambangan
		1.1.2.16.03.0018	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	71,195	0	0	1	15,644	0	0	0	0	1	15,644	50.00%	21.97%					Kec. Karangpilang
		1.1.2.16.03.0019	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	78,880	0	0	1	22,817	0	0	0	0	1	22,817	50.00%	28.93%					Kec. Kenjeran
		1.1.2.16.03.0020	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 Kali	89,073	1	3,004	1	17,309	0	0	0	0	2	20,313	50.00%	22.80%					Kec. Krembangan
		1.1.2.16.03.0021	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	83,074	0	0	0	15,799	0	0	0	0	0	15,799	0.00%	19.02%					Kec. Lakarsantri
		1.1.2.16.03.0022	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	97,326	0	0	0	14,321	0	0	0	0	0	14,321	0.00%	14.71%					Kec. Mulyorejo
		1.1.2.16.03.0023	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					6 Kali	90,695	1	2,349	1	14,920	0	0	0	0	2	17,268	33.33%	19.04%					Kec. Pabean Cantian
		1.1.2.16.03.0024	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	79,129	0	0	0	12,606	0	0	0	0	0	12,606	0.00%	15.93%					Kec. Pakal
		1.1.2.16.03.0025	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	77,782	1	3,704	0	14,699	0	0	0	0	1	18,403	33.33%	23.66%					Kec. Rungkut
		1.1.2.16.03.0026	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	80,353	1	2,832	0	9,888	0	0	0	0	1	12,719	33.33%	15.83%					Kec. Sambikerep
		1.1.2.16.03.0027	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	145,213	0	0	1	30,004	0	0	0	0	1	30,004	33.33%	20.66%					Kec. Sawahan
		1.1.2.16.03.0028	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 Kali	81,359	0	0	1	17,316	0	0	0	0	1	17,316	25.00%	21.28%					Kec. Semampir
		1.1.2.16.03.0029	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	73,100	0	0	0	16,375	0	0	0	0	0	16,375	0.00%	22.40%					Kec. Simokerto
		1.1.2.16.03.0030	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	91,975	0	0	1	22,349	0	0	0	0	1	22,349	50.00%	24.30%					Kec. Sukolilo
		1.1.2.16.03.0031	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					6 Kali	86,759	1	3,505	1	17,517	0	0	0	0	2	21,022	33.33%	24.23%					Kec. Sukomanunggal
		1.1.2.16.03.0032	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 Kali	91,960	1	4,313	1	20,206	0	0	0	0	2	24,519	50.00%	26.66%					Kec. Tambaksari
		1.1.2.16.03.0033	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	102,410	1	5,349	0	18,035	0	0	0	0	1	23,384	50.00%	22.83%					Kec. Tandes
		1.1.2.16.03.0034	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	82,487	0	54	1	8,504	0	0	0	0	1	8,558	50.00%	10.38%					Kec. Tegalsari

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.1.2.16.03.0035	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 kali	67,446	1	2,825	1	8,945	0	0	0	0	2	11,770	50.00%	17.45%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		1.1.2.16.03.0036	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 kali	103,349	1	2,566	0	18,280	0	0	0	0	1	20,845	33.33%	20.17%			Kec. Wiyung		
		1.1.2.16.03.0037	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	73,889	1	3,533	0	10,842	0	0	0	0	1	14,374	50.00%	19.45%			Kec. Wonocolo		
		1.1.2.16.03.0038	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	103,837	1	4,409	0	20,682	0	0	0	0	1	25,091	50.00%	24.16%			Kec. Wonokromo		
		1.1.2.16.03.0039	Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara					7 lokasi	1,827,520	7	307,685	7	428,662	0	0	0	0	7	736,348	100.00%	40.29%			Dinas Sosial		
		1.1.2.17	Perpustakaan																								
46	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		162,179,066		52,294,387		31,741,665		4,360,445		7,005,381		0,00		0,00		11,365,826		35,81%		63,660,213	39,25%			
				Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	100,00 %		8.33%		10,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		-54,17 %		-541,67%		8,33 %		83,33 %				
				Persentase koleksi buku	100,00 %		87.45%		91,56 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		87,45 %		95,52%		87,45 %		87,45 %				
				Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	100,00 %		40.93%		60,30 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		21,61 %		35,83%		40,93 %		40,93 %				
				Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	33,00 %		31.06%		22,80 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		36,24 %		158,97%		31,06 %		94,11 %				
		1.1.2.17.01.0001	Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling					57433 orang	235,935	0	4,290	0	36,571	0	0	0	0	0	40,861	0.00%	17.32%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.17.01.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca					189 kali	503,098	30	38,859	47	115,620	0	0	0	0	77	154,479	40.74%	30.71%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.17.01.0003	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina					500 lembaga	619,560	403	117,512	115	172,768	0	0	0	0	512	290,280	102.40%	46.85%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.17.01.0004	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola					1494 lokasi	25,025,465	1382	4,057,878	1468	5,934,931	0	0	0	0	1617	9,992,809	108.23%	39.93%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.17.01.0005	Penyediaan dan Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat					43069 Buku	4,234,400	0	57,401	0	610,140	0	0	0	0	0	667,541	0.00%	15.76%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.17.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah yang diselenggarakan					3 kali	469,415	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	3,870	0.00%	0.82%			Dinas Pendidikan		
		1.1.2.17.01.0007	Akse Literasi	Jumlah rangkaian kegiatan pelaksanaan akse literasi					1 kali	653,791	0	84,505	0	131,482	0	0	0	0	0	215,987	0.00%	33.04%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.18	Kearsipan																								
47	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1.1.2.18.01	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		13,051,862		6,656,286		4,862,804		362,745		687,104		0,00		0,00		1,049,850		21,59%		7,706,136	59,04%			
				Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20,00 %		50.78%		20,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		16,99 %		84,93%		50,78 %		253,91 %				
				Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang terbit sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100,00 %		43.89%		60,80 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		4,56 %		7,50%		43,89 %		43,89 %				
		1.1.2.18.01.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan					40 kali	352,313	11	35,917	6	73,517	0	0	0	0	17	109,433	42.50%	31.06%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.18.01.0002	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan					130 lembaga	369,698	17	16,846	19	89,194	0	0	0	0	36	106,040	27.69%	28.68%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.18.01.0003	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan					52 kali	2,494,588	0	307,245	14	448,252	0	0	0	0	14	755,497	26.92%	30.29%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.18.01.0004	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan					23 item	1,646,206	1	2,738	8	76,141	0	0	0	0	9	78,879	39.13%	4.79%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.14	Statistik																								
48	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik		17,098,829		2,550,369		1,493,163		341,629		315,266		0,00		0,00		656,894		43,99%		3,207,263	18,76%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13	15=14/6x100%	16		
				Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5,00 %		2.67%		5,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		2,67 %		146,52%		2,67 %		53,48 %		
		1.1.2.14.01.0002	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola					17 data urusan	1,493,163	500	341,629	0	315,266	0	0	0	0	0	656,894	0.00%	43.99%				Badan Perencanaan Pembangunan	
		1.2	Pilihan																								
		1:02:02	Non Pelayanan Dasar																								
		1.2.2.03	Pertanian																								
49	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1.2.2.03.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			9,271,379		2,695,933		1,301,221		108,365		479,874		0,00		0,00		588,239		45,21%		3,284,172		35,42%	
				Persentase pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	16,00 %		15.31%		14,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		15,58 %		111,32%		15,31 %		95,71 %		
		1.2.2.03.01.0001	Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan					5 jenis	1,028,729	3	100,391	3	437,517	0	0	0	0	5	537,908	100.00%	52.29%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.01.0002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dipelihara					13 unit	272,492	0	7,975	6	42,356	0	0	0	0	6	50,331	46.15%	18.47%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			10,520,282		5,617,886		2,272,744		59,679		346,850		0,00		0,00		406,529		17,89%		6,024,415		57,26%	
				Persentase pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00 %		36.31%		50,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		52,54 %		105,09%		36,31 %		45,39 %		
		1.2.2.03.02.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura					3 kali	298,720	100	11,151	2	100,243	0	0	0	0	3	111,394	100.00%	37.29%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.02.0002	Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan					13 jenis	1,266,192	0	20,252	3	226,951	0	0	0	0	3	247,203	23.08%	19.52%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.02.0003	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian					125 orang	707,832	75	28,276	0	19,656	0	0	0	0	75	47,932	60.00%	6.77%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.04	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak			14,607,788		1,872,431		1,225,113		137,260		340,210		0,00		0,00		477,470		38,97%		2,349,901		16,09%	
				Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	87,00 %		87.74%		85,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		87,74 %		100,85 %		
		1.2.2.03.04.0002	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan					1558 kali	1,035,679	396	137,260	356	318,667	0	0	0	0	752	455,927	48.27%	44.02%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.04.0003	Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan	Jumlah peserta Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan					200 peserta	189,434	0	0	0	21,543	0	0	0	0	0	21,543	0.00%	11.37%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.05	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan			2,016,349		2,491,741		656,486		4,123		90,375		0,00		0,00		94,498		14,39%		2,586,239		128,26%	
				Persentase pembudidayaan ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00 %		37.81%		50,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		37,81 %		47,27 %		
		1.2.2.03.05.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan					16 kali	383,155	0	3,900	0	32,941	0	0	0	0	0	36,841	0.00%	9.62%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.05.0002	Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan					6 jenis	273,331	0	223	4	57,433	0	0	0	0	4	57,657	66.67%	21.09%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.02	Pariwisata																								

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
50	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	1.2.2.02.01	Program pengembangan destinasi wisata			26,196,203		10,306,378		5,702,822		741,905		1,374,540		0,00		0,00		2,116,445		37,11%		12,422,824		47,42%	
				Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	55,00 %		46.15%		36,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		53,85 %		149,57%		46,15 %		83,92 %		
		1.2.2.02.01.0001	Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara				3 lokasi	1,401,646	3	268,525	3	241,834	0	0	0	0	3	510,358	100.00%	36.41%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.01.0002	Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara				3 lokasi	1,595,995	4	300,511	3	638,611	0	0	0	0	4	939,122	133.33%	58.84%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.01.0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata				600 orang	252,678	60	20,147	120	44,534	0	0	0	0	180	64,681	30.00%	25.60%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.01.0004	Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel	Jumlah sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel yang disediakan				11 unit	1,578,151	0	44,775	10	115,546	0	0	0	0	10	160,320	90.91%	10.16%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.01.0005	Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah sarana penunjang wisata di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan				81 unit	874,352	7	107,948	69	334,016	0	0	0	0	76	441,964	93.83%	50.55%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.02	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata			21,456,254		1,823,192		830,121		84,008		167,161		0,00		0,00		251,169		30,26%		2,074,361		9,67%	
				Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100,00 %		60.00%		60,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		80,00 %		133,33%		60,00 %		60,00 %		
		1.2.2.02.02.0001	Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata				10 kali	385,680	3	58,692	1	63,651	0	0	0	0	4	122,343	40.00%	31.72%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.02.0002	Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi hiburan umum	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum				10 kali	334,208	1	25,315	4	88,845	0	0	0	0	5	114,160	50.00%	34.16%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.02.0003	Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi				6 lokasi	110,233	0	0	0	14,666	0	0	0	0	0	14,666	0.00%	13.30%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.03	Program Pemasaran Pariwisata			59,904,319		18,990,076		8,718,807		1,591,839		1,839,050		0,00		0,00		3,430,889		39,35%		22,420,965		37,43%	
				Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52,27 %		48.03%		47,74 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		18,47 %		38,69%		48,03 %		91,89 %		
		1.2.2.02.03.0001	Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti				81 kali	941,758	31	55,748	27	488,088	0	0	0	0	58	543,837	71.60%	57.75%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.03.0002	Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel				93 kali	1,386,328	25	172,178	33	200,373	0	0	0	0	58	372,551	62.37%	26.87%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.03.0003	Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR				64 kali	1,500,459	16	284,139	14	304,453	0	0	0	0	30	588,592	46.88%	39.23%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.03.0004	Penyelenggaraan even wisata	Jumlah Event Wisata yang diselenggarakan				1 kali	342,975	0	0	0	20,856	0	0	0	0	0	20,856	0.00%	6.08%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.03.0005	Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah Penyelenggaraan festival kuliner				7 kali	1,743,935	506	507,423	0	246,222	0	0	0	0	2	753,645	28.57%	43.22%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.03.0006	Fasilitasi promosi wisata	Jumlah fasilitasi promosi wisata				295 kali	2,803,352	113	572,351	61	579,057	0	0	0	0	174	1,151,408	58.98%	41.07%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
51	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	1.2.2.02.04	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif			7,876,252		6,621,649		4,734,766		570,604		740,561		0,00		0,00		1,311,165		27,69%		7,932,814		100,72%	
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	9,00 %		18.30%		7,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		17,84 %		254,83%		18,30 %		203,31 %		
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	9,00 %		7.50%		7,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		7,50 %		107,14%		7,50 %		83,33 %		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13		15=14/6x100%		16
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	9,00 %		7.84%		7,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		8,29 %		118,47%		7,84 %		87,15 %		
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	9,00 %		7.76%		7,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		7,59 %		108,44%		25,37 %		281,92 %		
				Persentase rumah kreatif yang beroperasi	100,00 %		87.50%		81,25 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		87,50 %		107,69%		87,50 %		87,50 %		
		1.2.2.02.04.0001	Pengelolaan Rumah Kreatif Handicraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan					1 bangunan	329,738	1	41,489	1	77,596	0	0	0	0	1	119,084	100.00%	36.11%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.2.2.02.04.0002	Fasilitasi Pelatihan dan pertunjukan seni budaya lokal di rumah kreatif	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di rumah kreatif yg difasilitasi					770 kali	782,396	6331	130,043	160	141,534	0	0	0	0	401	271,577	52.08%	34.71%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2.02.04.0003	Pengelolaan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah rumah kreatif yang dikelola					1 bangunan	154,719	0	70	0	9,192	0	0	0	0	0	9,262	0.00%	5.99%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2.02.04.0004	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif					100 orang	655,354	43	62,505	14	37,352	0	0	0	0	57	99,857	57.00%	15.24%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.2.2.02.04.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Desain dan Fashion	Jumlah rumah kreatif yang dikelola					2 bangunan	686,731	2	101,967	2	150,942	0	0	0	0	2	252,909	100.00%	36.83%					Dinas Perdagangan
		1.2.2.02.04.0006	Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah Rumah Kreatif yang dikelola					2 bangunan	578,892	2	79,683	2	106,636	0	0	0	0	2	186,319	100.00%	32.19%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.02.04.0007	Pelatihan Desain dan Fashion di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang dilatih					120 orang	438,397	60	96,501	40	118,436	0	0	0	0	100	214,937	83.33%	49.03%					Dinas Perdagangan
		1.2.2.02.04.0010	Pendampingan usaha olahan pangan di rumah kreatif	Jumlah pelaksanaan Pendampingan Usaha Olahan Pangan di Rumah Kreatif					7 kali	314,884	5	43,600	1	81,642	0	0	0	0	6	125,242	85.71%	39.77%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.02.04.0011	Pelatihan Handicraft di Rumah Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handicraft di rumah kreatif					25 orang	215,183	21	14,746	25	17,233	0	0	0	0	25	31,978	100.00%	14.86%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.2.2.02.04.0012	Pelatihan Kuliner di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pelatihan kuliner di rumah kreatif					25 orang	37,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2.02.04.0013	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan					268 unit	540,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perdagangan
		1.2.2.02.05	Program legalisasi usaha kreatif			718,467		293,119		95,984		0		16,150		0,00		0,00		16,150		16,83%		309,269		43,05%	
				Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	40,00 %		50.88%		30,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		50.88 %		169,59%		50,88 %		127,19 %		
		1.2.2.02.05.0001	Fasilitasi Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi produk					25 orang	95,984	0	0	0	16,150	0	0	0	0	0	16,150	0.00%	16.83%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2.02.06	Program perkuatan permodalan usaha kreatif			830,890		239,680		117,442		0		18,794		0,00		0,00		18,794		16,00%		258,474		31,11%	
				Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	25,00 %		24.56%		15,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		24,56 %		163,74%		24,56 %		98,25 %		
		1.2.2.02.06.0001	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan					50 orang	117,442	0	0	0	18,794	0	0	0	0	0	18,794	0.00%	16.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan																								
52	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	1.2.2.01.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan			14,039,819		7,792,999		4,754,862		317,928		526,059		0,00		0,00		843,987		17,75%		8,636,986		61,52%	
				Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16,00 %		13.38%		14,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		13,38 %		95,54%		13,38 %		83,60 %		
		1.2.2.01.01.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang disediakan					15 Paket	827,805	0	0	0	9,250	0	0	0	0	0	9,250	0.00%	1.12%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.01.01.0002	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan					724 paket	1,158,165	0	35,500	0	24,252	0	0	0	0	0	59,752	0.00%	5.16%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13				15=14/6x100%		16				
		1.2.2.01.01.0003	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan			383 paket	857,424	0	17,961	0	51,867	0	0	0	0	0	69,829	0.00%	8.14%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
		1.2.2.01.01.0004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap yang dipelihara			13 unit	1,911,467	0	264,467	0	440,689	0	0	0	0	0	705,156	0.00%	36.89%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
		1.2.2.01.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan		2,108,344	926,413		389,489	14,525	19,911		0,00		0,00			34,436		8,84%		960,849	45,57%					
				Persentase pembudidayaan perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00 %	35.43%	50,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %			35,43 %		70,87%		35,43 %		44,29 %					
		1.2.2.01.02.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan			18 kali	389,489	123	14,525	0	19,911	0	0	0	0	6	34,436	33.33%	8.84%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
		1.2.2.06	Perdagangan																								
53	Peningkatan sistem manajemen city logistik	1.2.2.06.01	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial		3,274,905	2,276,608		1,343,312	169,259	286,192		0,00		0,00			455,451		33,91%		2,732,059	83,42%					
				Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	100,00 %	75.00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		75,00 %		75,00%		75,00 %		75,00 %				
				Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	100,00 %	69.59%	75,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		133,33%		69,59 %		69,59 %				
		1.2.2.06.01.0001	Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Jumlah pelaku distribusi perdagangan yang dibina			350 orang	686,779	82	106,977	87	152,050	0	0	0	0	169	259,027	48.29%	37.72%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.06.01.0003	Koordinasi Pengembangan Hub/Simpul Logistik	Jumlah koordinasi pengembangan hub/simpul logistik yang dilaksanakan			5 kali	195,957	1	10,269	1	40,314	0	0	0	0	2	50,583	40.00%	25.81%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.06.01.0004	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor laporannya			250 lokasi	460,576	102	52,013	41	93,828	0	0	0	0	143	145,840	57.20%	31.66%			Dinas Perdagangan				
54	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.2.2.06.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		13,760,431	5,181,349		5,112,848	427,310	705,024		0,00		0,00			1,132,334		22,15%		6,313,683	45,88%					
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85,00 %	100.00%	80,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		125,00%		100,00 %		117,65 %				
		1.2.2.06.03.0001	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani			23160 unit	669,160	9352	18,349	4338	92,100	0	0	0	0	13690	110,449	59.11%	16.51%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.06.03.0002	Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan			119 jenis	2,024,027	49	156,366	24	270,041	0	0	0	0	73	426,407	61.34%	21.07%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.06.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi			4100 unit	619,508	1115	45,808	807	115,515	0	0	0	0	1922	161,323	46.88%	26.04%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.06.03.0005	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya			1521 lembaga	1,135,352	439	206,787	250	227,368	0	0	0	0	689	434,155	45.30%	38.24%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.06.03.0006	Pengadaan Peralatan Kemetrolgian (DAK)	Jumlah peralatan kemetrolgian yang diadakan			6 unit	664,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			Dinas Perdagangan				
55	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	1.2.2.06.04	Program perluasan jangkauan pemasaran		221,739,987	57,798,529		44,368,943	2,822,197	10,251,824		0,00		0,00			13,074,022		29,47%		70,872,551	31,96%					
				Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	60,00 %	72.00%	53,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		72,00 %		120,00 %				
				Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	80,00 %	46.81%	60,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		6,38 %		10,64%		46,81 %		58,51 %				
				Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	7,19 %	19.40%	4,79 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		19,40 %		405,07%		19,40 %		269,86 %				
		1.2.2.06.04.0002	Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner	Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan			4 kali	247,217	0	0	2	44,683	0	0	0	0	2	44,683	50.00%	18.07%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				
		1.2.2.06.04.0003	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun/direhabilitasi			35 bangunan	19,946,418	1	404,665	2	5,405,367	0	0	0	0	3	5,810,033	8.57%	29.13%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K		Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.2.2.06.04. 0004	Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun					7 dokumen	402,608	0	0	0	60,534	0	0	0	0	0	60,534	0.00%	15.04%			Dinas Penumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.2.2.06.04. 0005	Pendampingan Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pembinaan					80 orang	943,905	160	140,319	160	221,264	0	0	0	0	164	361,583	205.00%	38.31%			Dinas Perdagangan		
		1.2.2.06.04. 0006	Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk					280 orang	645,596	117	152,959	55	116,518	0	0	0	0	172	269,477	61.43%	41.74%			Dinas Perdagangan		
		1.2.2.06.04. 0007	Pengelolaan Sentra Usaha Mikro Surabaya	Jumlah sentra Usaha Mikro Surabaya yang dikelola					3 lokasi	1,966,237	3	299,191	3	444,384	0	0	0	0	3	743,575	100.00%	37.82%			Dinas Perdagangan		
		1.2.2.06.04. 0009	Penyediaan Stand Usaha Mikro	Jumlah stand usaha yang disediakan					7 lokasi	3,403,325	7	682,442	7	842,482	0	0	0	0	7	1,524,925	100.00%	44.81%			Dinas Perdagangan		
		1.2.2.06.04. 0010	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Jumlah Event pameran yang diikuti					16 kali	3,495,204	38	375,145	5	970,615	0	0	0	0	9	1,345,761	56.25%	38.50%			Dinas Perdagangan		
		1.2.2.06.04. 0011	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	184,677	12	3,911	12	40,127	0	0	0	0	24	44,037	50.00%	23.85%			Kec. Asemrowo		
		1.2.2.06.04. 0012	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	170,032	12	1,487	8	44,892	0	0	0	0	20	46,379	41.67%	27.28%			Kec. Benowo		
		1.2.2.06.04. 0013	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	165,724	189	6,188	18	35,843	0	0	0	0	36	42,031	75.00%	25.36%			Kec. Bubutan		
		1.2.2.06.04. 0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	214,881	12	2,879	8	51,222	0	0	0	0	20	54,101	41.67%	25.18%			Kec. Bulak		
		1.2.2.06.04. 0015	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	200,619	12	2,369	8	29,459	0	0	0	0	20	31,828	41.67%	15.87%			Kec. Dukuh Pakis		
		1.2.2.06.04. 0016	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	190,083	12	2,132	8	34,677	0	0	0	0	20	36,809	41.67%	19.36%			Kec. Gayungan		
		1.2.2.06.04. 0017	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	146,744	13	1,559	12	26,543	0	0	0	0	25	28,101	52.08%	19.15%			Kec. Genteng		
		1.2.2.06.04. 0018	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	237,614	12	439	8	49,117	0	0	0	0	20	49,556	41.67%	20.86%			Kec. Gubeng		
		1.2.2.06.04. 0019	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	169,711	12	1,665	12	36,583	0	0	0	0	24	38,248	50.00%	22.54%			Kec. Gunung Anyar		
		1.2.2.06.04. 0020	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	110,888	8	2,415	4	23,344	0	0	0	0	12	25,759	25.00%	23.23%			Kec. Jambangan		
		1.2.2.06.04. 0021	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	212,314	12	5,740	8	37,383	0	0	0	0	20	43,123	41.67%	20.31%			Kec. Karangpilang		
		1.2.2.06.04. 0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	204,267	11	2,336	13	40,756	0	0	0	0	24	43,091	50.00%	21.10%			Kec. Kenjeran		
		1.2.2.06.04. 0023	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	209,334	15	7,243	15	44,086	0	0	0	0	30	51,329	62.50%	24.52%			Kec. Krembangan		
		1.2.2.06.04. 0024	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	245,583	9	828	6	54,846	0	0	0	0	15	55,674	31.25%	22.67%			Kec. Lakarsantri		
		1.2.2.06.04. 0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	252,738	17	7,651	8	49,082	0	0	0	0	25	56,733	52.08%	22.45%			Kec. Pabean Cantian		
		1.2.2.06.04. 0027	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	258,415	48	7,477	32	36,739	0	0	0	0	80	44,216	166.67%	17.11%			Kec. Pakal		
		1.2.2.06.04. 0028	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	237,806	12	7,257	8	56,797	0	0	0	0	20	64,053	41.67%	26.94%			Kec. Rungkut		
		1.2.2.06.04. 0029	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	195,959	12	3,138	12	40,933	0	0	0	0	24	44,071	50.00%	22.49%			Kec. Sambikerep		
		1.2.2.06.04. 0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	233,882	11	45	10	20,076	0	0	0	0	21	20,121	43.75%	8.60%			Kec. Sawahan		
		1.2.2.06.04. 0031	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	191,730	12	2,718	26	42,855	0	0	0	0	38	45,573	79.17%	23.77%			Kec. Semampir		
		1.2.2.06.04. 0032	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	166,914	12	4,094	60	36,691	0	0	0	0	72	40,785	150.00%	24.43%			Kec. Simokerto		
		1.2.2.06.04. 0033	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	253,623	14	2,130	10	51,270	0	0	0	0	24	53,400	50.00%	21.05%			Kec. Sukolilo		
		1.2.2.06.04. 0034	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	229,288	10	4,113	14	45,340	0	0	0	0	24	49,453	50.00%	21.57%			Kec. Sukomanunggal		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		1.2.2.06.04.0035	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	248,737	10	1,704	15	52,250	0	0	0	0	25	53,954	52.08%	21.69%			Kec. Tambaksari		
		1.2.2.06.04.0036	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	268,883	12	7,719	8	49,576	0	0	0	0	20	57,295	41.67%	21.31%			Kec. Tandes		
		1.2.2.06.04.0037	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	229,697	12	6,231	8	49,773	0	0	0	0	20	56,004	41.67%	24.38%			Kec. Tegalsari		
		1.2.2.06.04.0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	228,197	32	7,883	12	40,083	0	0	0	0	24	47,967	50.00%	21.02%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		1.2.2.06.04.0039	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	197,716	12	5,275	8	40,070	0	0	0	0	20	45,346	41.67%	22.93%			Kec. Wiyung		
		1.2.2.06.04.0040	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	243,086	18	2,963	12	42,192	0	0	0	0	30	45,155	62.50%	18.58%			Kec. Wonocolo		
		1.2.2.06.04.0041	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	259,062	511	7,004	12	54,172	0	0	0	0	24	61,176	50.00%	23.61%			Kec. Wonokromo		
		1.2.2.06.04.0042	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner dan Pasar Tradisional	Jumlah sentra wisata kuliner dan pasar tradisional yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya					60 lokasi	737,562	61	92,374	61	188,837	0	0	0	0	62	281,211	103.33%	38.13%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.2.2.06.04.0043	Pengadaan Sarana Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah sarana penunjang tempat usaha skala mikro yang disediakan					238 unit	900,210	0	5,352	0	15,184	0	0	0	0	0	20,536	0.00%	2.28%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.2.2.06.04.0044	Pemeliharaan Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah tempat usaha skala mikro yang dipelihara					15 lokasi	5,095,183	15	542,481	10	651,979	0	0	0	0	15	1,194,460	100.00%	23.44%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.2.2.06.04.0048	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	227,275	12	8,677	12	33,197	0	0	0	0	24	41,875	50.00%	18.42%			Kec. Mulyorejo		
56	Meningkatkan distribusi pangan	1.2.2.06.05	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan			13,005,760		4,008,010		2,151,957		163,375		876,174		0,00		0,00		1,039,549		48,31%		5,047,559	38,81%		
				Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15,00 kali/kejadian		19,00 kali/kejadian	15,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	0,00 kali/kejadian	31,00 kali/kejadian	206,67%	19,00 %		126,67 %						
				Persentase pasar yang dipantau harganya	8,00 %		10.45%	8,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,45 %	130,60%	10,45 %		130,60 %						
		1.2.2.06.05.0001	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah				12 laporan	695,558	3	42,400	3	176,955	0	0	0	0	6	219,355	50.00%	31.54%				Bagian Administrasi Perencanaan dan Usaha Daerah		
		1.2.2.06.05.0003	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan				131 kali	956,379	14	62,570	55	582,736	0	0	0	0	69	645,306	52.67%	67.47%				Dinas Perdagangan		
		1.2.2.06.05.0004	Fasilitasi Akses Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	Jumlah lembaga yang difasilitasi akses pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya				10 lembaga	500,019	8	58,405	3	116,483	0	0	0	0	11	174,888	110.00%	34.98%				Dinas Perdagangan		
57	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1.2.2.06.06	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian			5,476,667		1,408,648		974,750		17,890		203,485		0,00		0,00		221,375		22,71%		1,630,023	29,76%		
				Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	65,00 %		67.49%	63,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	67,49 %	107,13%	67,49 %		103,83 %						
		1.2.2.06.06.0001	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan				67 kali	974,750	14	17,890	10	203,485	0	0	0	0	24	221,375	35.82%	22.71%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2	Penunjang Urusan Pemerintahan																								
		2.1	Fungsi Manajemen																								
		2.01:02	Non Pelayanan Dasar																								
		2.1.2.01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan																								
58	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah			28,235,522		11,194,462		5,500,840		964,256		1,380,700		0,00		0,00		2,344,956		42,63%		13,539,419	47,95%		
				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90,00 %		92.29%	90,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	92,29 %		102,55 %						
				Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	100,00 %		94.45%	98,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%	94,45 %		94,45 %						
		2.1.2.01.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah				72 PD	741,262	5	160,746	0	149,769	0	0	0	0	0	310,515	0.00%	41.89%				Badan Perencanaan Pembangunan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13		15=14/6x100%		16						
		2.1.2.01.01.0005	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya			72 lembaga	1,508,652	75	275,121	72	393,326	0	0	0	0	75	668,447	104.17%	44.31%			Bagian Administrasi Pembangunan				
		2.1.2.01.01.0006	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara			7 sistem	2,168,861	0	367,419	6	526,028	0	0	0	0	6	893,447	85.71%	41.19%			Bagian Administrasi Pembangunan				
		2.1.2.01.01.0007	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun			16 dokumen	1,082,064	5	160,970	13	311,577	0	0	0	0	18	472,547	112.50%	43.67%			Bagian Administrasi Pembangunan				
		2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			115,813,713		49,531,532		25,791,464		2,167,528		5,252,844		0,00	0,00	7,420,372		28,77%		56,951,904		49,18%			
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00 %		98.61%		100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		98,61 %	98,61 %					
				Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparat pemerintah yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85,00 %		100.00%		75,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %	117,65 %					
				Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85,00 %		100.00%		75,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %	117,65 %					
				Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85,00 %		100.00%		75,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %	117,65 %					
		2.1.2.01.02.0008	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan			2140 lembaga	605,961	2401	157,391	0	175,001	0	0	0	0	2180	332,392	101.87%	54.85%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0014	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi			4 dokumen	826,858	52254	158,646	0	182,294	0	0	0	0	0	340,940	0.00%	41.23%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0016	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota			4 dokumen	872,473	0	256,837	0	156,530	0	0	0	0	0	413,367	0.00%	47.38%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0017	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun			2 dokumen	638,192	0	85,477	1	225,954	0	0	0	0	1	311,432	50.00%	48.80%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0018	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	139,429	4	12,825	0	32,673	0	0	0	0	4	45,498	23.53%	32.63%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0019	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun			6 dokumen	1,133,648	0	28,000	1	373,794	0	0	0	0	1	401,794	16.67%	35.44%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0020	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat			1 dokumen	448,744	0	54,901	1	82,090	0	0	0	0	1	136,990	100.00%	30.53%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0021	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun			2 dokumen	524,965	0	95,228	2	110,412	0	0	0	0	2	205,640	100.00%	39.17%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0022	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun			10 dokumen	1,298,177	0	212,093	0	308,517	0	0	0	0	0	520,610	0.00%	40.10%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0024	Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun			2 dokumen	798,834	0	161,606	1	157,150	0	0	0	0	1	318,756	50.00%	39.90%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0025	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun			6 dokumen	1,462,207	1	176,675	2	306,302	0	0	0	0	3	482,977	50.00%	33.03%			Bagian Administrasi Pembangunan				
		2.1.2.01.02.0035	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	705,974	4	4,173	1	155,951	0	0	0	0	5	160,124	29.41%	22.68%			Bagian Umum dan Protokol				
		2.1.2.01.02.0039	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	121,665	4	6,785	0	19,140	0	0	0	0	4	25,925	23.53%	21.31%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		2.1.2.01.02.0040	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	536,819	4	955	0	49,916	0	0	0	0	4	50,871	23.53%	9.48%			Dinas Kesehatan				
		2.1.2.01.02.0043	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	502,545	4	168,815	0	69,844	0	0	0	0	4	238,659	23.53%	47.49%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13	15=14/6x100%	16						
		2.1.2.01.02. 0044	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	325,305	4	11,018	0	44,201	0	0	0	0	4	55,219	23.53%	16.97%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.1.2.01.02. 0047	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	439,134	4	20,145	3	70,427	0	0	0	0	7	90,572	41.18%	20.63%			Dinas Pendidikan		
		2.1.2.01.02. 0054	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	313,870	4	8,824	0	54,402	0	0	0	0	4	63,226	23.53%	20.14%			Inspektorat		
		2.1.2.01.02. 0055	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	153,881	4	2,992	0	30,047	0	0	0	0	4	33,039	100.00%	21.47%			Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.02. 0057	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	170,325	4	3,960	0	39,255	0	0	0	0	4	43,215	100.00%	25.37%			Kec. Benowo		
		2.1.2.01.02. 0059	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	199,292	4	5,370	0	39,678	0	0	0	0	4	45,048	100.00%	22.60%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.02. 0061	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	200,066	4	5,725	0	30,010	0	0	0	0	4	35,735	100.00%	17.86%			Kec. Bulak		
		2.1.2.01.02. 0063	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	167,877	4	2,975	0	7,112	0	0	0	0	4	10,087	100.00%	6.01%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.02. 0065	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	180,863	4	6,523	0	30,041	0	0	0	0	4	36,564	100.00%	20.22%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.02. 0067	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	238,634	4	4,101	0	47,831	0	0	0	0	4	51,932	100.00%	21.76%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.02. 0069	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	260,305	4	7,006	0	47,904	0	0	0	0	4	54,909	100.00%	21.09%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.02. 0071	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	168,564	4	5,480	0	38,029	0	0	0	0	4	43,509	100.00%	25.81%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.02. 0073	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	157,436	4	6,183	0	29,655	0	0	0	0	4	35,837	100.00%	22.76%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.02. 0075	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	198,664	4	3,818	0	24,572	0	0	0	0	4	28,390	100.00%	14.29%			Kec. Karangpilang		
		2.1.2.01.02. 0077	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	168,692	4	8,145	0	27,796	0	0	0	0	4	35,940	100.00%	21.31%			Kec. Kenjeran		
		2.1.2.01.02. 0079	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	259,077	4	14,881	0	48,956	0	0	0	0	4	63,837	100.00%	24.64%			Kec. Krembangan		
		2.1.2.01.02. 0081	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	254,022	4	6,589	0	44,001	0	0	0	0	4	50,590	100.00%	19.92%			Kec. Lakarsantri		
		2.1.2.01.02. 0083	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	219,330	4	2,864	0	45,257	0	0	0	0	4	48,121	100.00%	21.94%			Kec. Mulyorejo		
		2.1.2.01.02. 0085	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	204,186	4	6,906	0	43,054	0	0	0	0	4	49,960	100.00%	24.47%			Kec. Pabean Cantian		
		2.1.2.01.02. 0087	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	198,340	4	3,836	0	40,172	0	0	0	0	4	44,007	100.00%	22.19%			Kec. Pakal		
		2.1.2.01.02. 0089	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	301,094	4	5,335	0	54,610	0	0	0	0	4	59,944	100.00%	19.91%			Kec. Rungkut		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6x100%	16												
		2.1.2.01.02. 0091	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	198,780	4	4,988	0	40,076	0	0	0	0	4	45,064	100.00%	22.67%					Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.02. 0093	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	234,212	24	5,582	0	61,212	0	0	0	0	4	66,793	100.00%	28.52%					Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02. 0095	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	179,782	4	6,470	0	39,534	0	0	0	0	4	46,004	100.00%	25.59%					Kec. Semampir		
		2.1.2.01.02. 0097	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	206,267	4	6,375	0	39,542	0	0	0	0	4	45,916	100.00%	22.26%					Kec. Simokerto		
		2.1.2.01.02. 0099	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	275,816	4	6,025	0	53,591	0	0	0	0	4	59,616	100.00%	21.61%					Kec. Sukolilo		
		2.1.2.01.02. 0101	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	251,251	4	5,890	0	47,546	0	0	0	0	4	53,436	100.00%	21.27%					Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02. 0103	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	287,119	4	8,350	0	58,470	0	0	0	0	4	66,820	100.00%	23.27%					Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02. 0105	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	278,509	4	6,026	0	50,209	0	0	0	0	4	56,235	100.00%	20.19%					Kec. Tandes		
		2.1.2.01.02. 0107	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	177,486	4	5,702	0	29,435	0	0	0	0	4	35,137	100.00%	19.80%					Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.02. 0109	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	212,544	4	7,334	0	32,892	0	0	0	0	4	40,226	100.00%	18.93%					Kec. Tenggilis Mejaya		
		2.1.2.01.02. 0111	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	188,736	4	4,077	0	38,099	0	0	0	0	4	42,176	100.00%	22.35%					Kec. Wiyung		
		2.1.2.01.02. 0113	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	233,521	4	4,364	0	40,357	0	0	0	0	4	44,721	100.00%	19.15%					Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.02. 0117	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	34,874	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0	29.41%	0.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada		
		2.1.2.01.02. 0118	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			17 dokumen	34,874	4	10,645	1	1,386	0	0	0	0	5	12,031	29.41%	34.50%					RSUD Dr. Mahamad Soewandie		
		2.1.2.01.02. 0121	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakarya, Perumahan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Perumahan dan Lingkungan Hidup			1 dokumen	1,031,940	0	94,796	0	138,448	0	0	0	0	0	233,244	0.00%	22.60%					Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.01.02. 0122	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun			2 dokumen	591,274	0	58,686	2	204,145	0	0	0	0	2	262,831	100.00%	44.45%					Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.01.02. 0123	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi			12 kali	672,377	3	104,539	3	106,865	0	0	0	0	6	211,405	50.00%	31.44%					Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.01.02. 0125	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	120,786	14	2,271	7	24,109	0	0	0	0	21	26,380	43.75%	21.84%					Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.02. 0126	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	258,609	4	7,767	0	51,412	0	0	0	0	4	59,179	100.00%	22.88%					Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.02. 0127	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	216,088	290	9,967	12	44,645	0	0	0	0	24	54,612	50.00%	25.27%					Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.02. 0128	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	183,941	0	0	12	37,017	0	0	0	0	12	37,017	25.00%	20.12%					Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02. 0129	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	128,556	12	1,981	8	32,632	0	0	0	0	20	34,613	41.67%	26.92%					Kec. Benowo		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		2.1.2.01.02.0130	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	163,084	270	8,172	20	33,639	0	0	0	0	47	41,811	97.92%	25.64%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.02.0131	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	148,761	12	1,857	0	24,767	0	0	0	0	12	26,624	25.00%	17.90%			Kec. Bulak		
		2.1.2.01.02.0132	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	141,266	12	6,098	10	21,465	0	0	0	0	22	27,562	45.83%	19.51%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.02.0133	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	157,722	12	2,118	8	24,653	0	0	0	0	20	26,771	41.67%	16.97%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.02.0134	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	171,364	12	800	8	36,990	0	0	0	0	20	37,789	41.67%	22.05%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.02.0135	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	189,871	72	1,644	12	35,334	0	0	0	0	24	36,978	50.00%	19.48%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.02.0136	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	124,775	58	1,711	12	31,954	0	0	0	0	24	33,665	50.00%	26.98%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.02.0137	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	109,163	8	0	4	21,743	0	0	0	0	12	21,743	25.00%	19.92%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.02.0138	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	134,890	28	900	20	25,172	0	0	0	0	48	26,072	100.00%	19.33%			Kec. Karangpilang		
		2.1.2.01.02.0139	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	125,565	60	2,109	12	25,063	0	0	0	0	24	27,172	50.00%	21.64%			Kec. Kenjeran		
		2.1.2.01.02.0140	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	216,346	9	5,126	15	38,234	0	0	0	0	24	43,361	50.00%	20.04%			Kec. Krembangan		
		2.1.2.01.02.0141	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	174,316	18	1,250	26	36,588	0	0	0	0	35	37,838	72.92%	21.71%			Kec. Lakarsantri		
		2.1.2.01.02.0142	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	155,650	12	0	8	29,108	0	0	0	0	20	29,108	41.67%	18.70%			Kec. Mulyorejo		
		2.1.2.01.02.0143	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	171,027	12	5,100	8	33,728	0	0	0	0	20	38,828	41.67%	22.70%			Kec. Pabean Cantian		
		2.1.2.01.02.0144	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	148,743	12	1,604	15	32,604	0	0	0	0	27	34,208	56.25%	23.00%			Kec. Pakal		
		2.1.2.01.02.0145	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	231,493	12	2,646	8	37,398	0	0	0	0	20	40,044	41.67%	17.30%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.02.0146	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	145,847	12	1,761	8	29,246	0	0	0	0	20	31,007	41.67%	21.26%			Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.02.0147	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	168,637	12	4,549	12	11,719	0	0	0	0	24	16,267	50.00%	9.65%			Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02.0148	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	116,328	15	2,340	10	29,704	0	0	0	0	25	32,044	52.08%	27.55%			Kec. Semampir		
		2.1.2.01.02.0149	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	162,795	12	9,030	60	33,360	0	0	0	0	72	42,390	150.00%	26.04%			Kec. Simokerto		
		2.1.2.01.02.0150	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	190,050	12	2,229	0	40,493	0	0	0	0	12	42,722	25.00%	22.48%			Kec. Sukolilo		
		2.1.2.01.02.0151	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	183,226	10	1,800	15	38,060	0	0	0	0	25	39,860	52.08%	21.75%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02.0152	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	215,147	12	6,802	8	43,390	0	0	0	0	20	50,191	41.67%	23.33%			Kec. Tandes		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						K		Rp.(000)	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13		15=14/6x100%		16
		2.1.2.01.02.0153	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	160,147	10	2,047	10	31,980	0	0	0	0	20	34,028	41.67%	21.25%					Kec. Tegalsari
		2.1.2.01.02.0154	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	167,850	8	5,044	12	29,957	0	0	0	0	20	35,001	41.67%	20.85%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.0155	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	154,199	12	4,590	8	31,881	0	0	0	0	20	36,471	41.67%	23.65%					Kec. Wiyung
		2.1.2.01.02.0156	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	170,414	15	1,287	5	30,416	0	0	0	0	20	31,703	41.67%	18.60%					Kec. Wonocolo
		2.1.2.02	Keuangan																								
59	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	2.1.2.02.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			25,082,100		10,192,431		6,898,231		1,291,525		1,634,761		0,00		0,00		2,926,286		42,42%		13,118,717	52,30%		
				Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80,00 %		100.00%		80,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		125,00%		100,00 %		125,00 %		
		2.1.2.02.01.0001	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah					4 dokumen	57,969	1	10,245	1	14,260	0	0	0	0	2	24,505	50.00%	42.27%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0002	Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah					4 dokumen	160,190	1	34,395	1	25,902	0	0	0	0	2	60,297	50.00%	37.64%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0003	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani					72000 berkas	3,121,440	11696	322,014	19537	811,972	0	0	0	0	31233	1,133,986	43.38%	36.33%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0004	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola					245 dokumen	337,635	62	51,762	49	103,695	0	0	0	0	111	155,457	45.31%	46.04%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0005	Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun					5 laporan	954,364	1	179,034	0	126,656	0	0	0	0	1	305,690	20.00%	32.03%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0007	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun					22 dokumen	1,151,117	7	237,618	9	265,421	0	0	0	0	16	503,038	72.73%	43.70%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0008	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun					4 dokumen	850,748	3	446,769	2	269,523	0	0	0	0	5	716,292	125.00%	84.20%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.01.0011	Pengembangan Sistem Penganggaran	Jumlah sistem penganggaran yang dikembangkan					1 sistem	264,768	1	9,689	1	17,333	0	0	0	0	1	27,021	100.00%	10.21%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah			170,414,651		51,898,677		29,704,654		5,319,590		9,503,525		0,00		0,00		14,823,115		49,90%		66,721,792	39,15%		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah		81,70 %		26.83%		33,53 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		-57,28 %		-170.83%		26,83 %		32,84 %		
		2.1.2.02.02.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					23656 obyek	4,905,335	13453	1,062,928	13218	1,303,954	0	0	0	0	26671	2,366,882	112.75%	48.25%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPI dan Parkir	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPI dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					5496 obyek	9,079,325	18724	1,527,487	17806	3,655,052	0	0	0	0	36530	5,182,539	664.67%	57.08%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					672096 obyek	11,087,452	683772	1,660,526	3803	3,144,319	0	0	0	0	687575	4,804,845	102.30%	43.34%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2.02.02.0004	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPI dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, Angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPI dan Parkir yang ditagih dan dilayani					6852 berkas	1,008,084	2216	358,978	2134	271,065	0	0	0	0	4350	630,043	63.49%	62.50%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						K		Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13		15=14/6x100%		16					
		2.1.2.02.02.0005	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani			4376 berkas	806,976	2966	129,849	2939	329,442	0	0	0	0	0	0	5905	459,291	134.94%	56.92%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
		2.1.2.02.02.0006	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani			195392 berkas	2,817,481	63810	579,822	59567	799,693	0	0	0	0	0	0	123377	1,379,515	63.14%	48.96%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
		2.1.2.03	Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah																							
60	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	2.1.2.03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		31,332,209	6,267,523		3,160,159		347,938		734,296		0,00		0,00			1,082,235		34,25%		7,349,757		23,46%	
				Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,00 %			
				Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%	100,00 %		100,00 %				
				Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	75,00 %		43.47%	45,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		35,48 %		78,84%	43,47 %		57,97 %				
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%	100,00 %		100,00 %				
		2.1.2.03.01.0001	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun			2 dokumen	603,798	0	169,760	0	136,678	0	0	0	0	0	0	306,438	0.00%	50.75%				Bagian Organisasi	
		2.1.2.03.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun			1 dokumen	386,799	0	34,342	0	72,950	0	0	0	0	0	0	107,291	0.00%	27.74%				Bagian Organisasi	
		2.1.2.03.01.0003	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi			155 POS	637,900	0	63,964	0	104,959	0	0	0	0	0	0	168,923	0.00%	26.48%				Bagian Organisasi	
		2.1.2.03.01.0004	Peningkatan Implementasi Standar Pelayanan	Jumlah unit pelayanan yang dilakukan peningkatan implementasi standar pelayanan			264 lembaga	260,311	0	28,488	0	52,434	0	0	0	0	0	0	80,922	0.00%	31.09%				Bagian Organisasi	
		2.1.2.03.01.0006	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja dan Monitoring Implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun			2 dokumen	529,928	1	49,135	0	50,770	0	0	0	0	0	1	99,905	50.00%	18.85%				Bagian Organisasi	
		2.1.2.03.01.0008	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat			254 lembaga	741,423	0	2,250	0	316,506	0	0	0	0	0	0	318,756	0.00%	42.99%				Bagian Organisasi	
		2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		25,811,197	10,295,549		5,917,655		1,004,778		900,741		0,00		0,00			1,905,519		32,20%		12,201,068		47,27%	
				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100,00 %		103.80%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		40.51 %		40.51%	105,06 %		105,06 %				
				Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%	100,00 %		100,00 %				
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%	100,00 %		100,00 %				
				Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%	100,00 %		100,00 %				
		2.1.2.03.02.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah			12 dokumen	302,547	3	45,665	3	40,529	0	0	0	0	6	86,194	50.00%	28.49%				Bagian Hukum		
		2.1.2.03.02.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani			65 permasalahan hukum	2,906,014	12	491,949	15	475,298	0	0	0	0	27	967,247	41.54%	33.28%				Bagian Hukum		
		2.1.2.03.02.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun			70 rancangan produk hukum	1,534,211	15	248,468	19	218,434	0	0	0	0	34	466,902	48.57%	30.43%				Bagian Hukum		
		2.1.2.03.02.0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi			70 produk hukum	1,174,883	13	218,696	17	166,480	0	0	0	0	30	385,176	42.86%	32.78%				Bagian Hukum		
		2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom		641,328,535	256,316,278		73,938,252		14,768,038		15,942,628		0,00		0,00			30,710,665		41,54%		287,026,943		44,76%	
				Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100,00 %		100.00%	100,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%	100,00 %		100,00 %				
				Persentase nama rubabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100,00 %		64.00%	71,27 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		64,00 %		89,80%	64,00 %		64,00 %				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13	15=14/6x100%				16					
		2.1.2.03.03.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			2 dokumen	756,516	0	112,290	0	162,419	0	0	0	0	0	274,709	0.00%	36.31%				Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
		2.1.2.03.03.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan			1 kali	515,569	1	117,629	0	73,588	0	0	0	0	1	191,217	100.00%	37.09%				Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
		2.1.2.03.03.0003	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan			115 objek	532,767	0	46,080	0	64,501	0	0	0	0	0	110,581	0.00%	20.76%				Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
		2.1.2.03.03.0004	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan			185 lembaga	926,805	0	57,424	0	201,946	0	0	0	0	0	259,371	0.00%	27.99%				Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
		2.1.2.03.03.0005	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan			16 kali	3,108,929	0	229,146	0	399,617	0	0	0	0	0	628,763	0.00%	20.22%				Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
		2.1.2.03.03.0006	Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan			1 dokumen	1,600,072	0	125,319	0	146,989	0	0	0	0	0	272,307	0.00%	17.02%				Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
		2.1.2.03.03.0161	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			139 Lembaga	964,843	140	191,550	140	174,566	0	0	0	0	141	366,116	101.44%	37.95%				Kec. Asemrowo			
		2.1.2.03.03.0162	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			183 Lembaga	1,216,197	183	252,600	183	304,428	0	0	0	0	187	557,028	102.19%	45.80%				Kec. Benowo			
		2.1.2.03.03.0163	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			414 Lembaga	2,570,283	415	567,750	416	629,825	0	0	0	0	526	1,197,575	127.05%	46.59%				Kec. Bubutan			
		2.1.2.03.03.0164	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			157 Lembaga	1,122,330	157	216,900	157	253,925	0	0	0	0	157	470,825	100.00%	41.95%				Kec. Bulak			
		2.1.2.03.03.0165	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			195 Lembaga	1,293,730	196	269,700	195	284,625	0	0	0	0	196	554,325	100.51%	42.85%				Kec. Dukuh Pakis			
		2.1.2.03.03.0166	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			197 Lembaga	1,334,797	197	272,250	197	324,143	0	0	0	0	197	596,393	100.00%	44.68%				Kec. Gayungan			
		2.1.2.03.03.0167	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			364 Lembaga	2,242,383	368	335,200	364	553,204	0	0	0	0	368	888,404	101.10%	39.62%				Kec. Genteng			
		2.1.2.03.03.0168	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			480 Lembaga	2,944,903	480	658,500	480	726,237	0	0	0	0	480	1,384,737	100.00%	47.02%				Kec. Gubeng			
		2.1.2.03.03.0169	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			215 Lembaga	1,436,897	215	296,400	215	242,260	0	0	0	0	215	538,660	100.00%	37.49%				Kec. Gunung Anyar			
		2.1.2.03.03.0170	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			168 Lembaga	1,143,683	168	232,500	168	202,042	0	0	0	0	168	434,542	100.00%	37.99%				Kec. Jambangan			
		2.1.2.03.03.0171	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			220 Lembaga	1,416,830	220	301,350	220	344,791	0	0	0	0	220	646,141	100.00%	45.60%				Kec. Karangpilang			
		2.1.2.03.03.0172	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			455 Lembaga	2,696,663	458	621,750	456	665,469	0	0	0	0	458	1,287,219	100.66%	47.73%				Kec. Kenjeran			
		2.1.2.03.03.0173	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			430 Lembaga	2,655,233	430	503,350	430	733,471	0	0	0	0	430	1,236,821	100.00%	46.58%				Kec. Krembangan			
		2.1.2.03.03.0174	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			199 Lembaga	1,444,437	199	274,150	196	324,901	0	0	0	0	200	599,051	100.50%	41.47%				Kec. Lakarsantri			
		2.1.2.03.03.0175	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			346 Lembaga	2,041,587	346	477,750	346	373,680	0	0	0	0	346	851,430	100.00%	41.70%				Kec. Mulyorejo			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13				15=14/6x100%				16		
		2.1.2.03.03.0176	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			377 Lembaga	2,289,167	377	519,000	377	535,273	0	0	0	0	377	1,054,273	100.00%	46.05%					Kec. Pabean Cantian		
		2.1.2.03.03.0177	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			226 Lembaga	1,512,930	226	208,000	226	355,864	0	0	0	0	226	563,864	100.00%	37.27%					Kec. Pakal		
		2.1.2.03.03.0178	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			486 Lembaga	2,977,753	487	672,600	488	637,376	0	0	0	0	489	1,309,976	100.62%	43.99%					Kec. Rungkut		
		2.1.2.03.03.0179	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			250 Lembaga	1,642,531	250	344,850	250	396,496	0	0	0	0	250	741,346	100.00%	45.13%					Kec. Sambikerep		
		2.1.2.03.03.0180	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			627 Lembaga	3,547,780	626	858,600	626	648,578	0	0	0	0	626	1,507,178	99.84%	42.48%					Kec. Sawahan		
		2.1.2.03.03.0181	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			636 Lembaga	3,728,450	636	871,350	636	921,955	0	0	0	0	717	1,793,305	112.74%	48.10%					Kec. Semampir		
		2.1.2.03.03.0182	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			356 Lembaga	2,274,383	427	490,050	356	380,035	0	0	0	0	428	870,085	120.22%	38.26%					Kec. Simokerto		
		2.1.2.03.03.0183	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			439 Lembaga	2,797,123	439	605,850	439	687,238	0	0	0	0	440	1,293,088	100.23%	46.23%					Kec. Sukotilo		
		2.1.2.03.03.0184	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			323 Lembaga	2,057,270	323	444,150	323	348,865	0	0	0	0	323	793,015	100.00%	38.55%					Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.03.03.0185	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			748 Lembaga	4,465,943	748	1,025,100	748	760,233	0	0	0	0	839	1,785,333	112.17%	39.98%					Kec. Tambaksari		
		2.1.2.03.03.0186	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			371 Lembaga	2,356,503	373	511,200	371	580,449	0	0	0	0	375	1,091,649	101.08%	46.32%					Kec. Tandes		
		2.1.2.03.03.0187	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			366 Lembaga	2,298,850	366	503,550	366	567,499	0	0	0	0	368	1,071,049	100.55%	46.59%					Kec. Tegalsari		
		2.1.2.03.03.0188	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			185 Lembaga	1,237,297	185	255,300	185	212,805	0	0	0	0	185	468,105	100.00%	37.83%					Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2.03.03.0189	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			210 Lembaga	1,440,063	630	290,400	210	251,343	0	0	0	0	212	541,743	100.95%	37.62%					Kec. Wiyung		
		2.1.2.03.03.0190	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			278 Lembaga	1,830,617	278	222,150	278	606,609	0	0	0	0	278	828,759	100.00%	45.27%					Kec. Wonocolo		
		2.1.2.03.03.0191	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			574 Lembaga	3,516,137	574	786,300	574	865,384	0	0	0	0	574	1,651,684	100.00%	46.97%					Kec. Wonokromo		
		2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			15,377,805	4,240,079	2,032,828	214,041	291,818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,858	24,88%	4,745,937	30,86%								
				Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25,00 %	40,00%	25,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	40,00 %	160,00 %								
				Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00 %	100,00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %									
		2.1.2.03.04.0001	Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang ketahanan masyarakat yang disusun			1 dokumen	172,483	0	1,866	0	28,648	0	0	0	0	0	30,514	0.00%	17.69%					Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2.03.04.0002	Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun			2 dokumen	244,948	0	51,936	1	38,956	0	0	0	0	1	90,892	50.00%	37.11%					Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2.03.04.0003	Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat yang disusun			2 dokumen	304,542	0	7,539	0	42,265	0	0	0	0	0	49,804	0.00%	16.35%					Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						K		Rp.(000)	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		2.1.2.03.04.0004	Evaluasi Program Layanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Layanan Masyarakat					1 dokumen	174,071	0	0	0	33,387	0	0	0	0	0	33,387	0.00%	19.18%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2.03.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro					4 dokumen	392,672	0	15,600	1	27,530	0	0	0	0	1	43,130	25.00%	10.98%			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah		
		2.1.2.03.04.0007	Fasilitasi penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat yang diselenggarakan					19 kali	269,735	3	42,937	1	38,755	0	0	0	0	4	81,691	21.05%	30.29%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2.03.04.0008	Fasilitasi Penunjang Sekretariat Komda Lansia	Jumlah kegiatan fasilitasi penunjang sekretariat Komda Lansia					3 kali	236,447	1	42,980	1	57,044	0	0	0	0	2	100,024	66.67%	42.30%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2.03.04.0009	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah yang diselenggarakan					31 kali	237,930	5	51,183	4	25,234	0	0	0	0	9	76,417	29.03%	32.12%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2.03.05	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah			542,885,870		178,718,821		102,333,617		13,561,844		12,751,474		0,00		0,00		26,313,318		25,71%		205,032,139		37,77%	
				Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %				
				Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		99,91 %		99,91%		100,00 %		100,00 %		
		2.1.2.03.05.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD					38 kali	3,266,537	13	403,402	8	535,566	0	0	0	0	21	938,968	55.26%	28.75%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0002	Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah jenis media publikasi kegiatan DPRD					5 jenis	16,805,321	7	3,658,581	8	5,131,030	0	0	0	0	10	8,789,611	200.00%	52.30%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0003	Fasilitasi Reses DPRD	Jumlah Fasilitasi Reses					2 kali	8,488,279	0	0	1	35,089	0	0	0	0	1	35,089	50.00%	0.41%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD					185 kali	61,542,102	62	8,202,860	34	5,031,443	0	0	0	0	96	13,234,303	51.89%	21.50%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang dibahas					6 dokumen	2,371,664	0	288,351	2	214,387	0	0	0	0	2	502,738	33.33%	21.20%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0006	Penyusunan Dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen kajian/telaah terhadap kebijakan daerah yang disusun					10 dokumen	1,362,828	0	15,299	0	32,050	0	0	0	0	0	47,349	0.00%	3.47%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0007	Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan					264 kali	1,269,937	62	85,457	63	99,283	0	0	0	0	125	184,740	47.35%	14.55%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0008	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan					930 kali	2,803,208	179	317,039	124	201,762	0	0	0	0	303	518,801	32.58%	18.51%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan					45 kali	1,857,260	4	91,409	7	221,785	0	0	0	0	11	313,194	24.44%	16.86%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.05.0010	Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi					240 kali	2,566,479	42	499,446	43	1,249,081	0	0	0	0	85	1,748,527	35.42%	68.13%				Sekretariat DPRD	
		2.1.2.03.06	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			34,295,564		20,908,034		12,345,837		2,519,484		2,344,338		0,00		0,00		4,863,821		39,40%		25,771,856		75,15%	
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100,00 %		100.00%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		
		2.1.2.03.06.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100%	12,345,837	100	2,519,484	100	2,344,338	0	0	0	0	100	4,863,821	100.00%	39.40%				Bagian Umum dan Protokol	
		2.1.2.03.07	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			100,767,636		21,765,881		11,334,541		825,122		694,638		0,00		0,00		1,519,760		13,41%		23,285,641		23,11%	
				Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86 %		70.59%		42,86 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		69,70 %		162,62%		70,59 %		164,69 %		
				Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33 %		80.00%		33,33 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		80,00 %		240,02%		80,00 %		240,02 %		
				Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	100,00 %		60.00%		75,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		60,00 %		80,00%		60,00 %		60,00 %		
		2.1.2.03.07.0001	Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kegiatan delegasi internasional di dalam negeri					10 kali	751,063	5	114,036	2	168,778	0	0	0	0	7	282,814	70.00%	37.66%				Bagian Administrasi Kerjasama	
		2.1.2.03.07.0002	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri non perdagangan yang difasilitasi					16 lembaga	1,191,243	11	421,574	15	155,742	0	0	0	0	26	577,316	162.50%	48.46%				Bagian Administrasi Kerjasama	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%		16								
		2.1.2.03.07.0003	Facilitasi Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama luar negeri non perdagangan yang difasilitasi			4 lembaga	1,593,010	0	178,437	2	243,327	0	0	0	0	2	421,763	50.00%	26.48%				Bagian Administrasi Kerjasama			
		2.1.2.03.07.0004	Facilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi			78 orang	7,258,250	0	53,376	11	35,144	0	0	0	0	11	88,519	14.10%	1.22%				Bagian Administrasi Kerjasama			
		2.1.2.03.07.0005	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi			26 lembaga	384,135	0	52,500	0	62,074	0	0	0	0	0	114,574	0.00%	29.83%				Bagian Administrasi Kerjasama			
		2.1.2.03.07.0007	Pelaksanaan Rekomendasi Roadmap Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekomendasi road map kerjasama daerah			5 kali	156,841	0	5,200	2	29,574	0	0	0	0	2	34,774	40.00%	22.17%				Bagian Administrasi Kerjasama			
61	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	2.1.2.03.08	Program Kerjasama Bidang Perdagangan		2,584,908	492,808		236,246	4,314	11,334		0,00		0,00		15,648	6,62%	508,457		19,67%							
				Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	100,00 %	57.14%	71,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		71,43 %	100,00%	57,14 %	57,14 %										
				Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	85,71 %	75.00%	80,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		80,00 %	100,00%	75,00 %	87,50 %										
		2.1.2.03.08.0001	Facilitasi Kerjasama Dalam Negeri Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti			5 lembaga	236,246	2	4,314	0	11,334	0	0	0	0	2	15,648	40.00%	6.62%				Bagian Administrasi Kerjasama			
62	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	2.1.2.03.09	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah		2,237,691	2,727,290		1,495,143	205,400	121,833		0,00		0,00		327,233	21,89%	3,054,524		136,50%							
				Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	83,00 %	66.67%	67,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		66,67 %	99,50%	66,67 %		80,32 %							
		2.1.2.03.09.0001	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi			6 lembaga	1,153,786	6	205,400	6	105,806	0	0	0	0	6	311,206	100.00%	26.97%				Bagian Administrasi Perencanaan dan Usaha Daerah			
		2.1.2.03.09.0003	Review Peraturan Daerah tentang BUMD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah BUMD yang direview			4 dokumen	341,357	0	0	0	16,027	0	0	0	0	0	16,027	0.00%	4.70%				Bagian Administrasi Perencanaan dan Usaha Daerah			
		2.1.2.04	Pengawasan																								
63	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat pemerintah	2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal		31,964,247	11,048,265		4,623,539	459,148	854,986		0,00		0,00		1,314,134	28,42%	12,362,399		38,68%							
				Persentase penanganan disiplin aparat wilayah I	100,00 %	100.00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	100,00%	100,00 %		100,00 %							
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100,00 %	100.00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		100,00 %	100,00%	100,00 %		100,00 %							
				Persentase penanganan disiplin aparat wilayah II	100,00 %	100.00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	100,00%	100,00 %		100,00 %							
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100,00 %	100.00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	100,00%	100,00 %		100,00 %							
				Persentase penanganan disiplin aparat wilayah III	100,00 %	100.00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	100,00%	100,00 %		100,00 %							
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100,00 %	100.00%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %	100,00%	100,00 %		100,00 %							
		2.1.2.04.01.0001	Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai			633 orang	713,027	119	127,499	103	103,875	0	0	0	0	222	231,374	35.07%	32.45%				Badan Kepegawaian dan Diklat			
		2.1.2.04.01.0002	Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu			2 dokumen	201,448	0	7,098	1	28,078	0	0	0	0	1	35,176	50.00%	17.46%				Inspektorat			
		2.1.2.04.01.0003	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan			12 dokumen	316,594	3	40,485	2	62,838	0	0	0	0	5	103,323	41.67%	32.64%				Inspektorat			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14=7+13		15=14/6x100%		16						
		2.1.2.04.01.0008	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	503,663	23	41,231	10	97,606	0	0	0	0	33	138,837	94.29%	27.57%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0009	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	387,616	20	75,369	11	63,669	0	0	0	0	29	139,038	82.86%	35.87%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0010	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	471,282	41	52,061	4	96,980	0	0	0	0	38	149,041	108.57%	31.62%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0011	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	308,171	11	14,664	23	45,537	0	0	0	0	23	60,201	65.71%	19.53%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0013	Revisi Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan revisi penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	384,603	18	9,489	18	117,123	0	0	0	0	18	126,612	100.00%	32.92%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0014	Revisi Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan revisi penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	384,087	18	59,145	18	68,855	0	0	0	0	18	128,000	100.00%	33.33%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0015	Revisi Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan revisi penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	363,850	11	726	18	80,112	0	0	0	0	18	80,838	100.00%	22.22%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0016	Revisi Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan revisi penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	237,305	19	1,551	18	35,346	0	0	0	0	19	36,897	105.56%	15.55%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0017	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP			50 kali	163,337	8	24,629	5	21,789	0	0	0	0	13	46,418	26.00%	28.42%			Inspektorat		
		2.1.2.04.01.0018	Revisi Dokumen Perencanaan Tingkat Kota	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang direvisi			1 dokumen	188,554	0	5,200	1	33,181	0	0	0	0	1	38,381	100.00%	20.36%			Inspektorat		
		2.2	Unsur Manajemen																						
		2.02:02	Non Pelayanan Dasar																						
		2.2.2.01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																						
64	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		103,415,798	25,648,860		18,529,866		2,779,366		2,906,599		0,00		0,00		5,685,965		30,69%		31,334,825		30,30%	
				Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	97,08 %	78.24%		92,58 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		78,24 %		84,51%		78,24 %		80,60 %	
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	89,47 %	70.46%		62,52 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		70,46 %		112,70%		70,46 %		78,76 %	
				Persentase terbentuknya dan berfungsinya assesment centre	100,00 %	70.00%		60,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		80,00 %		133,33%		70,00 %		70,00 %	
				Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	95,00 %	96.68%		93,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		96,68 %		103,95%		96,68 %		101,76 %	
		2.2.2.01.01.0002	Pelaksanaan Assesment Centre	Jumlah pelaksanaan assesment pegawai			5 kali	492,057	3	74,696	2	40,997	0	0	0	0	5	115,693	100.00%	23.51%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0003	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian			9513 berkas	738,125	3836	116,477	820	121,241	0	0	0	0	4656	237,718	48.94%	32.21%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0004	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural			2 jenis	2,259,865	3	409,614	3	437,498	0	0	0	0	5	847,112	250.00%	37.49%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0005	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial			2 jenis	4,115,798	1	146,485	1	144,126	0	0	0	0	2	290,611	100.00%	7.06%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0007	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis			2 jenis	2,712,226	2	341,749	5	1,542,964	0	0	0	0	6	1,884,713	300.00%	69.49%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0008	Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan			127 berkas	1,026,323	68	138,959	39	157,968	0	0	0	0	107	296,927	84.25%	28.93%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0009	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola			9000 data	462,783	4290	6,838	664	48,841	0	0	0	0	4954	55,679	55.04%	12.03%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0010	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya			439 orang	3,199,162	210	1,356,985	85	171,405	0	0	0	0	295	1,528,390	67.20%	47.77%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0011	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kerjanya			6954 orang	647,623	7046	104,939	223	98,257	0	0	0	0	6958	203,196	100.06%	31.38%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2.01.01.0012	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)			3 materi	359,504	0	24,266	0	59,827	0	0	0	0	0	84,092	0.00%	23.39%					Badan Kepegawaian dan Diklat

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16		
		2.2.01.01.0013	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Calon PNS					4 tahap	2,224,079	0	41,377	0	34,921	0	0	0	0	0	76,298	0.00%	3.43%			Badan Kepegawaian dan Diklat		
		2.2.01.01.0014	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian					3500 orang	292,320	0	16,981	1500	48,554	0	0	0	0	1500	65,535	42.86%	22.42%			Badan Kepegawaian dan Diklat		
		2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran																								
65	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,636,274,912		841,264,411		499,563,135		78,551,567		100,766,613		0,00		0,00		179,318,180		35,89%		1,020,582,591	38,71%		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80,00 %		86.97%		76,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		86,97 %		114,44%		86,97 %		108,72 %		
		2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,793,513	6	440,888	8	585,417	0	0	0	0	8	1,026,305	8.00%	36.74%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,513,902	18	229,779	15	344,305	0	0	0	0	33	574,084	33.00%	37.92%			Badan Kepegawaian dan Diklat		
		2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,093,182	12	151,925	12	225,729	0	0	0	0	24	377,654	24.00%	34.55%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		
		2.2.2.02.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,915,551	19	380,094	10	313,952	0	0	0	0	29	694,046	29.00%	36.23%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,241,804	15	187,010	14	413,735	0	0	0	0	29	600,745	29.00%	48.38%			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.2.2.02.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,784,467	15	697,198	10	860,654	0	0	0	0	25	1,557,852	25.00%	41.16%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		2.2.2.02.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,061,609	11	188,554	10	421,458	0	0	0	0	21	610,012	21.00%	29.59%			Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat		
		2.2.2.02.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,706,452	6	563,718	5	565,094	0	0	0	0	6	1,128,812	6.00%	41.71%			Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.2.2.02.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,074,280	5	143,967	6	220,947	0	0	0	0	6	364,914	6.00%	33.97%			Bagian Administrasi Pembangunan		
		2.2.2.02.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,709,704	15	424,526	11	535,845	0	0	0	0	26	960,371	26.00%	35.44%			Bagian Hubungan Masyarakat		
		2.2.2.02.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	779,237	17	110,825	13	150,943	0	0	0	0	30	261,768	30.00%	33.59%			Bagian Hukum		
		2.2.2.02.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,165,513	15	161,778	14	262,518	0	0	0	0	29	424,296	29.00%	36.40%			Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.2.2.02.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	914,717	15	159,023	7	187,336	0	0	0	0	22	346,359	22.00%	37.87%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.2.2.02.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	580,137	13	98,141	10	81,872	0	0	0	0	23	180,013	23.00%	31.03%			Bagian Organisasi		
		2.2.2.02.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	763,344	10	86,893	9	169,086	0	0	0	0	19	255,979	19.00%	33.53%			Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		2.2.2.02.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	513,821	6	67,390	7	102,928	0	0	0	0	7	170,318	7.00%	33.15%			Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah		
		2.2.2.02.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,672,631	5	236,220	5	272,058	0	0	0	0	6	508,279	6.00%	30.39%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.2.2.02.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	78,092,131	19	11,385,833	17	13,778,960	0	0	0	0	36	25,164,794	36.00%	32.22%			Bagian Umum dan Protokol		
	2.2.2.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,914,375	19	529,220	15	589,990	0	0	0	0	34	1,119,209	34.00%	28.59%			Dinas Pemadam Kebakaran			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						K	Rp.(000)	K	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13				15=14/6x100%		16
		2.2.2.02.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	5,396,224	15	1,081,694	12	1,363,837	0	0	0	0	27	2,445,531	27.00%	45.32%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		2.2.2.02.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	11,321,659	8	1,917,162	7	2,432,465	0	0	0	0	8	4,349,627	8.00%	38.42%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		2.2.2.02.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	8,455,618	15	1,287,165	11	1,904,382	0	0	0	0	26	3,191,547	26.00%	37.74%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2.2.2.02.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	106,046,081	14	16,869,539	11	23,854,454	0	0	0	0	25	40,723,993	25.00%	38.40%			Dinas Kesehatan		
		2.2.2.02.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,033,832	14	327,908	12	485,090	0	0	0	0	26	812,997	26.00%	39.97%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.2.2.02.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,913,494	15	325,050	11	420,425	0	0	0	0	26	745,475	26.00%	38.96%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		2.2.2.02.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	30,920,050	5	9,032,686	5	6,827,802	0	0	0	0	5	15,860,488	5.00%	51.30%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman		
		2.2.2.02.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	6,382,975	11	1,615,267	13	2,154,461	0	0	0	0	24	3,769,728	24.00%	59.06%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.2.2.02.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,832,720	7	492,938	5	610,029	0	0	0	0	7	1,102,967	7.00%	38.94%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		2.2.2.02.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	6,621,320	14	1,122,356	13	1,729,043	0	0	0	0	27	2,851,399	27.00%	43.06%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	13,056,893	10	952,581	13	2,038,979	0	0	0	0	23	2,991,560	23.00%	22.91%			Dinas Pendidikan		
		2.2.2.02.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,213,226	6	622,338	6	673,078	0	0	0	0	6	1,295,416	6.00%	40.32%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		2.2.2.02.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	4,629,750	16	903,497	12	945,146	0	0	0	0	28	1,848,643	28.00%	39.93%			Dinas Perdagangan		
		2.2.2.02.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	12,192,415	13	2,057,662	11	1,953,487	0	0	0	0	24	4,011,149	24.00%	32.90%			Dinas Perhubungan		
		2.2.2.02.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	7,138,293	15	1,272,421	10	1,697,853	0	0	0	0	25	2,970,274	25.00%	41.61%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2.2.2.02.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	5,229,753	17	828,503	14	1,160,145	0	0	0	0	31	1,988,648	31.00%	38.03%			Dinas Sosial		
		2.2.2.02.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,427,436	16	470,611	11	506,226	0	0	0	0	27	976,837	27.00%	40.24%			Dinas Tenaga Kerja		
		2.2.2.02.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,377,533	7	255,993	6	278,036	0	0	0	0	7	534,029	7.00%	38.77%			Inspektorat		
		2.2.2.02.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	864,642	16	119,161	12	182,630	0	0	0	0	28	301,791	28.00%	34.90%			Kec. Asemrowo		
		2.2.2.02.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,346,188	7	131,921	6	238,077	0	0	0	0	7	369,998	7.00%	27.48%			Kec. Benowo		
		2.2.2.02.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,301,698	21	181,294	15	256,046	0	0	0	0	36	437,340	36.00%	33.60%			Kec. Bubutan		
		2.2.2.02.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,206,478	7	177,746	6	270,381	0	0	0	0	7	448,127	7.00%	37.14%			Kec. Bulak		
		2.2.2.02.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,245,156	19	187,745	15	303,548	0	0	0	0	34	491,293	34.00%	39.46%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.2.2.02.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,388,923	15	256,088	12	251,355	0	0	0	0	27	507,442	27.00%	36.53%			Kec. Gayungan		
		2.2.2.02.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,443,402	8	184,756	6	309,574	0	0	0	0	8	494,331	8.00%	34.25%			Kec. Genteng		
		2.2.2.02.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,662,110	15	218,087	12	332,390	0	0	0	0	27	550,476	27.00%	33.12%			Kec. Gubeng		
		2.2.2.02.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	983,332	11	144,761	10	242,857	0	0	0	0	21	387,618	21.00%	39.42%			Kec. Gunung Anyar		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13				15=14/6x100%				16		
		2.2.2.02.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,262,539	8	183,881	4	239,037	0	0	0	0	8	422,917	8.00%	33.50%				Kec. Jambangan			
		2.2.2.02.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,076,320	18	135,963	14	173,452	0	0	0	0	32	309,415	32.00%	28.75%				Kec. Karangpilang			
		2.2.2.02.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,416,743	16	185,038	11	331,408	0	0	0	0	27	516,446	27.00%	36.45%				Kec. Kenjeran			
		2.2.2.02.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,552,358	21	212,798	15	318,166	0	0	0	0	36	530,964	36.00%	34.20%				Kec. Krembangan			
		2.2.2.02.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,154,953	7	154,952	5	205,459	0	0	0	0	7	360,411	7.00%	31.21%				Kec. Lakarsantri			
		2.2.2.02.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,895,179	17	249,102	12	323,668	0	0	0	0	29	572,770	29.00%	30.22%				Kec. Mulyorejo			
		2.2.2.02.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,565,196	14	150,705	12	322,278	0	0	0	0	26	472,982	26.00%	30.22%				Kec. Pabean Cantian			
		2.2.2.02.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,327,043	8	179,393	7	250,673	0	0	0	0	8	430,065	8.00%	32.41%				Kec. Pakal			
		2.2.2.02.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,669,499	15	227,119	9	373,294	0	0	0	0	24	600,413	24.00%	35.96%				Kec. Rungkut			
		2.2.2.02.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,325,020	20	186,996	13	271,697	0	0	0	0	33	458,693	33.00%	34.62%				Kec. Sambikerep			
		2.2.2.02.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2,413,860	15	299,942	13	480,246	0	0	0	0	28	780,188	28.00%	32.32%				Kec. Sawahan			
		2.2.2.02.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,652,047	21	221,857	15	344,682	0	0	0	0	36	566,540	36.00%	34.29%				Kec. Semampir			
		2.2.2.02.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,083,007	15	148,971	11	208,561	0	0	0	0	26	357,533	26.00%	33.01%				Kec. Simokerto			
		2.2.2.02.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,645,373	15	356,149	10	277,516	0	0	0	0	25	633,664	25.00%	38.51%				Kec. Sukolilo			
		2.2.2.02.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,753,249	15	230,306	11	456,546	0	0	0	0	26	686,851	26.00%	39.18%				Kec. Sukomanunggal			
		2.2.2.02.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2,317,896	16	262,434	10	484,511	0	0	0	0	26	746,945	26.00%	32.23%				Kec. Tambaksari			
		2.2.2.02.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,436,334	16	172,432	11	267,839	0	0	0	0	27	440,271	27.00%	30.65%				Kec. Tandes			
		2.2.2.02.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,471,202	7	177,655	6	301,538	0	0	0	0	8	479,193	8.00%	32.57%				Kec. Tegalsari			
		2.2.2.02.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,309,971	14	164,777	11	211,643	0	0	0	0	25	376,420	25.00%	28.74%				Kec. Tenggilis Mejoyo			
		2.2.2.02.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,290,869	14	184,313	9	243,124	0	0	0	0	23	427,437	23.00%	33.11%				Kec. Wiyung			
		2.2.2.02.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,394,601	6	188,224	7	297,798	0	0	0	0	8	486,023	8.00%	34.85%				Kec. Wonocolo			
		2.2.2.02.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,499,665	19	217,725	13	299,245	0	0	0	0	32	516,970	32.00%	34.47%				Kec. Wonokromo			
		2.2.2.02.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	32,671,456	14	4,756,053	11	6,384,597	0	0	0	0	25	11,140,649	25.00%	34.10%				RSUD Bhakti Dharma Husada			
		2.2.2.02.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	61,124,806	24	6,610,671	17	9,323,146	0	0	0	0	41	15,933,817	41.00%	26.07%				RSUD Dr. Mohamad Soewandie			
		2.2.2.02.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1,688,646	8	322,639	7	395,174	0	0	0	0	8	717,813	8.00%	42.51%				Satuan Polisi Pamong Praja			
		2.2.2.02.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	18,643,730	7	3,091,564	8	4,476,692	0	0	0	0	8	7,568,256	8.00%	40.59%				Sekretariat DPRD			
		2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan			1,593,568,610		848,704,514		309,687,565		25,702,919		85,528,629		0,00		0,00		111,231,548		35,92%		959,936,062	60,24%		
				Persentase pemanfaatan aset	95,00 %		98.27%		93,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		98,27 %		103,44 %				
				Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100,00 %		40.00%		60,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		20,00 %		33,33%		40,00 %		40,00 %				
				Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	85,00 %		100.00%		81,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		84,07 %		103,79%		100,00 %		117,65 %				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13		15=14/6x100%		16						
				Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	100,00 %		81.22%		87,18 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		264,19 %		303,04%		81,22 %		81,22 %				
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00 %		94.71%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		94,71 %		94,71 %				
				Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00 %		99.39%		100,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00%		99,11 %		99,11 %				
		2.2.2.02.02.0001	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	680,430	6	55,772	5	118,881	0	0	0	0	11	174,653	11.00%	25.67%				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		2.2.2.02.02.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	485,688	4	59,420	2	83,232	0	0	0	0	4	142,652	4.00%	29.37%				Badan Kepegawaian dan Diklat			
		2.2.2.02.02.0003	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	271,253	2	5,591	3	75,681	0	0	0	0	5	81,273	5.00%	29.96%				Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			
		2.2.2.02.02.0004	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	423,488	4	31,366	3	60,399	0	0	0	0	7	91,764	7.00%	21.67%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.2.2.02.02.0005	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	504,198	8	101,103	5	98,954	0	0	0	0	13	200,057	13.00%	39.68%				Dinas Lingkungan Hidup			
		2.2.2.02.02.0006	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1,098,389	3	57,963	4	150,015	0	0	0	0	7	207,978	7.00%	18.93%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		2.2.2.02.02.0007	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	880,911	3	132,424	2	112,422	0	0	0	0	5	244,845	5.00%	27.79%				Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat			
		2.2.2.02.02.0008	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	545,317	4	99,331	4	75,736	0	0	0	0	4	175,068	4.00%	32.10%				Badan Perencanaan Pembangunan			
		2.2.2.02.02.0009	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	2,131,773	6	242,566	5	482,216	0	0	0	0	11	724,782	11.00%	34.00%				Bagian Administrasi Pembangunan			
		2.2.2.02.02.0010	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	370,154	7	60,020	4	40,097	0	0	0	0	11	100,117	11.00%	27.05%				Bagian Hubungan Masyarakat			
		2.2.2.02.02.0011	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	266,802	6	28,736	4	49,952	0	0	0	0	10	78,688	10.00%	29.49%				Bagian Hukum			
		2.2.2.02.02.0012	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	222,059	4	48,693	4	36,693	0	0	0	0	8	85,386	8.00%	38.45%				Bagian Administrasi Kerjasama			
		2.2.2.02.02.0013	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	130,367	5	17,355	2	19,711	0	0	0	0	7	37,066	7.00%	28.43%				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			
		2.2.2.02.02.0014	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	259,821	2	16,960	3	53,129	0	0	0	0	3	70,088	3.00%	26.98%				Bagian Organisasi			
		2.2.2.02.02.0015	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	250,855	6	11,947	4	33,752	0	0	0	0	10	45,698	10.00%	18.22%				Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
		2.2.2.02.02.0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	203,496	2	15,101	2	21,294	0	0	0	0	2	36,394	2.00%	17.88%				Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah			
		2.2.2.02.02.0017	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah			6 Berkas	2,315,499	0	475,798	2	521,403	0	0	0	0	2	997,201	33.33%	43.07%				Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			
		2.2.2.02.02.0018	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan			900 dokumen	5,880,312	388	1,107,517	346	968,176	0	0	0	0	734	2,075,693	81.56%	35.30%				Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			
		2.2.2.02.02.0019	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya			2352 unit	7,181,740	302	1,345,738	332	1,537,097	0	0	0	0	634	2,882,836	26.96%	40.14%				Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			
		2.2.2.02.02.0020	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	619,797	1	13,602	2	52,359	0	0	0	0	2	65,961	2.00%	10.64%				Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			
		2.2.2.02.02.0021	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan			8012 stel	3,369,782	261	47,301	138	164,469	0	0	0	0	399	211,770	4.98%	6.28%				Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13		15=14/6x100%		16
		2.2.2.02.02.0022	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan					3334 unit	41,889,195	739	2,818,858	2346	22,979,807	0	0	0	0	3085	25,798,665	92.53%	61.59%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0023	Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor					72 lembaga	2,315,612	72	147,688	72	276,853	0	0	0	0	72	424,540	100.00%	18.33%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2.02.02.0024	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran					100%	4,832,821	9	810,069	6	1,142,179	0	0	0	0	15	1,952,248	15.00%	40.40%					Bagian Umum dan Protokol
		2.2.2.02.02.0025	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,197,485	9	343,097	6	158,820	0	0	0	0	15	501,917	15.00%	41.91%					Dinas Pemadam Kebakaran
		2.2.2.02.02.0026	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,605,339	25	212,334	4	315,931	0	0	0	0	29	528,265	29.00%	32.91%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2.02.02.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	718,680	2	82,687	3	126,154	0	0	0	0	3	208,841	3.00%	29.06%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2.2.02.02.0028	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	922,663	5	58,688	4	129,115	0	0	0	0	9	187,803	9.00%	20.35%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.2.2.02.02.0029	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	5,612,610	7	635,578	7	931,549	0	0	0	0	14	1,567,128	14.00%	27.92%					Dinas Kesehatan
		2.2.2.02.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,977,575	6	155,117	4	442,961	0	0	0	0	10	598,078	10.00%	30.24%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.2.2.02.02.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	547,677	6	24,035	5	206,419	0	0	0	0	11	230,453	11.00%	42.08%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2.2.2.02.02.0032	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	4,989,776	0	25,614	1	662,414	0	0	0	0	1	688,028	1.00%	13.79%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemutasan
		2.2.2.02.02.0033	Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah daerah yang dibangun/direhabilitasi					78 bangunan	72,580,380	0	3,212,825	15	20,545,941	0	0	0	0	15	23,758,765	19.23%	32.73%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.02.0034	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhabilitasi					1 bangunan	24,042,381	0	0	0	11,497,569	0	0	0	0	0	11,497,569	0.00%	47.82%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.02.0035	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,066,795	2	122,664	3	227,156	0	0	0	0	3	349,820	3.00%	32.79%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.02.0036	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah yang disusun					62 dokumen	4,418,907	0	53,325	1	544,560	0	0	0	0	1	597,885	1.61%	13.53%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2.02.02.0037	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	523,064	2	52,840	2	66,124	0	0	0	0	3	118,964	3.00%	22.74%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.2.2.02.02.0038	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	3,702,013	9	1,881,061	6	768,304	0	0	0	0	15	2,649,365	15.00%	71.57%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.2.2.02.02.0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,406,386	2	108,700	5	222,584	0	0	0	0	7	331,284	7.00%	13.77%					Dinas Pendidikan
		2.2.2.02.02.0040	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	772,494	6	108,145	4	147,725	0	0	0	0	10	255,870	10.00%	33.12%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.2.2.02.02.0041	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,403,689	11	477,240	5	264,039	0	0	0	0	16	741,279	16.00%	52.81%					Dinas Perdagangan
		2.2.2.02.02.0042	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	7,893,404	8	1,243,585	7	1,405,351	0	0	0	0	15	2,648,935	15.00%	33.56%					Dinas Perhubungan
		2.2.2.02.02.0043	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,427,347	4	225,875	3	152,594	0	0	0	0	7	378,469	7.00%	26.52%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)					
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14=7+13				15=14/6x100%				16				
		2.2.2.02.02.0044	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	661,543	6	74,893	4	91,417	0	0	0	0	10	166,310	10.00%	25.14%					Dinas Sosial				
		2.2.2.02.02.0045	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	433,019	2	64,521	2	76,877	0	0	0	0	2	141,398	2.00%	32.65%					Dinas Tenaga Kerja				
		2.2.2.02.02.0046	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	492,584	3	90,862	2	71,544	0	0	0	0	3	162,406	3.00%	32.97%					Inspektorat				
		2.2.2.02.02.0047	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	364,189	5	19,715	3	64,388	0	0	0	0	8	84,104	8.00%	23.09%					Kec. Asemrowo				
		2.2.2.02.02.0048	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	528,030	4	11,689	3	68,805	0	0	0	0	7	80,494	7.00%	15.24%					Kec. Benowo				
		2.2.2.02.02.0049	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	358,916	6	18,173	4	69,744	0	0	0	0	10	87,917	10.00%	24.50%					Kec. Bubutan				
		2.2.2.02.02.0050	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	427,003	6	28,930	4	79,977	0	0	0	0	10	108,908	10.00%	25.51%					Kec. Bulak				
		2.2.2.02.02.0051	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	474,122	5	22,079	4	31,752	0	0	0	0	9	53,831	9.00%	11.35%					Kec. Dukuh Pakis				
		2.2.2.02.02.0052	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	432,156	6	25,445	4	63,303	0	0	0	0	10	88,748	10.00%	20.54%					Kec. Gayungan				
		2.2.2.02.02.0053	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	473,623	5	26,116	3	89,580	0	0	0	0	8	115,696	8.00%	24.43%					Kec. Genteng				
		2.2.2.02.02.0054	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	478,982	4	34,520	2	90,093	0	0	0	0	6	124,613	6.00%	26.02%					Kec. Gubeng				
		2.2.2.02.02.0055	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	385,761	5	19,467	4	80,413	0	0	0	0	9	99,880	9.00%	25.89%					Kec. Gunung Anyar				
		2.2.2.02.02.0056	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	481,599	2	23,173	2	85,004	0	0	0	0	2	108,176	2.00%	22.46%					Kec. Jambangan				
		2.2.2.02.02.0057	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	412,528	5	19,254	4	69,118	0	0	0	0	9	88,371	9.00%	21.42%					Kec. Karangpilang				
		2.2.2.02.02.0058	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	474,000	5	18,533	3	86,687	0	0	0	0	8	105,220	8.00%	22.20%					Kec. Kenjeran				
		2.2.2.02.02.0059	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	426,423	6	33,412	4	82,775	0	0	0	0	10	116,187	10.00%	27.25%					Kec. Krembangan				
		2.2.2.02.02.0060	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	450,700	4	22,616	2	87,037	0	0	0	0	6	109,654	6.00%	24.33%					Kec. Lakarsantri				
		2.2.2.02.02.0061	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	696,399	5	24,329	3	103,093	0	0	0	0	8	127,422	8.00%	18.30%					Kec. Mulyorejo				
		2.2.2.02.02.0062	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	540,065	1	23,562	2	86,005	0	0	0	0	2	109,566	2.00%	20.29%					Kec. Pabean Cantian				
		2.2.2.02.02.0063	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	349,824	2	9,940	2	64,652	0	0	0	0	2	74,592	2.00%	21.32%					Kec. Pakal				
		2.2.2.02.02.0064	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	491,774	4	20,834	3	94,111	0	0	0	0	7	114,945	7.00%	23.37%					Kec. Rungkut				
		2.2.2.02.02.0065	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	336,642	6	17,222	4	75,843	0	0	0	0	10	93,065	10.00%	27.65%					Kec. Sambikerep				
		2.2.2.02.02.0066	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	579,052	5	24,802	4	87,343	0	0	0	0	9	112,145	9.00%	19.37%					Kec. Sawahan				
		2.2.2.02.02.0067	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	471,383	5	19,519	4	97,084	0	0	0	0	9	116,603	9.00%	24.74%					Kec. Semampir				
		2.2.2.02.02.0068	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	444,866	5	25,515	4	77,816	0	0	0	0	9	103,330	9.00%	23.23%					Kec. Simokerto				
		2.2.2.02.02.0069	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	576,244	6	32,413	4	107,121	0	0	0	0	10	139,534	10.00%	24.21%					Kec. Sukolilo				
		2.2.2.02.02.0070	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	487,846	5	21,216	2	83,794	0	0	0	0	7	105,010	7.00%	21.53%					Kec. Sukomanunggal				
		2.2.2.02.02.0071	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	768,318	5	38,106	4	149,620	0	0	0	0	9	187,725	9.00%	24.43%					Kec. Tambaksari				
		2.2.2.02.02.0072	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	553,861	5	17,294	4	91,841	0	0	0	0	9	109,135	9.00%	19.70%					Kec. Tandes				
		2.2.2.02.02.0073	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	438,373	2	28,471	2	93,821	0	0	0	0	2	122,291	2.00%	27.90%					Kec. Tegalsari				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13				14=7+13		15=14/6x100%		16
		2.2.2.02.02.0074	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	418,291	4	13,733	2	79,860	0	0	0	0	6	93,593	6.00%	22.38%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.2.2.02.02.0075	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	392,171	5	19,711	3	77,089	0	0	0	0	8	96,800	8.00%	24.68%					Kec. Wiyung
		2.2.2.02.02.0076	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	422,345	2	31,856	2	76,387	0	0	0	0	2	108,243	2.00%	25.63%					Kec. Wonocolo
		2.2.2.02.02.0077	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	490,416	5	39,472	3	94,210	0	0	0	0	8	133,682	8.00%	27.26%					Kec. Wonokromo
		2.2.2.02.02.0078	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	7,672,299	3	22,770	4	1,029,075	0	0	0	0	4	1,051,845	4.00%	13.71%					RSUD Bhakti Dharma Husada
		2.2.2.02.02.0079	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	11,179,209	7	995,269	6	677,551	0	0	0	0	13	1,672,820	13.00%	14.96%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		2.2.2.02.02.0080	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,400,014	3	316,599	3	347,092	0	0	0	0	3	663,691	3.00%	27.65%					Satuan Polisi Pamong Praja
		2.2.2.02.02.0081	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	5,771,107	5	503,042	7	1,982,946	0	0	0	0	12	2,485,988	12.00%	43.08%					Sekretariat DPRD
		2.2.2.02.02.0085	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara					200 bangunan	51,513,466	25	6,129,519	40	10,693,948	0	0	0	0	65	16,823,467	32.50%	32.66%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					50.92%	26.90%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (Dalam narasi)																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (Dalam narasi)																											
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (Dalam narasi)																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya: (Dalam narasi)																											

2.3 Alasan Perubahan RKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019, beberapa target program dan kegiatan serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah masih harus dioptimalkan untuk dicapai Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa urusan yang menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan dan pembenahan pembangunan antara lain urusan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan, tenaga kerja serta pangan, lebih dioptimalkan untuk pencapaian targetnya sehingga memerlukan penyesuaian anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap RKPD untuk dapat diselaraskan kembali antara sasaran dan prioritas pembangunan dengan kondisi yang ada saat ini.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Selaras dengan Visi Pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang salah satunya memiliki sasaran utama dalam bidang ekonomi, maka dirumuskan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Dokumen RPJM Nasional 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.** Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
- b. **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan.** Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar -wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

- c. **Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
- d. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.** Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- e. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.** Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
- f. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

- g. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.** Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Serangkaian kebijakan makro maupun mikro ekonomi telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, yang tertuang dalam dokumen RPKMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, antara lain:

1. Aspek Produksi UMKM dan Besar, pada prinsipnya adalah bagaimana peran Pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain aspek peningkatan produksi pada berbagai komoditas dalam skala usaha UMKM dan Besar menghasilkan produk yang berdaya saing lebih tinggi serta terjaga baik dari aspek harga yang kompetitif, kualitas serta kecepatan pengiriman.
2. Aspek pembiayaan yang kompetitif dan efisien, pada prinsipnya adalah peran Pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain kebijakan fiskal kedalam sistem perbankan untuk pembiayaan yang kompetitif dan efisien khususnya bagi UMKM serta sektor riil lainnya, sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan lebih efisien yang dengan demikian akan memiliki daya saing yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui upaya antara lain :
 - a. Mendorong perbankan untuk mengoptimalkan skema-skema kredit yang kompetitif untuk sektor riil;
 - b. Skema kredit dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil baik dengan skema pinjaman bunga murah 6%, Apex bank Jatim & BPR di Jawa Timur, Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida, Pembiayaan sektor pertanian melalui penempatan modal di PT Bank UMKM, serta loan agreement Pemprov Jatim dan Bank Jatim

- serta Linkage Program dengan BPR Kab/Kota dalam pengembangan Industri Primer;
- c. Mengoptimalkan pola-pola kerjasama pemerintah-swasta;
 - d. Mendorong peran Perseroan maupun BUMN dalam mengalokasikan pemanfaatan CSR/PKBL untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil.
3. Aspek Pemasaran, pada prinsipnya adalah peran pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain pemasaran yang kompetitif serta skala pasar yang lebih luas yang memungkinkan produk UMKM khususnya dan usaha besar memiliki kepastian tujuan pasar. Optimalisasi peran 26 Kantor Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Provinsi Mitra serta peningkatan kapasitas 6 Etalase Perdagangan Jawa Timur di 5 Negara menjadi pendorong dan bentuk fasilitasi yang lebih riil pada pengembangan aspek pemasaran untuk utamanya menguasai pasar domestik dan juga pasar global.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Surabaya

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Surabaya, yakni Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi. Adapun arah kebijakan yang disusun Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang dalam Perubahan RPJM Kota Surabaya tahun 2016 - 2021, yakni:

1. **Aspek sumber daya manusia.** Arah kebijakan yang dimaksud yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, serta untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, yaitu melalui upaya:
 - a) Meningkatkan kualitas pendidikan

- b) Peningkatan dan perbaikan prasarana layanan kesehatan sesuai standar prasarana, tipe rumah sakit, standar dan perkembangan ilmu kesehatan
 - c) Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
 - d) Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi terkait pembangunan kepemudaan di berbagai bidang
 - e) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran
2. **Aspek pemerintahan.** Arah kebijakan yang dimaksud yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana prinsipnya yang dimaksud untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK, yaitu melalui upaya :
- a) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - b) Memantapkan kemandirian keuangan daerah
3. **Aspek daya saing.** Arah kebijakan yang dimaksud yakni memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif, dimana prinsipnya yang dimaksud untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global. Mengingat proporsi sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta jasa-jasa berperan tinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya maka Pemerintah Kota Surabaya menyusun arah kebijakan yang diopritaskan untuk meningkatkan produktivitas yang memiliki nilai tambah tertinggi, dimana diharapkan arah kebijakan yang disusun tersebut juga dapat menstimulus percepatan produktivitas dari sektor ekonomi lainnya.
- Arah kebijakan dalam aspek daya saing diimplementasikan melalui upaya:
- a) Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif

- b) Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
- c) Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global

Arah kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya juga telah diseleraskan dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam buku Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur Tahun 2019. Kebijakan yang disusun tersebut didasarkan pada sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yakni sektor transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi. Adapun arah kebijakan untuk Kota Surabaya berfokus pada:

- a. Meningkatkan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan
- b. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektor dalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas
- e. Modernisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- f. Standarisasi kualitas produk dan sumber daya manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp547.769.496,96 juta. Secara nominal nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,65 persen dibandingkan tahun 2017. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi seluruh lapangan usaha di Kota Surabaya. Khususnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Lapangan usaha

tersebut memberikan kontribusi yang lebih dominan dibanding sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2018 lapangan usaha tersebut menghasilkan nilai tambah sebesar Rp154.687.454,96 juta yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai Rp137.322.725,10 juta. Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp101.871.621,10 dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp88.834.803,20 juta. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kota Surabaya terangkum dalam Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2017- 2018 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2017	2018*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883.177,30	913.487,70
B	Pertambangan dan Penggalian	30.638,60	31.562,70
C	Industri Pengolahan	92.762.070,10	101.871.621,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.263.680,00	2.238.366,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	740.173,40	771.856,00
F	Konstruksi	49.603.609,40	52.770.743,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137.322.725,10	154.687.456,96
H	Transportasi dan Pergudangan	26.215.295,80	29.211.510,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.971.933,90	88.834.803,20
J	Informasi dan Komunikasi	26.571.784,80	29.039.867,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.631.465,10	28.132.150,10
L	Real Estate	12.495.064,20	14.186.426,70
M,N	Jasa Perusahaan	12.098.851,20	13.339.657,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.768.287,70	7.171.019,60
P	Jasa Pendidikan	11.958.097,20	12.661.378,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.730.513,90	4.053.988,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.995.936,80	7.853.596,80
PDRB		495.043.304,50	547.769.496,96

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2019

*) Data Sementara

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp364.714.819,50 juta meningkat menjadi sebesar Rp387.292.704,09 juta di tahun 2018. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp109.871.557,50 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp73.033.402,40 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp58.460.906,80 juta.

Tabel III.2
Peranan Ekonomi PerKategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017– 2018

Kategori	Uraian	2017	2018*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	589.909,40	582.185,40
B	Pertambangan dan Penggalian	20.544,80	20.121,40
C	Industri Pengolahan	69.881.287,90	73.033.402,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.541.129,00	1.540.006,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	564.406,80	583.121,20
F	Konstruksi	36.208.179,00	38.371.797,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	103.301.112,80	109.871.557,50
H	Transportasi dan Pergudangan	17.707.950,20	19.276.049,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.192.882,20	58.460.906,80
J	Informasi dan Komunikasi	23.974.911,30	25.925.129,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.685.808,00	18.536.479,00
L	Real Estate	9.610.228,80	10.165.858,70
M,N	Jasa Perusahaan	8.278.199,90	8.867.969,80

Kategori	Uraian	2017	2018*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.597.265,30	4.585.695,60
P	Jasa Pendidikan	8.531.781,70	8.843.385,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.804.625,20	3.023.872,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.224.597,00	5.605.165,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		364.714.819,50	387.292.704,09

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2019

*) Data Sementara

b. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kota Surabaya. Tabel III.3 menunjukkan struktur PDRB Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi tertinggi pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi pada kisaran 28 persen dari total PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya. Adapun sektor tertinggi kedua dengan kontribusi yaitu industri pengolahan dengan nilai kontribusi pada kisaran sebesar 19 persen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel III.3 berikut:

Tabel III.3
Peranan Ekonomi PerKategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017– 2018(dalam persen)

Kategori	Uraian	2017	2018*
		(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,37	18,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15
F	Konstruksi	9,84	9,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	28,39	28,37

Kategori	Uraian	2017	2018*
		(%)	(%)
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
H	Transportasi dan Pergudangan	4,8	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,57	15,09
J	Informasi dan Komunikasi	6,55	6,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,95	4,79
L	Real Estate	2,65	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	2,24	2,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,18
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,49	1,45

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2019

*) Data Sementara

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terus menunjukkan kecenderungan yang positif. Seperti yang diketahui, Kota Surabaya dengan karakteristik perdagangan dan jasa memiliki potensi produktivitas yang masih cukup besar untuk digali. Hal ini ditunjukkan pada grafik, Walaupun gejolak ekonomi sepanjang tahun 2018 yang sangat dinamis, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya senantiasa cukup tinggi berada dilevel 6 persen yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Hal itu berarti aktivitas ekonomi di Kota Surabaya masih terus tumbuh menggeliat.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2016– 2018(dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)
2016	6,00
2017	6,13
2018*	6,194

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2019

*) Data Sementara

d. Tingkat Inflasi

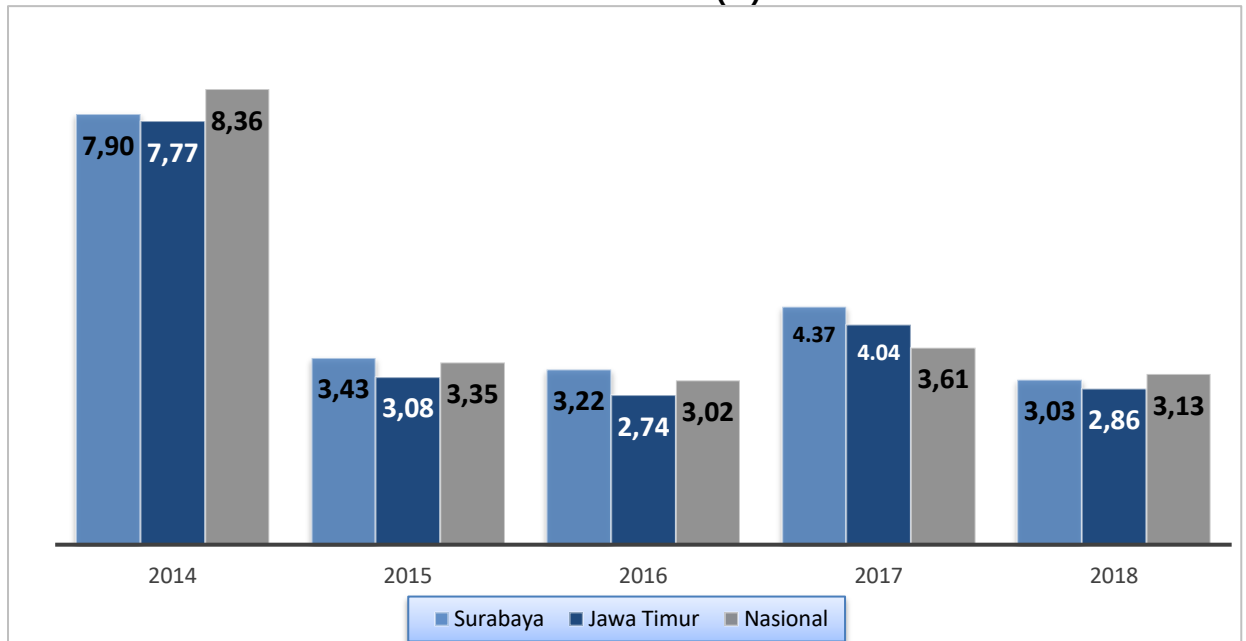
Pada tahun 2018 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 3,03 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2017 sebesar 4,37 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2018 juga sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2018 sebesar $3,5 \pm 1$ persen.

Sebagaimana ditunjukkan oleh grafik dibawah, pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2018 cukup baik, dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir umumnya inflasi Kota Surabaya selalu lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, namun kali ini meskipun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,86% namun lebih rendah dibandingkan Nasional yakni sebesar 3,13 persen.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2017 antara lain: bensin, daging ayam ras, beras, kontrak rumah, rokok kretek filter, sekolah dasar, akademi/perguruan tinggi, bawang merah, emas perhiasan dan tukang bukan mandor.

Selain komoditi-komoditi pendorong laju inflasi, beberapa komoditi juga menjadi penghambat laju inflasi Kota Surabaya tahun 2018 ini. Sepuluh komoditi terbesar yang menahan terjadinya inflasi antara lain tomat sayur, gypsum, gula pasir, wortel, kentang, biskuit, apel, susu untuk balita, televisi berwarna dan angkutan udara.

Gambar III.1
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014 - Tahun 2018 (%)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2019

e. Tingkat Investasi (PMA & PMDN)

Kota Surabaya berkembang menjadi Kota Bisnis yang berkembang sangat pesat. Dengan segala daya dukung baik sarana dan prasarana yang memadai menjadikan Kota Surabaya bukan hanya menjadi tempat hunian, melainkan juga menjadi target pasar para pelaku usaha seperti investor. Daya tarik yang kuat sebagai imbas dari semakin pesatnya perkembangan Kota Surabaya dari berbagai aspek baik aspek ekonomi maupun non ekonomi juga menjadi pertimbangan para investor memutuskan untuk memilih Kota Surabaya sebagai sasaran target investasinya.

Investasi yang ditanamkan di Surabaya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Kota Surabaya. Keberadaan investasi tersebut tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap sektor lainnya sebagai hasil dari keterkaitan antar sektor dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Pada tahun 2018 investasi Kota Surabaya yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 4.140.545.316.800. Sementara investasi dari penanaman modal asing

(PMA)Rp1.584.216.149.643. Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabayainvestasi Kota Surabaya tahun 2018 tersebut berasal dari penanaman modal pada sektor sektor perdagangan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; industri makanan; kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen; serta industri logam dasar barang logam, mesin dan elektronik.

Tabel III.6
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2015- 2018

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2015	Rp 828.416.500.000	Rp 206.155.804.800
2016	Rp 1.072.644.600.000	Rp 2.945.139.318.400
2017	Rp1.658.419.300.000	Rp 2.338.348.601.600
2018	Rp 4.140.545.316.800	Rp 1.584.216.149.643

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Untuk mengetahui seberapa besar peran investasi terhadap suatu perekonomian maka perlu diperkaya dengan indikator tambahan yang dapat menjelaskan seberapa baik kinerja investasi yang sudah ditanamkan tersebut, yakni seperti indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai *ICOR* selain dapat digunakan untuk mengevaluasi dan investasi, melainkan juga dapat digunakan untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan.

Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi yang ditanamkan.

Tabel III.7
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2013-2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
ICOR	4,05	4,27	4,89	4,90	4,81	3,0-4,0

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

Catatan : *) data angka proyeksi Bappeko

Rata-rata nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2013 sampai pada 2017 berada pada kisaran angka 4. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi di Kota Surabaya, sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB dan dapat memberikan *multiplier effect* yaitu membantu dalam perluasan lapangan pekerjaan.

f. Ekspor

Aktivitas perdagangan baik skala domestik maupun internasional juga berkembang cukup baik dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Kota Surabaya. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, nilai perdagangan Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang positif. Ditengah kondisi ekonomi global yang cukup berfluktuatif, aktivitas perdagangan masih berjalan pesat. Pada tahun 2017 nilai ekspor Kota Surabaya sebesar USD18.268.869.178 dan pada tahun 2018 kinerja ekspor Kota Surabaya tahun 2018 sebesar USD19.165.996.010. Sama seperti kinerja ekspor, nilai impor Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar USD16.956.900.232 dan pada tahun 2018 sebesar USD19.612.835.745.

Tabel III.8
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2016–2018

Tahun		2016	2017	2018*
Ekspor	Nilai (US \$)	17.901.405.669	18.268.869.178	19.165.996.010
Impor	Nilai (US \$)	15.632.269.630	16.956.900.232	19.612.835.745

Sumber data: Bank Indonesia dan Bappeko Kota Surabaya, diolah, 2019

*) Data Sementara

g. Tingkat pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 5,98%, dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,14 persen sehingga TPT Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 6,12 persen. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh BPS Kota Surabaya meningkatnya TPT Kota Surabaya dipengaruhi oleh penambahan jumlah partisipasi angkatan kerja yang cukup signifikan dan hal tersebut salah satunya dipicu adanya rekrutmen PNS di tahun 2018. Sebagaimana kota besar pada umumnya, hal yang menarik dari Kota Surabaya adalah daya tarik ekonomi yang sangat kuat bagi para pencari kerja dari luar wilayah Kota Surabaya untuk mencari kerja di Kota Surabaya. Sehingga urbanisasi dan tingginya persaingan dalam mencari kerja menjadi resiko yang terjadi di pasar kerja di Kota Surabaya.

Tabel III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2017	5,98%
2018	6,12%

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2019

Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan dapat diukur dari pengukuran ILOR. ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja pada suatu wilayah. ILOR dapat dilihat sebagai perbandingan antara perubahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan penambahan output perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama kurun waktu 3 tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR pada tahun 2013 yang mencapai 0,03. Sementara nilai ILOR Surabaya pada tahun 2014-2015 besarnya sama yakni 0,01 dan pada tahun 2016-2017 nilai ILOR meningkat kembali.

Tabel III.10
Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya
Tahun 2013- 2017 dan Perkiraan 2018

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018**
ILOR	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01-0,03

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2019

Catatan : *) data sementara

**) data angka proyeksi Bappeko

3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2017 dan tahun 2018, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp387.292.704,09juta. Melihat Kota Surabaya yang menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya maka pada tahun 2019 PDRB ADHK Kota Surabaya diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp411.614.685,92juta. Peningkatan pada tahun 2019 diperkirakan terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha khususnya kategori lapangan usaha yang memberikan nilai tambah tertinggi terhadap PDRB Kota Surabaya yakni perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp119.327.097,22juta. Sektor terbesar selanjutnya yang menghasilkan PDRB ADHK adalah sektor Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dimana pada tahun 2019diperkirakan menghasilkan PDRB sebesar Rp76.025.232,48jutadan sebesar Rp62.194.979,04juta.

Tabel III.11
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	582.185,40	617.422,02
B	Pertambangan dan Penggalian	20.121,40	41.161,46
C	Industri Pengolahan	73.033.402,40	76.025.232,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,40	1.728.781,68

Kategori	Uraian	2018*	2019**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,20	617.422,01
F	Konstruksi	38.371.797,10	39.844.301,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.871.557,50	119.327.097,22
H	Transportasi dan Pergudangan	19.276.049,90	20.992.348,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.460.906,80	62.194.979,04
J	Informasi dan Komunikasi	25.925.129,70	28.277.928,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.536.479,00	19.387.051,70
L	Real Estate	10.165.858,70	10.496.174,49
M,N	Jasa Perusahaan	8.867.969,80	9.631.783,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.585.695,60	4.486.600,07
P	Jasa Pendidikan	8.843.385,70	8.849.715,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.872,00	3.169.433,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.605.165,60	5.927.251,47
PDRB		387.292.704,09	411.614.685,92

Sumber data:**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2019

2) Peranan Sektoral

Hingga tahun 2019 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan terus menunjukkan geliat ekonomi yang tumbuh pesat, dimana struktur ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha yang berbasis perdagangan dan jasa. Pada tahun 2019 kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan menjadi penyumbang terbesar terhadap terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya dengan kontribusi sebesar 28,99 persen. Sementara industri pengolahan pada tahun 2019 diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 18,47 persen. Untuk gambaran perkembangan peranan kategori lapangan usaha di Kota Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel III.12
Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 ADHK (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	18,86	18,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,4	0,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15
F	Konstruksi	9,91	9,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,37	28,99
H	Transportasi dan Pergudangan	4,98	5,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,09	15,11
J	Informasi dan Komunikasi	6,69	6,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	4,71
L	Real Estate	2,62	2,55
M,N	Jasa Perusahaan	2,29	2,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,09
P	Jasa Pendidikan	2,28	2,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,45	1,44
PDRB		100,00	100,00

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2019

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2019 diperkirakan pada kisaran 6,2%-6,7% persen. Kinerja perekonomian Kota Surabaya yang diperkirakan tetap tinggi dipengaruhi oleh kekuatan perekonomian Kota Surabaya selama ini ditopang oleh besarnya tingkat konsumsi masyarakat disertai tingginya daya beli menjadi potensi yang tinggi dalam mendorong perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; serta penyedia akomodasi dan makan minum diperkirakan masih memberikan nilai tambah terbesar terhadap perekonomian Kota Surabaya. Besarnya nilai tambah pada kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sejalan dengan

besarnya permintaan baik dari masyarakat dari dalam maupun luar Kota Surabaya, mengingat Kota Surabaya merupakan kota bisnis yang tumbuh pesat dengan segala aktivitasnya sehingga perputaran arus barang dan jasa sangat besar. Sementara peningkatan pada kategori lapangan usaha industri pengolahan serta penyedia akomodasi dan makan minum merupakan imbas dari pesatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan. Berlangsungnya momen-momen hari besar keagamaan maupun momen pemilihan umum diperkirakan turut mengakselerasi kinerja lapangan usaha utama Kota Surabaya tersebut pada tahun 2019.

Tabel III.13
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan proyeksi 2019(dalam Persen)

Uraian	2018*	2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,194%	6,2%-6,7%

Sumber data: *) Angka Sangat Sementara

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2019

4) Tingkat Inflasi

Realiasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 3,03 persen. Berdasarkan perkembangan indikator harga dari data BPS, capaian inflasi Kota Surabaya hingga Mei 2019, dimana capaian tersebut dikatakan cukup memuaskan karena inflasi Kota Surabaya terkendali rendah. Mencermati perkembangan tersebut maka inflasi Kota Surabaya ke depan pada tahun 2019 diperkirakan masih dalam kisaran 3,5 persen ± 1 persen.

Tabel III.14
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019(dalam Persen)

Uraian	2018	2019**
Inflasi (%)	3,03%	3,5% ± 1 %

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

5) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

Peran investasi dalam pembangunan di Kota Surabaya cukup tinggi. Hal itu ditunjukkan oleh nilai investasi Kota Surabaya pada tahun 2018 yang terangkum dalam tabel dibawah. Mempertimbangkan potensi yang dimiliki

Kota Surabaya serta besarnya peluang investasi yang ditanamkan tersebut, investasi Kota Surabaya pada tahun 2019 diperkirakan meningkat baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2019 investasi Kota Surabaya diperkirakan sebesar Rp4.500,00milyar yang berasal dari PMDN sementara dari PMA sebesar Rp 2.000milyar.

Tabel III.15
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Nilai Investasi	
	PMDN (dalam Milyar Rp)	PMA (dalam Milyar Rp)
2018	4.140,54	1.584,22
2019**	4.500,00	2.000,00

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya. 2019

6) Ekspor dan Impor

Sejalan dengan perekonomian global yang diperkirakan masih tumbuh positif ditahun 2019,—makapada tahun 2019 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai US\$20.672.037.275 sementara kinerja impor diperkirakan sebesar US\$19.729.572.494. Perkiraan tersebut tentunya dipengaruhi oleh kinerja perbaikan ekonomi mitra dagang Kota Surabaya yang akhirnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran komoditi ekspor impor Kota Surabaya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.16.

Tabel III.16
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam US\$)

Tahun	2018*	2019**
Ekspor	19.165.996.010	20.672.037.275
Impor	19.612.835.745	19.729.572.494

Sumber data: Bappeko Kota Surabaya, diolah 2019

**) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka TPT di Kota Surabaya pada tahun 2019 diperkirakan masih dalam kisaran angka 6 persen. Hal tersebut mempertimbangkan daya tarik

Kota Surabaya sebagai pasar tenaga kerja bagi para pencari kerja disekitar wilayah Kota Surabaya serta diperkirakan adanya perekrutan CPNS di tahun 2019 turut menjadi faktor yang memengaruhi angka pengangguran kedepan. Perkiraan angka TPT Kota Surabaya tersebut terangkum dalam III.17.

Tabel III.17
Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018	6,12
2019**	5,5 – 6,5

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya dlm RPJMD Kota Surabaya

3.2 Arah Kebijakan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya menunjukkan peningkatan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya selama 2 tahun kebelakang mulai tahun 2017 – 2018 menunjukkan peningkatan PAD Kota Surabaya yang semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2018 dituangkan kedalam tabel III.18 sebagai berikut:

Tabel III.18
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2017 s.d Tahun 2020

No	Uraian	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Ketercapaian	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Ketercapaian	APBD Tahun 2019	APBD Perubahan Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.709.645.546.043	5.161.844.571.172	109,60%	4.758.967.236.960	4.973.031.004.728	104,50%	5.190.295.025.246	5.234.387.226.266	5.391.096.909.848
1.1.1	Pajak Daerah	3.265.955.423.267	3.595.670.492.734	110,10%	3.615.432.902.416	3.817.402.592.324	105,59%	4.008.794.324.904	4.008.794.324.904	4.244.596.988.225
1.1.2	Retribusi Daerah	392.397.980.801	557.966.574.670	142,19%	364.330.957.049	346.798.583.545	95,19%	382.785.780.664	392.663.829.146	392.512.777.081
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	137.981.858.739	134.668.941.612	97,60%	141.308.453.768	140.036.260.033	99,10%	155.431.097.801	156.728.284.536	167.501.717.512
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	913.310.283.236	873.538.562.156	95,65%	637.894.923.727	668.793.568.826	104,84%	643.283.821.877	676.200.787.680	586.485.427.030
1.2	Dana Perimbangan	2.174.478.926.178	1.965.635.624.698	90,40%	2.197.705.635.699	2.088.869.968.843	95,05%	2.316.324.635.003	2.314.200.840.849	2.338.172.801.173
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	496.067.546.178	375.422.942.034	75,68%	545.272.449.699	478.358.706.741	87,73%	529.799.982.003	527.676.187.849	551.648.148.173
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	100,00%	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	100,00%	1.308.697.316.000	1.308.697.316.000	1.308.697.316.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	466.697.504.000	378.498.806.664	81,10%	440.719.310.000	398.797.386.102	90,49%	477.827.337.000	477.827.337.000	477.827.337.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.020.770.497.137	906.092.967.800	88,77%	1.122.419.321.609	1.113.318.147.099	99,19%	1.252.190.367.618	1.174.813.196.619	1.184.077.136.619
1.3.1	Hibah	-	-	0,00%	179.612.600.000	181.544.145.050	0,00%	181.409.399.999	183.711.200.000	191.975.140.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	967.584.022.137	853.167.802.800	88,18%	890.407.321.609	880.120.602.049	98,84%	981.445.686.619	901.445.686.619	902.445.686.619
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.164.710.000	2.903.400.000	91,74%	3.649.400.000	2.903.400.000	79,56%	3.699.400.000	4.020.429.000	4.020.429.000
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.021.765.000	50.021.765.000	100,00%	48.750.000.000	48.750.000.000	100,00%	85.635.881.000	85.635.881.000	85.635.881.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		7.904.894.969.358	8.033.573.163.670	101,63%	8.079.092.194.268	8.175.219.120.670	101,19%	8.758.810.027.867	8.723.401.263.734	8.913.346.847.640

Sumber : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil 2019, diolah

Berdasarkan pada target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2017 dan 2018 maka Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2019 dikarenakan:

1. Penyesuaian target pendapatan daerah dengan mengacu kepada Naskah Perjanjian Hibah BOS SD antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya No.972/1678.01/101.1/2019 dan Naskah Perjanjian Hibah BOS SMP antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya No.972/1677.01/101.1/2019;
2. Penyesuaian target berdasarkan potensi dan realisasi dari pajak dan retribusi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
3. Penyesuaian bagian laba Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan Surat dari Perusahaan Milik Daerah (BUMD);
4. Penyesuaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;
5. Penyesuaian Lain-lain Pendapatan berdasarkan Realisasi pada Tahun 2018 dan proyeksi berdasarkan Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 970/6594/202.4/2019 Tanggal 28 Pebruari 2019, Perihal Informasi Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD TA. 2019.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan realisasi dan proyeksi/target belanja kota Surabaya tahun 2017 – 2018 maka Perubahan belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel III. 19 berikut ini:

Tabel III.19
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Surabaya
Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Ketercapaian	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Ketercapaian	APBD Tahun 2019	APBD Perubahan Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
2.1.2	Belanja Pegawai	2.076.006.837.938	1.960.289.143.905	94,43%	2.125.810.091.981	1.857.794.385.641	87,39%	2.221.237.964.649	2.170.352.550.292	2.259.963.015.551
2.1.3	Belanja Bunga		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	177.606.478.734	111.504.410.055	62,78%	223.172.686.715	81.167.517.434	36,37%	99.989.015.754	158.089.907.809	215.415.480.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
2.1.7	Belanja Bagi Hasil kpd. Prop/Kab/Kota	7.974.260.070	-	0,00%	9.254.742.990	9.254.742.990	100,00%	750.000.000	2.218.293.630	750.000.000
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kpd. Prop/Kab/Kota	2.076.869.303	1.376.863.000	66,30%	3.181.420.697	2.158.290.000	67,84%	3.181.420.697	3.181.420.697	3.181.420.697
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	-	0,00%	10.000.000.000	6.085.899.644	60,86%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.273.664.446.045	2.073.170.416.960	91,18%	2.371.418.942.383	1.956.460.835.709	82,50%	2.340.158.401.100	2.348.842.172.428	2.494.309.916.248
2.2	BELANJA LANGSUNG			0,00%			0,00%			
2.2.1	Belanja Pegawai	485.523.796.636	435.954.095.330	89,79%	510.163.444.973	483.644.287.890	94,80%	517.650.383.870	556.919.526.461	569.028.853.084
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.370.631.852	2.885.392.981.721	85,87%	3.666.769.874.931	3.306.763.333.391	90,18%	3.841.940.288.330	4.077.118.307.777	4.324.716.834.039
2.2.3	Belanja Modal	2.844.371.811.527	2.517.891.658.246	88,52%	2.720.098.071.386	2.430.061.039.309	89,34%	2.806.523.286.995	2.940.806.076.119	2.364.032.088.324
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	6.690.266.240.015	5.839.238.735.298	87,28%	6.897.031.391.290	6.220.468.660.590	90,19%	7.166.113.959.195	7.574.843.910.357	7.257.777.775.447
	TOTAL JUMLAH BELANJA	8.963.930.686.060	7.912.409.152.257	88,27%	9.268.450.333.673	8.176.929.496.299	88,22%	9.506.272.360.295	9.923.686.082.785	9.752.087.691.695

Sumber data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu **“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”**. mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dan Rancangan RKP Tahun 2019 untuk keselarasan program pembangunan daerah maka tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 adalah

“Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Perdagangan dan Jasa dengan Dukungan Integrasi Infrastruktur Ekologis”

Berdasarkan hal tersebut maka Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya pada 2019 diarahkan untuk :

1. Menjamin teralokasinya anggaran belanja pegawai dan belanja untuk program skala prioritas dan besar;
2. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
3. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/guru maupun non guru;
6. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Alokasi belanja langsung dioptimalkan untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil;
8. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan biaya operasional kepada SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta, serta tambahan perbaikan penghasilan bagi guru di Sekolah Negeri/Swasta;
9. Penyesuaian belanja berdasarkan Silpa Tahun 2018 yang telah dikhususkan pengalokasiannya.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sesuai penerimaan dan target, penerimaan perkiraan pembiayaan Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 yang dicantumkan pada APBD Tahun 2019 sebesar

Rp756.287.482.428,- sedangkan realisasi Silpa Tahun 2018 sebesar Rp1.200.284.819.051,- maka terjadi penyesuaian sebesar Rp443.997.336.623,-

Pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2019 yang semula Rp8.825.150.000,- dihapusdenganpertimbangan agar Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya bisa lebih mengoptimalkan penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya yang belum direalisasikan.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 –2018 yang kemudianmendasari perubahan pembiayaan kota Surabaya dituangkan kedalam tabel III.20 adalah sebagai berikut:

Tabel III.20
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Ketercapaian	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Ketercapaian	APBD Tahun 2019	APBD Perubahan Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN									
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan Silpa BLUD	1.069.035.716.702	1.068.140.827.993	99,92%	1.189.308.139.405	1.200.284.819.051	100,92%	756.287.482.428	1.200.284.819.051	848.740.844.055
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-		-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	-		-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-		-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	3.300.000		-	2.000.000		-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	-		-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.069.035.716.702	1.068.144.127.993	99,92%	1.189.308.139.405	1.200.286.819.051	100,92%	756.287.482.428	1.200.284.819.051	848.740.844.055
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN									
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-		-	-		-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	-	0,00%	-	-		8.825.150.000	-	10.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-		-	-		-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-		-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	-		-	-		8.825.150.000	-	10.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	1.059.035.716.702	1.068.144.127.993	100,86%	1.189.308.139.405	1.200.286.819.051	100,92%	747.462.332.428	1.200.284.819.051	838.740.844.055

Sumber data : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BAB IV

SASARANDAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Tema pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2019 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2019 dan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Tema pembangunan nasional tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Ekonomi Inklusif”, sehingga tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 adalah :

***"Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Perdagangan dan Jasa
dengan Dukungan Integrasi Infrastruktur Ekologis"***

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada Tabel IV.1.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Tabel IV.1

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

Penjelasan : Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dandapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah
			Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
			Pembangunan lokal/ruang kelas
			Penyediaan biaya operasional pendidikan
			Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin
		Meningkatkan kualitas pendidikan formal	Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan
			Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak
			Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah
			Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan
	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik
			Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Sertifikasi bagi Pendidik
	Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal	Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal	Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Penjaringan siswa kejar paket
			Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
			Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu
Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan
			Pemberian imunisasi bayi dan balita
		Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak	Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI
			Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita
			Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
			Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
			Pengembangan kampung ASI
	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan
			Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
			Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
			Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
			Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan
		Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas	Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
			Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien	Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan
		Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan
	Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat
			Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
			Penyediaan pelayanan kesehatan khusus
	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif	Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah
			Peningkatan partisipasi peserta KB pria
			Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
			Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)
Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
			Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
	Meningkatkan distribusi pangan	Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar
Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian
			Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan		
	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga	Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin Pemberian kesejahteraan bagi atlet Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Memperluas kesempatan kerja formal	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan <i>job matching</i> yang tepat Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja
		Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif	Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda
		Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja
	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
		Meningkatkan penerapan norma kerja	Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		(termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3	Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

Penjelasan : Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha sertamenciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS	Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial
			Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar
			Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal
			Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
			Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial
Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan	Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif
			Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu memproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM
			Pengembangan hasil usaha kelompok
			Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat
			Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS
Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA
			Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan <i>trafficking</i> melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan <i>trafficking</i>	Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan <i>trafficking</i> (pelaku, korban, saksi)
			Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan
			Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi III : Memelihara keamanan dan ketertiban umum

Penjelasan : Misi 3 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Penyiapan tenaga penertiban
			Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan
			Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota
			Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar	Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan	Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat
			Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang
			Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	umat beragama	kerukunan hidup bermasyarakat	kerukunan beragama
			Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
			Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

Penjelasan : Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral	Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi
			Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral
		Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota
			Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap
			Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK
		Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
			Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan
			Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya	Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum
			Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui <i>database</i> yang terintegrasi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya	Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH
			Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH
	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah	Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah
			Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala
	Meningkatkan kualitas udara dan air	Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota	Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial
			Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient
			Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman
			Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota	Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman
			Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana
			Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana
			Peningkatan upaya integrasi antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan tanggap darurat bencana

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

Penjelasan : Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
			Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat
			Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah
		Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha	Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota
			Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif
			Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif
Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi	Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat
			Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

Penjelasan : Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter, terbuka, kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal	Menggali potensi budaya lokal
			Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya
			Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata	Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal
			Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal
Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca	Penambahan koleksi buku di layanan baca
			Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca
			Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca
			Mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan
		Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan <i>event</i> pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat
			Mengevaluasi kemampuan literasi siswa
Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan	Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler
			Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan <i>event</i> peningkatan nilai kebangsaan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

Penjelasan : Misi 7 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic. Penggalan potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional	Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota
			Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (<i>supply chain management</i>) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik
	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama	Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas
			Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama
			Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan
			Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal: instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri
			Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Penjelasan : Misi 8 dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Meningkatkan kedisiplinan aparatur	Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi
		Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif
		Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan	Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur
	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama,	Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya
			Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan
			Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip
			Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi
			Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik	Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran
			Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
			Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif
			Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan
			Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin
			Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan	Pengembangan <i>database</i> kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu
			Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (<i>Surabaya Single Window</i>)
		Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan <i>masterplan</i> pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif
			Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
			Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
		Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan	Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah
			Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan
			Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen
			Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal
			Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi
Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah	Pengelolaan laboratorium metrologi legal
			Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien
			Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya
			Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak
			Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak
			Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah
			Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Penjelasan : Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro
			Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro
			Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
			Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk
	Meningkatkan produktivitas koperasi	Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha	Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan
			Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi
			Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam
	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian
			Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian
			Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan
	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif	Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Meningkatkan daya tarik wisata	Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
			Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> bidang pariwisata
			Meningkatkan <i>image/branding/ikon</i> pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif
			Penyelenggaraan <i>event</i> yang mempunyai daya tarik secara periodik
Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi	Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha
			Pengembangan strategi promosi investasi

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

Penjelasan : Misi 10 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api) dan utilitas kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
			Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang
Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional	Penambahan dan peningkatan jaringan jalan
			Pemantapan kondisi jaringan jalan
	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas	Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal
			Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi	Penerapan <i>traffic demand management</i>
			Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah
			Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional
			Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan
Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air	Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana jaringan air bersih
			Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
kota secara terpadu dan merata	bersih		
	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang	Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala
			Penyediaan utilitas PJU
			Penggunaan PJU hemat energi
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota	Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya
			Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kota dalam dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Surabaya juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Sasaran pembangunan kota tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan tersebut masih relevan dan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya sehingga tidak dilakukan revisi atau perubahan baik terhadap narasi, indikator, maupun targetnya.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global
2. Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi
4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif
5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional
6. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global
7. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2019	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2019	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2019
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan	1. Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global 4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif	1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	2. Pemerataan Pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	6. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global	2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dengan sistem transportasi berkelanjutan dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah didukung dengan sistem logistik dan hub yang optimal
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim	5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung	3. Peningkatan peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2019	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2019	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2019
	serta akselerasi kepariwisataan	Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional	usaha dalam pembangunan
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air	4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi	4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu	2. Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum 7. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

ISU STRATEGIS BERDASARKAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
1	Tenaga Kerja	• Kualitas angkatan kerja sehingga mampu bersaing dan dapat diterima di dunia kerja
		• Perluasan lapangan kerja bagi warga kota
		• Hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	• Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak meningkat
		• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Pangan	• Ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat meningkat
4	Pertanahan	• Perwujudan keabsahan kepemilikan aset untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan umum
5	Lingkungan Hidup	• Pengendalian pencemaran lingkungan secara efektif dan efisien
		• Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	• Peningkatan Sistem Administrasi kependudukan
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	• Peningkatan potensi masyarakat untuk partisipasi pembangunan
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	• Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana
		• Pengendalian arus urbanisasi
		• Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga
9	Perhubungan	• Ketersediaan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda
		• Penuntasan pembangunan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai
		• Ketersediaan sistem manajemen lalu lintas yang berkualitas dan angkutan umum massal yang nyaman, aman dan cepat serta ramah lingkungan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
10	Komunikasi Dan Informatika	• Pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat • Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien
11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	• Daya saing produk UMKM dan akses terhadap sumber-sumber permodalan meningkat • Volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi meningkat
12	Penanaman Modal	• Realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah meningkat • Kinerja investasi dan akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
13	Kepemudaan Dan Olahraga	• Potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan meningkat • Peningkatan dan pertahanan prestasi olahraga
14	Statistik	• Perwujudan tata kelola data dan informasi yang baik
15	Persandian	
16	Kebudayaan	• Penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni social
17	Perpustakaan	• Minat dan budaya baca masyarakat meningkat melalui peningkatan akses baca
18	Kearsipan	• Perwujudan tertib administrasi pemerintahan termasuk di kecamatan dan kelurahan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN URUSAN PILIHAN		
1	Kelautan Dan Perikanan	• Produktivitas kelautan dan perikanan meningkat • Teknologi tepat guna di bidang kelautan dan perikanan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan
2	Pariwisata	• Wisata religi, heritage, kuliner, belanja, kesehatan, dan wisata lainnya berkembang dan optimal • Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kota Surabaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar meningkat • Perwujudan kerjasama di bidang pariwisata dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
		• Inovasi dalam pemasaran pariwisata
		• Daya saing pelaku usaha kreatif meningkat
3	Pertanian	• Produktivitas pertanian perkotaan meningkat • Teknologi tepat guna di bidang pertanian dapat dikembangkan dan dimanfaatkan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN URUSAN PILIHAN		
4	Perdagangan	• Perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional • Penerapan konsep <i>city logistic</i> yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional • Ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang memudahkan investor • Pengawasan peredaran barang dan jasa meningkat
5	Perindustrian	• Daya saing industri meningkat

ISU STRATEGIS BERDASARKAN PENUNJANG URUSAN (FUNGSI MANAJEMEN)		
1	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	• Perwujudan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan reformasi birokrasi
2	Keuangan	
3	Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah	
4	Pengawasan	

ISU STRATEGIS BERDASARKAN PENUNJANG URUSAN (UNSUR MANAJEMEN)		
1	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	• Perwujudan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan reformasi birokrasi
2	Sarana dan Prasarana Perkantoran	

4.2.2 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Surabaya

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surabaya telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya serta telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Surabaya. Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan Urusan dijabarkan sebagai berikut.

No	Urusan	Pokok-pokok Pikiran DPRD
1	Pendidikan	• Tata cara dan mekanisme terkait pengurusan izin dan pelaksanaan layanan pendidikan sebaiknya memudahkan dan tidak sering dirubah
		• Peraturan terkait pendidikan segera direvisi serta upaya penegakannya lebih ditingkatkan
		• Diperlukan solusi dan tindak lanjut untuk mengurangi dan/atau mencegah anak putus sekolah
		• Kebijakan terkait kuota untuk sekolah menengah perlu dievaluasi dan besar kuota ditingkatkan
		• Pemantauan terhadap pemberian dan pencairan dana bantuan kepada sekolah swasta dan negeri serta kepada siswa dan ditingkatkan
		• Koordinasi secara terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membina PAUD perlu ditingkatkan
		• Meningkatkan upaya pengawasan terhadap siswa dari pengaruh narkoba
		• Peningkatan kualitas pendidikan agar lebih diprioritaskan
		• Perlunya melakukan evaluasi terhadap besar penghasilan tenaga pendidik agar lebih tinggi dari UMK
		• Pemantaun dalam pelaksanaan bantuan kepada pendidik non formal ditingkatkan
2	Kesehatan	• Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bersumber dari dana BPJS
		• Peningkatan layanan kesehatan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang bersumber dari dana BPJS agar warga kota mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan dibeda-bedakan
		• Perlu adanya pelayanan kesehatan secara gratis melalui pembebasan iuran BPJS
		• Perlunya memperluas cakupan/penambahan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh APBD Kota Surabaya
		• Perlu dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data warga miskin sehingga seluruhnya mendapatkan bantuan PBI BPJS

No	Urusan	Pokok-pokok Pikiran DPRD
		• Perlu adanya mekanisme pengobatan bagi masyarakat terlanjar (non identitas) pada Rumah Sakit di kota Surabaya • Perlunya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk mengurangi keluhan pasien/keluarganya • Menambah daya tampung rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya • Mengupayakan ketersediaan sumberdaya kesehatan di puskesmas melalui penambahan dokter/dokter gigi • Penanganan dan pengelolaan limbah rumah sakit agar mendapatkan perhatian • Perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Adanya peraturan terkait pemanfaatan jalan (termasuk aktivitas penutupan) • Peningkatan terhadap pengawasan kinerja PDAM termasuk penentuan tarif • Diseminasi informasi mengenai pengurusan izin terkait tata ruang dan bangunan perlu ditingkatkan • Pelaksanaan pembangunan berpedoman pada ketentuan baik nasional maupun daerah serta sesuai dengan kesepakatan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan kendala • Lebar pedestrian perlu dievaluasi dan dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa kemacetan karena berkurangnya lebar jalan • Pembangunan, pemeliharaan, normalisasi/pengerukan saluran baik primer, sekunder, tersier, maupun skala lingkungan perlu ditingkatkan agar dapat mengurangi luas, lama, dan tinggi genangan terutama di lokasi Jemursari, Tegalsari, dan Pasar Kembang • Pembangunan Penerangan Jalan Umum segera direalisasi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan di kawasan/lingkungan permukiman
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Perlunya diseminasi informasi kepada publik mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan RSDK

No	Urusan	Pokok-pokok Pikiran DPRD
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	- Koordinasi terkait kegiatan yang dilakukan ormas orpol perlu ditingkatkan - Upaya penertiban pedagang perlu ditingkatkan agar tidak mengganggu kepentingan umum terutama di Pasar Keputran dan Jalan Kenjeran - Mitigasi bencana menjadi prioritas sehingga masyarakat mendapatkan edukasi serta informasi yang intensif mengenai bencana untuk meningkatkan kepedulian dan mawas diri
6	Sosial	- Perlu dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data warga miskin secara rutin karena jumlah warga miskin bersifat dinamis sehingga warga yang mendapatkan intervensi dapat terukur dan dipertanggungjawabkan - Upaya untuk menangani PMKS dan menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar harus ditingkatkan karena jumlah PMKS masih tinggi di Kota Surabaya
7	Perhubungan	- Perlu adanya ketentuan mengenai parkir yang dapat mengatur pengelolaan parkir terutama di lokasi pasar, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya - Kota Surabaya membutuhkan transportasi umum yang cepat dan tidak terpengaruh dengan kemacetan - Uji KIR seharusnya dilakukan terhadap kendaraan yang digunakan untuk transportasi online - Pembangunan jalan, jembatan, maupun underpass diperlukan untuk dapat mengurangi kemacetan
8	Lingkungan Hidup	- Penegakan Perda kebersihan perlu ditingkatkan dengan didukung sosialisasi informasi terkait pengelolaan kebersihan - Perlunya fasilitasi dan dukungan Pemkot untuk mengarahkan dana CSR untuk pembangunan lingkungan di kampus kampus - Pembebasan lahan di kawasan konservasi/lindung mangrove segera dilaksanakan
9	Pertanahan	-
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan KTP elektronik perlu ditingkatkan agar memudahkan masyarakat

No	Urusan	Pokok-pokok Pikiran DPRD
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Perlindungan anak perlu ditingkatkan dengan cara memberantas narkoba, mengurangi kasus kenakalan remaja dan pelecehan seksual
		• Program kesetaraan gender seharusnya melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah agar lebih efektif
		• Dukungan kepada PKK perlu ditingkatkan
12	Tenaga Kerja	• Masalah pengangguran terbuka harus ditangani secara tepat sehingga dapat jumlahnya berkurang dengan didukung jumlah dan variasi lapangan kerja yang meningkat
		• Pelatihan keterampilan kepada masyarakat seharusnya mempertimbangkan segmentasi minat masyarakat
		• Perlunya ketentuan yang melindungi tenaga kerja lokal
13	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	• Perlu adanya perhatian terkait sarana untuk pameran dan pemasaran hasil karya masyarakat yang sesuai dengan segmen pasar
14	Kepemudaan dan Olahraga	• Pemberantasan narkoba perlu ditingkatkan dengan melibatkan unsur masyarakat antara lain LPMK
15	Pangan	• Meningkatkan upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok
16	Perpustakaan	• Minat baca masyarakat ditingkatkan dengan cara mempermudah akses kepada perpustakaan dan buku
17	Pariwisata	• Perlu adanya upaya untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap obyek dan destinasi wisata di Kota Surabaya
		• Wisata Mangrove agar dimaksimalkan agar menjadi potensi tambahan penghasilan warga Kota Surabaya
		• Perlu adanya pembangunan obyek wisata di Surabaya Timur
		• Inovasi dalam pemasaran pariwisata
		• Daya saing pelaku usaha kreatif meningkat
18	Perdagangan	• Perlu dilakukan penataan PKL sehingga semua PKL mendapatkan kesempatan berdagang
		• Pendirian UMKM oleh masyarakat agar semakin dipermudah
19	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	• Perlunya mendorong realisasi usulan musrenbang dan jaring aspirasi masyarakat

No	Urusan	Pokok-pokok Pikiran DPRD
20	Keuangan	• Perlu adanya upaya untuk mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan adanya mekanisme insentif/reward/penghargaan bagi yang telah sesuai dengan ketentuan

Hubungan keterkaitan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surabaya dengan Prioritas Prioritas dan Sasaran Pembangunan serta Urusan Kota Surabaya dijelaskan dalam Tabel IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV.3

Keterkaitan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Urusan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Tata cara dan mekanisme terkait pengurusan izin dan pelaksanaan layanan pendidikan sebaiknya memudahkan dan tidak sering dirubah	Pendidikan	1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
Peraturan terkait pendidikan segera direvisi serta upaya penegakannya lebih ditingkatkan			
Diperlukan solusi dan tindak lanjut untuk mengurangi dan/atau mencegah anak putus sekolah			
Kebijakan terkait kuota untuk sekolah menengah perlu dievaluasi dan besar kuota ditingkatkan			
Pemantauan terhadap pemberian dan pencairan dana bantuan kepada sekolah swasta dan negeri serta kepada siswa dan ditingkatkan			
Koordinasi secara terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membina PAUD perlu ditingkatkan			
Meingkatkan upaya pengawasan terhadap siswa dari pengaruh narkoba			
Peningkatan kualitas pendidikan agar lebih diprioritaskan			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Perlunya melakukan evaluasi terhadap besar penghasilan tenaga pendidik agar lebih tinggi dari UMK	Kesehatan		
Pemantaun dalam pelaksanaan bantuan kepada pendidik non formal ditingkatkan			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bersumber dari dana BPJS			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin
Peningkatan layanan kesehatan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang bersumber dari dana BPJS agar warga kota mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan dibedakan			
Perlu adanya pelayanan kesehatan secara gratis melalui pembebasan iuran BPJS			
Perlunya memperluas cakupan/penambahan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh APBD Kota Surabaya			
Perlu dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data warga miskin sehingga seluruhnya mendapatkan bantuan PBI BPJS			
Perlu adanya mekanisme pengobatan bagi masyarakat terlantar (non identitas) pada Rumah Sakit di kota Surabaya			
Perlunya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk mengurangi keluhan pasien/keluarganya			Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan	Sasaran	
Menambah daya tampung rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya				
Mengupayakan ketersediaan sumberdaya kesehatan di puskesmas melalui penambahan dokter/dokter gigi				
Penanganan dan pengelolaan limbah rumah sakit agar mendapatkan perhatian				Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
Perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan				Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
Perlu dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data warga miskin secara rutin karena jumlah warga miskin bersifat dinamis sehingga warga yang mendapatkan intervensi dapat terukur dan dipertanggungjawabkan	Sosial			Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Upaya untuk menangani PMKS dan menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar harus ditingkatkan karena jumlah PMKS masih tinggi di Kota Surabaya				
Pelayanan KTP elektronik perlu ditingkatkan agar memudahkan masyarakat	Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah			Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Perlindungan anak perlu ditingkatkan dengan cara memberantas narkotika, mengurangi kasus kenakalan remaja dan pelecehan seksual	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Program kesetaraan gender seharusnya melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah agar lebih efektif				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Dukungan kepada PKK perlu ditingkatkan			Meningkatkan pemberdayaan perempuan
Masalah pengangguran terbuka harus ditangani secara tepat sehingga dapat jumlahnya berkurang dengan didukung jumlah dan variasi lapangan kerja yang meningkat	Tenaga Kerja		Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
Pelatihan keterampilan kepada masyarakat seharusnya mempertimbangkan segmentasi minaa masyarakat			
Perlunya ketentuan yang melindungi tenaga kerja lokal			
Pemberantasan narkoba perlu ditingkatkan dengan melibatkan unsur masyarakat antara lain LPMK	Kepemudaan dan Olahraga		Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Meningkatkan upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok	Pangan		Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
Minat baca masyarakat ditingkatkan dengan cara mempermudah akses kepada perpustakaan dan buku	Perpustakaan		Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
Perlu adanya ketentuan mengenai parkir yang dapat mengatur pengelolaan parkir terutama di lokasi pasar, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya	Perhubungan	2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Kota Surabaya membutuhkan transportasi umum yang cepat dan tidak terpengaruh dengan kemacetan			Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
Uji KIR seharusnya dilakukan terhadap kendaraan yang digunakan untuk transportasi online			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Pembangunan jalan, jembatan, maupun underpass diperlukan untuk dapat mengurangi kemacetan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Adanya peraturan terkait pemanfaatan jalan (termasuk aktivitas penutupan)			
Peningkatan terhadap pengawasan kinerja PDAM termasuk penentuan tarif			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Diseminasi informasi mengenai pengurusan izin terkait tata ruang dan bangunan perlu ditingkatkan			Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Pelaksanaan pembangunan berpedoman pada ketentuan baik nasional maupun daerah serta sesuai dengan kesepakatan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan kendala			
Lebar pedestrian perlu dievaluasi dan dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa kemacetan karena berkurangnya lebar jalan			
Pembangunan, pemeliharaan, normalisasi/pengerukan saluran baik primer, sekunder, tersier, maupun skala lingkungan perlu ditingkatkan agar dapat mengurangi luas, lama, dan tinggi genangan terutama di lokasi Jemursari, Tegalsari, dan Pasar Kembang			Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
Pembangunan Penerangan Jalan Umum segera direalisasi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan di kawasan/lingkungan permukiman			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Perlunya diseminasi informasi kepada publik mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan RSDK	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
Perlunya mendorong realisasi usulan musrenbang dan jaring aspirasi masyarakat			
Pembebasan lahan di kawasan konservasi/lindung mangrove segera dilaksanakan	Pertanahan		Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Perlu adanya perhatian terkait sarana untuk pameran dan pemasaran hasil karya masyarakat yang sesuai dengan segmen pasar	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3. Peningkatan peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
Pendirian UMKM oleh masyarakat agar semakin dipermudah			
Perlu dilakukan penataan PKL sehingga semua PKL mendapatkan kesempatan berdagang			
Perlu adanya upaya untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap obyek dan destinasi wisata di Kota Surabaya	Pariwisata		Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Wisata Mangrove agar dimaksimalkan agar menjadi potensi tambahan penghasilan warga Kota Surabaya			
Perlu adanya pembangunan obyek wisata di Surabaya Timur			

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Urusan	Prioritas Pembangunan	Sasaran
Perlu adanya upaya untuk mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan adanya mekanisme insentif/reward/penghargaan bagi yang telah sesuai dengan ketentuan	Keuangan		Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
Penegakan perda kebersihan perlu ditingkatkan dengan didukung sosialisasi informasi terkait pengelolaan kebersihan	Lingkungan Hidup	4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Perlunya fasilitasi dan dukungan Pemkot untuk mengarahkan dana CSR untuk pembangunan lingkungan di kampus kampus			Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
Koordinasi terkait kegiatan yang dilakukan ormas orpol perlu ditingkatkan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
Upaya penertiban pedagang perlu ditingkatkan agar tidak mengganggu kepentingan umum terutama di Pasar Keputran dan Jalan Kenjeran			
Mitigasi bencana menjadi prioritas sehingga masyarakat mendapat edukasi serta informasi yang intensif mengenai bencana untuk meningkatkan kepedulian dan mawas diri			

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019 serta Provinsi Jawa Timur dalam RKPD 2019. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kota Surabaya Tahun 2019



TEMA RKP 2019

Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas



TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2019

Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusif



TEMA RKPD KOTA SURABAYA 2019

Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Perdagangan dan Jasa dengan Dukungan Integrasi Infrastruktur Ekologis

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Tabel IV.4

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya Tahun 2019

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1. Mempercepat pengurangan kemiskinan 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak 5. Meningkatkan tata kelola layanan dasar	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus 2. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru, dan sarana prasarana 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih 4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta "Link and Match" antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja 5. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal melalui penyediaan sarana prasarana, tenaga pendidik berkualitas serta penunjang operasional 2. Meningkatkan kualitas layanan baca 3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan masyarakat 4. Mempertahankan prestasi olahraga serta Meningkatkan potensi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja 5. Meningkatkan pelayanan, keterampilan, pemberdayaan dan perlindungan bagi PMKS serta ibu dan anak 6. Meningkatkan penguatan nilai kebangsaan dan budaya lokal

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
2	Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	1. Meningkatkan konektivitas 2. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika 3. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah 4. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi 5. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan	Pemerataan Pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	1. Memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan Pembangunan Desa 2. Mengembangkan dan Mengelola Telekomunikasi dan Informatika	Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dengan sistem transportasi berkelanjutan dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah didukung dengan sistem logistik dan hub yang optimal	1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan dan sistem manajemen transportasi 2. Optimalisasi sitem angkutan umum massal 3. Meningkatkan pelayanan utilitas kota 4. Mengembangkan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif dan mengendalikan keamanan data dan informasi layanan 5. Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	1. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi industri 3. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif 4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 5. Optimalisasi pemanfaatan iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah	Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan	1. Meningkatkan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 2. Meningkatkan nilai tambah agroindustri, agromaritim, dan daya saing koperasi dan UKM 3. Akselerasi kepariwisataan 4. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia pertanian, industri, dan pariwisata 5. Mengembangkan industrialisasi berbasis ekonomi digital	Peningkatan peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan	1. Memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan 2. Meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan pemasaran usaha mikro melalui fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan 3. Meningkatkan produktivitas koperasi, sektor industri kreatif, dan sektor penunjang pariwisata 4. Memanfaatkan inovasi teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha 5. Meningkatkan koordinasi dan dukungan dari Pemerintah dalam mendukung perdagangan dan usaha
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air	1. Meningkatkan produksi energi primer 2. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi 3. Meningkatkan aksesibilitas energi 4. Meningkatkan efisiensi dalam	Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, stabilisasi harga pangan, penganekaragaman konsumsi dan peningkatan keamanan pangan 2. Meningkatkan ketahanan energi dan pengelolaan potensi sumber daya mineral	Pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif	1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor kelautan perikanan 2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan RTH 3. Memantau dan menegakkan aturan terkait pencemaran air dan udara

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
		penggunaan energi dan listrik 5. Memperhatikan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri 6. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan 7. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat 8. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi 9. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air 10. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya 11. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air dan ekosistemnya 12. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS 13. Meningkatkan		3. Meningkatkan tata kelola sumber daya air dan pengendalian banjir 4. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup		4. Meningkatkan sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman 5. Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan 6. Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan distribusi pangan 7. Mengembangkan dan memelihara sistem drainase 8. Mengembangkan dan memelihara sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
		kesadaran terkait sumberdaya air				
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	1. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber 2. Menjamin kesuksesan Pemilu 3. Memperkuat pertahanan wilayah nasional 4. Meningkatkan kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi 5. Memperkuat efektivitas diplomasi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap issue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba 2. Mensukseskan Pemilu serentak	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Meningkatkan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan 2. Melakukan pembinaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan 3. Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama 4. Meningkatkan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota 5. Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan layanan untuk mewujudkan reformasi birokrasi

Dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya, telah diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional serta Provinsi Jawa Timur yang difokuskan pada :

1. Pembangunan manusia.

Pemerintah pusat akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2019. Pemerintah Kota Surabaya mendukung kebijakan tersebut. Pada tahun 2019 pembangunan manusia di kota Surabaya dilakukan melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca.

2. Pengurangan kesenjangan wilayah dan penguatan konektivitas.

Sebagai bentuk penyelarasan pada tingkat nasional dan provinsi terkait pengurangan kesenjangan dan penguatan konektivitas, Kota Surabaya akan melakukan pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dengan sistem transportasi berkelanjutan dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah didukung dengan sistem logistik dan hub yang optimal di tahun 2019.

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi

Melalui Peraturan Presiden no 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pemerintah pusat berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha dan investasi. Salah satu layanan yang diterbitkan untuk mendorong kebijakan tersebut adalah melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk perijinan investasi satu pintu pada bulan Juli 2018. Pemerintah Kota Surabaya mendukung sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pemerintah mengambil kebijakan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh final) bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%. Pemerintah Kota Surabaya mendukung kebijakan tersebut untuk meringankan beban para pelaku UMKM, disamping juga agar para pelaku usaha kecil dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi pada tahun 2019, Kota Surabaya memfokuskan pada sektor peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan.

4. Pemantapan energi.

Pemerintah mendorong penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), baik geothermal, tenaga matahari, angin dan air. Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan energi, antara lain : Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres No 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan Perpres No 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pemerintah Kota Surabaya mendukung kebijakan penggunaan EBT sehingga pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif menjadi prioritas Kota Surabaya pada Tahun 2019, sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

5. Stabilitas keamanan.

Bentuk penyelarasan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur terkait stabilitas keamanan adalah melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

6. Perbaikan Gizi Masyarakat

Perbaikan gizi masyarakat terutama dalam rangka penurunan prevalensi balita gizi buruk dan stunting dilakukan melalui upaya intervensi gizi spesifik yang difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan.

7. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Upaya penurunan AKI dan AKB telah dilaksanakan melalui optimalisasi Program Penurunan AKI dan AKB (Penakib) dengan pelaksanaan jejaring aktif bersama organisasi profesi, TP PKK, Kader, PERSI serta RS bersalin se-Kota Surabaya, serta pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan pada remaja/anak sekolah dan calon pengantin/pasangan usia subur terutama dalam rangka menurunkan ibu hamil dengan resiko tinggi atau 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Banyak).

8. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin

Pemutakhiran data penduduk miskin dilakukan melalui sistem e-pemutakhiran data yang didalamnya memfasilitasi proses verifikasi warga miskin yang mendapatkan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Melalui sistem tersebut, akan terpetakan jumlah penduduk miskin Kota Surabaya. Proses updating data dilakukan setiap hari, sehingga data tersebut sesuai dengan kondisi real-time warga Kota Surabaya.

4.2.4 Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Sasaran Pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019 dengan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.15 %	
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99.3 %	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	67.37 %	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99.54 %	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	91.35 %	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95.93 %	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	83.92 %	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.86 %	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.86 %	
		Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs,	28.38 %	

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
		SMA/MA/SMK yang terakreditasi *		
	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	26.88 %	1. Dinas Pendidikan
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	70	1. Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	100%	
	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada	79	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 3. RSUD Bhakti Dharma Husada 4. RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M Soewandie	75	
		Persentase puskesmas yang terakreditasi	71.43 %	
		Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	100%	
	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	1.8 -1.9	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100%	1. Dinas Kesehatan
		Persentase kelurahan siaga aktif	100%	
	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja Formal	40 >%	1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 2. Dinas Tenaga Kerja
		Persentase wirausaha muda yang berdaya	7.5 %	
	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	80%	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	14%	1. Dinas Sosial 2. 31 Kecamatan
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender	74.19 %	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kelurahan Ramah Anak	68.18 %	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. 31 Kecamatan
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 6.41 per 1.000 KH	1. Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 80.67 per 100.000 KH	
		Cakupan pelayanan ibu nifas	94.52 %	
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi	95.08 %	
		Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	
	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan	90.3 %	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	93%	1. Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah 2. Dinas Perdagangan
	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Persentase koleksi buku yang termanfaatkan	77.6 %	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	75.5 %	
		Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan reading text levelling	100%	
	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase Budaya yang dapat dilestarikan	91.39 %	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Pendidikan
	Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4%	1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Sosial 5. 31 Kecamatan
	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	24.43	1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
	dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan			
	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional	Persentase atlet yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional	65%	1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dengan sistem transportasi berkelanjutan dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah didukung dengan sistem logistik dan hub yang optimal	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95	36%	1. Dinas Perhubungan
	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Tingkat kehandalan jaringan jalan	0.41	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Load factor kendaraan umum (Angkot)	26%	1. Dinas Perhubungan
		Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	38%	
	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	Cakupan layanan teknis air bersih	100%	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	12.44 %	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	100%	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks genangan	41.41	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	27.59 %	1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum	100%	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	41.88 %	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks penanggulangan bencana	74.33 %	1. Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 2. Dinas Pemadam Kebakaran 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
3. Peningkatan peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	4.03 %	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 2. Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
		Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	75.54 %	
	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	23%	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 4. 31 Kecamatan
	Meningkatkan produktivitas koperasi	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	23%	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Tingkat Produktivitas budidaya pertanian	3.84 ton/ha	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya	3.45 ton/orang	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	6%	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5. Dinas Pengendalian

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
				Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Dinas Perdagangan
	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata	29.16 %	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	Rata-rata pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan	5.59 %	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Perhubungan
	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan	2.4 %	1. Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Persentase realisasi tindak lanjut MoU bidang Perdagangan (G to G dan G to B)	57.14 %	1. Bagian Administrasi Kerjasama
4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	7.47 %	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan	52.68	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perhubungan
		Indeks Kualitas Udara Ambien	84.75	
	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan	Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	18.9 %	1. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. 31 Kecamatan

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
	penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan			
	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	8295.65 Ha	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 3. Dinas Sosial
	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	71.43 %	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	83.67 %	
	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	26.55 %	1. Dinas Lingkungan Hidup
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	17.26	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. 31 Kecamatan
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Angka kejadian anarkis per 100.000 penduduk	0.95	1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2. Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 3. Dinas Sosial
	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Angka pelanggaran disiplin aparatur per 1.000 pegawai	1.26	1. Badan Kepegawaian dan Diklat 2. Inspektorat
		Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten	77.55 %	
		Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil	11.7 %	

Prioritas Pembangunan Kota Surabaya 2019	Sasaran Pembangunan Kota Surabaya	Indikator	Target Tahun 2019	Perangkat Daerah
		diturunkan		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	72	1. Bagian Hubungan Masyarakat 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Dinas Perdagangan 9. Dinas Perhubungan 10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 11. Dinas Tenaga Kerja 12. 31 Kecamatan
		Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	
		Tingkat kepuasan penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif	cukup	
		Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota	75%	
	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	66%	1. Seluruh Perangkat Daerah (72 PD)
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	100%	
		Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	
		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq 76\%$	95.39 %	
		Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti	85%	
		Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	
		Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik	30%	
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91.96 %	
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	78%	

(*) SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya tahun 2019 telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Jawa Timur, serta disesuaikan dengan APBD Kota Surabaya Tahun 2019 dimana terjadi penambahan kegiatan yang diampu oleh Inspektorat, Kecamatan serta Dinas Perhubungan. Penambahan kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) yang diampu oleh Inspektorat berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/10370/SJ tentang Penyediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Kegiatan baru Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan di Kecamatan merupakan pemenuhan atas berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Sedangkan kegiatan baru pada Dinas Perhubungan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Transportasi Umum merupakan penyesuaian atas berlakunya Peraturan Walikota No. 07 Tahun 2019 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 dijelaskan dalam Tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	698 lembaga	699 lembaga	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	317 lembaga	318 lembaga	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	2 kali	2 kali	Dinas Pendidikan dan lembaga SD Negeri dan SMP Negeri pelaksana PPDB	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	301 lembaga	302 lembaga	SD Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	62 lembaga	63 lembaga	SMP Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	447 paket	447 paket	lembaga PAUD	Dinas Pendidikan
					Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	363 lembaga	367 lembaga	Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri	Dinas Pendidikan
					Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	2 lembaga	2 lembaga	Lembaga PAUD penerima DAK PAUD	Dinas Pendidikan
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	301 lembaga	302 lembaga	SD Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	62 lembaga	63 lembaga	SMP Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pemeliharaan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	1 sistem	1 sistem	Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	6 lembaga	Lembaga SD Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	8 lembaga	7 lembaga	Lembaga SMP Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan
					Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	94 bangunan	170 bangunan	Fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	40 dokumen	23 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	100 bangunan	127 bangunan	Gedung Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Penerapan Kurikulum	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	73 lembaga	73 lembaga	Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Kelas Layanan khusus dan Sekolah Inklusi serta Pusat Layanan Disabilitas	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	37 lembaga	37 lembaga	Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	1 kali	1 kali	Semua Sekolah Menengah di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Nasional	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	2 kali	2 kali	Semua sekolah Dasar di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Sekolah	Dinas Pendidikan
					Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	410 lembaga	410 lembaga	Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi	Dinas Pendidikan
					Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	297 lembaga	297 lembaga	Sekolah Menengah Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	893 lembaga	893 lembaga	Lembaga PAUD dan Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	729 lembaga	729 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	286 lembaga	286 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	12 kali	12 kali	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	957 lembaga	957 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	12010 orang	11748 orang	Lembaga PAUD di Kota Surabaya dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan	1 kali	1 kali	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Prestasi	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1339 lembaga	1339 lembaga	Pos Paud Terpadu (PPT) di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	5 kali	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	2 kali	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	21 kali	21 kali	Kota Surabaya dan Luar Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	4 kali	4 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pemberian Makanan Tambahan PAUD	893 lembaga	893 lembaga	PAUD di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	4022 lembaga	1224 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal	Program Pendidikan Kesetaraan	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	34 lembaga	34 lembaga	PKBM yang ditunjuk	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	12000 orang	12000 orang	TPA/TPQ hasil verifikasi dari Kemenag	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	2 kali	2 kali	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	289 lembaga	289 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	537252 orang	537252 orang	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	32784 orang	467108 orang	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Pelayanan Kesehatan Primer	64 lembaga	64 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	1 sistem	1 sistem	Seluruh Layanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	54 jenis	59 jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	64 lembaga	64 lembaga	Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan UPTD Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	1 jenis	1 jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	4 jenis	4 jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	28 bangunan	33 bangunan	Puskesmas/Puskesmas Pembantu milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	11 dokumen	5 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	173 jenis	173 jenis	63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	34 jenis	34 jenis	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas (DAK)	17 lembaga	20 lembaga	17 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	134 lembaga	134 lembaga	Rumah Sakit, Klinik Utama dan Puskesmas di Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	45 kali	45 kali	Kantor Dinas Kesehatan dan Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	5 dokumen	5 dokumen	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	9216 orang	11751 orang	RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pelayanan Medik Rumah Sakit	2887 orang	2289 orang	RSUD Bhakti Dharma Husada dan domisili pasien RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	96 kali	96 kali	RSUD BDH	RSUD Bhakti Dharma Husada

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Promosi Kesehatan Rumah Sakit	134 kali	120 kali	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan)	1 kali	1 kali	RSUD BDH	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	26000 orang	26000 orang	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
					Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	115 kali	115 kali	RSUD dr. Moahamad Soewandhie	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
					Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	4 jenis	4 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
					Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	200 orang	200 orang	Eksternal dan Internal	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya	2 bangunan	2 bangunan	RSUD Milik pemerintah kota Surabaya yang dilakukan konservasi energi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	1 bangunan	RSUD milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru (Tahun Jamak / Multiyears)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	3 jenis	3 jenis	rsud bhakti dharma husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan/peningkat an/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	1 jenis	RSUD BDH	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	3 jenis	3 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
					Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	1 jenis	1 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2 jenis	2 jenis	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2 jenis	2 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
			Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	64 lembaga	64 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan
					Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	600 lokasi	600 lokasi	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	154 lembaga	154 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	154 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	64 lembaga	64 lembaga	Rumah ABK dan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Surveilans dan Imunisasi	63 lembaga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	82 lembaga	82 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	6 item	10 item	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
			Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi anak	6000 orang	5750 orang	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi lanjut usia	20000 orang	20000 orang	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	9414 orang	7500 orang	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pembinaan dan pemulihan PMKS	1235 orang	1235 orang	Kantor Dinas Sosial, UPTD Dinas Sosial dan Luar Kota Surabaya	Dinas Sosial
					Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	154 Kelurahan	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	40 orang	Kantor UPTD Kampung Anak Negeri Jalan Wonorejo Timur Nomor 130 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	65 orang	Kantor UPTD Pondok Sosial Kalijudan Jalan Villa Kalijudan Indah 15 Kavling 2-4 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	95 orang	95 orang	Kantor UPTD Babat Jerawat Jalan Raya Babat Jerawat Nomor 139 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	150 orang	Kantor UPTD Griya Werdha Jalan Jambangan Baru Tol Nomor 15 A Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1150 orang	1035 orang	Kantor UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Jalan Keputih tegal No.32 Surabaya	Dinas Sosial
					Penyelenggaraan layanan ambulance gratis	4416 kali	4416 kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	17 lembaga	17 lembaga	Kota Surabaya	Dinas Sosial
					Fasilitasi pemakaman	960 orang	543 orang	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	4 kali	4 kali	31 kecamatan	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	24 kali	24 kali	31 kecamatan	Dinas Sosial
					Peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	34 kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1038 orang	1038 orang	Kantor Dinas Sosial dan Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Sosial
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Pelayanan kesehatan keluarga	64 lembaga	64 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	428 kunjungan	428 kunjungan	Rumah Sakit Rujukan Jampersal	Dinas Kesehatan
				Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	686 orang	686 orang	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	3 item	3 item	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	8097 sampel	8097 sampel	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
			Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	3 kali	3 kali	Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
			Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	668 lembaga	668 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan / Sekolah jenjang Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	267 lembaga	267 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan / Sekolah jenjang Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan
			Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal	Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	376 lembaga	376 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan/Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	245 lembaga	245 lembaga	Kawasan Pelatihan Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Timur	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	13 kali	13 kali	Seluruh lembaga sekolah di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	62 kali	62 kali	31 kecamatan	Dinas Sosial
					Pemeliharaan TMP dan MPN	7 lokasi	7 lokasi	TMP Kusuma Bangsa, TMP Ngagel, TMP 10 Nopember, MPN WR. Soepratman, MPN Dr. Soetomo, MPN Bung Tomo, MPN KH. Mas Mansyur	Dinas Sosial
			Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	4 bangunan	5 bangunan	Fasilitas Olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga	2 dokumen	2 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	2. Pemerataan Pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dengan sistem transportasi berkelanjutan dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah didukung dengan sistem logistik dan hub yang optimal	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	12 dokumen	12 dokumen	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	200 unit	220 unit	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	1 lokasi	1 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	21 lokasi	21 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	1222 lokasi	1222 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	55 dokumen	55 dokumen	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)	2 lokasi	2 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)	2 dokumen	2 dokumen	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	1 lokasi	1 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	1 dokumen	1 dokumen	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2 dokumen	2 dokumen	di wilayah Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	4800 titik	4800 titik	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	6674 rekening	6674 rekening	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	73680 titik	73680 titik	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	10 izin	10 izin	Menyebar di 31 Kecamatan Wilayah Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan	240 rekomendasi	240 rekomendasi	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	20 dokumen	20 dokumen	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	56 unit	56 unit	Rumah pompa yang menyebar di Saluran primer dan sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	21 lokasi	27 lokasi	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	1055 lokasi	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	65 dokumen	65 dokumen	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	2 lokasi	2 lokasi	Saluran Banyu Urip diversifikasi Gunungsari	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	2 dokumen	2 dokumen	Saluran Banyu Urip diversifikasi Gunungsari	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Program Perencanaan Ruang Kota	Pendukung Perencanaan Rinci Ruang Kota	1 dokumen	1 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan	5 jenis	5 jenis	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	6000 bangunan	6000 bangunan	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pengawasan Bangunan	240 lokasi	240 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	7334 berkas	7334 berkas	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUK)	500 ijin	600 ijin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	9 dokumen	9 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	12677 persil	12677 persil	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	5 dokumen	5 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	5 lokasi	5 lokasi	JLLB, JLLT, Wonokromo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Program Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	40 bidang	40 bidang	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Program Penanggulan n Bencana	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	6 bangunan	10 bangunan	Fasilitas Pemadam Kebakaran milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	4 dokumen	4 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan	3. Peningkatan peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	Pembangunan/Rehabili tasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	35 bangunan	45 bangunan	Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	7 dokumen	7 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air	4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelesatarian sumber daya alam lingkungan hidup yang berkelanjutan	4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	401 lokasi	401 lokasi	Taman dan jalur hijau yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman Rekreasi	35 lokasi	35 lokasi	Taman Rekreasi yang Tersebar di Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Penataan Taman dan Jalur Hijau	71 lokasi	71 lokasi	Lahan aset Pemerintah Kota Surabaya dan lahan warga yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pengembangan Dekorasi Kota	15 lokasi	15 lokasi	Seluruh Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	13 lokasi	13 lokasi	13 Makam Pemkot	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Makam	63 Lokasi	63 Lokasi	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Program Pengelolaan Kebersihan	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	1 lokasi	1 lokasi	IPLC Keputih	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	573 lokasi	573 lokasi	9 Wilayah Rayon Kebersihan: Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Barat, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Selatan 1 dan Rayon Selatan 2	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	300 lokasi	450 lokasi	saluran primer, sekunder, tersier dan rumah pompa di kota surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pengangkutan Sampah	267 lokasi	267 lokasi	5 Wilayah pengangkutan sampah di Kota Surabaya: Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	7906 unit	7906 unit	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	1 rekening	1 rekening	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	19 unit	19 unit	Workshop alat berat/ kendaraan DKRTH dan ATPM alat berat/ kendaraan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	183 lokasi	183 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	3 lokasi	3 lokasi	IPAL di Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	4 kali	4 kali	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	104 kali	104 kali	9 wilayah rayon kebersihan Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Selatan 1, Rayon Selatan 2, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Barat	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	5 kali	3 kali	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	33 lokasi	33 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penanganan Limbah B3	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan (DAK)	2 unit	2 unit	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Layanan Pengolahan Sampah (DAK)	1 Rekening	1 Rekening	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	4 Lokasi	5 Lokasi	Kelurahan Kalirungkut, Jagir, Sawahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	12 bangunan	23 bangunan	Rusunawa Gunung Anyar Sawah dan Benowo, infrastruktur penunjang rusunawa Keputih dan Tambak Wedi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1323 lokasi	811 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	178 dokumen	178 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 dokumen	4 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	10 dokumen	13 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 Lokasi	200 Lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Perbaikan rumah tidak layak huni	1000 unit	1000 unit	31 Kecamatan	Dinas Sosial
			Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	2 lokasi	2 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	11 unit	10 unit	Gedung Milik pemerintah kota Surabaya yang dilakukan konservasi energi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	4 dokumen	1 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	102 kali	Gedung milik Pemerintah Kota, Gedung Tempat Ibadah, dan 31 Kecamatan	Dinas Sosial
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	9467 berkas	6500 berkas	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	50 berkas	50 berkas	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor Dinas Sosial	Dinas Sosial
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
				Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	78 bangunan	127 bangunan	Fasilitas gedung pemerintah daerah milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	1 bangunan	Gedung Pemerintah milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	62 dokumen	50 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	200 bangunan	208 bangunan	Gedung Pemerintah yang perlu dilakukan pemeliharaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor Dinas Sosial	Dinas Sosial
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	17 dokumen	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	17 dokumen	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	17 dokumen	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	17 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET		LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	17 dokumen	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	17 dokumen	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	RSUD Dr. Mohamad Soewandie

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2019

Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan RKPD Tahun 2019 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah mengalami perubahan anggaran yang disebabkan oleh penyesuaian output kegiatan maupun selain output kegiatan (kebijakan Pemerintah) disampaikan secara detail pada Tabel V.2 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana berikut :



Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Badan Kepegawaian dan Diklat			21,242,483,681	Badan Kepegawaian dan Diklat			23,347,029,070
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.04. Pengawasan			713,027,462	2.1.2.04. Pengawasan			713,027,462
2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	100%	713,027,462	2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	100%	713,027,462
	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	100%			Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	100%	
	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%			Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%	
2.1.2.04.01.0001 Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai	633 orang	713,027,462	2.1.2.04.01.0001 Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai	633 orang	713,027,462
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.01. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			18,529,866,106	2.2.2.01. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			20,614,411,495
2.2.2.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	93%	18,529,866,106	2.2.2.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	93%	20,614,411,495
	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	62.52%			Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	62.52%	
	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	92.58%			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	92.58%	
	Persentase terbentuknya dan berfungsinya assesment centre	60%			Persentase terbentuknya dan berfungsinya assesment centre	60%	
2.2.2.01.01.0002 Pelaksanaan Assesment Centre	Jumlah pelaksanaan assesment pegawai	5 kali	492,056,930	2.2.2.01.01.0002 Pelaksanaan Assesment Centre	Jumlah pelaksanaan assesment pegawai	8 kali	492,056,930
2.2.2.01.01.0003 Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	9513 berkas	738,125,062	2.2.2.01.01.0003 Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	9513 berkas	738,125,062



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.01.01.0004 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural	2 jenis	2,259,865,340	2.2.2.01.01.0004 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural	2 jenis	2,259,865,340
2.2.2.01.01.0005 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial	2 jenis	4,115,798,226	2.2.2.01.01.0005 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial	2 jenis	4,621,593,396
2.2.2.01.01.0007 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	2 jenis	2,712,225,803	2.2.2.01.01.0007 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	2 jenis	4,310,976,022
2.2.2.01.01.0008 Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan	127 berkas	1,026,323,174	2.2.2.01.01.0008 Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan	127 berkas	1,026,323,174
2.2.2.01.01.0009 Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola	9000 data	462,782,764	2.2.2.01.01.0009 Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola	9000 data	345,638,231
2.2.2.01.01.0010 Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya	439 orang	3,199,162,233	2.2.2.01.01.0010 Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya	479 orang	3,477,261,120
2.2.2.01.01.0011 Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	6954 orang	647,622,890	2.2.2.01.01.0011 Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	6954 orang	637,622,890
2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)	3 materi	359,504,325	2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)	3 materi	359,504,325
2.2.2.01.01.0013 Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Calon PNS	4 tahap	2,224,079,087	2.2.2.01.01.0013 Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Calon PNS	4 tahap	2,053,124,733
2.2.2.01.01.0014 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian	3500 orang	292,320,272	2.2.2.01.01.0014 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian	3500 orang	292,320,272
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,999,590,113	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,019,590,113
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,513,901,842	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,523,901,842
2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,513,901,842	2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,523,901,842

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	485,688,271	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	495,688,271
2.2.2.02.02.0002 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	485,688,271	2.2.2.02.02.0002 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	495,688,271
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			8,959,492,589	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			8,834,730,424
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			6,590,283,359	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			6,507,040,240
1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	6,590,283,359	1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	6,507,040,240
1.1.1.05.02.0001 Orientasi Kewaspadaan Nasional	Jumlah Kegiatan Orientasi Kewaspadaan Nasional	16 Kali	613,385,079	1.1.1.05.02.0001 Orientasi Kewaspadaan Nasional	Jumlah Kegiatan Orientasi Kewaspadaan Nasional	16 Kali	474,770,540
1.1.1.05.02.0002 Pemantauan dan Pengendalian Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota	70 kali	601,998,775	1.1.1.05.02.0002 Pemantauan dan Pengendalian Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota	70 kali	536,831,950
1.1.1.05.02.0003 Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota	194 kali	4,231,464,605	1.1.1.05.02.0003 Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota	194 kali	4,659,904,050
1.1.1.05.02.0004 Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 kali	1,143,434,900	1.1.1.05.02.0004 Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 kali	835,533,700
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.16. Kebudayaan			1,004,774,422	1.1.2.16. Kebudayaan			962,576,826
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	1,004,774,422	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	962,576,826
1.1.2.16.03.0001 Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	31 lembaga	395,328,528	1.1.2.16.03.0001 Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	31 lembaga	309,762,776



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03.0002 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan	750 orang	609,445,894	1.1.2.16.03.0002 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan	750 orang	652,814,050
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,364,434,808	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,365,113,358
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,093,181,708	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,093,860,258
2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,093,181,708	2.2.2.02.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,093,860,258
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	271,253,100	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	271,253,100
2.2.2.02.02.0003 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	271,253,100	2.2.2.02.02.0003 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	271,253,100
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			53,270,545,057	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat			52,974,421,125
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			50,328,024,935	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			50,149,361,223
1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	40,910,160,351	1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	40,620,999,681
1.1.1.05.02.0005 Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	737 orang	39,643,886,811	1.1.1.05.02.0005 Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	741 orang	39,415,353,146
1.1.1.05.02.0007 Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat	81 kali	810,982,615	1.1.1.05.02.0007 Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat	81 kali	880,029,610



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.02.0008 Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	455,290,925	1.1.1.05.02.0008 Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	325,616,925
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	68%	9,417,864,584	1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	68%	9,528,361,542
	Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%			Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%	
1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	2100 orang	1,741,906,543	1.1.1.05.03.0002 Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	2100 orang	1,709,461,371
1.1.1.05.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	1,959,734,695	1.1.1.05.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	1,959,734,695
1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	25 jenis	2,002,591,090	1.1.1.05.03.0004 Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	25 jenis	2,056,981,690
1.1.1.05.03.0005 Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	4 Kegiatan	2,204,344,355	1.1.1.05.03.0005 Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	4 Kegiatan	2,360,948,385
1.1.1.05.03.0006 Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	515 orang	799,265,645	1.1.1.05.03.0006 Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	515 orang	826,709,865
1.1.1.05.03.0007 Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Penanggulangan Bencana	jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	710,022,256	1.1.1.05.03.0007 Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Penanggulangan Bencana	jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	614,525,536
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,061,609,483	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,886,684,663



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,061,609,483		2.2.2.02.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,886,684,663	
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	880,910,639		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	938,375,239	
2.2.2.02.02.0007 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	880,910,639		2.2.2.02.02.0007 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	938,375,239	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			46,926,218,135		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			45,978,259,772	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.02. Keuangan			36,602,885,610		2.1.2.02. Keuangan			35,447,415,197	
2.1.2.02.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	6,898,231,125		2.1.2.02.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	6,643,856,979	
2.1.2.02.01.0001 Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	57,968,934		2.1.2.02.01.0001 Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	57,968,934	
2.1.2.02.01.0002 Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	4 dokumen	160,190,032		2.1.2.02.01.0002 Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	4 dokumen	160,190,032	
2.1.2.02.01.0003 Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72000 berkas	3,121,440,437		2.1.2.02.01.0003 Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72000 berkas	3,058,791,151	
2.1.2.02.01.0004 Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	245 dokumen	337,634,922		2.1.2.02.01.0004 Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	245 dokumen	337,770,495	



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.1.2.02.01.0005 Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun	5 laporan	954,363,842		2.1.2.02.01.0005 Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun	5 laporan	888,294,961	
2.1.2.02.01.0007 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 dokumen	1,151,116,890		2.1.2.02.01.0007 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 dokumen	1,151,116,890	
2.1.2.02.01.0008 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	4 dokumen	850,748,270		2.1.2.02.01.0008 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	5 dokumen	850,748,270	
2.1.2.02.01.0011 Pengembangan Sistem Penganggaran	Jumlah sistem penganggaran yang dikembangkan	1 sistem	264,767,798		2.1.2.02.01.0011 Pengembangan Sistem Penganggaran	Jumlah sistem penganggaran yang dikembangkan	1 sistem	138,976,246	
2.1.2.02.02 Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	33.53%	29,704,654,485		2.1.2.02.02 Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	33.53%	28,803,558,218	
2.1.2.02.02.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	23656 obyek	4,905,335,321		2.1.2.02.02.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	34900 obyek	4,646,730,821	
2.1.2.02.02.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	5496 obyek	9,079,325,304		2.1.2.02.02.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	6555 obyek	8,534,352,906	
2.1.2.02.02.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	672096 obyek	11,087,452,368		2.1.2.02.02.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	695022 obyek	11,018,422,330	
2.1.2.02.02.0004 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	6852 berkas	1,008,084,152		2.1.2.02.02.0004 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	6852 berkas	992,380,902	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.02.02.0005 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	4376 berkas	806,976,396	2.1.2.02.02.0005 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	7876 berkas	786,861,646
2.1.2.02.02.0006 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	195392 berkas	2,817,480,944	2.1.2.02.02.0006 Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	195392 berkas	2,824,809,613
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			10,323,332,525	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			10,530,844,575
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	6,621,319,733	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	6,617,813,413
2.2.2.02.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6,621,319,733	2.2.2.02.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6,617,813,413
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	3,702,012,792	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	3,913,031,162
2.2.2.02.02.0038 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3,702,012,792	2.2.2.02.02.0038 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3,913,031,162
Badan Perencanaan Pembangunan			18,030,676,817	Badan Perencanaan Pembangunan			19,043,759,073
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2,961,610,331	1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2,942,810,997



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	85.71%	2,961,610,331		1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	85.71%	2,942,810,997	
1.1.1.03.06.0002 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan	3 dokumen	1,355,782,420		1.1.1.03.06.0002 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan	3 dokumen	1,373,342,536	
1.1.1.03.06.0004 Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	2 dokumen	1,605,827,911		1.1.1.03.06.0004 Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	3 dokumen	1,569,468,461	
1.1.2. Non Pelayanan Dasar					1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.14. Statistik				1,493,162,997	1.1.2.14. Statistik				1,838,594,461
1.1.2.14.01 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	1,493,162,997		1.1.2.14.01 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	1,838,594,461	
1.1.2.14.01.0002 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola	17 data urusan	1,493,162,997		1.1.2.14.01.0002 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola	17 data urusan	1,838,594,461	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				10,324,134,001	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				10,813,417,855
2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	98%	741,262,423		2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	98%	781,262,423	
2.1.2.01.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	741,262,423		2.1.2.01.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	781,262,423	
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	9,582,871,578		2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	10,032,155,432	
	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	75%				Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	75%		



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	75%				Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	75%		
	Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	75%				Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	75%		
	2.1.2.01.02.0008 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan	2140 lembaga	605,961,217		2.1.2.01.02.0008 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan	2140 lembaga	574,561,217
	2.1.2.01.02.0014 Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi	4 dokumen	826,857,652		2.1.2.01.02.0014 Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi	4 dokumen	946,777,652
	2.1.2.01.02.0016 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	4 dokumen	872,473,328		2.1.2.01.02.0016 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	3 dokumen	1,004,663,307
	2.1.2.01.02.0017 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun	2 dokumen	638,192,287		2.1.2.01.02.0017 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun	2 dokumen	658,192,287
	2.1.2.01.02.0018 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	139,428,696		2.1.2.01.02.0018 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	144,431,114
	2.1.2.01.02.0019 Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun	6 dokumen	1,133,647,656		2.1.2.01.02.0019 Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun	6 dokumen	1,158,647,656
	2.1.2.01.02.0020 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	448,743,993		2.1.2.01.02.0020 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	465,543,993

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.1.2.01.02.0021 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun	2 dokumen	524,965,480		2.1.2.01.02.0021 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun	2 dokumen	597,965,480	
2.1.2.01.02.0022 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	10 dokumen	1,298,177,174		2.1.2.01.02.0022 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	10 dokumen	1,329,177,174	
2.1.2.01.02.0024 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun	2 dokumen	798,834,366		2.1.2.01.02.0024 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun	2 dokumen	823,834,366	
2.1.2.01.02.0121 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1,031,939,580		2.1.2.01.02.0121 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1,067,511,037	
2.1.2.01.02.0122 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun	2 dokumen	591,273,541		2.1.2.01.02.0122 Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun	2 dokumen	616,273,541	
2.1.2.01.02.0123 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi	12 kali	672,376,608		2.1.2.01.02.0123 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi	12 kali	644,576,608	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran					2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				
3,251,769,488					3,448,935,760				
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,706,452,406		2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,841,722,078	
2.2.2.02.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,706,452,406		2.2.2.02.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,841,722,078	
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	545,317,082		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	607,213,682	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0008 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	545,317,082	2.2.2.02.02.0008 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	607,213,682
Bagian Administrasi Kerjasama			12,958,359,181	Bagian Administrasi Kerjasama			12,958,359,181
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			11,570,787,739	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			11,570,787,739
2.1.2.03.07 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42.86%	11,334,541,483	2.1.2.03.07 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42.86%	11,334,541,483
	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33.33%			Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33.33%	
	Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	75%			Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	75%	
2.1.2.03.07.0001 Fasilitas Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kegiatan delegasi internasional di dalam negeri	10 kali	751,062,700	2.1.2.03.07.0001 Fasilitas Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kegiatan delegasi internasional di dalam negeri	10 kali	691,312,680
2.1.2.03.07.0002 Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri non perdagangan yang difasilitasi	16 lembaga	1,191,243,267	2.1.2.03.07.0002 Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri non perdagangan yang difasilitasi	16 lembaga	1,191,243,267
2.1.2.03.07.0003 Fasilitas Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama luar negeri non perdagangan yang difasilitasi	4 lembaga	1,593,009,834	2.1.2.03.07.0003 Fasilitas Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama luar negeri non perdagangan yang difasilitasi	4 lembaga	1,707,109,864
2.1.2.03.07.0004 Fasilitas Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi	78 orang	7,258,249,602	2.1.2.03.07.0004 Fasilitas Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi	69 orang	7,203,899,592
2.1.2.03.07.0005 Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	26 lembaga	384,135,399	2.1.2.03.07.0005 Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	26 lembaga	384,135,399
2.1.2.03.07.0007 Pelaksanaan Rekomendasi Roadmap Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekomendasi road map kerjasama daerah	5 kali	156,840,681	2.1.2.03.07.0007 Pelaksanaan Rekomendasi Roadmap Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekomendasi road map kerjasama daerah	5 kali	156,840,681



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.08 Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	80%	236,246,256	2.1.2.03.08 Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	80%	236,246,256
	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani	71.43%			Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani	71.43%	
2.1.2.03.08.0001 Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	5 lembaga	236,246,256	2.1.2.03.08.0001 Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	5 lembaga	236,246,256
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,165,512,680	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,165,512,680
2.2.2.02.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,165,512,680	2.2.2.02.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,165,512,680
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	222,058,762	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	222,058,762
2.2.2.02.02.0012 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	222,058,762	2.2.2.02.02.0012 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	222,058,762
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat			
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%	1,640,155,720	2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%	1,607,802,690



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.04.0001 Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang ketahanan masyarakat yang disusun	1 dokumen	172,482,838	2.1.2.03.04.0001 Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang ketahanan masyarakat yang disusun	1 dokumen	172,331,038
2.1.2.03.04.0002 Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun	2 dokumen	244,947,658	2.1.2.03.04.0002 Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun	2 dokumen	244,947,658
2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat yang disusun	2 dokumen	304,542,498	2.1.2.03.04.0003 Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat yang disusun	2 dokumen	290,456,498
2.1.2.03.04.0004 Evaluasi Program Layanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Layanan Masyarakat	1 dokumen	174,071,138	2.1.2.03.04.0004 Evaluasi Program Layanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Layanan Masyarakat	1 dokumen	174,071,138
2.1.2.03.04.0007 Fasilitas penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitas penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat yang diselenggarakan	19 kali	269,734,792	2.1.2.03.04.0007 Fasilitas penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitas penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat yang diselenggarakan	19 kali	267,844,792
2.1.2.03.04.0008 Fasilitas Penunjang Sekretariat Komda Lansia	Jumlah kegiatan fasilitas penunjang sekretariat Komda Lansia	3 kali	236,446,758	2.1.2.03.04.0008 Fasilitas Penunjang Sekretariat Komda Lansia	Jumlah kegiatan fasilitas penunjang sekretariat Komda Lansia	3 kali	216,672,878
2.1.2.03.04.0009 Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah yang diselenggarakan	31 kali	237,930,038	2.1.2.03.04.0009 Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah yang diselenggarakan	31 kali	241,478,688
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,045,084,886	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,077,437,916
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	914,717,438	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	923,472,388
2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	914,717,438	2.2.2.02.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	923,472,388
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	130,367,448	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	153,965,528



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0013 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	130,367,448	2.2.2.02.02.0013 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	153,965,528
Bagian Administrasi Pembangunan			9,427,836,773	Bagian Administrasi Pembangunan			10,484,943,795
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			6,221,784,198	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			6,807,641,220
2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	4,759,577,531	2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	5,013,087,137
2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72 lembaga	1,508,652,441	2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72 lembaga	1,613,247,467
2.1.2.01.01.0006 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	7 sistem	2,168,860,822	2.1.2.01.01.0006 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	2,297,775,402
2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	1,082,064,268	2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	1,102,064,268
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	1,462,206,667	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	1,794,554,083
2.1.2.01.02.0025 Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	1,462,206,667	2.1.2.01.02.0025 Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	1,794,554,083
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3,206,052,575	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3,677,302,575



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,074,279,895		2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,109,279,895	
2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,074,279,895		2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,109,279,895	
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	2,131,772,680		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	2,568,022,680	
2.2.2.02.02.0009 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,131,772,680		2.2.2.02.02.0009 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,568,022,680	
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			8,454,856,263		Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah			8,123,759,025	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			7,440,657,900		2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			7,109,560,662	
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	7,440,657,900		2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	7,109,560,662	
	Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	71.27%				Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	71.27%		
2.1.2.03.03.0001 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	756,515,847		2.1.2.03.03.0001 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	702,718,447	
2.1.2.03.03.0002 Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1 kali	515,569,455		2.1.2.03.03.0002 Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1 kali	423,069,455	
2.1.2.03.03.0003 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan	115 objek	532,766,569		2.1.2.03.03.0003 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan	115 objek	450,508,069	
2.1.2.03.03.0004 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan	185 lembaga	926,805,013		2.1.2.03.03.0004 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan	185 lembaga	926,805,013	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0005 Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	16 kali	3,108,928,840	2.1.2.03.03.0005 Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	16 kali	3,152,726,240
2.1.2.03.03.0006 Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1 dokumen	1,600,072,176	2.1.2.03.03.0006 Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1 dokumen	1,453,733,438
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
1,014,198,363				1,014,198,363			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	763,343,626	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	763,343,626
2.2.2.02.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	763,343,626	2.2.2.02.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	763,343,626
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	250,854,737	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	250,854,737
2.2.2.02.02.0015 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	250,854,737	2.2.2.02.02.0015 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	250,854,737
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah				Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah			
3,300,690,823				3,660,040,823			
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan				1.2.2.06. Perdagangan			
695,558,387				695,558,387			
1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	695,558,387	1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	695,558,387
1.2.2.06.05.0001 Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	695,558,387	1.2.2.06.05.0001 Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	695,558,387
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
1,887,815,441				2,264,015,441			
2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%	392,672,347	2.1.2.03.04 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%	412,672,347
2.1.2.03.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	4 dokumen	392,672,347	2.1.2.03.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	4 dokumen	412,672,347
2.1.2.03.09 Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	1,495,143,094	2.1.2.03.09 Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	1,851,343,094
2.1.2.03.09.0001 Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	6 lembaga	1,153,786,027	2.1.2.03.09.0001 Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	6 lembaga	1,509,986,027
2.1.2.03.09.0003 Review Peraturan Daerah tentang BUMD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah BUMD yang direview	4 dokumen	341,357,067	2.1.2.03.09.0003 Review Peraturan Daerah tentang BUMD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah BUMD yang direview	4 dokumen	341,357,067
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
717,316,995				700,466,995			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	513,821,028	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	516,971,028
2.2.2.02.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	513,821,028	2.2.2.02.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	516,971,028
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	203,495,967	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	183,495,967
2.2.2.02.02.0016 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	203,495,967	2.2.2.02.02.0016 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	183,495,967



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Bagian Hubungan Masyarakat			13,459,241,241	Bagian Hubungan Masyarakat			15,375,619,398
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika			10,379,383,640	1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika			12,094,315,840
1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	84%	10,379,383,640	1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	84%	12,094,315,840
1.1.2.10.02.0001 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peliputan kegiatan pemerintah kota Surabaya	1990 kali	7,307,333,090	1.1.2.10.02.0001 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peliputan kegiatan pemerintah kota Surabaya	2053 kali	9,147,433,090
1.1.2.10.02.0003 Penyelenggaraan Event Kehumasan	Jumlah pelaksanaan event kehumasan	20 kali	294,719,818	1.1.2.10.02.0003 Penyelenggaraan Event Kehumasan	Jumlah pelaksanaan event kehumasan	20 kali	294,719,818
1.1.2.10.02.0011 Penyusunan Dokumentasi Profil Kota Surabaya	Jumlah dokumentasi profil kota Surabaya yang disusun	8 dokumen	874,911,368	1.1.2.10.02.0011 Penyusunan Dokumentasi Profil Kota Surabaya	Jumlah dokumentasi profil kota Surabaya yang disusun	8 dokumen	874,911,368
1.1.2.10.02.0012 Penerbitan Majalah Gapura	Jumlah majalah Gapura yang diterbitkan	40440 Eksemplar	1,093,981,290	1.1.2.10.02.0012 Penerbitan Majalah Gapura	Jumlah majalah Gapura yang diterbitkan	40440 Eksemplar	1,061,748,190
1.1.2.10.02.0013 Penyusunan Data dan Informasi Publikasi	Jumlah dokumen penyusunan data dan informasi publikasi yang disusun	2 dokumen	175,858,168	1.1.2.10.02.0013 Penyusunan Data dan Informasi Publikasi	Jumlah dokumen penyusunan data dan informasi publikasi yang disusun	2 dokumen	175,858,168
1.1.2.10.02.0014 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan	149 kali	533,504,778	1.1.2.10.02.0014 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan	149 kali	400,570,078
1.1.2.10.02.0015 Evaluasi Kinerja Kehumasan	Jumlah dokumen evaluasi kehumasan	1 dokumen	99,075,128	1.1.2.10.02.0015 Evaluasi Kinerja Kehumasan	Jumlah dokumen evaluasi kehumasan	1 dokumen	139,075,128
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3,079,857,601	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3,281,303,558
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,709,703,821	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,844,093,778
2.2.2.02.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,709,703,821	2.2.2.02.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,844,093,778



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	370,153,780	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	437,209,780
2.2.2.02.02.0010 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	370,153,780	2.2.2.02.02.0010 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	437,209,780
Bagian Hukum			6,963,693,713	Bagian Hukum			7,145,693,713
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			5,917,655,109	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			6,099,655,109
2.1.2.03.02 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	5,917,655,109	2.1.2.03.02 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	6,099,655,109
	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%	
	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	
	Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	
2.1.2.03.02.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah	12 dokumen	302,546,667	2.1.2.03.02.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah	12 dokumen	302,546,667
2.1.2.03.02.0002 Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	65 permasalahan hukum	2,906,014,040	2.1.2.03.02.0002 Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	65 permasalahan hukum	3,088,014,040
2.1.2.03.02.0003 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 rancangan produk hukum	1,534,211,059	2.1.2.03.02.0003 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 rancangan produk hukum	1,534,211,059
2.1.2.03.02.0004 Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	70 produk hukum	1,174,883,343	2.1.2.03.02.0004 Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	70 produk hukum	1,174,883,343
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,046,038,604	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,046,038,604



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	779,236,604		2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	779,236,604	
2.2.2.02.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	779,236,604		2.2.2.02.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	779,236,604	
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	266,802,000		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	266,802,000	
2.2.2.02.02.0011 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	266,802,000		2.2.2.02.02.0011 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	266,802,000	
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			65,244,567,971		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset			72,726,013,966	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			65,244,567,971		2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			72,726,013,966	
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,672,631,125		2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,672,631,125	
2.2.2.02.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,672,631,125		2.2.2.02.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,672,631,125	
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	81%	63,571,936,846		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	81%	71,053,382,841	
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%				Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		
	Persentase pemanfaatan aset	93%				Persentase pemanfaatan aset	93%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	60%				Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	60%		
2.2.2.02.02.0017 Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6 Berkas	2,315,499,282		2.2.2.02.02.0017 Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6 Berkas	2,574,182,282	
2.2.2.02.02.0018 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	900 dokumen	5,880,311,945		2.2.2.02.02.0018 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	900 dokumen	5,880,311,945	
2.2.2.02.02.0019 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2352 unit	7,181,739,500		2.2.2.02.02.0019 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2352 unit	7,646,418,470	
2.2.2.02.02.0020 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	619,797,250		2.2.2.02.02.0020 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	619,797,250	
2.2.2.02.02.0021 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	8004 stel	3,369,781,563		2.2.2.02.02.0021 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	6514 stel	3,369,781,563	
2.2.2.02.02.0022 Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	3334 unit	41,889,195,274		2.2.2.02.02.0022 Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	3451 unit	48,647,279,299	
2.2.2.02.02.0023 Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72 lembaga	2,315,612,032		2.2.2.02.02.0023 Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72 lembaga	2,315,612,032	
Bagian Organisasi			4,000,116,738		Bagian Organisasi			3,904,881,970	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			3,160,159,342		2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,944,429,664	
2.1.2.03.01 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%	3,160,159,342		2.1.2.03.01 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%	2,944,429,664	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%		



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	45%				Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	45%		
	Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%				Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%		
2.1.2.03.01.0001 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun	2 dokumen	603,798,292		2.1.2.03.01.0001 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun	2 dokumen	650,827,542	
2.1.2.03.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun	1 dokumen	386,799,003		2.1.2.03.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun	1 dokumen	339,769,753	
2.1.2.03.01.0003 Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155 POS	637,899,509		2.1.2.03.01.0003 Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155 POS	602,006,095	
2.1.2.03.01.0004 Peningkatan Implementasi Standar Pelayanan	Jumlah unit pelayanan yang dilakukan peningkatan implementasi standar pelayanan	264 lembaga	260,311,430		2.1.2.03.01.0004 Peningkatan Implementasi Standar Pelayanan	Jumlah unit pelayanan yang dilakukan peningkatan implementasi standar pelayanan	264 lembaga	260,311,430	
2.1.2.03.01.0006 Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja dan Monitoring Implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun	2 dokumen	529,928,235		2.1.2.03.01.0006 Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja dan Monitoring Implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun	2 dokumen	371,264,421	
2.1.2.03.01.0008 Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	741,422,873		2.1.2.03.01.0008 Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	720,250,423	
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			839,957,396		2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			960,452,306	
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	580,136,771		2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	642,368,701	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	580,136,771	2.2.2.02.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	642,368,701
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	259,820,625	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	318,083,605
2.2.2.02.02.0014 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	259,820,625	2.2.2.02.02.0014 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	318,083,605
Bagian Umum Dan Protokol			95,976,762,399	Bagian Umum Dan Protokol			100,079,552,192
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			705,973,540	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			755,973,540
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	705,973,540	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	755,973,540
2.1.2.01.02.0035 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	705,973,540	2.1.2.01.02.0035 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	755,973,540
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			12,345,836,692	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			14,338,265,692
2.1.2.03.06 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	12,345,836,692	2.1.2.03.06 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	14,338,265,692
2.1.2.03.06.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	12,345,836,692	2.1.2.03.06.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	14,338,265,692
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			82,924,952,167	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			84,985,312,960



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	78,092,131,055	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	77,942,131,055
2.2.2.02.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	78,092,131,055	2.2.2.02.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	77,942,131,055
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	4,832,821,112	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	7,043,181,905
2.2.2.02.02.0024 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	4,832,821,112	2.2.2.02.02.0024 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	7,043,181,905
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			763,631,423,141	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			821,625,636,753
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			239,634,078,061	1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			270,511,164,570
1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2660250 m	239,634,078,061	1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2660250 m	270,511,164,570
	Persentase Pemasangan PJU Hemat Energi	79.81%			Persentase Pemasangan PJU Hemat Energi	79.81%	
1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	4800 titik	115,766,411,180	1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	4800 titik	116,681,220,881
1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	6674 rekening	111,320,330,478	1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	6674 rekening	139,435,138,104
1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara	73680 titik	12,547,336,403	1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara	73680 titik	14,394,805,585
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			516,995,782,013	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			543,857,893,009
1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	50.76%	114,926,219,099	1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	50.76%	128,683,512,432



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	7.07%				Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	7.07%		
1.1.2.05.01.0001 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang dipelihara	401 lokasi	34,888,130,164		1.1.2.05.01.0001 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang dipelihara	401 lokasi	38,440,936,452	
1.1.2.05.01.0002 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman Rekreasi	Jumlah lokasi taman rekreasi yang dipelihara	35 lokasi	16,894,137,448		1.1.2.05.01.0002 Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman Rekreasi	Jumlah lokasi taman rekreasi yang dipelihara	35 lokasi	18,163,515,407	
1.1.2.05.01.0003 Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang ditata	71 lokasi	27,251,496,982		1.1.2.05.01.0003 Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang ditata	71 lokasi	35,527,476,732	
1.1.2.05.01.0004 Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	15 lokasi	8,417,536,779		1.1.2.05.01.0004 Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	15 lokasi	9,451,484,704	
1.1.2.05.01.0005 Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara	13 lokasi	11,853,527,808		1.1.2.05.01.0005 Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara	13 lokasi	12,619,996,225	
1.1.2.05.01.0010 Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Makam	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi makam	63 Lokasi	15,621,389,918		1.1.2.05.01.0010 Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Makam	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi makam	63 Lokasi	14,480,102,912	
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	23.08%	401,825,081,679		1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	23.08%	414,951,603,440	
	Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	83.78%				Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	83.78%		
	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%				Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%		
1.1.2.05.02.0002 Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan	1 lokasi	6,616,648,536		1.1.2.05.02.0002 Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan	1 lokasi	4,952,181,168	
1.1.2.05.02.0003 Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	573 lokasi	91,757,898,572		1.1.2.05.02.0003 Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	573 lokasi	97,350,342,470	



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.05.02.0004 Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran	300 lokasi	17,745,530,685		1.1.2.05.02.0004 Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran	450 lokasi	19,626,043,139	
1.1.2.05.02.0005 Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	72,198,333,214		1.1.2.05.02.0005 Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	76,023,237,327	
1.1.2.05.02.0006 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan	7906 unit	25,687,037,781		1.1.2.05.02.0006 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan	7906 unit	28,193,953,896	
1.1.2.05.02.0007 Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 rekening	119,293,629,100		1.1.2.05.02.0007 Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 rekening	119,293,629,100	
1.1.2.05.02.0008 Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola	19 unit	6,188,383,267		1.1.2.05.02.0008 Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola	19 unit	6,667,328,022	
1.1.2.05.02.0009 Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	183 lokasi	7,113,252,279		1.1.2.05.02.0009 Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	183 lokasi	7,990,718,526	
1.1.2.05.02.0010 Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah lokasi penyediaan sarana dan prasarana air limbah yang disediakan	3 lokasi	1,287,421,266		1.1.2.05.02.0010 Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah lokasi penyediaan sarana dan prasarana air limbah yang disediakan	3 lokasi	1,287,421,266	
1.1.2.05.02.0011 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah pelaksanaan peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH	4 kali	1,548,532,961		1.1.2.05.02.0011 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah pelaksanaan peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH	4 kali	1,278,334,508	
1.1.2.05.02.0012 Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan	104 kali	3,568,902,568		1.1.2.05.02.0012 Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan	104 kali	3,468,902,568	
1.1.2.05.02.0013 Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	5 kali	3,475,049,747		1.1.2.05.02.0013 Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	3 kali	3,475,049,747	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02.0014 Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	33 lokasi	14,497,464,566	1.1.2.05.02.0014 Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	33 lokasi	14,497,464,566
1.1.2.05.02.0051 Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	2 Kegiatan	3,181,434,137	1.1.2.05.02.0051 Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	2 Kegiatan	3,181,434,137
1.1.2.05.02.0052 Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan (DAK)	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang disediakan	2 unit	753,310,000	1.1.2.05.02.0052 Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan (DAK)	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang disediakan	2 unit	753,310,000
1.1.2.05.02.0053 Layanan Pengolahan Sampah (DAK)	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 Rekening	26,912,253,000	1.1.2.05.02.0053 Layanan Pengolahan Sampah (DAK)	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 Rekening	26,912,253,000
1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	10 lingkungan	244,481,235	1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	10 lingkungan	222,777,137
1.1.2.05.08.0004 Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	2 lokasi	244,481,235	1.1.2.05.08.0004 Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	2 lokasi	222,777,137
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			7,001,563,067	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			7,256,579,174
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	5,396,224,288	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	5,651,240,395
2.2.2.02.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5,396,224,288	2.2.2.02.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5,651,240,395
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,605,338,779	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,605,338,779



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0026 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,605,338,779	2.2.2.02.02.0026 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,605,338,779
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			37,830,817,129	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			39,436,722,960
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.12. Penanaman Modal			973,526,660	1.1.2.12. Penanaman Modal			1,028,147,160
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	973,526,660	1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	1,028,147,160
1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses	400 berkas	119,549,529	1.1.2.12.04.0010 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses	400 berkas	119,549,529
1.1.2.12.04.0011 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses	169 berkas	117,830,121	1.1.2.12.04.0011 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses	169 berkas	117,830,121
1.1.2.12.04.0018 Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa dan sarana Pariwisata yang dimonitor	240 lokasi	365,665,989	1.1.2.12.04.0018 Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa dan sarana Pariwisata yang dimonitor	240 lokasi	388,215,989
1.1.2.12.04.0019 Monitoring perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Usaha rekreasi dan hiburan Umum pariwisata yang dimonitor	240 lokasi	370,481,021	1.1.2.12.04.0019 Monitoring perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Usaha rekreasi dan hiburan Umum pariwisata yang dimonitor	240 lokasi	402,551,521
1.1.2.16. Kebudayaan			8,782,805,727	1.1.2.16. Kebudayaan			9,510,287,967
1.1.2.16.01 Program perlindungan budaya lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91.50%	1,528,609,463	1.1.2.16.01 Program perlindungan budaya lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	91.50%	1,508,609,463
1.1.2.16.01.0001 Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	250 lokasi	1,528,609,463	1.1.2.16.01.0001 Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	250 lokasi	1,508,609,463



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	1.1.2.16.02 Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	76.50%	6,007,533,516		1.1.2.16.02 Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	76.50%	6,757,856,556
		Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	47%				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	47%	
	1.1.2.16.02.0001 Fasilitas penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	546 kali	5,341,421,752		1.1.2.16.02.0001 Fasilitas penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	641 kali	5,801,321,752
	1.1.2.16.02.0002 Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring	14 lokasi	260,060,552		1.1.2.16.02.0002 Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring	14 lokasi	270,060,552
	1.1.2.16.02.0003 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali	406,051,212		1.1.2.16.02.0003 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	4 kali	686,474,252
	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	16%	1,246,662,748		1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	16%	1,243,821,948
	1.1.2.16.03.0003 Fasilitas penyelenggaraan even peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan	11 kali	1,246,662,748		1.1.2.16.03.0003 Fasilitas penyelenggaraan even peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan	11 kali	1,243,821,948
1.2. Urusan Pilihan					1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar					1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.02. Pariwisata				16,034,145,457	1.2.2.02. Pariwisata				17,111,481,957
	1.2.2.02.01 Program pengembangan destinasi wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	36%	5,702,821,507		1.2.2.02.01 Program pengembangan destinasi wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	36%	6,648,849,725
	1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	3 lokasi	1,401,646,091		1.2.2.02.01.0001 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	3 lokasi	1,381,646,091

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	3 lokasi	1,595,994,632		1.2.2.02.01.0002 Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	3 lokasi	2,523,211,427	
1.2.2.02.01.0003 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata	600 orang	252,678,426		1.2.2.02.01.0003 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata	600 orang	247,749,306	
1.2.2.02.01.0004 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel	Jumlah sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel yang disediakan	11 unit	1,578,150,830		1.2.2.02.01.0004 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel	Jumlah sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel yang disediakan	11 unit	1,523,982,770	
1.2.2.02.01.0005 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah sarana penunjang wisata di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan	81 unit	874,351,528		1.2.2.02.01.0005 Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah sarana penunjang wisata di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan	81 unit	972,260,131	
1.2.2.02.02 Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	60%	830,120,977		1.2.2.02.02 Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	60%	765,500,477	
1.2.2.02.02.0001 Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	10 kali	385,679,933		1.2.2.02.02.0001 Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	10 kali	353,609,433	
1.2.2.02.02.0002 Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi hiburan umum	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum	10 kali	334,207,715		1.2.2.02.02.0002 Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi hiburan umum	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum	10 kali	301,657,715	
1.2.2.02.02.0003 Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi	6 lokasi	110,233,329		1.2.2.02.02.0003 Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi	6 lokasi	110,233,329	
1.2.2.02.03 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	47.74%	8,718,806,761		1.2.2.02.03 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	47.74%	8,825,384,723	
1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	81 kali	941,758,222		1.2.2.02.03.0001 Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	81 kali	782,195,382	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.02.03.0002 Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali	1,386,328,379	1.2.2.02.03.0002 Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali	1,366,328,379
1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	64 kali	1,500,458,532	1.2.2.02.03.0003 Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	64 kali	1,582,987,762
1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan even wisata	Jumlah Event Wisata yang diselenggarakan	1 kali	342,974,722	1.2.2.02.03.0004 Penyelenggaraan even wisata	Jumlah Event Wisata yang diselenggarakan	1 kali	332,859,722
1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah Penyelenggaraan festival kuliner	7 kali	1,743,934,703	1.2.2.02.03.0005 Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah Penyelenggaraan festival kuliner	7 kali	1,870,512,665
1.2.2.02.03.0006 Fasilitas promosi wisata	Jumlah fasilitas promosi wisata	295 kali	2,803,352,203	1.2.2.02.03.0006 Fasilitas promosi wisata	Jumlah fasilitas promosi wisata	295 kali	2,890,500,813
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	7%	782,396,212	1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	7%	871,747,032
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%	
1.2.2.02.04.0002 Fasilitas Pelatihan dan pertunjukan seni budaya lokal di rumah kreatif	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di rumah kreatif yg difasilitasi	770 kali	782,396,212	1.2.2.02.04.0002 Fasilitas Pelatihan dan pertunjukan seni budaya lokal di rumah kreatif	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di rumah kreatif yg difasilitasi	770 kali	871,747,032
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			12,040,339,285	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			11,786,805,876
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	11,321,658,814	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	11,102,644,905
2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	11,321,658,814	2.2.2.02.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	11,102,644,905



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	718,680,471	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	684,160,971
2.2.2.02.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	718,680,471	2.2.2.02.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	684,160,971
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			105,091,746,761	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			115,672,400,432
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.01. Tenaga Kerja			1,301,515,158	1.1.2.01. Tenaga Kerja			1,301,515,158
1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	1,301,515,158	1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	1,301,515,158
1.1.2.01.01.0001 Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	400 Orang	1,301,515,158	1.1.2.01.01.0001 Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	650 Orang	1,301,515,158
1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga			99,779,093,988	1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga			110,396,387,854
1.1.2.13.01 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	3,191,529,353	1.1.2.13.01 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	3,191,529,353
1.1.2.13.01.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	22 kali	1,817,866,323	1.1.2.13.01.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	27 kali	1,817,866,323
1.1.2.13.01.0003 Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	3600 peserta	1,373,663,030	1.1.2.13.01.0003 Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	4570 peserta	1,373,663,030
1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1607 orang	96,587,564,635	1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1607 orang	107,204,858,501
	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	130 kelurahan			Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	130 kelurahan	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.13.02.0003 Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	9 unit	8,112,271,383		1.1.2.13.02.0003 Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	9 unit	8,357,756,657	
1.1.2.13.02.0004 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	90 unit	26,907,045,229		1.1.2.13.02.0004 Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	90 unit	25,295,255,979	
1.1.2.13.02.0005 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	29 kali	2,086,738,900		1.1.2.13.02.0005 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	29 kali	2,086,738,900	
1.1.2.13.02.0006 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	36 kali	2,835,127,191		1.1.2.13.02.0006 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	36 kali	2,450,127,191	
1.1.2.13.02.0007 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional yang diselenggarakan	25 kali	2,716,536,707		1.1.2.13.02.0007 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional yang diselenggarakan	25 kali	2,716,536,707	
1.1.2.13.02.0008 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	41 kali	25,564,612,500		1.1.2.13.02.0008 Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	41 kali	25,933,658,100	
1.1.2.13.02.0009 Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	1889 unit	5,853,894,489		1.1.2.13.02.0009 Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	2302 unit	6,171,978,889	
1.1.2.13.02.0010 Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	133 unit	17,738,828,830		1.1.2.13.02.0010 Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	133 unit	29,001,695,272	
1.1.2.13.02.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun	57 dokumen	2,654,096,906		1.1.2.13.02.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun	56 dokumen	3,125,198,306	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.13.02.0012 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak yang diselenggarakan	26 kali	2,118,412,500	1.1.2.13.02.0012 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak yang diselenggarakan	26 kali	2,065,912,500
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.02. Pariwisata				1.2.2.02. Pariwisata			
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	7%	655,354,008	1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	7%	655,354,008
1.2.2.02.04.0004 Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif	100 orang	655,354,008	1.2.2.02.04.0004 Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif	475 orang	655,354,008
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,832,720,001	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,816,496,521
2.2.2.02.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,832,720,001	2.2.2.02.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,816,496,521
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	523,063,606	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	502,646,891
2.2.2.02.02.0037 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	523,063,606	2.2.2.02.02.0037 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	502,646,891
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			12,721,556,325	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			13,768,448,325
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi	Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99.69%	12,721,556,325	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi	Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99.69%	13,768,448,325
	Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	87.55%			Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	87.55%	
	Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%			Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93.94%			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93.94%	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%	
	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99.69%			Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99.69%	
	Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%			Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%	
1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani	300000 berkas	807,493,166	1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani	300000 berkas	784,783,666
1.1.2.06.01.0003 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Musiman	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk musiman	40930 berkas	502,358,180	1.1.2.06.01.0003 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Musiman	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk musiman	40930 berkas	502,358,180
1.1.2.06.01.0004 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	1,139,088,393	1.1.2.06.01.0004 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	1,139,088,393
1.1.2.06.01.0005 Pemberian Pelayanan Data Kependudukan	jumlah Dokumen layanan data kependudukan yang diberikan	12 dokumen	964,753,620	1.1.2.06.01.0005 Pemberian Pelayanan Data Kependudukan	jumlah Dokumen layanan data kependudukan yang diberikan	12 dokumen	964,753,620



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.06.01.0006 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani	75130 berkas	478,554,576		1.1.2.06.01.0006 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani	75130 berkas	548,814,100	
1.1.2.06.01.0007 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3250 berkas	455,643,205		1.1.2.06.01.0007 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3250 berkas	455,643,205	
1.1.2.06.01.0008 Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 dokumen	410,896,464		1.1.2.06.01.0008 Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 dokumen	410,896,464	
1.1.2.06.01.0009 Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan	200000 berkas	6,439,459,000		1.1.2.06.01.0009 Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan	200000 berkas	7,486,351,000	
1.1.2.06.01.0041 Penyusunan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang disusun	2 dokumen	432,662,905		1.1.2.06.01.0041 Penyusunan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang disusun	2 dokumen	432,662,905	
1.1.2.06.01.0042 Pelayanan Informasi Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	24 kali	716,727,715		1.1.2.06.01.0042 Pelayanan Informasi Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	24 kali	716,727,715	
1.1.2.06.01.0043 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan	213 orang	224,170,233		1.1.2.06.01.0043 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan	213 orang	224,170,233	
1.1.2.06.01.0044 Penyusunan Analisa Regulasi Bidang Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen analisa regulasi Bidang Administrasi Kependudukan yang disusun	1 dokumen	149,748,868		1.1.2.06.01.0044 Penyusunan Analisa Regulasi Bidang Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen analisa regulasi Bidang Administrasi Kependudukan yang disusun	1 dokumen	102,198,844	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				121,665,304	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				121,665,304



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	121,665,304	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	121,665,304
2.1.2.01.02.0039 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	121,665,304	2.1.2.01.02.0039 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	121,665,304
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
9,378,281,361				9,958,591,861			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	8,455,617,871	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	9,071,865,591
2.2.2.02.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8,455,617,871	2.2.2.02.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	9,071,865,591
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	922,663,490	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	886,726,270
2.2.2.02.02.0028 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	922,663,490	2.2.2.02.02.0028 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	886,726,270
Dinas Kesehatan				Dinas Kesehatan			
595,371,149,413				658,187,197,349			
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
481,464,735,428				540,247,485,390			
1.1.1.02. Kesehatan				1.1.1.02. Kesehatan			
1.1.1.02.01 Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	172,563,729,768	1.1.1.02.01 Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	188,941,985,037
	Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	13%			Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	13%	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	537252 orang	163,515,215,205	1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	537252 orang	166,854,993,037
1.1.1.02.01.0002 Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	32784 orang	9,048,514,563	1.1.1.02.01.0002 Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	467108 orang	22,086,992,000
1.1.1.02.02 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan imunisasi dasar lengkap	93.85%	32,340,704,635	1.1.1.02.02 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan imunisasi dasar lengkap	93.85%	34,378,494,192
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98.48%			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98.48%	
	Cakupan Kunjungan neonatal lengkap	90%			Cakupan Kunjungan neonatal lengkap	90%	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96.96%			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96.96%	
1.1.1.02.02.0001 Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga	64 lembaga	30,673,704,635	1.1.1.02.02.0001 Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga	64 lembaga	32,711,494,192
1.1.1.02.02.0002 Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Ibu dan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan	428 kunjungan	1,667,000,000	1.1.1.02.02.0002 Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Ibu dan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan	428 kunjungan	1,667,000,000
1.1.1.02.03 Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94.66%	8,242,541,119	1.1.1.02.03 Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94.66%	8,014,073,869
	Persentase Penimbangan balita	81.50%			Persentase Penimbangan balita	81.50%	
	Prevalensi Balita gizi buruk	<1 %			Prevalensi Balita gizi buruk	<1 %	
	Prevalensi Balita Gizi kurang	9.50%			Prevalensi Balita Gizi kurang	9.50%	
1.1.1.02.03.0001 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	686 orang	5,582,824,119	1.1.1.02.03.0001 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	686 orang	5,354,356,869



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.03.0002 Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	Jumlah obat gizi yang diadakan	3 item	2,659,717,000	1.1.1.02.03.0002 Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	Jumlah obat gizi yang diadakan	3 item	2,659,717,000
1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	78%	130,423,513,884	1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	78%	145,953,173,591
1.1.1.02.04.0001 Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	64 lembaga	79,421,189,098	1.1.1.02.04.0001 Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	64 lembaga	86,340,321,280
1.1.1.02.04.0002 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1 sistem	929,293,849	1.1.1.02.04.0002 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1 sistem	929,293,849
1.1.1.02.04.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	54 jenis	27,356,287,488	1.1.1.02.04.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	59 jenis	26,238,105,171
1.1.1.02.04.0004 Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	64 lembaga	19,112,519,571	1.1.1.02.04.0004 Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	64 lembaga	29,215,433,975
1.1.1.02.04.0007 Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	1 jenis	949,999,000	1.1.1.02.04.0007 Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	1 jenis	949,999,000
1.1.1.02.04.0010 Penyediaan/Peningkatan/Pe- meliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	4 jenis	2,654,224,878	1.1.1.02.04.0010 Penyediaan/Peningkatan/Pe- meliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	4 jenis	2,280,020,316
1.1.1.02.05 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	25,747,650,504	1.1.1.02.05 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	39,172,392,062



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.05.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	173 jenis	22,615,289,504	1.1.1.02.05.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	173 jenis	36,816,993,002
1.1.1.02.05.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	34 jenis	3,132,361,000	1.1.1.02.05.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	34 jenis	2,355,399,060
1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	86%	8,928,649,121	1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	86%	9,851,518,998
	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	86%			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	86%	
1.1.1.02.06.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	17 lembaga	3,984,048,000	1.1.1.02.06.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	20 lembaga	3,984,048,000
1.1.1.02.06.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi	134 lembaga	491,556,190	1.1.1.02.06.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi	134 lembaga	491,556,190
1.1.1.02.06.0003 Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan	45 kali	4,212,396,116	1.1.1.02.06.0003 Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan	45 kali	5,135,265,993
1.1.1.02.06.0017 Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 dokumen	240,648,815	1.1.1.02.06.0017 Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 dokumen	240,648,815
1.1.1.02.09 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	86%	103,217,946,397	1.1.1.02.09 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	86%	113,935,847,641
	Persentase rumah sehat	78%			Persentase rumah sehat	78%	
	Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	83%			Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	83%	
1.1.1.02.09.0001 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan	64 lembaga	33,649,343,000	1.1.1.02.09.0001 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan	64 lembaga	33,649,343,000



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.09.0002 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	600 lokasi	1,206,277,134	1.1.1.02.09.0002 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	600 lokasi	1,226,277,134
1.1.1.02.09.0003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 lembaga	16,639,329,616	1.1.1.02.09.0003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 lembaga	22,730,374,206
1.1.1.02.09.0004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	3,408,452,310	1.1.1.02.09.0004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	3,125,787,110
1.1.1.02.09.0005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	64 lembaga	928,542,478	1.1.1.02.09.0005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	64 lembaga	928,542,478
1.1.1.02.09.0006 Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	3,929,765,853	1.1.1.02.09.0006 Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	3,996,427,753
1.1.1.02.09.0007 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	9,585,203,399	1.1.1.02.09.0007 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	12,962,895,545
1.1.1.02.09.0008 Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi	63 lembaga	1,386,401,541	1.1.1.02.09.0008 Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi	63 lembaga	802,969,349
1.1.1.02.09.0009 Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	82 lembaga	26,963,405,066	1.1.1.02.09.0009 Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	82 lembaga	28,992,005,066
1.1.1.02.09.0010 Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan	6 item	5,521,226,000	1.1.1.02.09.0010 Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan	10 item	5,521,226,000
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.03. Pangan			1,710,903,936	1.1.2.03. Pangan			1,710,903,936

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	86%	1,710,903,936	1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	86%	1,710,903,936
1.1.2.03.01.0001 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	8097 sampel	1,710,903,936	1.1.2.03.01.0001 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	8097 sampel	1,710,903,936
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	536,819,068	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	536,819,068
2.1.2.01.02.0040 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	536,819,068	2.1.2.01.02.0040 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	536,819,068
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	106,046,081,326	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	110,280,432,078
2.2.2.02.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	106,046,081,326	2.2.2.02.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	110,280,432,078
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	5,612,609,655	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	5,411,556,877
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0029 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	5,612,609,655	2.2.2.02.02.0029 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	5,411,556,877
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			41,190,837,083	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			40,834,898,601
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.03. Pangan			6,176,282,587	1.1.2.03. Pangan			6,097,489,660
1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	83%	6,176,282,587	1.1.2.03.01 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	83%	6,097,489,660
	Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	96			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	96	
1.1.2.03.01.0002 Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam monitoring bidang ketahanan pangan	222 kali	299,676,811	1.1.2.03.01.0002 Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam monitoring bidang ketahanan pangan	222 kali	348,725,338
1.1.2.03.01.0003 Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah pelaksanaan pembinaan keamanan pangan yang beredar	12 kali	223,588,165	1.1.2.03.01.0003 Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah pelaksanaan pembinaan keamanan pangan yang beredar	12 kali	228,588,165
1.1.2.03.01.0005 Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelompok pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan	253 Kelompok	3,761,556,310	1.1.2.03.01.0005 Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelompok pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan	253 Kelompok	3,557,642,060
1.1.2.03.01.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diawasi	2020 sampel	863,579,905	1.1.2.03.01.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diawasi	2020 sampel	904,652,701
1.1.2.03.01.0007 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan	59 kali	806,877,045	1.1.2.03.01.0007 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan	59 kali	811,877,045
1.1.2.03.01.0008 Penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan	3 dokumen	221,004,351	1.1.2.03.01.0008 Penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan	3 dokumen	246,004,351
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			13,785,536,562	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			13,479,771,602
1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	50.76%	13,785,536,562	1.1.2.05.01 Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	50.76%	13,479,771,602



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	7.07%				Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	7.07%		
1.1.2.05.01.0006 Pembangunan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang dibangun	4 lokasi	9,375,282,693		1.1.2.05.01.0006 Pembangunan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang dibangun	4 lokasi	9,243,407,691	
1.1.2.05.01.0008 Pemeliharaan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang Dipelihara	12 lokasi	3,371,185,819		1.1.2.05.01.0008 Pemeliharaan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang Dipelihara	12 lokasi	3,380,194,741	
1.1.2.05.01.0009 Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	12 kali	1,039,068,050		1.1.2.05.01.0009 Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	12 kali	856,169,170	
1.1.2.12. Penanaman Modal			194,938,185		1.1.2.12. Penanaman Modal			229,938,185	
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	194,938,185		1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	229,938,185	
1.1.2.12.04.0015 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses	255 berkas	194,938,185		1.1.2.12.04.0015 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses	255 berkas	229,938,185	
1.2. Urusan Pilihan					1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar					1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.01. Kelautan dan Perikanan			5,144,351,083		1.2.2.01. Kelautan dan Perikanan			5,303,207,138	
1.2.2.01.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	14%	4,754,861,601		1.2.2.01.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	14%	4,913,717,656	
1.2.2.01.01.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang disediakan	15 Paket	827,805,450		1.2.2.01.01.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang disediakan	15 Paket	678,265,950	
1.2.2.01.01.0002 Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	724 paket	1,158,165,420		1.2.2.01.01.0002 Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan	724 paket	1,072,282,920	
1.2.2.01.01.0003 Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	383 paket	857,423,640		1.2.2.01.01.0003 Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	383 paket	847,423,640	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.01.01.0004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap yang dipelihara	13 unit	1,911,467,091	1.2.2.01.01.0004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap yang dipelihara	13 unit	2,315,745,146
1.2.2.01.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	50%	389,489,482	1.2.2.01.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	50%	389,489,482
1.2.2.01.02.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	18 kali	389,489,482	1.2.2.01.02.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	18 kali	389,489,482
1.2.2.02. Pariwisata			893,775,271	1.2.2.02. Pariwisata			967,823,798
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	7%	893,775,271	1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	7%	967,823,798
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%	
1.2.2.02.04.0006 Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah Rumah Kreatif yang dikelola	2 bangunan	578,891,600	1.2.2.02.04.0006 Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah Rumah Kreatif yang dikelola	2 bangunan	627,940,127
1.2.2.02.04.0010 Pendampingan usaha olahan pangan di rumah kreatif	Jumlah pelaksanaan Pendampingan Usaha Olahan Pangan di Rumah Kreatif	7 kali	314,883,671	1.2.2.02.04.0010 Pendampingan usaha olahan pangan di rumah kreatif	Jumlah pelaksanaan Pendampingan Usaha Olahan Pangan di Rumah Kreatif	7 kali	339,883,671
1.2.2.03. Pertanian			5,455,563,643	1.2.2.03. Pertanian			6,129,224,601
1.2.2.03.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	14%	1,301,220,756	1.2.2.03.01 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	14%	1,391,128,568
1.2.2.03.01.0001 Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan	5 jenis	1,028,728,893	1.2.2.03.01.0001 Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan	5 jenis	1,232,238,633



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.03.01.0002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dipelihara	13 unit	272,491,863	1.2.2.03.01.0002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dipelihara	13 unit	158,889,935
1.2.2.03.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	50%	2,272,743,728	1.2.2.03.02 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	50%	2,660,424,082
1.2.2.03.02.0001 Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura	3 kali	298,719,653	1.2.2.03.02.0001 Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura	3 kali	257,092,053
1.2.2.03.02.0002 Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan	13 jenis	1,266,192,198	1.2.2.03.02.0002 Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan	13 jenis	1,815,562,810
1.2.2.03.02.0003 Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125 orang	707,831,877	1.2.2.03.02.0003 Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125 orang	587,769,219
1.2.2.03.04 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	85%	1,225,113,050	1.2.2.03.04 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	85%	1,309,161,578
1.2.2.03.04.0002 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan	1558 kali	1,035,678,773	1.2.2.03.04.0002 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan	1558 kali	1,089,727,301
1.2.2.03.04.0003 Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan	Jumlah peserta Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan	200 peserta	189,434,277	1.2.2.03.04.0003 Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan	Jumlah peserta Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan	200 peserta	219,434,277
1.2.2.03.05 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	50%	656,486,109	1.2.2.03.05 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	50%	768,510,373

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.03.05.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	8 kali	383,155,367	1.2.2.03.05.0001 Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	16 kali	433,155,367
1.2.2.03.05.0002 Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	273,330,742	1.2.2.03.05.0002 Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	335,355,006
1.2.2.06. Perdagangan			974,749,643	1.2.2.06. Perdagangan			774,749,643
1.2.2.06.06 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	63%	974,749,643	1.2.2.06.06 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	63%	774,749,643
1.2.2.06.06.0001 Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	67 kali	974,749,643	1.2.2.06.06.0001 Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	67 kali	774,749,643
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			8,565,640,109	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			7,852,693,974
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	7,138,293,473	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	6,390,347,338
2.2.2.02.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	7,138,293,473	2.2.2.02.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6,390,347,338
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,427,346,636	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,462,346,636
2.2.2.02.02.0043 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,427,346,636	2.2.2.02.02.0043 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,462,346,636
Dinas Komunikasi dan Informatika			82,701,170,154	Dinas Komunikasi dan Informatika			90,631,119,665
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika			78,689,763,167	1.1.2.10. Komunikasi dan Informatika			86,549,443,356



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.10.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	38.65%	64,065,620,448		1.1.2.10.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	38.65%	71,913,115,092	
	Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%				Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%		
1.1.2.10.01.0001 Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengaduan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	12 dokumen	330,140,043		1.1.2.10.01.0001 Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengaduan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	12 dokumen	270,138,779	
1.1.2.10.01.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Disusun	1 dokumen	342,501,065		1.1.2.10.01.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Disusun	1 dokumen	342,501,065	
1.1.2.10.01.0003 Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persandian	930 unit	1,806,270,067		1.1.2.10.01.0003 Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persandian	930 unit	1,806,270,067	
1.1.2.10.01.0004 Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah Integrasi Sistem yang Dibangun	3 basis data	420,179,867		1.1.2.10.01.0004 Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah Integrasi Sistem yang Dibangun	3 basis data	291,424,649	
1.1.2.10.01.0005 Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	5 jenis	12,360,454,087		1.1.2.10.01.0005 Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	5 jenis	15,326,090,662	
1.1.2.10.01.0006 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	15 aplikasi	828,940,755		1.1.2.10.01.0006 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	15 aplikasi	773,040,755	
1.1.2.10.01.0007 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	134 sistem	1,127,680,849		1.1.2.10.01.0007 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	134 sistem	1,183,580,849	
1.1.2.10.01.0008 Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	5 jenis	40,055,046,427		1.1.2.10.01.0008 Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	5 jenis	43,918,347,418	
1.1.2.10.01.0009 Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola	2 Lokasi	2,866,231,423		1.1.2.10.01.0009 Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola	2 Lokasi	3,029,344,344	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.10.01.0010 Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100 persen	3,460,899,638	1.1.2.10.01.0010 Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100 persen	4,651,132,638
1.1.2.10.01.0011 Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola e-Gov yang disusun	1 dokumen	467,276,227	1.1.2.10.01.0011 Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola e-Gov yang disusun	1 dokumen	321,243,866
1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	9481 kunjungan	14,624,142,719	1.1.2.10.02 Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	9481 kunjungan	14,636,328,264
1.1.2.10.02.0004 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Komunikasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan KIM	4 Kali	1,166,410,247	1.1.2.10.02.0004 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Komunikasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan KIM	4 Kali	1,166,410,247
1.1.2.10.02.0005 Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	5 dokumen	976,300,167	1.1.2.10.02.0005 Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	5 dokumen	976,300,167
1.1.2.10.02.0006 Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Jumlah dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik yang disusun	13 dokumen	1,000,582,773	1.1.2.10.02.0006 Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Jumlah dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik yang disusun	13 dokumen	1,000,582,773
1.1.2.10.02.0007 Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19 Saluran	990,583,315	1.1.2.10.02.0007 Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19 Saluran	990,583,315
1.1.2.10.02.0008 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi yang dilaksanakan	4 Jenis	1,357,558,303	1.1.2.10.02.0008 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi yang dilaksanakan	3 Jenis	1,357,558,303
1.1.2.10.02.0009 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	4 Jenis	3,479,720,800	1.1.2.10.02.0009 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	4 Jenis	3,479,720,800

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.10.02.0010 Penyelenggaraan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah BLC yang melaksanakan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	49 lembaga	5,652,987,114	1.1.2.10.02.0010 Penyelenggaraan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah BLC yang melaksanakan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	49 lembaga	5,665,172,659
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			4,011,406,987	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			4,081,676,309
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,033,832,173	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,059,110,393
2.2.2.02.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,033,832,173	2.2.2.02.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,059,110,393
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,977,574,814	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	2,022,565,916
2.2.2.02.02.0030 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,977,574,814	2.2.2.02.02.0030 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,022,565,916
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			14,989,311,061	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			14,989,311,061
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			5,141,920,492	1.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			5,402,376,279
1.1.2.11.02 Program perkuatan permodalan usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	5%	259,557,613	1.1.2.11.02 Program perkuatan permodalan usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	5%	252,557,613
1.1.2.11.02.0001 Fasilitas Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan	125 orang	259,557,613	1.1.2.11.02.0001 Fasilitas Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan	125 orang	252,557,613
1.1.2.11.03 Program standarisasi produk usaha mikro	Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	30%	1,371,672,914	1.1.2.11.03 Program standarisasi produk usaha mikro	Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	30%	1,544,648,994



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	30%				Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	30%		
1.1.2.11.03.0001 Fasilitas Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitas sertifikasi produk	25 orang	124,829,767		1.1.2.11.03.0001 Fasilitas Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitas sertifikasi produk	25 orang	128,373,917	
1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya	385 orang	614,227,649		1.1.2.11.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya	385 orang	619,227,649	
1.1.2.11.03.0003 Peningkatan Mutu Produk Bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas peningkatan mutu produk	125 orang	302,446,900		1.1.2.11.03.0003 Peningkatan Mutu Produk Bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas peningkatan mutu produk	125 orang	307,446,900	
1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk	140 orang	176,531,938		1.1.2.11.03.0004 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk	140 orang	489,600,528	
1.1.2.11.03.0005 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (DAK)	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	125 Orang	153,636,660		1.1.2.11.03.0005 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (DAK)	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	125 Orang	0	
1.1.2.11.04 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	66.24%	1,912,912,717		1.1.2.11.04 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	66.24%	1,698,555,764	
1.1.2.11.04.0001 Pengawasan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pengawasan	450 lembaga	1,135,944,688		1.1.2.11.04.0001 Pengawasan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pengawasan	450 lembaga	1,037,387,735	
1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya	150 lembaga	282,321,378		1.1.2.11.04.0003 Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya	150 lembaga	302,321,378	
1.1.2.11.04.0004 Pelatihan Perkoperasian (DAK)	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pelatihan	200 lembaga	155,800,000		1.1.2.11.04.0004 Pelatihan Perkoperasian (DAK)	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pelatihan	200 lembaga	0	
1.1.2.11.04.0005 Fasilitas Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitas pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga	61 lembaga	338,846,651		1.1.2.11.04.0005 Fasilitas Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitas pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga	61 lembaga	358,846,651	
1.1.2.11.05 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	78%	1,597,777,248		1.1.2.11.05 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	78%	1,906,613,908	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.11.05.0001 Penyelenggaraan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	5 kali	184,751,223	1.1.2.11.05.0001 Penyelenggaraan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	5 kali	194,751,223
1.1.2.11.05.0002 Fasilitas Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, dengan Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan antar koperasi, distributor, dan/atau lembaga keuangan/perbankan	144 lembaga	123,574,136	1.1.2.11.05.0002 Fasilitas Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, dengan Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan antar koperasi, distributor, dan/atau lembaga keuangan/perbankan	144 lembaga	123,574,136
1.1.2.11.05.0003 Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	60 lembaga	269,349,135	1.1.2.11.05.0003 Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	35 lembaga	289,349,135
1.1.2.11.05.0004 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi (DAK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi	80 lembaga	158,063,340	1.1.2.11.05.0004 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah pengurus koperasi dan pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan	220 Orang	467,500,000
1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya	150 lembaga	265,340,221	1.1.2.11.05.0005 Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya	150 lembaga	284,740,221
1.1.2.11.05.0006 Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	144 lembaga	596,699,193	1.1.2.11.05.0006 Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	144 lembaga	546,699,193
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.02. Pariwisata				1.2.2.02. Pariwisata			
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif				1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif			
	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	7%	192,619,795		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	7%	131,051,756
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.02.04.0003 Pengelolaan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	1 bangunan	154,719,483	1.2.2.02.04.0003 Pengelolaan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	1 bangunan	105,471,584
1.2.2.02.04.0012 Pelatihan Kuliner di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pelatihan kuliner di rumah kreatif	25 orang	37,900,312	1.2.2.02.04.0012 Pelatihan Kuliner di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pelatihan kuliner di rumah kreatif	25 orang	25,580,172
1.2.2.02.05 Program legalisasi usaha kreatif	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	30%	95,984,422	1.2.2.02.05 Program legalisasi usaha kreatif	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	30%	135,984,422
1.2.2.02.05.0001 Fasilitas Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan fasilitas sertifikasi produk	25 orang	95,984,422	1.2.2.02.05.0001 Fasilitas Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan fasilitas sertifikasi produk	25 orang	135,984,422
1.2.2.02.06 Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	15%	117,442,457	1.2.2.02.06 Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	15%	117,442,457
1.2.2.02.06.0001 Fasilitas Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	50 orang	117,442,457	1.2.2.02.06.0001 Fasilitas Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	50 orang	117,442,457
1.2.2.06. Perdagangan			6,980,172,230	1.2.2.06. Perdagangan			6,471,418,137
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	60%	6,980,172,230	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	60%	6,471,418,137
1.2.2.06.04.0002 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner	Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	4 kali	247,217,408	1.2.2.06.04.0002 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner	Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	4 kali	303,174,408
1.2.2.06.04.0042 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner dan Pasar Tradisional	Jumlah sentra wisata kuliner dan pasar tradisional yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya	60 lokasi	737,561,620	1.2.2.06.04.0042 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner dan Pasar Tradisional	Jumlah sentra wisata kuliner dan pasar tradisional yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya	60 lokasi	791,423,147
1.2.2.06.04.0043 Pengadaan Sarana Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah sarana penunjang tempat usaha skala mikro yang disediakan	238 unit	900,209,873	1.2.2.06.04.0043 Pengadaan Sarana Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah sarana penunjang tempat usaha skala mikro yang disediakan	334 unit	1,368,330,310
1.2.2.06.04.0044 Pemeliharaan Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah tempat usaha skala mikro yang dipelihara	15 lokasi	5,095,183,329	1.2.2.06.04.0044 Pemeliharaan Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah tempat usaha skala mikro yang dipelihara	15 lokasi	4,008,490,272
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,913,494,318		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,802,978,881
	2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		2.2.2.02.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	1,802,978,881
	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	928,059,129
	2.2.2.02.02.0031 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		2.2.2.02.02.0031 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	928,059,129
Dinas Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup			
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	72%	3,571,762,610		Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	72%	4,060,421,290
	1.1.1.04.01.0012 Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	1000 lokasi		1.1.1.04.01.0012 Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	4,060,421,290
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan				1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan			
	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	70%	8,188,696,212		Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	70%	8,316,661,637



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.03.0001 Penyusunan Kajian dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disusun	2 dokumen	442,655,722	1.1.2.05.03.0001 Penyusunan Kajian dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disusun	2 dokumen	442,655,722
1.1.2.05.03.0002 Pendukung Penilaian Adipura	Jumlah Kegiatan Pendukung Penilaian Adipura yang diselenggarakan	1 kali	177,149,356	1.1.2.05.03.0002 Pendukung Penilaian Adipura	Jumlah Kegiatan Pendukung Penilaian Adipura yang diselenggarakan	1 kali	177,149,356
1.1.2.05.03.0003 Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	50 lokasi	233,184,472	1.1.2.05.03.0003 Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	50 lokasi	233,184,472
1.1.2.05.03.0004 Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	160 kali	2,400,225,527	1.1.2.05.03.0004 Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	161 kali	2,299,652,394
1.1.2.05.03.0005 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pendidikan lingkungan yang diselenggarakan	14 kali	304,504,312	1.1.2.05.03.0005 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pendidikan lingkungan yang diselenggarakan	14 kali	304,504,312
1.1.2.05.03.0006 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 obyek	500,975,915	1.1.2.05.03.0006 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 obyek	496,459,885
1.1.2.05.03.0007 Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang disusun	2 dokumen	199,410,463	1.1.2.05.03.0007 Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang disusun	2 dokumen	199,410,463
1.1.2.05.03.0008 Inventarisasi dan Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen inventarisasi dan perencanaan penataan lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	286,565,039	1.1.2.05.03.0008 Inventarisasi dan Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen inventarisasi dan perencanaan penataan lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	286,565,039
1.1.2.05.03.0009 Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 lembaga	908,488,093	1.1.2.05.03.0009 Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 lembaga	908,488,093
1.1.2.05.03.0011 Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	6 kali	650,615,187	1.1.2.05.03.0011 Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	6 kali	650,615,187



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.03.0012 Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	224 sampel	612,862,948	1.1.2.05.03.0012 Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	224 sampel	608,287,948
1.1.2.05.03.0013 Pemantauan dan Sosialisasi Pengguna Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	30 lembaga	190,965,611	1.1.2.05.03.0013 Pemantauan dan Sosialisasi Pengguna Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	30 lembaga	190,965,611
1.1.2.05.03.0015 Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut	48 sampel	407,365,841	1.1.2.05.03.0015 Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut	48 sampel	612,628,816
1.1.2.05.03.0016 Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	jumlah stasiun monitoring udara ambien yang dipelihara	2 unit	873,727,726	1.1.2.05.03.0016 Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	jumlah stasiun monitoring udara ambien yang dipelihara	2 unit	906,094,339
1.1.2.05.05 Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	144 kegiatan dan / atau usaha	509,489,317	1.1.2.05.05 Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	144 kegiatan dan / atau usaha	573,448,395
1.1.2.05.05.0001 Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan perusahaan konservasi energi	120 lembaga	509,489,317	1.1.2.05.05.0001 Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan perusahaan konservasi energi	120 lembaga	573,448,395
1.1.2.12. Penanaman Modal			2,652,308,858	1.1.2.12. Penanaman Modal			2,627,308,858
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	2,652,308,858	1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	2,627,308,858
1.1.2.12.04.0007 Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	800 berkas	1,568,045,485	1.1.2.12.04.0007 Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	800 berkas	1,543,045,485
1.1.2.12.04.0008 Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	50 izin	437,604,680	1.1.2.12.04.0008 Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	50 izin	437,604,680
1.1.2.12.04.0009 Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	45 izin	646,658,693	1.1.2.12.04.0009 Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	45 izin	646,658,693
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,746,002,029	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,756,002,029
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,241,804,295	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,246,804,295
2.2.2.02.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,241,804,295	2.2.2.02.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,246,804,295
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	504,197,734	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	509,197,734
2.2.2.02.02.0005 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	504,197,734	2.2.2.02.02.0005 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	509,197,734
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			1,238,707,664,255	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan			1,352,297,517,255
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1,005,052,824,114	1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1,021,961,810,364
1.1.1.03.01 Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	Lama genangan (menit)	48 menit	427,089,551,540	1.1.1.03.01 Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	Lama genangan (menit)	48 menit	452,459,381,561
	Luas genangan (ha)	1150 ha			Luas genangan (ha)	1150 ha	
	Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%			Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%	
	Tinggi genangan (cm)	15 cm			Tinggi genangan (cm)	15 cm	
1.1.1.03.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	20 dokumen	10,912,624,004	1.1.1.03.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	20 dokumen	7,982,599,277



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak	56 unit	28,311,167,808	1.1.1.03.01.0003 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak	56 unit	32,252,517,379
1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	21 lokasi	186,159,637,256	1.1.1.03.01.0004 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	27 lokasi	202,279,324,756
1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	160,040,675,345	1.1.1.03.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1055 lokasi	180,640,818,686
1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	65 dokumen	7,744,183,127	1.1.1.03.01.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	65 dokumen	6,431,743,967
1.1.1.03.01.0008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan	2 lokasi	32,616,600,000	1.1.1.03.01.0008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan	2 lokasi	21,567,713,496
1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 dokumen	1,304,664,000	1.1.1.03.01.0009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 dokumen	1,304,664,000
1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	10.32%	575,047,897,756	1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	10.32%	566,587,053,985
	Persentase jalan yang terbangun (%)	0.48%			Persentase jalan yang terbangun (%)	0.48%	
	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%			Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%	
	Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	22.91%			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	22.91%	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	12 dokumen	13,058,729,557	1.1.1.03.02.0001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	12 dokumen	8,689,610,200
1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak	200 unit	16,077,287,117	1.1.1.03.02.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak	220 unit	17,103,254,753
1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	1 lokasi	10,025,494,000	1.1.1.03.02.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	1 lokasi	10,025,494,000
1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun	21 lokasi	256,023,227,479	1.1.1.03.02.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun	21 lokasi	256,023,227,479
1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	1222 lokasi	39,530,682,003	1.1.1.03.02.0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	1222 lokasi	39,780,682,003
1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	55 dokumen	7,792,247,600	1.1.1.03.02.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	55 dokumen	6,564,373,240
1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)	Jumlah lokasi Jalan yang dibangun	2 lokasi	212,641,000,000	1.1.1.03.02.0007 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)	Jumlah lokasi Jalan yang dibangun	2 lokasi	209,641,000,000
1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)	2 dokumen	6,379,230,000	1.1.1.03.02.0008 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)	2 dokumen	5,239,412,310

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.03.02.0009 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun	1 lokasi	13,000,000,000	1.1.1.03.02.0009 Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun	1 lokasi	13,000,000,000
1.1.1.03.02.0010 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun	1 dokumen	520,000,000	1.1.1.03.02.0010 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun	1 dokumen	520,000,000
1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Persentase pelanggan baru PDAM (%)	15.07%	354,078,000	1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Persentase pelanggan baru PDAM (%)	15.07%	354,078,000
1.1.1.03.03.0001 Fasilitas Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitas penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum	2 dokumen	354,078,000	1.1.1.03.03.0001 Fasilitas Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitas penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum	2 dokumen	354,078,000
1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	2,561,296,818	1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	2,561,296,818
1.1.1.03.05.0001 Fasilitas Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10 ijin	1,393,601,669	1.1.1.03.05.0001 Fasilitas Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10 ijin	1,393,601,669
1.1.1.03.05.0002 Fasilitas dan Rekomendasi Teknis pendukung Jalan, Jembatan, Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan	240 rekomendasi	1,167,695,149	1.1.1.03.05.0002 Fasilitas dan Rekomendasi Teknis pendukung Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan	240 rekomendasi	1,167,695,149
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.04. Pertanahan			197,242,468,946	1.1.2.04. Pertanahan			289,295,890,581
1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	4.703 Ha	195,431,813,470	1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	4.703 Ha	287,485,235,105

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	5 lokasi	195,431,813,470	1.1.2.04.01.0001 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	5 lokasi	287,485,235,105
1.1.2.04.02 Program Pengamanan Aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	17.85%	1,810,655,476	1.1.2.04.02 Program Pengamanan Aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	17.85%	1,810,655,476
1.1.2.04.02.0007 Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset Infrastruktur yang diamankan	40 bidang	1,810,655,476	1.1.2.04.02.0007 Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset Infrastruktur yang diamankan	40 bidang	1,810,655,476
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
502,544,789				502,544,789			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	502,544,789	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	502,544,789
2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	502,544,789	2.1.2.01.02.0043 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	502,544,789
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
35,909,826,406				40,537,271,521			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	30,920,050,171	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	35,547,495,286
2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	30,920,050,171	2.2.2.02.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	35,547,495,286
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	4,989,776,235	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	4,989,776,235



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4,989,776,235	2.2.2.02.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4,989,776,235
Dinas Pemadam Kebakaran			120,182,968,005	Dinas Pemadam Kebakaran			120,019,405,463
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			115,071,107,857	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			115,168,665,804
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	53 kejadian	115,071,107,857	1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	53 kejadian	115,168,665,804
	Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	109 kejadian			Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	109 kejadian	
	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	97%			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	97%	
1.1.1.05.03.0008 Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	832 orang	30,794,669,132	1.1.1.05.03.0008 Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	832 orang	34,185,905,471
1.1.1.05.03.0009 Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	210 unit	4,480,854,809	1.1.1.05.03.0009 Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	210 unit	4,871,078,017
1.1.1.05.03.0010 Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	567 unit	70,024,331,292	1.1.1.05.03.0010 Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	567 unit	67,035,229,692
1.1.1.05.03.0011 Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	700 bangunan	5,900,667,148	1.1.1.05.03.0011 Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	400 bangunan	5,050,667,148



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.03.0012 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	199 kali	2,829,632,434	1.1.1.05.03.0012 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	199 kali	2,839,632,434
1.1.1.05.03.0013 Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah pelatihan pengendalian pemadaman kebakaran	48 kali	1,040,953,042	1.1.1.05.03.0013 Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah pelatihan pengendalian pemadaman kebakaran	48 kali	1,186,153,042
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			5,111,860,148	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			4,850,739,659
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	3,914,375,408	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	3,533,860,919
2.2.2.02.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,914,375,408	2.2.2.02.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,533,860,919
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,197,484,740	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,316,878,740
2.2.2.02.02.0025 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,197,484,740	2.2.2.02.02.0025 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,316,878,740
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			13,993,704,873	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			14,082,000,026
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.12. Penanaman Modal			11,654,665,783	1.1.2.12. Penanaman Modal			11,210,645,443
1.1.2.12.01 Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	30%	227,605,792	1.1.2.12.01 Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	30%	171,890,607
1.1.2.12.01.0001 Temu Usaha Fasilitas Pendukung Logistik	Jumlah temu usaha fasilitas pendukung logistik yang dilaksanakan	1 kali	227,605,792	1.1.2.12.01.0001 Temu Usaha Fasilitas Pendukung Logistik	Jumlah temu usaha fasilitas pendukung logistik yang dilaksanakan	1 kali	171,890,607



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.12.03 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	16%	3,884,681,740	1.1.2.12.03 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	16%	3,661,704,943
	Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	24%			Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	24%	
1.1.2.12.03.0001 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal yang dilaksanakan	1 kali	209,577,887	1.1.2.12.03.0001 Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal yang dilaksanakan	1 kali	162,768,127
1.1.2.12.03.0002 Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	500 lembaga	317,536,961	1.1.2.12.03.0002 Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	500 lembaga	317,536,961
1.1.2.12.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	2700 lembaga	813,560,570	1.1.2.12.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	2800 lembaga	813,560,570
1.1.2.12.03.0004 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	791,249,496	1.1.2.12.03.0004 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	662,484,640
1.1.2.12.03.0005 Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	3 dokumen	232,821,117	1.1.2.12.03.0005 Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun	3 dokumen	316,919,687
1.1.2.12.03.0006 Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola	34403 data	544,300,205	1.1.2.12.03.0006 Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola	34403 data	446,977,298
1.1.2.12.03.0008 Pembinaan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang dibina	200 lembaga	234,959,016	1.1.2.12.03.0008 Pembinaan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang dibina	200 lembaga	234,959,016
1.1.2.12.03.0009 Pendampingan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang didampingi	300 lembaga	451,775,370	1.1.2.12.03.0009 Pendampingan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang didampingi	400 lembaga	417,597,526
1.1.2.12.03.0010 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan	12 kali	288,901,118	1.1.2.12.03.0010 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan	12 kali	288,901,118
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	7,542,378,251	1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	7,377,049,893
1.1.2.12.04.0001 Bimtek Penyusunan Laporan Industri	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek laporan Industri	200 orang	197,734,064	1.1.2.12.04.0001 Bimtek Penyusunan Laporan Industri	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek laporan Industri	200 orang	197,734,064



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.12.04.0002 Bimtek Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek perizinan penanaman modal	100 lembaga	282,760,328	1.1.2.12.04.0002 Bimtek Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek perizinan penanaman modal	100 lembaga	282,760,328
1.1.2.12.04.0003 Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60000 berkas	5,236,951,728	1.1.2.12.04.0003 Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	90000 berkas	5,097,123,370
1.1.2.12.04.0004 Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah petugas layanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dibina	100 orang	209,664,548	1.1.2.12.04.0004 Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah petugas layanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dibina	100 orang	209,664,548
1.1.2.12.04.0005 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan tanda daftar perusahaan	500 orang	363,002,876	1.1.2.12.04.0005 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan tanda daftar perusahaan	500 orang	363,002,876
1.1.2.12.04.0006 Pengawasan Perijinan Industri dan Tanda Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin industri dan tanda daftar perusahaan yang diawasi	10300 orang	378,546,614	1.1.2.12.04.0006 Pengawasan Perijinan Industri dan Tanda Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin industri dan tanda daftar perusahaan yang diawasi	10300 orang	378,546,614
1.1.2.12.04.0021 Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah koordinasi teknis pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu yang dilaksanakan	24 kali	822,331,564	1.1.2.12.04.0021 Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah koordinasi teknis pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu yang dilaksanakan	24 kali	796,831,564
1.1.2.12.04.0022 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	4 kali	23,296,619	1.1.2.12.04.0022 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	4 kali	23,296,619
1.1.2.12.04.0023 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 kali	11,704,145	1.1.2.12.04.0023 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 kali	11,704,145



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.12.04.0024 Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	1 kali	16,385,765	1.1.2.12.04.0024 Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	1 kali	16,385,765
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,339,039,090	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,871,354,583
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,915,551,268	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,921,690,119
2.2.2.02.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,915,551,268	2.2.2.02.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,921,690,119
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	423,487,822	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	949,664,464
2.2.2.02.02.0004 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	423,487,822	2.2.2.02.02.0004 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	949,664,464
Dinas Pendidikan			875,844,499,215	Dinas Pendidikan			934,214,579,375
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.01. Pendidikan			855,235,921,437	1.1.1.01. Pendidikan			913,749,665,965
1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%	583,389,100,355	1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%	633,193,510,459
	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%			Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	72.83%				Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	72.83%		
	Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	78.03%				Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	78.03%		
	Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	49.04%				Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	49.04%		
1.1.1.01.01.0003 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	698 lembaga	185,993,461,192		1.1.1.01.01.0003 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	699 lembaga	191,213,914,030	
1.1.1.01.01.0004 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	317 lembaga	93,747,778,172		1.1.1.01.01.0004 Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	318 lembaga	109,917,014,950	
1.1.1.01.01.0005 Fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan	2 kali	855,395,455		1.1.1.01.01.0005 Fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan	2 kali	941,395,455	
1.1.1.01.01.0006 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar	301 lembaga	18,474,498,153		1.1.1.01.01.0006 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar	302 lembaga	16,433,350,623	
1.1.1.01.01.0007 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah	62 lembaga	10,734,573,743		1.1.1.01.01.0007 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah	63 lembaga	17,601,881,896	
1.1.1.01.01.0008 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah APE yang diberikan	447 paket	1,344,479,332		1.1.1.01.01.0008 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah APE yang diberikan	447 paket	1,364,479,332	
1.1.1.01.01.0009 Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	363 lembaga	86,077,559,365		1.1.1.01.01.0009 Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	367 lembaga	95,826,525,817	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	2 lembaga	111,600,000	1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	2 lembaga	111,600,000
1.1.1.01.01.0012 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	301 lembaga	123,406,656,334	1.1.1.01.01.0012 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	302 lembaga	128,156,415,666
1.1.1.01.01.0013 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	62 lembaga	58,075,506,304	1.1.1.01.01.0013 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	63 lembaga	67,163,241,124
1.1.1.01.01.0014 Pemeliharaan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Jumlah sistem yang dipelihara	1 sistem	675,555,305	1.1.1.01.01.0014 Pemeliharaan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Jumlah sistem yang dipelihara	1 sistem	675,555,305
1.1.1.01.01.0016 Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana dan rehabilitasi gedung pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	1,728,237,000	1.1.1.01.01.0016 Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana dan rehabilitasi gedung pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	1,728,237,000
1.1.1.01.01.0017 Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	8 lembaga	2,163,800,000	1.1.1.01.01.0017 Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	7 lembaga	2,059,899,261
1.1.1.01.02 Program Penerapan Kurikulum	Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	83.23%	28,499,591,361	1.1.1.01.02 Program Penerapan Kurikulum	Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	83.23%	26,491,670,041



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
	Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	83.23%				Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	83.23%		
	Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	68.69%				Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	68.69%		
1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	73 lembaga	14,361,551,300		1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	73 lembaga	11,836,405,630	
1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	37 lembaga	8,093,234,866		1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	37 lembaga	8,113,234,866	
1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	1 kali	835,996,546		1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	1 kali	835,996,546	
1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	2 kali	2,616,755,668		1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	2 kali	2,616,755,668	
1.1.1.01.02.0005	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	410 lembaga	524,803,435		1.1.1.01.02.0005	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	410 lembaga	524,803,435	
1.1.1.01.02.0006	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah	297 lembaga	381,034,573		1.1.1.01.02.0006	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah	297 lembaga	403,258,923	
1.1.1.01.02.0007	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	893 lembaga	454,817,768		1.1.1.01.02.0007	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	893 lembaga	454,817,768	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.01.02.0008 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	729 lembaga	761,218,735	1.1.1.01.02.0008 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	729 lembaga	1,196,218,735
1.1.1.01.02.0009 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	286 lembaga	470,178,470	1.1.1.01.02.0009 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	286 lembaga	510,178,470
1.1.1.01.03 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	69.09%	148,311,514,895	1.1.1.01.03 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	69.09%	153,278,704,535
	Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	100%			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	100%	
	Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	82.81%			Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	82.81%	
	Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%	
	Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	85.93%			Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	85.93%	
	Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	67.93%			Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	67.93%	
	Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	54.71%			Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	54.71%	
	Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	60.95%			Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	60.95%	
1.1.1.01.03.0001 Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	45,771,010,715	1.1.1.01.03.0001 Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	34,771,010,715



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.1.01.03.0002 Fasilitas Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	12 kali	53,167,229,915		1.1.1.01.03.0002 Fasilitas Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	12 kali	69,378,419,555	
1.1.1.01.03.0003 Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	957 lembaga	6,871,739,988		1.1.1.01.03.0003 Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	957 lembaga	6,627,739,988	
1.1.1.01.03.0004 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	12010 orang	41,677,725,008		1.1.1.01.03.0004 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	11748 orang	41,677,725,008	
1.1.1.01.03.0006 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan	1 kali	823,809,269		1.1.1.01.03.0006 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan	1 kali	823,809,269	
1.1.1.01.04 Program Peningkatan Prestasi	Persentase PAUD berprestasi	2.25%	32,758,047,676		1.1.1.01.04 Program Peningkatan Prestasi	Persentase PAUD berprestasi	2.25%	34,782,822,676	
	Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	62.50%				Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	62.50%		
	Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	62.50%				Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	62.50%		
1.1.1.01.04.0001 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1339 lembaga	473,512,308		1.1.1.01.04.0001 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1339 lembaga	493,512,308	
1.1.1.01.04.0002 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	1,447,302,838		1.1.1.01.04.0002 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	1,467,302,838	
1.1.1.01.04.0003 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	652,874,165		1.1.1.01.04.0003 Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	2 kali	672,874,165	
1.1.1.01.04.0004 Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan	21 kali	3,172,302,756		1.1.1.01.04.0004 Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan	21 kali	3,172,302,756	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.01.04.0005 Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	4 kali	23,306,138,441	1.1.1.01.04.0005 Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	4 kali	25,250,913,441
1.1.1.01.04.0007 Pemberian Makanan Tambahan PAUD	Jumlah lembaga penerima pemberian makanan tambahan PAUD	893 lembaga	3,705,917,168	1.1.1.01.04.0007 Pemberian Makanan Tambahan PAUD	Jumlah lembaga penerima pemberian makanan tambahan PAUD	893 lembaga	3,725,917,168
1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	46.31%	1,055,180,760	1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	46.31%	1,871,686,507
	Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	59.18%			Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	59.18%	
	Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	64.94%			Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	64.94%	
	Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	83.70%			Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	83.70%	
1.1.1.01.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Manajemen Sekolah	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitas pengelolaan manajemen sekolah	4022 lembaga	1,055,180,760	1.1.1.01.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Manajemen Sekolah	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitas pengelolaan manajemen sekolah	1224 lembaga	1,871,686,507
1.1.1.01.06 Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	72.14%	4,188,589,293	1.1.1.01.06 Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	72.14%	5,185,482,663
	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88.89%			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88.89%	
	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91.11%			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91.11%	
1.1.1.01.06.0001 Fasilitas Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas pembinaan pendidikan kesetaraan	34 lembaga	4,188,589,293	1.1.1.01.06.0001 Fasilitas Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas pembinaan pendidikan kesetaraan	34 lembaga	5,185,482,663
1.1.1.01.07 Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5.93%	57,033,897,097	1.1.1.01.07 Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5.93%	58,945,789,084



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	2.08%						Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	2.08%		
			1.1.1.01.07.0001 Fasilitas Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitas pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu	12000 orang	56,161,887,181				1.1.1.01.07.0001 Fasilitas Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitas pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu	12000 orang	57,769,627,168	
			1.1.1.01.07.0002 Fasilitas Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2 kali	224,775,778				1.1.1.01.07.0002 Fasilitas Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2 kali	651,664,388	
			1.1.1.01.07.0003 Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	289 lembaga	647,234,138				1.1.1.01.07.0003 Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	289 lembaga	524,497,528	
	1.1.2. Non Pelayanan Dasar							1.1.2. Non Pelayanan Dasar						
	1.1.2.16. Kebudayaan					4,236,750,482			1.1.2.16. Kebudayaan					4,713,345,096
			1.1.2.16.02 Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	47%	732,340,822				1.1.2.16.02 Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	47%	752,340,822	
			1.1.2.16.02.0004 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar	668 lembaga	464,427,612				1.1.2.16.02.0004 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar	668 lembaga	464,427,612	
			1.1.2.16.02.0005 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah Menengah	267 lembaga	267,913,210				1.1.2.16.02.0005 Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah Menengah	267 lembaga	287,913,210	
			1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	16%	3,504,409,660				1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	16%	3,961,004,274	
			1.1.2.16.03.0004 Fasilitas Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan karakter Kebangsaan di Sekolah	376 lembaga	634,330,573				1.1.2.16.03.0004 Fasilitas Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan karakter Kebangsaan di Sekolah	376 lembaga	766,440,573	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03.0005 Fasilitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	245 lembaga	416,790,488	1.1.2.16.03.0005 Fasilitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	245 lembaga	741,275,102
1.1.2.16.03.0006 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan	13 kali	2,453,288,599	1.1.2.16.03.0006 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan	13 kali	2,453,288,599
1.1.2.17. Perpustakaan			469,414,925	1.1.2.17. Perpustakaan			334,414,925
1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	60.30%	469,414,925	1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	60.30%	334,414,925
1.1.2.17.01.0006 Fasilitas Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitas Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah yang diselenggarakan	3 kali	469,414,925	1.1.2.17.01.0006 Fasilitas Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitas Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah yang diselenggarakan	3 kali	334,414,925
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			439,134,005	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			389,134,005
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	439,134,005	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	389,134,005
2.1.2.01.02.0047 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	439,134,005	2.1.2.01.02.0047 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	389,134,005
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			15,463,278,366	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			15,028,019,384
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	13,056,892,771	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	11,584,699,292
2.2.2.02.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	13,056,892,771	2.2.2.02.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	11,584,699,292



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	2,406,385,595	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	3,443,320,092
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0039 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,406,385,595	2.2.2.02.02.0039 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3,443,320,092
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			400,011,213,522	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			401,742,482,689
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			25,298,228,128	1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			26,377,485,226
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	35%	25,298,228,128	1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	35%	26,377,485,226
1.1.1.04.01.0007 Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3967 lokasi	15,628,997,082	1.1.1.04.01.0007 Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3967 lokasi	16,608,254,180
1.1.1.04.01.0009 Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	91 blok	9,669,231,046	1.1.1.04.01.0009 Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	91 blok	9,769,231,046
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.04. Pertanahan			370,727,264,842	1.1.2.04. Pertanahan			371,339,872,411
1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	41.75 Ha	333,752,249,647	1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	41.75 Ha	333,732,249,647
1.1.2.04.01.0002 Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	6 dokumen	5,306,373,839	1.1.2.04.01.0002 Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	6 dokumen	5,296,373,839



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.04.01.0006 Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	6 lokasi	328,445,875,808	1.1.2.04.01.0006 Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	6 lokasi	328,435,875,808
1.1.2.04.02 Program Pengamanan Aset	Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100%	15,316,315,181	1.1.2.04.02 Program Pengamanan Aset	Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100%	15,449,947,151
	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	17.85%			Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	17.85%	
	Persentase tanah aset yang tersertifikasi	13.22%			Persentase tanah aset yang tersertifikasi	13.22%	
1.1.2.04.02.0001 Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	12 obyek	1,302,914,523	1.1.2.04.02.0001 Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	12 obyek	1,292,914,523
1.1.2.04.02.0002 Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	18 obyek	1,387,495,963	1.1.2.04.02.0002 Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	18 obyek	1,337,495,963
1.1.2.04.02.0003 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	4,894,443,941	1.1.2.04.02.0003 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	5,215,250,911
1.1.2.04.02.0004 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola	47350 berkas	1,211,623,382	1.1.2.04.02.0004 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola	47350 berkas	1,124,448,382
1.1.2.04.02.0005 Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	4 kali	1,624,099,728	1.1.2.04.02.0005 Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	4 kali	1,624,099,728
1.1.2.04.02.0006 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	75 dokumen	4,895,737,644	1.1.2.04.02.0006 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	75 dokumen	4,855,737,644
1.1.2.04.03 Program Pengelolaan Aset	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	62.62%	21,658,700,014	1.1.2.04.03 Program Pengelolaan Aset	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	62.62%	22,157,675,613



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen hasil Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	2 dokumen	1,575,919,641	1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen hasil Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	2 dokumen	1,565,919,641
1.1.2.04.03.0002 Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	7000 izin	1,627,722,179	1.1.2.04.03.0002 Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	7000 izin	1,627,722,179
1.1.2.04.03.0003 Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	24 lokasi	14,683,707,904	1.1.2.04.03.0003 Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	24 lokasi	15,202,501,713
1.1.2.04.03.0004 Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8000 lokasi	3,137,956,360	1.1.2.04.03.0004 Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8000 lokasi	3,137,956,360
1.1.2.04.03.0005 Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	633,393,930	1.1.2.04.03.0005 Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	623,575,720
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			3,985,720,552	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			4,025,125,052
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	3,213,226,114	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	3,263,226,114
2.2.2.02.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,213,226,114	2.2.2.02.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,263,226,114
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	772,494,438	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	761,898,938
2.2.2.02.02.0040 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	772,494,438	2.2.2.02.02.0040 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	761,898,938



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan			29,225,348,853	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan			28,159,141,834
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			9,333,724,231	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			8,415,344,438
1.1.2.02.01 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	3,304,837,696	1.1.2.02.01 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	3,056,215,341
1.1.2.02.01.0001 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	147 lembaga	959,833,420	1.1.2.02.01.0001 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	147 lembaga	890,628,515
1.1.2.02.01.0002 Fasilitas Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitas pembinaan organisasi perempuan	25 kali	991,726,991	1.1.2.02.01.0002 Fasilitas Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitas pembinaan organisasi perempuan	25 kali	918,895,991
1.1.2.02.01.0005 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	7 kali	572,357,189	1.1.2.02.01.0005 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	7 kali	519,507,189
1.1.2.02.01.0007 Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen	376,205,957	1.1.2.02.01.0007 Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen	333,764,546
1.1.2.02.01.0008 Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	jumlah orang yang mengikuti peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	1000 orang	404,714,139	1.1.2.02.01.0008 Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	jumlah orang yang mengikuti peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	1000 orang	393,419,100
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	6,028,886,535	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	5,359,129,097
	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	66.86%			Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	66.86%	
	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	35%			Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	35%	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	
1.1.2.02.02.0001 Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak yang dilakukan pendampingan dan pembinaan	330 kasus	1,755,101,255	1.1.2.02.02.0001 Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak yang dilakukan pendampingan dan pembinaan	330 kasus	1,777,869,134
1.1.2.02.02.0002 Fasilitas Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	916,362,879	1.1.2.02.02.0002 Fasilitas Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	914,392,879
1.1.2.02.02.0003 Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	532,966,690	1.1.2.02.02.0003 Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	631,980,180
1.1.2.02.02.0004 Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	681,678,470	1.1.2.02.02.0004 Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	703,678,470
1.1.2.02.02.0037 Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1,228,794,973	1.1.2.02.02.0037 Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1,331,208,434
1.1.2.02.02.0038 Pengelolaan Tempat Penitipan Anak	jumlah tempat penitipan anak yang dikelola selama 12 bulan	1 lembaga	913,982,268	1.1.2.02.02.0038 Pengelolaan Tempat Penitipan Anak	jumlah tempat penitipan anak yang dikelola selama 12 bulan	0 lembaga	0
1.1.2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			14,463,848,231	1.1.2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			14,370,516,131
1.1.2.08.01 Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20.20%	8,991,758,431	1.1.2.08.01 Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20.20%	8,996,431,331
	Persentase peserta KB aktif	79.60%			Persentase peserta KB aktif	79.60%	
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5.25%			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5.25%	
	Persentase peserta KB baru	82.75%			Persentase peserta KB baru	82.75%	
1.1.2.08.01.0001 Pembinaan Saka Kencana	jumlah Pembinaan Saka Kencana	1 kali	194,551,813	1.1.2.08.01.0001 Pembinaan Saka Kencana	jumlah Pembinaan Saka Kencana	1 kali	194,551,813



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.08.01.0002 Fasilitas Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	1740 orang	1,844,639,784		1.1.2.08.01.0002 Fasilitas Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	1740 orang	1,844,639,784	
1.1.2.08.01.0003 Pembinaan Keluarga Berencana	jumlah orang yang mengikuti pembinaan Keluarga Berencana	1718 orang	581,879,435		1.1.2.08.01.0003 Pembinaan Keluarga Berencana	jumlah orang yang mengikuti pembinaan Keluarga Berencana	1718 orang	581,879,435	
1.1.2.08.01.0004 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	850 orang	1,289,057,696		1.1.2.08.01.0004 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	775 orang	1,262,205,596	
1.1.2.08.01.0005 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	2 unit	1,060,040,000		1.1.2.08.01.0005 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	2 unit	1,091,565,000	
1.1.2.08.01.0007 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	32 lembaga	3,894,200,000		1.1.2.08.01.0007 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	3,894,200,000	
1.1.2.08.01.0008 Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen profil pengendalian penduduk yang disusun	1 dokumen	127,389,703		1.1.2.08.01.0008 Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen profil pengendalian penduduk yang disusun	1 dokumen	127,389,703	
1.1.2.08.02 Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	92.89%	1,673,381,824		1.1.2.08.02 Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	92.89%	1,673,381,824	
	Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	3.20%				Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	3.20%		
1.1.2.08.02.0001 Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	539,390,781		1.1.2.08.02.0001 Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	539,390,781	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.08.02.0002 Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1280 orang	548,504,944	1.1.2.08.02.0002 Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1280 orang	548,504,944
1.1.2.08.02.0003 Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	585,486,099	1.1.2.08.02.0003 Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	585,486,099
1.1.2.08.03 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	3,798,707,976	1.1.2.08.03 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	3,700,702,976
1.1.2.08.03.0002 Fasilitas dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	300 orang	1,817,592,087	1.1.2.08.03.0002 Fasilitas dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	275 orang	1,719,587,087
1.1.2.08.03.0003 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitas pengembangan usaha ekonomi	63 lembaga	1,653,542,596	1.1.2.08.03.0003 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitas pengembangan usaha ekonomi	63 lembaga	1,653,542,596
1.1.2.08.03.0004 Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri	12 dokumen	327,573,293	1.1.2.08.03.0004 Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri	12 dokumen	327,573,293
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.02. Pariwisata				1.2.2.02. Pariwisata			
544,920,326				566,744,600			
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	7%	544,920,326	1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	7%	566,744,600
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%	
1.2.2.02.04.0001 Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	329,737,579	1.2.2.02.04.0001 Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	395,792,990
1.2.2.02.04.0011 Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handycraft di rumah kreatif	25 orang	215,182,747	1.2.2.02.04.0011 Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handycraft di rumah kreatif	25 orang	170,951,610
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
4,882,856,065				4,806,536,665			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	3,784,467,180	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	3,794,467,180
2.2.2.02.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,784,467,180	2.2.2.02.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3,794,467,180
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,098,388,885	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,012,069,485
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0006 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,098,388,885	2.2.2.02.02.0006 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,012,069,485
Dinas Perdagangan			26,472,534,257	Dinas Perdagangan			26,723,407,882
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.12. Penanaman Modal			406,571,126	1.1.2.12. Penanaman Modal			426,071,126
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	406,571,126	1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	426,071,126
1.1.2.12.04.0017 Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan	400 berkas	406,571,126	1.1.2.12.04.0017 Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan	400 berkas	426,071,126
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.02. Pariwisata			1,665,700,668	1.2.2.02. Pariwisata			1,587,794,858
1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	7%	1,665,700,668	1.2.2.02.04 Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	7%	1,587,794,858
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.02.04.0005 Pengelolaan Rumah Kreatif Desain dan Fashion	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	2 bangunan	686,730,926	1.2.2.02.04.0005 Pengelolaan Rumah Kreatif Desain dan Fashion	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	2 bangunan	671,365,616
1.2.2.02.04.0007 Pelatihan Desain dan Fashion di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang dilatih	120 orang	438,396,742	1.2.2.02.04.0007 Pelatihan Desain dan Fashion di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang dilatih	120 orang	438,396,742
1.2.2.02.04.0013 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan	268 unit	540,573,000	1.2.2.02.04.0013 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan	268 unit	478,032,500
1.2.2.06. Perdagangan			18,366,823,636	1.2.2.06. Perdagangan			18,514,608,968
1.2.2.06.01 Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	100%	1,343,311,752	1.2.2.06.01 Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	100%	1,374,511,752
	Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	75%			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	75%	
1.2.2.06.01.0001 Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Jumlah pelaku distribusi perdagangan yang dibina	350 orang	686,779,347	1.2.2.06.01.0001 Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Jumlah pelaku distribusi perdagangan yang dibina	350 orang	686,779,347
1.2.2.06.01.0003 Koordinasi Pengembangan Hub/Simpul Logistik	Jumlah koordinasi pengembangan hub/simpul logistik yang dilaksanakan	5 kali	195,956,751	1.2.2.06.01.0003 Koordinasi Pengembangan Hub/Simpul Logistik	Jumlah koordinasi pengembangan hub/simpul logistik yang dilaksanakan	5 kali	195,956,751
1.2.2.06.01.0004 Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor laporannya	250 lokasi	460,575,654	1.2.2.06.01.0004 Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor laporannya	250 lokasi	491,775,654
1.2.2.06.03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	80%	5,112,847,809	1.2.2.06.03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	80%	4,870,744,974
1.2.2.06.03.0001 Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani	23160 unit	669,160,328	1.2.2.06.03.0001 Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani	23160 unit	609,160,328
1.2.2.06.03.0002 Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	119 jenis	2,024,026,850	1.2.2.06.03.0002 Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	119 jenis	1,889,059,595

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.2.2.06.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4100 unit	619,508,211		1.2.2.06.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4100 unit	559,508,211	
1.2.2.06.03.0005 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1521 lembaga	1,135,352,420		1.2.2.06.03.0005 Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1521 lembaga	1,148,216,840	
1.2.2.06.03.0006 Pengadaan Peralatan Kemetrollogian (DAK)	Jumlah peralatan kemetrollogian yang diadakan	6 unit	664,800,000		1.2.2.06.03.0006 Pengadaan Peralatan Kemetrollogian (DAK)	Jumlah peralatan kemetrollogian yang diadakan	6 unit	664,800,000	
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	60%	10,454,265,586		1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	60%	10,777,353,753	
	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%				Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%		
1.2.2.06.04.0005 Pendampingan Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pembinaan	80 orang	943,904,729		1.2.2.06.04.0005 Pendampingan Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pembinaan	160 orang	943,904,729	
1.2.2.06.04.0006 Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	280 orang	645,595,539		1.2.2.06.04.0006 Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	395 orang	774,595,539	
1.2.2.06.04.0007 Pengelolaan Sentra Usaha Mikro Surabaya	Jumlah sentra Usaha Mikro Surabaya yang dikelola	3 lokasi	1,966,237,020		1.2.2.06.04.0007 Pengelolaan Sentra Usaha Mikro Surabaya	Jumlah sentra Usaha Mikro Surabaya yang dikelola	3 lokasi	1,971,737,526	
1.2.2.06.04.0009 Penyediaan Stand Usaha Mikro	Jumlah stand usaha yang disediakan	7 lokasi	3,403,324,587		1.2.2.06.04.0009 Penyediaan Stand Usaha Mikro	Jumlah stand usaha yang disediakan	7 lokasi	3,669,587,749	
1.2.2.06.04.0010 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Jumlah Event pameran yang diikuti	16 kali	3,495,203,711		1.2.2.06.04.0010 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Jumlah Event pameran yang diikuti	19 kali	3,417,528,210	
1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/kejadian	1,456,398,489		1.2.2.06.05 Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/kejadian	1,491,998,489	
1.2.2.06.05.0003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	131 kali	956,379,228		1.2.2.06.05.0003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	131 kali	971,979,228	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.05.0004 Fasilitas Akses Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	Jumlah lembaga yang difasilitasi akses pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya	10 lembaga	500,019,261	1.2.2.06.05.0004 Fasilitas Akses Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	Jumlah lembaga yang difasilitasi akses pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya	10 lembaga	520,019,261
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			6,033,438,827	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			6,194,932,930
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	4,629,749,634	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	4,709,749,634
2.2.2.02.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,629,749,634	2.2.2.02.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,709,749,634
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,403,689,193	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,485,183,296
2.2.2.02.02.0041 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,403,689,193	2.2.2.02.02.0041 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,485,183,296
Dinas Perhubungan			352,798,651,342	Dinas Perhubungan			368,668,112,644
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			2,175,242,455	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			1,565,242,455
1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	70%	2,175,242,455	1.1.2.05.03 Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	70%	1,565,242,455
1.1.2.05.03.0014 Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	48 kali	2,175,242,455	1.1.2.05.03.0014 Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	48 kali	1,565,242,455
1.1.2.09. Perhubungan			327,449,570,261	1.1.2.09. Perhubungan			342,464,578,296



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	1.1.2.09.01 Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	31.27 km/jam	277,095,019,787		1.1.2.09.01 Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	31.27 km/jam	290,561,149,800
		Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%				Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%	
	1.1.2.09.01.0001 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR	149069 unit	8,464,222,968		1.1.2.09.01.0001 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR	149069 unit	9,214,222,968
	1.1.2.09.01.0002 Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	2 bangunan	8,618,410,369		1.1.2.09.01.0002 Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	2 bangunan	8,518,410,369
	1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun (Tahun Jamak/Multiyears)	1 bangunan	116,027,673,709		1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun (Tahun Jamak/Multiyears)	1 bangunan	123,183,140,000
	1.1.2.09.01.0004 Pengawasan dan Pengendalian sarana Angkutan Jalan	Jumlah Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan	7 Jenis	3,511,103,661		1.1.2.09.01.0004 Pengawasan dan Pengendalian sarana Angkutan Jalan	Jumlah Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan	7 Jenis	3,761,103,661
	1.1.2.09.01.0005 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	15,182,391,355		1.1.2.09.01.0005 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	18,703,808,155
	1.1.2.09.01.0006 Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara	36 lokasi	7,199,870,173		1.1.2.09.01.0006 Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara	36 lokasi	7,349,870,173
	1.1.2.09.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan	365 Kali	15,225,183,608		1.1.2.09.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan	365 Kali	15,348,011,708
	1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dladakan	2510 unit	55,962,804,417		1.1.2.09.01.0008 Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dladakan	2510 unit	57,375,720,756
	1.1.2.09.01.0010 Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan	1684 Lokasi	19,413,593,906		1.1.2.09.01.0010 Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan	1716 Lokasi	19,713,593,906
	1.1.2.09.01.0011 Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	33 Paket	5,888,512,902		1.1.2.09.01.0011 Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	33 Paket	5,818,512,902



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.09.01.0012 Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5 Kali	10,136,240,828		1.1.2.09.01.0012 Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5 Kali	10,286,240,828	
1.1.2.09.01.0013 Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	17 dokumen	3,226,417,597		1.1.2.09.01.0013 Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	17 dokumen	3,237,617,597	
1.1.2.09.01.0014 Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Jumlah sarana transportasi pelajar yang diselenggarakan selama 12 bulan	8 unit	1,235,084,386		1.1.2.09.01.0014 Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Jumlah sarana transportasi pelajar yang diselenggarakan selama 12 bulan	8 unit	1,297,386,869	
1.1.2.09.01.0016 Pengelolaan Parkir Tempat Khusus	Jumlah Tempat Khusus Parkir yang Dikelola selama 12 bulan	118 Lokasi	7,003,509,908		1.1.2.09.01.0016 Pengelolaan Parkir Tempat Khusus	Jumlah Tempat Khusus Parkir yang Dikelola selama 12 bulan	105 Lokasi	6,753,509,908	
1.1.2.09.02 Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	49,551,360,728		1.1.2.09.02 Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	51,200,238,750	
	Rata-rata headway angkutan umum (Angkot)	25 menit				Rata-rata headway angkutan umum (Angkot)	25 menit		
	Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	42.5 menit				Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	42.5 menit		
1.1.2.09.02.0001 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	27,924,729,390		1.1.2.09.02.0001 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	27,224,729,390	
1.1.2.09.02.0002 Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Jumlah Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan	20 unit	16,203,926,305		1.1.2.09.02.0002 Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Jumlah Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan	20 unit	13,796,766,488	
1.1.2.09.02.0003 Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Jumlah dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun	7 Dokumen	5,422,705,033		1.1.2.09.02.0003 Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Jumlah dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun	7 Dokumen	5,047,109,813	
					1.1.2.09.02.0004 Penyelenggaraan Pengelolaan Transportasi Umum	Jumlah Koridor yang dilayani	2 Koridor	5,131,633,059	
1.1.2.09.03 Program manajemen lalu lintas angkutan barang	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	100.33 menit	803,189,746		1.1.2.09.03 Program manajemen lalu lintas angkutan barang	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	100.33 menit	703,189,746	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.09.03.0001 Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	803,189,746	1.1.2.09.03.0001 Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	703,189,746
1.1.2.12. Penanaman Modal			3,088,019,482	1.1.2.12. Penanaman Modal			3,100,321,966
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	3,088,019,482	1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	3,100,321,966
1.1.2.12.04.0014 Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan	5 Jenis	3,088,019,482	1.1.2.12.04.0014 Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan	5 Jenis	3,100,321,966
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			20,085,819,144	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			21,537,969,927
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	12,192,414,925	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	12,294,717,409
2.2.2.02.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	12,192,414,925	2.2.2.02.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	12,294,717,409
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	7,893,404,219	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	9,243,252,518
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0042 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	7,893,404,219	2.2.2.02.02.0042 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	9,243,252,518
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			39,608,997,293	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			39,546,243,943
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.17. Perpustakaan			31,272,249,785	1.1.2.17. Perpustakaan			31,175,534,080
1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Persentase koleksi buku	91.56%	31,272,249,785	1.1.2.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Persentase koleksi buku	91.56%	31,175,534,080
	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	22.80%			Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	22.80%	
	Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%	
	Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	60.30%			Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	60.30%	
1.1.2.17.01.0001 Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	57433 orang	235,934,609	1.1.2.17.01.0001 Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	57433 orang	230,923,583
1.1.2.17.01.0002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	189 kali	503,098,431	1.1.2.17.01.0002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	189 kali	517,446,889
1.1.2.17.01.0003 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	500 lembaga	619,560,351	1.1.2.17.01.0003 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	500 lembaga	595,109,756
1.1.2.17.01.0004 Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	25,025,464,694	1.1.2.17.01.0004 Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	25,014,860,716
1.1.2.17.01.0005 Penyediaan dan Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat	Jumlah sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat	43069 Buku	4,234,400,213	1.1.2.17.01.0005 Penyediaan dan Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat	Jumlah sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat	25911 Buku	4,130,869,954
1.1.2.17.01.0007 Akse Literasi	Jumlah rangkaian kegiatan pelaksanaan akse literasi	1 kali	653,791,487	1.1.2.17.01.0007 Akse Literasi	Jumlah rangkaian kegiatan pelaksanaan akse literasi	1 kali	686,323,182
1.1.2.18. Kearsipan			4,862,804,103	1.1.2.18. Kearsipan			4,871,538,374
1.1.2.18.01 Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	4,862,804,103	1.1.2.18.01 Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	4,871,538,374
	Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan	60.80%			Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan	60.80%	
1.1.2.18.01.0001 Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	352,313,041	1.1.2.18.01.0001 Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	347,334,679



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.18.01.0002 Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan	130 lembaga	369,697,674	1.1.2.18.01.0002 Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan	130 lembaga	416,422,833
1.1.2.18.01.0003 Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	52 kali	2,494,587,810	1.1.2.18.01.0003 Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	52 kali	2,411,000,822
1.1.2.18.01.0004 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	23 item	1,646,205,578	1.1.2.18.01.0004 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	23 item	1,696,780,040
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
2.2.2.02.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.02.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah			
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan				2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan			
2.2.2.02.02.0001 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran				2.2.2.02.02.0001 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran			
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata			
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.01. Pendidikan				1.1.1.01. Pendidikan			
1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan				1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan			
1.1.1.01.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan				1.1.1.01.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.01.01.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	94 bangunan	203,543,790,893	1.1.1.01.01.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	170 bangunan	212,222,683,239
1.1.1.01.01.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun	40 dokumen	2,051,174,269	1.1.1.01.01.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun	23 dokumen	2,058,474,269
1.1.1.01.01.0015 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara	100 bangunan	21,605,638,158	1.1.1.01.01.0015 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara	127 bangunan	24,585,638,157
1.1.1.02. Kesehatan			64,696,665,582	1.1.1.02. Kesehatan			62,316,723,939
1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	76.35%	9,521,960,157	1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	76.35%	11,574,792,509
1.1.1.02.04.0005 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/ direhabilitasi	28 bangunan	8,924,819,258	1.1.1.02.04.0005 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/ direhabilitasi	33 bangunan	10,967,651,610
1.1.1.02.04.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	11 dokumen	597,140,899	1.1.1.02.04.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun	5 dokumen	607,140,899
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	82%	55,174,705,425	1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	82%	50,741,931,430
1.1.1.02.07.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhabilitasi	2 bangunan	2,593,988,158	1.1.1.02.07.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhabilitasi	2 bangunan	2,470,135,283



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.1.02.07.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD berserta Peralatannya	Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta peralatannya yang disusun	2 dokumen	2,580,717,267		1.1.1.02.07.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD berserta Peralatannya	Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta peralatannya yang disusun	2 dokumen	352,599,267	
1.1.1.02.07.0010 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	50,000,000,000		1.1.1.02.07.0010 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	47,919,196,880	
1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			30,528,119,781		1.1.1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			28,886,889,045	
1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	60%	5,283,703,498		1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota	Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	60%	4,326,558,050	
1.1.1.03.06.0003 Pendukung Perencanaan Rinci Ruang Kota	Jumlah dokumen perencanaan rinci ruang kota yang disusun	1 dokumen	5,283,703,498		1.1.1.03.06.0003 Pendukung Perencanaan Rinci Ruang Kota	Jumlah dokumen perencanaan rinci ruang kota yang disusun	1 dokumen	4,326,558,050	
1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	56.93%	25,244,416,283		1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	56.93%	24,560,330,995	
	Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%				Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%		
1.1.1.03.07.0001 Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah arsip yang dipelihara	5 jenis	493,839,036		1.1.1.03.07.0001 Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah arsip yang dipelihara	5 jenis	469,979,842	
1.1.1.03.07.0002 Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	6000 bangunan	1,632,125,621		1.1.1.03.07.0002 Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	6000 bangunan	1,637,125,621	
1.1.1.03.07.0004 Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	240 lokasi	1,456,869,426		1.1.1.03.07.0004 Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	240 lokasi	1,461,869,426	
1.1.1.03.07.0005 Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah berkas pemanfaatan rencana ruang kota yang dilayani	7334 berkas	4,137,683,422		1.1.1.03.07.0005 Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah berkas pemanfaatan rencana ruang kota yang dilayani	7334 berkas	3,949,378,801	
1.1.1.03.07.0006 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 ijin	216,456,150		1.1.1.03.07.0006 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	600 ijin	373,157,389	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.03.07.0007 Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	9 dokumen	1,401,584,320	1.1.1.03.07.0007 Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	9 dokumen	1,272,648,746
1.1.1.03.07.0010 Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan	12677 persil	12,074,334,679	1.1.1.03.07.0010 Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan	12677 persil	12,099,334,679
1.1.1.03.07.0011 Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	5 dokumen	3,831,523,629	1.1.1.03.07.0011 Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	5 dokumen	3,296,836,491
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			461,192,423,559	1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			405,726,882,356
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	72%	461,192,423,559	1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	72%	405,726,882,356
	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%			Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	35%			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	35%	
1.1.1.04.01.0001 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	4 Lokasi	2,799,026,642	1.1.1.04.01.0001 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	5 Lokasi	2,310,180,740
1.1.1.04.01.0002 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun / direhabilitasi	12 bangunan	87,847,687,198	1.1.1.04.01.0002 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun / direhabilitasi	23 bangunan	87,903,312,390
1.1.1.04.01.0003 Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	1323 lokasi	329,059,899,029	1.1.1.04.01.0003 Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	811 lokasi	273,454,975,536
1.1.1.04.01.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun	178 dokumen	10,481,050,511	1.1.1.04.01.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun	178 dokumen	10,491,050,511

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.04.01.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 dokumen	1,115,686,126	1.1.1.04.01.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 dokumen	1,252,239,126
1.1.1.04.01.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun	10 dokumen	1,571,308,852	1.1.1.04.01.0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun	13 dokumen	2,027,358,852
1.1.1.04.01.0011 Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi perbaikan / pemeliharaan rusun dan paving	100 Lokasi	28,317,765,201	1.1.1.04.01.0011 Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi perbaikan / pemeliharaan rusun dan paving	200 Lokasi	28,287,765,201
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			2,681,731,891	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			3,723,107,506
1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	97%	2,681,731,891	1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	97%	3,723,107,506
1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhabilitasi	6 bangunan	2,444,629,303	1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhabilitasi	10 bangunan	3,476,004,918
1.1.1.05.03.0015 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun	4 dokumen	237,102,588	1.1.1.05.03.0015 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun	4 dokumen	247,102,588
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			2,455,832,092	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			2,171,267,617
1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	41 unit	2,455,832,092	1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	41 unit	2,171,267,617
1.1.2.05.08.0002 Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	11 unit	2,208,691,193	1.1.2.05.08.0002 Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	10 unit	2,059,618,348



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.08.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	4 dokumen	247,140,899	1.1.2.05.08.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	1 dokumen	111,649,269
1.1.2.12. Penanaman Modal			6,110,849,102	1.1.2.12. Penanaman Modal			6,088,133,662
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	6,110,849,102	1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	6,088,133,662
1.1.2.12.04.0012 Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	9467 berkas	5,742,868,128	1.1.2.12.04.0012 Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	6500 berkas	5,728,760,848
1.1.2.12.04.0025 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	50 berkas	367,980,974	1.1.2.12.04.0025 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	50 berkas	359,372,814
1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga			57,472,471,036	1.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga			45,190,100,432
1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	130 kelurahan	57,472,471,036	1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	130 kelurahan	45,190,100,432
1.1.2.13.02.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi	4 bangunan	56,547,750,159	1.1.2.13.02.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi	5 bangunan	44,255,379,555
1.1.2.13.02.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun	2 dokumen	924,720,877	1.1.2.13.02.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun	2 dokumen	934,720,877
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			20,349,025,702	1.2.2.06. Perdagangan			20,299,409,625
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan	Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	4.79%	20,349,025,702	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan	Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	4.79%	20,299,409,625
1.2.2.06.04.0003 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun/direhabilitasi	35 bangunan	19,946,417,883	1.2.2.06.04.0003 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun/direhabilitasi	45 bangunan	19,886,801,806



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04.0004 Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun	7 dokumen	402,607,819	1.2.2.06.04.0004 Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun	7 dokumen	412,607,819
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	325,305,139		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	275,305,139
2.1.2.01.02.0044 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	325,305,139	2.1.2.01.02.0044 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	275,305,139
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	6,382,975,420		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	6,228,448,770
2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6,382,975,420	2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6,228,448,770
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan				2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan			
	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	87.18%	153,621,928,608		Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	87.18%	169,830,426,241
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0033 Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah daerah yang dibangun/direhabilitasi	78 bangunan	72,580,379,933	2.2.2.02.02.0033 Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah daerah yang dibangun/direhabilitasi	127 bangunan	93,704,578,739
2.2.2.02.02.0034 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhabilitasi	1 bangunan	24,042,380,703	2.2.2.02.02.0034 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhabilitasi	1 bangunan	16,972,809,476
2.2.2.02.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,066,794,835	2.2.2.02.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,270,664,889
2.2.2.02.02.0036 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun	62 dokumen	4,418,907,309	2.2.2.02.02.0036 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun	50 dokumen	4,428,907,309
2.2.2.02.02.0085 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara	200 bangunan	51,513,465,828	2.2.2.02.02.0085 Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara	208 bangunan	53,453,465,828
Dinas Sosial			276,179,516,266	Dinas Sosial			265,206,604,769
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			36,484,864,975	1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			36,616,717,475
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	60%	36,484,864,975	1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	60%	36,616,717,475
1.1.1.04.01.0010 Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1000 unit	36,484,864,975	1.1.1.04.01.0010 Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1000 unit	36,616,717,475
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			15,184,391,849	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			14,827,491,849



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	15,184,391,849	1.1.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	14,827,491,849
1.1.1.05.02.0006 Fasilitas Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	15,184,391,849	1.1.1.05.02.0006 Fasilitas Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	14,827,491,849
1.1.1.06. Sosial			210,471,021,770	1.1.1.06. Sosial			200,787,127,785
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	207,748,591,097	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	198,272,729,892
1.1.1.06.01.0002 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi anak	Jumlah anak yang mendapat bantuan permakanaan	6000 orang	28,886,423,732	1.1.1.06.01.0002 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi anak	Jumlah anak yang mendapat bantuan permakanaan	5750 orang	28,200,549,932
1.1.1.06.01.0003 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan permakanaan	20000 orang	93,668,971,687	1.1.1.06.01.0003 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan permakanaan	20000 orang	91,096,895,887
1.1.1.06.01.0004 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang mendapat bantuan permakanaan	9414 orang	44,833,890,735	1.1.1.06.01.0004 Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang mendapat bantuan permakanaan	7500 orang	40,900,286,535
1.1.1.06.01.0005 Pembinaan dan pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	1235 orang	1,485,901,739	1.1.1.06.01.0005 Pembinaan dan pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	1235 orang	1,567,901,739
1.1.1.06.01.0006 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	1,695,453,359	1.1.1.06.01.0006 Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	1,830,163,078
1.1.1.06.01.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	2,351,034,114	1.1.1.06.01.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	40 orang	2,372,118,748



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	2,655,989,886	1.1.1.06.01.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	65 orang	2,595,076,718
1.1.1.06.01.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	95 orang	1,624,632,263	1.1.1.06.01.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	95 orang	1,423,663,103
1.1.1.06.01.0010 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	6,118,102,046	1.1.1.06.01.0010 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	5,948,061,626
1.1.1.06.01.0011 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1150 orang	19,824,541,409	1.1.1.06.01.0011 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1035 orang	17,861,785,428
1.1.1.06.01.0074 Penyelenggaraan layanan ambulance gratis	Jumlah kegiatan layanan ambulance gratis yang diselenggarakan	4416 kali	2,839,731,369	1.1.1.06.01.0074 Penyelenggaraan layanan ambulance gratis	Jumlah kegiatan layanan ambulance gratis yang diselenggarakan	4416 kali	2,746,108,340
1.1.1.06.01.0077 Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan	17 lembaga	215,759,224	1.1.1.06.01.0077 Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan	17 lembaga	215,759,224
1.1.1.06.01.0078 Fasilitasi pemakaman	Jumlah orang yang mendapat fasilitasi pemakaman	960 orang	941,097,101	1.1.1.06.01.0078 Fasilitasi pemakaman	Jumlah orang yang mendapat fasilitasi pemakaman	543 orang	941,097,101
1.1.1.06.01.0079 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 kali	607,062,433	1.1.1.06.01.0079 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 kali	573,262,433



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	1.1.1.06.02 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	55%	2,722,430,673		1.1.1.06.02 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	55%	2,514,397,893
	1.1.1.06.02.0001 Koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan	24 kali	1,064,061,210		1.1.1.06.02.0001 Koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan	24 kali	919,661,210
	1.1.1.06.02.0002 Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	725,854,488		1.1.1.06.02.0002 Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	702,276,708
	1.1.1.06.02.0003 Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan	1038 orang	932,514,975		1.1.1.06.02.0003 Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan	1038 orang	892,459,975
1.1.2. Non Pelayanan Dasar					1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.16. Kebudayaan					1.1.2.16. Kebudayaan				
	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	8,147,941,916		1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	7,764,898,596
	1.1.2.16.03.0007 Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	62 kali	6,320,421,511		1.1.2.16.03.0007 Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	62 kali	5,937,378,191
	1.1.2.16.03.0039 Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	7 lokasi	1,827,520,405		1.1.2.16.03.0039 Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	7 lokasi	1,827,520,405
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.2. Unsur Manajemen					2.2. Unsur Manajemen				
2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			5,891,295,756		2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			5,210,369,064
	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	5,229,752,976		2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	4,497,818,138
	2.2.2.02.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5,229,752,976		2.2.2.02.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,497,818,138



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	661,542,780	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	712,550,926
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0044 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	661,542,780	2.2.2.02.02.0044 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	712,550,926
Dinas Tenaga Kerja			23,929,232,479	Dinas Tenaga Kerja			23,644,418,880
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.01. Tenaga Kerja			20,945,437,916	1.1.2.01. Tenaga Kerja			20,633,069,966
1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	3,060,469,808	1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	2,993,469,808
1.1.2.01.01.0002 Bimtek Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja	1050 orang	347,801,279	1.1.2.01.01.0002 Bimtek Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja	1050 orang	327,801,279
1.1.2.01.01.0003 Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri	250 orang	106,199,583	1.1.2.01.01.0003 Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri	250 orang	101,199,583
1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	150 orang	546,953,709	1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	150 orang	526,953,709
1.1.2.01.01.0005 Bimtek Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek	60 lembaga	145,006,490	1.1.2.01.01.0005 Bimtek Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek	60 lembaga	143,006,490
1.1.2.01.01.0006 Bimtek Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang mengikuti bimtek	120 lembaga	103,387,840	1.1.2.01.01.0006 Bimtek Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang mengikuti bimtek	120 lembaga	103,387,840
1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan	7 kali	1,177,718,584	1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan	7 kali	1,177,718,584



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.01.01.0009 Fasilitas Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja	1000 orang	492,330,480	1.1.2.01.01.0009 Fasilitas Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja	1000 orang	482,330,480
1.1.2.01.01.0010 Bimtek Persiapan Usaha Mandiri Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha	100 orang	141,071,843	1.1.2.01.01.0010 Bimtek Persiapan Usaha Mandiri Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha	100 orang	131,071,843
1.1.2.01.02 Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	66%	14,967,524,865	1.1.2.01.02 Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	66%	14,805,156,915
	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	81%			Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	81%	
1.1.2.01.02.0001 Pembinaan Peningkatan Produktivitas Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas	200 lembaga	130,084,583	1.1.2.01.02.0001 Pembinaan Peningkatan Produktivitas Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas	200 lembaga	125,084,583
1.1.2.01.02.0002 Fasilitas Magang Bagi Pencari Kerja Penyandang Cacat	Jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang	20 orang	132,513,443	1.1.2.01.02.0002 Fasilitas Magang Bagi Pencari Kerja Penyandang Cacat	Jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang	20 orang	112,513,443
1.1.2.01.02.0003 Fasilitas Magang Bagi Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi yang difasilitasi magang	100 orang	257,755,733	1.1.2.01.02.0003 Fasilitas Magang Bagi Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi yang difasilitasi magang	100 orang	232,755,733
1.1.2.01.02.0004 Fasilitas Sertifikasi Profesi Bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi	2290 orang	6,342,864,867	1.1.2.01.02.0004 Fasilitas Sertifikasi Profesi Bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi	2290 orang	6,337,864,867
1.1.2.01.02.0006 Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun	1 dokumen	131,802,413	1.1.2.01.02.0006 Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun	1 dokumen	111,802,413
1.1.2.01.02.0007 Bimtek Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mengikuti bimtek	50 lembaga	98,311,913	1.1.2.01.02.0007 Bimtek Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mengikuti bimtek	50 lembaga	103,311,913
1.1.2.01.02.0008 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja	1136 orang	7,874,191,913	1.1.2.01.02.0008 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja	1136 orang	7,781,823,963



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.01.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7.26%	2,575,739,559	1.1.2.01.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7.26%	2,484,739,559
1.1.2.01.03.0001 Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	357,263,765	1.1.2.01.03.0001 Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	312,263,765
1.1.2.01.03.0002 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	250 lembaga	394,850,241	1.1.2.01.03.0002 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	250 lembaga	374,850,241
1.1.2.01.03.0003 Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah pelaksanaan koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	12 kali	613,891,937	1.1.2.01.03.0003 Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah pelaksanaan koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	12 kali	588,891,937
1.1.2.01.03.0004 Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1,014,824,293	1.1.2.01.03.0004 Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1,013,824,293
1.1.2.01.03.0005 Bimtek Hubungan Industrial Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh yang mengikuti bimtek hubungan industrial	300 orang	194,909,323	1.1.2.01.03.0005 Bimtek Hubungan Industrial Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh yang mengikuti bimtek hubungan industrial	300 orang	194,909,323
1.1.2.01.04 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma k3	61%	341,703,684	1.1.2.01.04 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma k3	61%	349,703,684
1.1.2.01.04.0001 Bimtek Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma ketenagakerjaan	500 lembaga	107,240,597	1.1.2.01.04.0001 Bimtek Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma ketenagakerjaan	500 lembaga	105,240,597
1.1.2.01.04.0002 Bimtek Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	500 lembaga	234,463,087	1.1.2.01.04.0002 Bimtek Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	500 lembaga	244,463,087
1.1.2.12. Penanaman Modal			123,339,892	1.1.2.12. Penanaman Modal			128,339,892
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	123,339,892	1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	76%	128,339,892



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses	1000 berkas	123,339,892	1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses	1000 berkas	128,339,892
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,860,454,671	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,883,009,022
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,427,435,521	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,344,989,872
2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,427,435,521	2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,344,989,872
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	433,019,150	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	538,019,150
2.2.2.02.02.0045 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	433,019,150	2.2.2.02.02.0045 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	538,019,150
Inspektorat			6,094,498,049	Inspektorat			6,105,802,922
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			313,869,700	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			313,869,700
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	313,869,700	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	313,869,700
2.1.2.01.02.0054 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	313,869,700	2.1.2.01.02.0054 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	313,869,700
2.1.2.04. Pengawasan			3,910,511,328	2.1.2.04. Pengawasan			3,932,025,628



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	100%	3,910,511,328		2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	100%	3,932,025,628	
	Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	100%				Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	100%		
	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%		
	Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I	100%				Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I	100%		
	Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II	100%				Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II	100%		
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%		
2.1.2.04.01.0002 Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	2 dokumen	201,447,880		2.1.2.04.01.0002 Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	2 dokumen	152,322,746	
2.1.2.04.01.0003 Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	12 dokumen	316,593,800		2.1.2.04.01.0003 Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	12 dokumen	281,723,467	
2.1.2.04.01.0008 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	503,663,273		2.1.2.04.01.0008 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	523,663,273	
2.1.2.04.01.0009 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	387,615,803		2.1.2.04.01.0009 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	387,615,803	
2.1.2.04.01.0010 Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	471,281,993		2.1.2.04.01.0010 Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	471,281,993	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.04.01.0011 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	308,171,490	2.1.2.04.01.0011 Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	265,951,110
2.1.2.04.01.0013 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	384,603,023	2.1.2.04.01.0013 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	384,603,023
2.1.2.04.01.0014 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	384,087,453	2.1.2.04.01.0014 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	404,087,453
2.1.2.04.01.0015 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	363,849,673	2.1.2.04.01.0015 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	363,849,673
2.1.2.04.01.0016 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	237,305,480	2.1.2.04.01.0016 Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	227,305,480
2.1.2.04.01.0017 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	50 kali	163,337,050	2.1.2.04.01.0017 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	50 kali	163,337,050
2.1.2.04.01.0018 Reviu Dokumen Perencanaan Tingkat Kota	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang direviu	1 dokumen	188,554,410	2.1.2.04.01.0018 Reviu Dokumen Perencanaan Tingkat Kota	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang direviu	1 dokumen	155,154,410
				2.1.2.04.01.0019 Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan	151,130,147
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,870,117,021	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,859,907,594
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,377,533,094	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,377,533,094



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,377,533,094	2.2.2.02.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,377,533,094
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	492,583,927	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	482,374,500
2.2.2.02.02.0046 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	492,583,927	2.2.2.02.02.0046 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	482,374,500
Kec. Asemrowo			3,813,439,941	Kec. Asemrowo			5,049,778,329
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,186,338,488
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,186,338,488
				1.1.1.04.01.0053 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	404,654,021
				1.1.1.04.01.0061 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	410,666,890
				1.1.1.04.01.0096 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	371,017,577
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			400,072,667	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			400,072,667
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	400,072,667	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	400,072,667



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01.0001 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	288 kali	400,072,667	1.1.1.05.01.0001 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	288 kali	400,072,667
1.1.1.06. Sosial			148,330,387	1.1.1.06. Sosial			168,330,387
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	148,330,387	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	168,330,387
1.1.1.06.01.0012 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	148,330,387	1.1.1.06.01.0012 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	168,330,387
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			256,950,917	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			271,950,917
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	256,950,917	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	271,950,917
1.1.2.02.02.0005 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	256,950,917	1.1.2.02.02.0005 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	271,950,917
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			57,598,467	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			57,598,467
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	57,598,467	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	57,598,467
1.1.2.05.02.0015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kali	57,598,467	1.1.2.05.02.0015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kali	57,598,467
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			222,940,553	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			247,940,553
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	222,940,553	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	247,940,553
1.1.2.06.01.0010 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14412 berkas	222,940,553	1.1.2.06.01.0010 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14412 berkas	247,940,553
1.1.2.16. Kebudayaan			74,527,073	1.1.2.16. Kebudayaan			83,070,293



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	74,527,073	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	83,070,293
1.1.2.16.03.0008 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	74,527,073	1.1.2.16.03.0008 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	83,070,293
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan				1.2.2.06. Perdagangan			
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	184,677,227	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	194,677,227
1.2.2.06.04.0011 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	184,677,227	1.2.2.06.04.0011 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	194,677,227
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	274,667,426	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	264,667,426
2.1.2.01.02.0055 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	153,881,133	2.1.2.01.02.0055 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	148,881,133
2.1.2.01.02.0125 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	120,786,293	2.1.2.01.02.0125 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	115,786,293
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	964,843,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	984,843,333



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0161 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	139 Lembaga	964,843,333	2.1.2.03.03.0161 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	139 Lembaga	984,843,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,228,831,891	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,190,288,571
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	864,642,491	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	850,626,821
2.2.2.02.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	864,642,491	2.2.2.02.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	850,626,821
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	364,189,400	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	339,661,750
2.2.2.02.02.0047 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	364,189,400	2.2.2.02.02.0047 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	339,661,750
Kec. Benowo			4,849,230,772	Kec. Benowo			6,294,421,994
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,445,191,222
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,445,191,222
				1.1.1.04.01.0047 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Romokalisari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	358,281,994
				1.1.1.04.01.0052 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kandangan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	386,756,415



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0062 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sememi	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	335,777,398
				1.1.1.04.01.0063 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	364,375,415
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			524,528,640	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			539,528,640
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	524,528,640	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	539,528,640
1.1.1.05.01.0002 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	524,528,640	1.1.1.05.01.0002 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	539,528,640
1.1.1.06. Sosial			142,735,100	1.1.1.06. Sosial			187,735,100
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			142,735,100	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			187,735,100
1.1.1.06.01.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	142,735,100	1.1.1.06.01.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	187,735,100
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			244,255,980	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			289,255,980
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	244,255,980	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	289,255,980
1.1.2.02.02.0006 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 Kali	244,255,980	1.1.2.02.02.0006 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 Kali	289,255,980
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			60,544,667	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			60,544,667
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	60,544,667	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	60,544,667



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.05.02.0016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	60,544,667		1.1.2.05.02.0016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	60,544,667	
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				241,187,649	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				291,187,649
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	241,187,649		1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	291,187,649	
1.1.2.06.01.0011 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22340 berkas	241,187,649		1.1.2.06.01.0011 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22340 berkas	291,187,649	
1.1.2.16. Kebudayaan				76,650,947	1.1.2.16. Kebudayaan				76,650,947
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	76,650,947		1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	76,650,947	
1.1.2.16.03.0009 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	76,650,947		1.1.2.16.03.0009 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	76,650,947	
1.2. Urusan Pilihan					1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar					1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.06. Perdagangan				170,031,760	1.2.2.06. Perdagangan				215,031,760
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	170,031,760		1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	215,031,760	
1.2.2.06.04.0012 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	170,031,760		1.2.2.06.04.0012 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	215,031,760	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				298,881,089	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				358,881,089
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	298,881,089		2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	358,881,089	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0057 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	170,325,427	2.1.2.01.02.0057 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	200,325,427
2.1.2.01.02.0129 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	128,555,662	2.1.2.01.02.0129 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	158,555,662
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,216,196,667	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,256,196,667
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,216,196,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,256,196,667
2.1.2.03.03.0162 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	183 Lembaga	1,216,196,667	2.1.2.03.03.0162 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	183 Lembaga	1,256,196,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,874,218,273	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,574,218,273
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,346,188,138	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,196,188,138
2.2.2.02.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,346,188,138	2.2.2.02.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,196,188,138
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	528,030,135	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	378,030,135
2.2.2.02.02.0048 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	528,030,135	2.2.2.02.02.0048 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	378,030,135
Kec. Bubutan			6,484,124,716	Kec. Bubutan			8,455,348,790
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,921,224,074
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,921,224,074
				1.1.1.04.01.0058 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Bubutan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	340,452,638
				1.1.1.04.01.0068 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Jepara	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	379,633,700
				1.1.1.04.01.0078 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	384,271,200
				1.1.1.04.01.0102 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gundih	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	414,643,116
				1.1.1.04.01.0106 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	402,223,420
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			543,124,667	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			579,068,779
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	543,124,667	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	579,068,779
1.1.1.05.01.0003 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	543,124,667	1.1.1.05.01.0003 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	579,068,779
1.1.1.06. Sosial			219,936,960	1.1.1.06. Sosial			229,936,960
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	219,936,960	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	229,936,960



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0016 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	219,936,960	1.1.1.06.01.0016 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	229,936,960
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
364,868,017				374,868,017			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	364,868,017	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	374,868,017
1.1.2.02.02.0007 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	364,868,017	1.1.2.02.02.0007 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	374,868,017
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
71,386,149				71,386,149			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	71,386,149	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	71,386,149
1.1.2.05.02.0017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	71,386,149	1.1.2.05.02.0017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	71,386,149
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
438,801,003				438,801,003			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	438,801,003	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	438,801,003
1.1.2.06.01.0012 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15057 berkas	438,801,003	1.1.2.06.01.0012 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15057 berkas	438,801,003
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
87,010,371				87,010,371			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	87,010,371	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	87,010,371
1.1.2.16.03.0010 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	7 Kali	87,010,371	1.1.2.16.03.0010 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	7 Kali	87,010,371
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			165,724,063	1.2.2.06. Perdagangan			175,724,063
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	165,724,063	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	175,724,063
1.2.2.06.04.0013 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	165,724,063	1.2.2.06.04.0013 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	175,724,063
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	362,375,849	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	367,375,849
2.1.2.01.02.0059 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	199,291,827	2.1.2.01.02.0059 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	199,291,827
2.1.2.01.02.0130 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	163,084,022	2.1.2.01.02.0130 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	168,084,022
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,570,283,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,567,783,333
2.1.2.03.03.0163 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	414 Lembaga	2,570,283,333	2.1.2.03.03.0163 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	414 Lembaga	2,567,783,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,301,698,226	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,272,130,226



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,301,698,226	2.2.2.02.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,272,130,226
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	358,916,078	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	370,039,966
2.2.2.02.02.0049 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	358,916,078	2.2.2.02.02.0049 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	370,039,966
Kec. Bulak			4,915,504,949	Kec. Bulak			6,528,151,388
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,509,902,867
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,509,902,867
				1.1.1.04.01.0013 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kenjeran	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	398,766,846
				1.1.1.04.01.0100 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Bulak	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	386,312,650
				1.1.1.04.01.0101 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	370,919,361
				1.1.1.04.01.0162 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	353,904,010
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			616,101,674	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			676,101,674



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	616,101,674	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	676,101,674
1.1.1.05.01.0004 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	616,101,674	1.1.1.05.01.0004 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	676,101,674
1.1.1.06. Sosial			184,174,313	1.1.1.06. Sosial			184,174,313
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	184,174,313	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	184,174,313
1.1.1.06.01.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	184,174,313	1.1.1.06.01.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	184,174,313
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			325,780,238	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			325,780,238
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	325,780,238	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	325,780,238
1.1.2.02.02.0008 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	32 Kali	325,780,238	1.1.2.02.02.0008 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	32 Kali	325,780,238
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			95,499,756	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			90,499,756
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	95,499,756	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	90,499,756
1.1.2.05.02.0018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	95,499,756	1.1.2.05.02.0018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	90,499,756
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			278,711,895	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			258,711,895
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	278,711,895	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	258,711,895

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0013 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11186 berkas	278,711,895	1.1.2.06.01.0013 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11186 berkas	258,711,895
1.1.2.16. Kebudayaan			95,717,573	1.1.2.16. Kebudayaan			91,218,448
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	95,717,573	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	91,218,448
1.1.2.16.03.0011 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	95,717,573	1.1.2.16.03.0011 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	91,218,448
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			214,881,373	1.2.2.06. Perdagangan			210,627,893
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	214,881,373	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	210,627,893
1.2.2.06.04.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	214,881,373	1.2.2.06.04.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	210,627,893
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			348,827,479	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			311,187,479
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	348,827,479	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	311,187,479
2.1.2.01.02.0061 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	200,066,424	2.1.2.01.02.0061 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	175,066,424
2.1.2.01.02.0131 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	148,761,055	2.1.2.01.02.0131 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	136,121,055

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,122,330,000	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,062,330,000
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,122,330,000	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,062,330,000
2.1.2.03.03.0164 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	157 Lembaga	1,122,330,000	2.1.2.03.03.0164 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	157 Lembaga	1,062,330,000
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,633,480,648	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,807,616,825
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,206,477,740	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,350,613,917
2.2.2.02.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,206,477,740	2.2.2.02.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,350,613,917
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	427,002,908	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	457,002,908
2.2.2.02.02.0050 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	427,002,908	2.2.2.02.02.0050 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	457,002,908
Kec. Dukuh Pakis			4,811,992,667	Kec. Dukuh Pakis			6,236,914,959
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,424,922,292
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,424,922,292
				1.1.1.04.01.0081 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	400,883,725



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0093 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	380,703,487
				1.1.1.04.01.0094 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	269,084,331
				1.1.1.04.01.0129 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	374,250,749
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			418,460,507	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			545,063,985
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	418,460,507	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	545,063,985
1.1.1.05.01.0005 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	418,460,507	1.1.1.05.01.0005 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	545,063,985
1.1.1.06. Sosial			172,652,239	1.1.1.06. Sosial			87,652,239
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	172,652,239	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	87,652,239
1.1.1.06.01.0020 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	172,652,239	1.1.1.06.01.0020 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	87,652,239
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			274,259,360	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			274,259,360
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	274,259,360	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	274,259,360
1.1.2.02.02.0009 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	274,259,360	1.1.2.02.02.0009 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	274,259,360
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			64,583,757	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			54,583,757



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	64,583,757	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	54,583,757
1.1.2.05.02.0019 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	64,583,757	1.1.2.05.02.0019 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	54,583,757
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			272,820,700	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			162,820,700
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	272,820,700	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	162,820,700
1.1.2.06.01.0014 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12616 berkas	272,820,700	1.1.2.06.01.0014 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12616 berkas	162,820,700
1.1.2.16. Kebudayaan			86,446,760	1.1.2.16. Kebudayaan			34,843,282
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	86,446,760	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	34,843,282
1.1.2.16.03.0012 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	86,446,760	1.1.2.16.03.0012 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	34,843,282
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			200,618,935	1.2.2.06. Perdagangan			170,618,935
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	200,618,935	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	170,618,935
1.2.2.06.04.0015 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	200,618,935	1.2.2.06.04.0015 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	170,618,935
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			309,143,085	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			219,143,085



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	309,143,085	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	219,143,085
2.1.2.01.02.0063 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	167,876,808	2.1.2.01.02.0063 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	92,876,808
2.1.2.01.02.0132 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	141,266,277	2.1.2.01.02.0132 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	126,266,277
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,293,730,000	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,583,730,000
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,293,730,000	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,583,730,000
2.1.2.03.03.0165 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	195 Lembaga	1,293,730,000	2.1.2.03.03.0165 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	195 Lembaga	1,583,730,000
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,719,277,324	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,679,277,324
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,245,155,759	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,470,155,759
2.2.2.02.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,245,155,759	2.2.2.02.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,470,155,759
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	474,121,565	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	209,121,565
2.2.2.02.02.0051 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	474,121,565	2.2.2.02.02.0051 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	209,121,565



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kec. Gayungan			5,064,204,447	Kec. Gayungan			6,544,168,037
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,479,963,590
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,479,963,590
				1.1.1.04.01.0104 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gayungan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	369,761,597
				1.1.1.04.01.0105 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Ketintang	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	7 Lokasi	361,536,600
				1.1.1.04.01.0141 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Menanggal	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	373,467,237
				1.1.1.04.01.0149 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	375,198,156
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			473,958,173	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			473,958,173
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	473,958,173	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	473,958,173
1.1.1.05.01.0006 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	300 kali	473,958,173	1.1.1.05.01.0006 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	300 kali	473,958,173
1.1.1.06. Sosial			157,778,757	1.1.1.06. Sosial			157,778,757
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	157,778,757	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	157,778,757



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	157,778,757	1.1.1.06.01.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	157,778,757
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
316,586,080				316,586,080			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	316,586,080	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	316,586,080
1.1.2.02.02.0010 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21 Kali	316,586,080	1.1.2.02.02.0010 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21 Kali	316,586,080
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
78,691,646				78,691,646			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	78,691,646	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	78,691,646
1.1.2.05.02.0020 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	78,691,646	1.1.2.05.02.0020 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	78,691,646
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
289,770,947				311,137,147			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	289,770,947	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	311,137,147
1.1.2.06.01.0015 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	5326 berkas	289,770,947	1.1.2.06.01.0015 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	5326 berkas	311,137,147
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
62,874,547				71,508,347			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	62,874,547	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	71,508,347
1.1.2.16.03.0013 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	62,874,547	1.1.2.16.03.0013 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	71,508,347
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			190,083,373	1.2.2.06. Perdagangan			190,083,373
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	190,083,373	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	190,083,373
1.2.2.06.04.0016 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	190,083,373	1.2.2.06.04.0016 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	190,083,373
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	338,585,163	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	338,585,163
2.1.2.01.02.0065 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	180,863,333	2.1.2.01.02.0065 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	180,863,333
2.1.2.01.02.0133 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	157,721,830	2.1.2.01.02.0133 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	157,721,830
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,334,796,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,334,796,667
2.1.2.03.03.0166 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	197 Lembaga	1,334,796,667	2.1.2.03.03.0166 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	197 Lembaga	1,334,796,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,388,923,416	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,373,923,416



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,388,923,416	2.2.2.02.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,373,923,416
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	432,155,678	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	417,155,678
2.2.2.02.02.0052 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	432,155,678	2.2.2.02.02.0052 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	417,155,678
Kec. Genteng			6,252,408,101	Kec. Genteng			8,110,294,129
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,857,886,028
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,857,886,028
				1.1.1.04.01.0085 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Peneleh	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	343,884,523
				1.1.1.04.01.0107 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	362,583,731
				1.1.1.04.01.0108 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Genteng	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	376,307,341
				1.1.1.04.01.0143 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Ketabang	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	402,686,867



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0150 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kapasari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	372,423,566
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			593,935,173	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			613,935,173
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	593,935,173	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	613,935,173
1.1.1.05.01.0007 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	348 kali	593,935,173	1.1.1.05.01.0007 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	348 kali	613,935,173
1.1.1.06. Sosial			159,467,273	1.1.1.06. Sosial			149,467,273
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	159,467,273	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	149,467,273
1.1.1.06.01.0024 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	159,467,273	1.1.1.06.01.0024 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	149,467,273
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			295,440,383	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			285,440,383
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	295,440,383	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	285,440,383
1.1.2.02.02.0011 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	295,440,383	1.1.2.02.02.0011 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	285,440,383
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			68,524,467	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			68,524,467
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	68,524,467	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	68,524,467
1.1.2.05.02.0021 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	68,524,467	1.1.2.05.02.0021 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	68,524,467
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			359,359,833	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			369,359,833



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	359,359,833		1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	369,359,833
	1.1.2.06.01.0016 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14463 berkas	359,359,833		1.1.2.06.01.0016 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14463 berkas	369,359,833
	1.1.2.16. Kebudayaan			59,530,847		1.1.2.16. Kebudayaan			64,530,847
	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	59,530,847		1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	64,530,847
	1.1.2.16.03.0014 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	59,530,847		1.1.2.16.03.0014 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	64,530,847
	1.2. Urusan Pilihan					1.2. Urusan Pilihan			
	1.2.2. Non Pelayanan Dasar					1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
	1.2.2.06. Perdagangan			146,743,773		1.2.2.06. Perdagangan			146,743,773
	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	146,743,773		1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	146,743,773
	1.2.2.06.04.0017 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	146,743,773		1.2.2.06.04.0017 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	146,743,773
	2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
	2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen			
	2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			409,998,376		2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			419,998,376
	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	409,998,376		2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	419,998,376
	2.1.2.01.02.0067 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	238,634,203		2.1.2.01.02.0067 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	243,634,203



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0134 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	171,364,173	2.1.2.01.02.0134 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	176,364,173
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,242,383,333	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,247,383,333
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,242,383,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,247,383,333
2.1.2.03.03.0167 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	364 Lembaga	2,242,383,333	2.1.2.03.03.0167 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	364 Lembaga	2,247,383,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,917,024,643	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,887,024,643
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,443,402,126	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,423,402,126
2.2.2.02.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,443,402,126	2.2.2.02.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,423,402,126
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	473,622,517	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	463,622,517
2.2.2.02.02.0053 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	473,622,517	2.2.2.02.02.0053 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	463,622,517
Kec. Gubeng			7,519,114,171	Kec. Gubeng			9,876,216,348
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,357,102,177
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,357,102,177



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0014 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Airlangga	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	373,224,274
				1.1.1.04.01.0015 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Baratajaya	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	423,174,866
				1.1.1.04.01.0016 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kertajaya	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	395,421,138
				1.1.1.04.01.0109 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Mojo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	402,365,976
				1.1.1.04.01.0138 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	381,363,941
				1.1.1.04.01.0151 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gubeng	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	381,551,982
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			421,071,933	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			421,071,933
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	421,071,933	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	421,071,933
1.1.1.05.01.0008 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	421,071,933	1.1.1.05.01.0008 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	421,071,933
1.1.1.06. Sosial			74,792,137	1.1.1.06. Sosial			74,792,137
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	74,792,137	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	74,792,137



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	74,792,137	1.1.1.06.01.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	74,792,137
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
383,319,645				383,319,645			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	383,319,645	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	383,319,645
1.1.2.02.02.0012 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	383,319,645	1.1.2.02.02.0012 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	383,319,645
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
191,452,745				196,452,745			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	191,452,745	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	196,452,745
1.1.2.05.02.0022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	191,452,745	1.1.2.05.02.0022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	196,452,745
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
575,836,743				575,836,743			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	575,836,743	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	575,836,743
1.1.2.06.01.0017 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	25178 berkas	575,836,743	1.1.2.06.01.0017 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	25178 berkas	575,836,743
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
98,856,153				98,856,153			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	98,856,153	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	98,856,153
1.1.2.16.03.0015 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	98,856,153	1.1.2.16.03.0015 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	98,856,153
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			237,613,794	1.2.2.06. Perdagangan			237,613,794
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	237,613,794	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	237,613,794
1.2.2.06.04.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	237,613,794	1.2.2.06.04.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	237,613,794
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	450,176,161	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	430,176,161
2.1.2.01.02.0069 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	260,305,172	2.1.2.01.02.0069 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	250,305,172
2.1.2.01.02.0135 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	189,870,989	2.1.2.01.02.0135 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	179,870,989
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,944,903,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,949,903,333
2.1.2.03.03.0168 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	480 Lembaga	2,944,903,333	2.1.2.03.03.0168 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	480 Lembaga	2,949,903,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,662,109,590	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,672,109,590



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,662,109,590	2.2.2.02.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,672,109,590
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	478,981,937	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	478,981,937
2.2.2.02.02.0054 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	478,981,937	2.2.2.02.02.0054 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	478,981,937
Kec. Gunung Anyar			4,466,038,890	Kec. Gunung Anyar			6,191,941,190
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,577,617,028
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,577,617,028
				1.1.1.04.01.0110 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	384,323,621
				1.1.1.04.01.0153 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	397,536,419
				1.1.1.04.01.0154 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	401,346,795
				1.1.1.04.01.0163 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	394,410,193
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			383,521,960	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			388,521,960



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	383,521,960	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	388,521,960
1.1.1.05.01.0009 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	420 kali	383,521,960	1.1.1.05.01.0009 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	420 kali	388,521,960
1.1.1.06. Sosial			147,890,000	1.1.1.06. Sosial			142,890,000
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	147,890,000	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	142,890,000
1.1.1.06.01.0028 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	147,890,000	1.1.1.06.01.0028 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	142,890,000
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			241,593,386	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			236,593,386
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	241,593,386	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	236,593,386
1.1.2.02.02.0013 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	13 Kali	241,593,386	1.1.2.02.02.0013 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	13 Kali	236,593,386
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			60,105,720	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			60,258,180
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	60,105,720	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	60,258,180
1.1.2.05.02.0023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	60,105,720	1.1.2.05.02.0023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	60,258,180
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			289,303,007	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			264,303,007
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	289,303,007	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	264,303,007

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0018 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11226 berkas	289,303,007	1.1.2.06.01.0018 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11226 berkas	264,303,007
1.1.2.16. Kebudayaan			74,586,287	1.1.2.16. Kebudayaan			69,586,287
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	74,586,287	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	69,586,287
1.1.2.16.03.0016 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	74,586,287	1.1.2.16.03.0016 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	69,586,287
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			169,710,630	1.2.2.06. Perdagangan			174,710,630
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	169,710,630	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	174,710,630
1.2.2.06.04.0019 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	169,710,630	1.2.2.06.04.0019 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	174,710,630
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			293,338,392	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			348,185,932
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	293,338,392	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	348,185,932
2.1.2.01.02.0071 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	168,563,811	2.1.2.01.02.0071 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	188,563,811
2.1.2.01.02.0136 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	124,774,581	2.1.2.01.02.0136 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	159,622,121



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,436,896,667	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,411,896,667
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,436,896,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,411,896,667
2.1.2.03.03.0169 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	215 Lembaga	1,436,896,667	2.1.2.03.03.0169 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	215 Lembaga	1,411,896,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,369,092,841	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,517,378,113
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	983,332,108	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,131,617,380
2.2.2.02.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	983,332,108	2.2.2.02.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,131,617,380
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	385,760,733	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	385,760,733
2.2.2.02.02.0055 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	385,760,733	2.2.2.02.02.0055 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	385,760,733
Kec. Jambangan			4,624,519,389	Kec. Jambangan			6,137,350,217
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,512,830,828
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,512,830,828
				1.1.1.04.01.0017 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Jambangan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	359,301,887



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0018 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pagesangan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	405,919,138
				1.1.1.04.01.0026 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Karah	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	374,489,803
				1.1.1.04.01.0152 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kebonsari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	373,120,000
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			540,985,157	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			595,985,157
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	540,985,157	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	595,985,157
1.1.1.05.01.0010 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	540,985,157	1.1.1.05.01.0010 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	595,985,157
1.1.1.06. Sosial			147,276,549	1.1.1.06. Sosial			122,276,549
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	147,276,549	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	122,276,549
1.1.1.06.01.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	147,276,549	1.1.1.06.01.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	122,276,549
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			275,248,893	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			250,248,893
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	275,248,893	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	250,248,893
1.1.2.02.02.0014 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	24 Kali	275,248,893	1.1.2.02.02.0014 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	24 Kali	250,248,893
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			74,389,000	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			74,389,000



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	74,389,000	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	74,389,000
1.1.2.05.02.0024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	74,389,000	1.1.2.05.02.0024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	74,389,000
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			250,541,333	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			250,541,333
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	250,541,333	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	250,541,333
1.1.2.06.01.0019 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12785 berkas	250,541,333	1.1.2.06.01.0019 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12785 berkas	250,541,333
1.1.2.16. Kebudayaan			70,768,738	1.1.2.16. Kebudayaan			85,768,738
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	70,768,738	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	85,768,738
1.1.2.16.03.0017 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	70,768,738	1.1.2.16.03.0017 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	85,768,738
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			110,888,410	1.2.2.06. Perdagangan			115,888,410
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	110,888,410	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	115,888,410
1.2.2.06.04.0020 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	110,888,410	1.2.2.06.04.0020 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	115,888,410
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			266,599,888	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			261,599,888



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	266,599,888	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	261,599,888
2.1.2.01.02.0073 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	157,436,395	2.1.2.01.02.0073 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	152,436,395
2.1.2.01.02.0137 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	109,163,493	2.1.2.01.02.0137 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	109,163,493
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,143,683,333	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,153,683,333
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,143,683,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,153,683,333
2.1.2.03.03.0170 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	168 Lembaga	1,143,683,333	2.1.2.03.03.0170 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	168 Lembaga	1,153,683,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,744,138,088	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,714,138,088
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,262,539,156	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,247,539,156
2.2.2.02.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,262,539,156	2.2.2.02.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,247,539,156
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	481,598,932	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	466,598,932
2.2.2.02.02.0056 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	481,598,932	2.2.2.02.02.0056 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	466,598,932



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kec. Karangpilang			4,861,624,834	Kec. Karangpilang			6,480,445,619
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,618,820,785
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,618,820,785
				1.1.1.04.01.0019 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kebraon	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	6 Lokasi	495,332,123
				1.1.1.04.01.0028 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	373,796,115
				1.1.1.04.01.0091 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	375,921,515
				1.1.1.04.01.0092 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kedurus	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	373,771,032
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			550,915,605	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			583,115,605
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	550,915,605	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	583,115,605
1.1.1.05.01.0011 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	550,915,605	1.1.1.05.01.0011 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	583,115,605
1.1.1.06. Sosial			154,650,572	1.1.1.06. Sosial			174,650,572
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	154,650,572	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	174,650,572



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0032 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	154,650,572	1.1.1.06.01.0032 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	174,650,572
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
293,412,900				318,412,900			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	293,412,900	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	318,412,900
1.1.2.02.02.0015 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21 Kali	293,412,900	1.1.2.02.02.0015 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21 Kali	318,412,900
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
65,928,940				75,928,940			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	65,928,940	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	75,928,940
1.1.2.05.02.0025 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	9 Kali	65,928,940	1.1.2.05.02.0025 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	9 Kali	75,928,940
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
273,974,900				293,974,900			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	273,974,900	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	293,974,900
1.1.2.06.01.0020 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	7397 berkas	273,974,900	1.1.2.06.01.0020 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	7397 berkas	293,974,900
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
71,195,480				71,195,480			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	71,195,480	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	71,195,480
1.1.2.16.03.0018 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	71,195,480	1.1.2.16.03.0018 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	71,195,480
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			212,314,322	1.2.2.06. Perdagangan			192,314,322
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	212,314,322	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	192,314,322
1.2.2.06.04.0021 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	212,314,322	1.2.2.06.04.0021 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	192,314,322
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	333,553,805	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	273,553,805
2.1.2.01.02.0075 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	198,663,805	2.1.2.01.02.0075 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	148,663,805
2.1.2.01.02.0138 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	134,890,000	2.1.2.01.02.0138 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	124,890,000
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,416,830,000	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,416,830,000
2.1.2.03.03.0171 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	220 Lembaga	1,416,830,000	2.1.2.03.03.0171 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	220 Lembaga	1,416,830,000
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,076,320,277	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,069,120,277



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,076,320,277	2.2.2.02.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,069,120,277
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	412,528,033	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	392,528,033
2.2.2.02.02.0057 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	412,528,033	2.2.2.02.02.0057 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	392,528,033
Kec. Kenjeran			6,536,366,284	Kec. Kenjeran			8,066,941,419
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,530,575,135
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,530,575,135
				1.1.1.04.01.0097 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	386,886,496
				1.1.1.04.01.0098 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	373,916,670
				1.1.1.04.01.0103 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	389,273,309
				1.1.1.04.01.0155 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	380,498,660
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			568,093,633	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			568,093,633



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	568,093,633	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	568,093,633
1.1.1.05.01.0012 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	264 kali	568,093,633	1.1.1.05.01.0012 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	264 kali	568,093,633
1.1.1.06. Sosial			160,327,093	1.1.1.06. Sosial			160,327,093
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	160,327,093	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	160,327,093
1.1.1.06.01.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	160,327,093	1.1.1.06.01.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	160,327,093
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			297,848,473	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			267,848,473
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	297,848,473	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	267,848,473
1.1.2.02.02.0016 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	297,848,473	1.1.2.02.02.0016 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	267,848,473
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			62,434,967	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			62,434,967
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	62,434,967	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	62,434,967
1.1.2.05.02.0026 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	62,434,967	1.1.2.05.02.0026 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	62,434,967
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			282,851,669	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			307,851,669
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	282,851,669	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	307,851,669

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0021 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	72000 berkas	282,851,669	1.1.2.06.01.0021 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	72000 berkas	307,851,669
1.1.2.16. Kebudayaan			78,880,013	1.1.2.16. Kebudayaan			103,880,013
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	78,880,013	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	103,880,013
1.1.2.16.03.0019 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	78,880,013	1.1.2.16.03.0019 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	103,880,013
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			204,266,683	1.2.2.06. Perdagangan			204,266,683
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	204,266,683	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	204,266,683
1.2.2.06.04.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	204,266,683	1.2.2.06.04.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	204,266,683
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			294,257,052	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			294,257,052
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	294,257,052	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	294,257,052
2.1.2.01.02.0077 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	168,692,153	2.1.2.01.02.0077 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	168,692,153
2.1.2.01.02.0139 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	125,564,899	2.1.2.01.02.0139 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	125,564,899



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,696,663,333	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,696,663,333
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,696,663,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,696,663,333
2.1.2.03.03.0172 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	455 Lembaga	2,696,663,333	2.1.2.03.03.0172 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	455 Lembaga	2,696,663,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,890,743,368	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,870,743,368
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,416,743,171	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,416,743,171
2.2.2.02.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,416,743,171	2.2.2.02.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,416,743,171
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	474,000,197	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	454,000,197
2.2.2.02.02.0058 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	474,000,197	2.2.2.02.02.0058 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	454,000,197
Kec. Krembangan			6,937,014,826	Kec. Krembangan			8,772,744,031
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,835,729,205
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,835,729,205
				1.1.1.04.01.0020 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Dupak	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	383,400,848



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0021 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	327,588,700
				1.1.1.04.01.0030 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	386,369,806
				1.1.1.04.01.0031 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Perak Barat	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	328,542,495
				1.1.1.04.01.0087 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kemayoran	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	409,827,356
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			476,232,000	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			476,232,000
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	476,232,000	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	476,232,000
1.1.1.05.01.0013 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	476,232,000	1.1.1.05.01.0013 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	476,232,000
1.1.1.06. Sosial			168,175,274	1.1.1.06. Sosial			168,175,274
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	168,175,274	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	168,175,274
1.1.1.06.01.0036 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	168,175,274	1.1.1.06.01.0036 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	168,175,274
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			410,546,385	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			410,546,385
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	410,546,385	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	410,546,385



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.02.02.0017 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	410,546,385	1.1.2.02.02.0017 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	410,546,385
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			90,254,531	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			90,254,531
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	90,254,531	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	90,254,531
1.1.2.05.02.0027 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	90,254,531	1.1.2.05.02.0027 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	90,254,531
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			383,963,034	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			383,963,034
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	383,963,034	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	383,963,034
1.1.2.06.01.0022 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	28440 berkas	383,963,034	1.1.2.06.01.0022 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	28440 berkas	383,963,034
1.1.2.16. Kebudayaan			89,073,201	1.1.2.16. Kebudayaan			89,073,201
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	89,073,201	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	89,073,201
1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	89,073,201	1.1.2.16.03.0020 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	89,073,201
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			209,333,860	1.2.2.06. Perdagangan			214,333,860
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	209,333,860	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	214,333,860
1.2.2.06.04.0023 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	209,333,860	1.2.2.06.04.0023 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	214,333,860
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			475,422,794	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			460,422,794
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	475,422,794	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	460,422,794
2.1.2.01.02.0079 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	259,076,951	2.1.2.01.02.0079 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4 lembaga	259,076,951
2.1.2.01.02.0140 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	216,345,843	2.1.2.01.02.0140 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	201,345,843
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,655,233,333	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,640,233,333
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,655,233,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,640,233,333
2.1.2.03.03.0173 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	430 Lembaga	2,655,233,333	2.1.2.03.03.0173 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	430 Lembaga	2,640,233,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,978,780,414	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,003,780,414
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,552,357,547	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,567,357,547
2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,552,357,547	2.2.2.02.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,567,357,547
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	426,422,867	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	436,422,867



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0059 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	426,422,867	2.2.2.02.02.0059 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	436,422,867
Kec. Lakarsantri			5,461,485,572	Kec. Lakarsantri			7,769,406,497
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,307,920,925
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,307,920,925
				1.1.1.04.01.0032 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	374,255,158
				1.1.1.04.01.0036 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	391,760,788
				1.1.1.04.01.0064 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	384,996,916
				1.1.1.04.01.0111 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Jeruk	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	410,176,870
				1.1.1.04.01.0142 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Bangkingan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	373,611,193
				1.1.1.04.01.0156 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	373,120,000
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			597,554,640	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			602,554,640



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	597,554,640	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	602,554,640
1.1.1.05.01.0014 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	597,554,640	1.1.1.05.01.0014 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	602,554,640
1.1.1.06. Sosial			211,458,126	1.1.1.06. Sosial			211,458,126
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	211,458,126	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	211,458,126
1.1.1.06.01.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	211,458,126	1.1.1.06.01.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	211,458,126
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			392,996,038	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			392,996,038
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	392,996,038	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	392,996,038
1.1.2.02.02.0018 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	19 Kali	392,996,038	1.1.2.02.02.0018 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	19 Kali	392,996,038
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			78,918,973	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			83,918,973
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	78,918,973	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	83,918,973
1.1.2.05.02.0028 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	78,918,973	1.1.2.05.02.0028 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	83,918,973
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			373,473,447	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			363,473,447
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	373,473,447	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	363,473,447



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0023 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	5336 berkas	373,473,447	1.1.2.06.01.0023 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	5336 berkas	363,473,447
1.1.2.16. Kebudayaan			83,073,720	1.1.2.16. Kebudayaan			88,073,720
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	83,073,720	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	88,073,720
1.1.2.16.03.0021 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	83,073,720	1.1.2.16.03.0021 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	88,073,720
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			245,582,615	1.2.2.06. Perdagangan			260,582,615
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	245,582,615	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	260,582,615
1.2.2.06.04.0024 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	245,582,615	1.2.2.06.04.0024 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	260,582,615
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			428,337,979	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			418,337,979
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	428,337,979	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	418,337,979
2.1.2.01.02.0081 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	254,022,343	2.1.2.01.02.0081 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	244,022,343
2.1.2.01.02.0141 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	174,315,636	2.1.2.01.02.0141 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	174,315,636



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,444,436,667	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,394,436,667
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,444,436,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,394,436,667
2.1.2.03.03.0174 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	199 Lembaga	1,444,436,667	2.1.2.03.03.0174 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	199 Lembaga	1,394,436,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,605,653,367	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,645,653,367
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,154,953,429	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,174,953,429
2.2.2.02.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,154,953,429	2.2.2.02.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,174,953,429
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	450,699,938	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	470,699,938
2.2.2.02.02.0060 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	450,699,938	2.2.2.02.02.0060 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	470,699,938
Kec. Mulyorejo			6,801,459,553	Kec. Mulyorejo			9,038,158,603
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,077,449,050
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,077,449,050
				1.1.1.04.01.0037 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	374,124,880



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					1.1.1.04.01.0040 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kalisari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	348,447,010	
					1.1.1.04.01.0065 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kalijudan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	379,724,860	
					1.1.1.04.01.0069 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	188,738,300	
					1.1.1.04.01.0072 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	399,960,260	
					1.1.1.04.01.0114 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	386,453,740	
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			554,254,080		1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			624,254,080	
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	554,254,080		1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	624,254,080	
1.1.1.05.01.0015 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	554,254,080		1.1.1.05.01.0015 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	624,254,080	
1.1.1.06. Sosial			177,863,333		1.1.1.06. Sosial			182,863,333	
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	177,863,333		1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	182,863,333	
1.1.1.06.01.0040 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	177,863,333		1.1.1.06.01.0040 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	182,863,333	
1.1.2. Non Pelayanan Dasar					1.1.2. Non Pelayanan Dasar				



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			296,727,393	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			311,727,393
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	296,727,393	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	311,727,393
1.1.2.02.02.0019 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	296,727,393	1.1.2.02.02.0019 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	311,727,393
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			68,407,447	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			68,407,447
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	68,407,447	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	68,407,447
1.1.2.05.02.0029 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	68,407,447	1.1.2.05.02.0029 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	68,407,447
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			371,461,506	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			371,461,506
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	371,461,506	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	371,461,506
1.1.2.06.01.0024 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	16551 berkas	371,461,506	1.1.2.06.01.0024 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	16551 berkas	371,461,506
1.1.2.16. Kebudayaan			97,325,892	1.1.2.16. Kebudayaan			97,325,892
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	97,325,892	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	97,325,892
1.1.2.16.03.0022 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	97,325,892	1.1.2.16.03.0022 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	97,325,892
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			227,275,378	1.2.2.06. Perdagangan			217,275,378
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan			227,275,378	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan			217,275,378



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06.04.0048 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	227,275,378	1.2.2.06.04.0048 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	217,275,378
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral			
100%				100%			
374,979,467				374,979,467			
2.1.2.01.02.0083 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan				2.1.2.01.02.0083 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan			
Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan				Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			
4 lembaga				4 lembaga			
219,329,892				219,329,892			
2.1.2.01.02.0142 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				2.1.2.01.02.0142 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			
Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			
48 Kali				48 Kali			
155,649,575				155,649,575			
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom				2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom			
Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update				Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update			
100%				100%			
2,041,586,667				2,200,836,667			
2.1.2.03.03.0175 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT				2.1.2.03.03.0175 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT			
Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan				Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			
346 Lembaga				346 Lembaga			
2,041,586,667				2,200,836,667			
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran			
76%				76%			
1,895,179,207				1,875,179,207			
2.2.2.02.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah				2.2.2.02.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah			
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			
100%				100%			
1,895,179,207				1,875,179,207			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	696,399,183	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	636,399,183
2.2.2.02.02.0061 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	696,399,183	2.2.2.02.02.0061 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	636,399,183
Kec. Pabean Cantian			6,487,724,434	Kec. Pabean Cantian			8,296,209,847
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,808,485,413
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,808,485,413
				1.1.1.04.01.0066 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	6 Lokasi	355,265,949
				1.1.1.04.01.0074 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Bongkaran	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	369,933,562
				1.1.1.04.01.0075 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	365,116,425
				1.1.1.04.01.0076 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Perak Timur	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	374,174,001
				1.1.1.04.01.0079 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Perak Utara	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	343,995,476
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			349,584,000	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			374,584,000



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	349,584,000	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	374,584,000
1.1.1.05.01.0016 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	349,584,000	1.1.1.05.01.0016 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	374,584,000
1.1.1.06. Sosial			198,600,000	1.1.1.06. Sosial			198,600,000
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	198,600,000	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	198,600,000
1.1.1.06.01.0042 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	198,600,000	1.1.1.06.01.0042 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	198,600,000
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			385,720,305	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			385,720,305
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	385,720,305	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	385,720,305
1.1.2.02.02.0020 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	385,720,305	1.1.2.02.02.0020 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	385,720,305
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			101,641,739	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			101,641,739
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	101,641,739	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	101,641,739
1.1.2.05.02.0030 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	101,641,739	1.1.2.05.02.0030 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	101,641,739
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			339,103,067	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			344,103,067
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	339,103,067	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	344,103,067

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0025 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	18209 berkas	339,103,067	1.1.2.06.01.0025 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	18209 berkas	344,103,067
1.1.2.16. Kebudayaan			90,695,134	1.1.2.16. Kebudayaan			90,695,134
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	90,695,134	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	90,695,134
1.1.2.16.03.0023 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	6 Kali	90,695,134	1.1.2.16.03.0023 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	6 Kali	90,695,134
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			252,738,460	1.2.2.06. Perdagangan			252,738,460
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	252,738,460	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	252,738,460
1.2.2.06.04.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	252,738,460	1.2.2.06.04.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	252,738,460
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			375,213,654	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			385,213,654
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	375,213,654	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	385,213,654
2.1.2.01.02.0085 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	204,186,350	2.1.2.01.02.0085 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	209,186,350
2.1.2.01.02.0143 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	171,027,304	2.1.2.01.02.0143 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	176,027,304



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,289,166,667	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,289,166,667
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,289,166,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,289,166,667
2.1.2.03.03.0176 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	377 Lembaga	2,289,166,667	2.1.2.03.03.0176 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	377 Lembaga	2,289,166,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,105,261,408	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,065,261,408
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,565,196,101	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,565,196,101
2.2.2.02.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,565,196,101	2.2.2.02.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,565,196,101
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	540,065,307	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	500,065,307
2.2.2.02.02.0062 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	540,065,307	2.2.2.02.02.0062 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	500,065,307
Kec. Pakal			5,169,128,954	Kec. Pakal			6,780,687,220
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,559,558,266
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,559,558,266
				1.1.1.04.01.0112 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	408,491,400



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0115 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Benowo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	372,723,852
				1.1.1.04.01.0144 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	402,800,000
				1.1.1.04.01.0157 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pakal	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	375,543,014
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			499,644,627	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			504,644,627
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	499,644,627	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	504,644,627
1.1.1.05.01.0017 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	499,644,627	1.1.1.05.01.0017 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	504,644,627
1.1.1.06. Sosial			160,164,880	1.1.1.06. Sosial			170,164,880
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	160,164,880	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	170,164,880
1.1.1.06.01.0044 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	160,164,880	1.1.1.06.01.0044 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	170,164,880
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			255,066,500	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			265,066,500
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	255,066,500	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	265,066,500
1.1.2.02.02.0021 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	10 Kali	255,066,500	1.1.2.02.02.0021 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	10 Kali	265,066,500
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			72,099,333	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			77,099,333

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	72,099,333	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	77,099,333
1.1.2.05.02.0031 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	72,099,333	1.1.2.05.02.0031 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	77,099,333
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			307,728,840	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			297,728,840
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	307,728,840	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	297,728,840
1.1.2.06.01.0026 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15500 berkas	307,728,840	1.1.2.06.01.0026 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15500 berkas	297,728,840
1.1.2.16. Kebudayaan			79,129,483	1.1.2.16. Kebudayaan			79,129,483
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	79,129,483	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	79,129,483
1.1.2.16.03.0024 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	79,129,483	1.1.2.16.03.0024 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	79,129,483
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			258,415,300	1.2.2.06. Perdagangan			258,415,300
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	258,415,300	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	258,415,300
1.2.2.06.04.0027 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	258,415,300	1.2.2.06.04.0027 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	258,415,300
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			347,083,315	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			357,083,315



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	347,083,315	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	357,083,315
2.1.2.01.02.0087 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	198,340,482	2.1.2.01.02.0087 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	203,340,482
2.1.2.01.02.0144 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	148,742,833	2.1.2.01.02.0144 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	153,742,833
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,512,930,000	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,502,930,000
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,512,930,000	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,502,930,000
2.1.2.03.03.0177 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	226 Lembaga	1,512,930,000	2.1.2.03.03.0177 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	226 Lembaga	1,502,930,000
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,676,866,676	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,708,866,676
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,327,042,543	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,369,042,543
2.2.2.02.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,327,042,543	2.2.2.02.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,369,042,543
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	349,824,133	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	339,824,133
2.2.2.02.02.0063 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	349,824,133	2.2.2.02.02.0063 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	339,824,133



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kec. Rungkut			7,741,351,318	Kec. Rungkut			9,980,990,328
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,239,639,010
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,239,639,010
				1.1.1.04.01.0022 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Penjaringsari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	347,855,025
				1.1.1.04.01.0023 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	372,806,420
				1.1.1.04.01.0042 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	391,936,260
				1.1.1.04.01.0088 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	352,564,839
				1.1.1.04.01.0090 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	386,995,400
				1.1.1.04.01.0132 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Wonorejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	387,481,066
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			584,115,175	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			654,115,175
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	584,115,175	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	654,115,175



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01.0018 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	584,115,175	1.1.1.05.01.0018 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	654,115,175
1.1.1.06. Sosial			201,987,067	1.1.1.06. Sosial			206,987,067
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	201,987,067	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	206,987,067
1.1.1.06.01.0046 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	201,987,067	1.1.1.06.01.0046 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	206,987,067
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			408,149,307	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			408,149,307
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	408,149,307	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	408,149,307
1.1.2.02.02.0022 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	18 Kali	408,149,307	1.1.2.02.02.0022 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	18 Kali	408,149,307
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			75,202,333	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			80,202,333
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	75,202,333	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	80,202,333
1.1.2.05.02.0032 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	75,202,333	1.1.2.05.02.0032 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	80,202,333
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			484,696,813	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			484,696,813
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	484,696,813	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	484,696,813
1.1.2.06.01.0027 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15963 berkas	484,696,813	1.1.2.06.01.0027 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15963 berkas	484,696,813
1.1.2.16. Kebudayaan			77,781,593	1.1.2.16. Kebudayaan			82,781,593



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	77,781,593	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	82,781,593
1.1.2.16.03.0025 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	77,781,593	1.1.2.16.03.0025 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	82,781,593
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan				1.2.2.06. Perdagangan			
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	237,805,587	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	282,805,587
1.2.2.06.04.0028 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	237,805,587	1.2.2.06.04.0028 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	282,805,587
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	532,586,886	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	462,586,886
2.1.2.01.02.0089 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	301,093,553	2.1.2.01.02.0089 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	276,093,553
2.1.2.01.02.0145 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	231,493,333	2.1.2.01.02.0145 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	186,493,333
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,977,753,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,927,753,333



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0178 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	486 Lembaga	2,977,753,333	2.1.2.03.03.0178 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488 Lembaga	2,927,753,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,161,273,224	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,151,273,224
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,669,499,063	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,664,499,063
2.2.2.02.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,669,499,063	2.2.2.02.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,664,499,063
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	491,774,161	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	486,774,161
2.2.2.02.02.0064 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	491,774,161	2.2.2.02.02.0064 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	486,774,161
Kec. Sambikerep			5,295,104,056	Kec. Sambikerep			6,675,941,986
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,380,837,930
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,380,837,930
				1.1.1.04.01.0116 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Made	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	376,251,696
				1.1.1.04.01.0137 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Lontar	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	378,048,846



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0145 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sambikerep	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	252,735,808
				1.1.1.04.01.0159 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Bringin	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	373,801,580
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			549,975,647	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			537,475,647
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	549,975,647	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	537,475,647
1.1.1.05.01.0019 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	549,975,647	1.1.1.05.01.0019 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	537,475,647
1.1.1.06. Sosial			158,695,333	1.1.1.06. Sosial			151,195,333
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	158,695,333	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	151,195,333
1.1.1.06.01.0048 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	158,695,333	1.1.1.06.01.0048 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	151,195,333
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			275,900,093	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			275,900,093
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	275,900,093	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	275,900,093
1.1.2.02.02.0023 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	275,900,093	1.1.2.02.02.0023 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	275,900,093
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			65,762,920	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			58,262,920
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	65,762,920	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	58,262,920



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
1.1.2.05.02.0033 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	65,762,920		1.1.2.05.02.0033 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	58,262,920	
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				319,638,754	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				312,138,754
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	319,638,754		1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	312,138,754	
1.1.2.06.01.0028 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	9318 berkas	319,638,754		1.1.2.06.01.0028 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	9318 berkas	312,138,754	
1.1.2.16. Kebudayaan				80,352,918	1.1.2.16. Kebudayaan				65,352,918
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	80,352,918		1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	65,352,918	
1.1.2.16.03.0026 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	80,352,918		1.1.2.16.03.0026 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	65,352,918	
1.2. Urusan Pilihan					1.2. Urusan Pilihan				
1.2.2. Non Pelayanan Dasar					1.2.2. Non Pelayanan Dasar				
1.2.2.06. Perdagangan				195,958,701	1.2.2.06. Perdagangan				195,958,701
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	195,958,701		1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	195,958,701	
1.2.2.06.04.0029 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	195,958,701		1.2.2.06.04.0029 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	195,958,701	
2. Penunjang Urusan Pemerintahan					2. Penunjang Urusan Pemerintahan				
2.1. Fungsi Manajemen					2.1. Fungsi Manajemen				
2.1.2. Non Pelayanan Dasar					2.1.2. Non Pelayanan Dasar				
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				344,626,359	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				344,626,359
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	344,626,359		2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	344,626,359	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0091 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	198,779,706	2.1.2.01.02.0091 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	203,779,706
2.1.2.01.02.0146 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	145,846,653	2.1.2.01.02.0146 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	140,846,653
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,642,530,853	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,637,530,853
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,642,530,853	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,637,530,853
2.1.2.03.03.0179 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	250 Lembaga	1,642,530,853	2.1.2.03.03.0179 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	250 Lembaga	1,637,530,853
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,661,662,478	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,716,662,478
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,325,020,495	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,352,520,495
2.2.2.02.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,325,020,495	2.2.2.02.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,352,520,495
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	336,641,983	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	364,141,983
2.2.2.02.02.0065 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	336,641,983	2.2.2.02.02.0065 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	364,141,983
Kec. Sawahan			9,079,881,122	Kec. Sawahan			11,101,119,680
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,021,238,558
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,021,238,558
				1.1.1.04.01.0117 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	362,718,615
				1.1.1.04.01.0122 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Petemon	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	374,117,460
				1.1.1.04.01.0125 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	383,859,383
				1.1.1.04.01.0126 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sawahan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	150,280,103
				1.1.1.04.01.0158 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	377,454,340
				1.1.1.04.01.0160 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pakis	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	7 Lokasi	372,808,657
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			560,293,641	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			693,993,641
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	560,293,641	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	693,993,641
1.1.1.05.01.0020 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	560,293,641	1.1.1.05.01.0020 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	693,993,641
1.1.1.06. Sosial			198,420,565	1.1.1.06. Sosial			123,420,565



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	198,420,565	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	123,420,565
1.1.1.06.01.0050 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	198,420,565	1.1.1.06.01.0050 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	123,420,565
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	362,933,101	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	442,933,101
1.1.2.02.02.0024 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	362,933,101	1.1.2.02.02.0024 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	442,933,101
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	96,795,135	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	106,795,135
1.1.2.05.02.0034 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	96,795,135	1.1.2.05.02.0034 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	106,795,135
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	538,803,604	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	638,803,604
1.1.2.06.01.0029 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	40320 berkas	538,803,604	1.1.2.06.01.0029 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	40320 berkas	638,803,604
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	145,213,360	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	155,213,360



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03.0027 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	145,213,360	1.1.2.16.03.0027 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	155,213,360
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan				1.2.2.06. Perdagangan			
233,882,191				153,882,191			
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	233,882,191	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	153,882,191
1.2.2.06.04.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	233,882,191	1.2.2.06.04.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	153,882,191
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
402,848,567				407,848,567			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	402,848,567	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	407,848,567
2.1.2.01.02.0093 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	234,211,820	2.1.2.01.02.0093 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	314,211,820
2.1.2.01.02.0147 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	168,636,747	2.1.2.01.02.0147 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	93,636,747
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
3,547,779,742				3,572,779,742			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	3,547,779,742	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	3,572,779,742
2.1.2.03.03.0180 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	627 Lembaga	3,547,779,742	2.1.2.03.03.0180 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	627 Lembaga	3,572,779,742
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
		2.2.2. Non Pelayanan Dasar					2.2.2. Non Pelayanan Dasar				
		2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,992,911,216			2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,784,211,216
		2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,413,859,623			2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,305,159,623
		2.2.2.02.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,413,859,623			2.2.2.02.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,305,159,623
		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	579,051,593			2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	479,051,593
		2.2.2.02.02.0066 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	579,051,593			2.2.2.02.02.0066 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	479,051,593
Kec. Semampir					7,841,274,305	Kec. Semampir					9,840,942,487
1. Urusan Pemerintahan						1. Urusan Pemerintahan					
1.1. Urusan Wajib						1.1. Urusan Wajib					
1.1.1. Pelayanan Dasar						1.1.1. Pelayanan Dasar					
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman						1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman					1,814,300,682
		1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,814,300,682
								1.1.1.04.01.0024 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Ujung	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	363,373,570
								1.1.1.04.01.0043 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pegirian	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	401,901,626
								1.1.1.04.01.0044 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	267,629,321



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0054 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Ampel	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	357,396,165
				1.1.1.04.01.0067 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sidotopo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	424,000,000
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			541,510,133	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			576,510,133
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	541,510,133	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	576,510,133
1.1.1.05.01.0021 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	541,510,133	1.1.1.05.01.0021 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	576,510,133
1.1.1.06. Sosial			151,488,920	1.1.1.06. Sosial			156,488,920
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	151,488,920	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	156,488,920
1.1.1.06.01.0052 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	151,488,920	1.1.1.06.01.0052 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	156,488,920
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			269,420,440	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			274,420,440
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	269,420,440	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	274,420,440
1.1.2.02.02.0025 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 Kali	269,420,440	1.1.2.02.02.0025 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 Kali	274,420,440
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			53,829,733	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			63,829,733
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	53,829,733	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	63,829,733



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02.0035 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	53,829,733	1.1.2.05.02.0035 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	63,829,733
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			403,946,050	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			439,313,550
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	403,946,050	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	439,313,550
1.1.2.06.01.0030 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24931 berkas	403,946,050	1.1.2.06.01.0030 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24931 berkas	439,313,550
1.1.2.16. Kebudayaan			81,359,264	1.1.2.16. Kebudayaan			81,359,264
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	81,359,264	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	81,359,264
1.1.2.16.03.0028 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	81,359,264	1.1.2.16.03.0028 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	81,359,264
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			191,729,640	1.2.2.06. Perdagangan			206,729,640
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	191,729,640	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	206,729,640
1.2.2.06.04.0031 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	191,729,640	1.2.2.06.04.0031 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	206,729,640
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			296,110,150	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			356,110,150
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	296,110,150	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	356,110,150



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0095 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	179,782,310	2.1.2.01.02.0095 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	209,782,310
2.1.2.01.02.0148 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	116,327,840	2.1.2.01.02.0148 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	146,327,840
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			3,728,450,000	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			3,728,450,000
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	3,728,450,000	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	3,728,450,000
2.1.2.03.03.0181 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	636 Lembaga	3,728,450,000	2.1.2.03.03.0181 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	636 Lembaga	3,728,450,000
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,123,429,975	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,143,429,975
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,652,046,608	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,662,046,608
2.2.2.02.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,652,046,608	2.2.2.02.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,662,046,608
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	471,383,367	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	481,383,367
2.2.2.02.02.0067 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	471,383,367	2.2.2.02.02.0067 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	481,383,367
Kec. Simokerto			5,838,988,669	Kec. Simokerto			7,497,136,817
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,658,148,148
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,658,148,148
				1.1.1.04.01.0045 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Simokerto	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	373,198,041
				1.1.1.04.01.0046 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Simolawang	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	389,511,242
				1.1.1.04.01.0082 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	374,192,048
				1.1.1.04.01.0083 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sidodadi	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	381,909,817
				1.1.1.04.01.0119 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kapasan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	139,337,000
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			560,978,167	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			570,978,167
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	560,978,167	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	570,978,167
1.1.1.05.01.0022 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	560,978,167	1.1.1.05.01.0022 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	570,978,167
1.1.1.06. Sosial			140,742,793	1.1.1.06. Sosial			160,742,793
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	140,742,793	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	160,742,793



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0054 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	140,742,793	1.1.1.06.01.0054 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	160,742,793
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
263,064,443				280,564,443			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	263,064,443	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	280,564,443
1.1.2.02.02.0026 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	263,064,443	1.1.2.02.02.0026 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	280,564,443
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
56,369,407				66,369,407			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	56,369,407	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	66,369,407
1.1.2.05.02.0036 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	56,369,407	1.1.2.05.02.0036 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	66,369,407
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
406,502,033				386,502,033			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	406,502,033	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	386,502,033
1.1.2.06.01.0031 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	20400 berkas	406,502,033	1.1.2.06.01.0031 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	20400 berkas	386,502,033
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
73,100,453				88,100,453			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	73,100,453	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	88,100,453
1.1.2.16.03.0029 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	73,100,453	1.1.2.16.03.0029 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	88,100,453
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			166,913,733	1.2.2.06. Perdagangan			184,413,733
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	166,913,733	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	184,413,733
1.2.2.06.04.0032 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	166,913,733	1.2.2.06.04.0032 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	184,413,733
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	369,061,100	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	374,061,100
2.1.2.01.02.0097 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	206,266,593	2.1.2.01.02.0097 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	211,266,593
2.1.2.01.02.0149 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	162,794,507	2.1.2.01.02.0149 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	162,794,507
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,274,383,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,224,383,333
2.1.2.03.03.0182 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	356 Lembaga	2,274,383,333	2.1.2.03.03.0182 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	356 Lembaga	2,224,383,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,527,873,207	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,502,873,207
2.2.2.02.01.0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,083,006,790	2.2.2.02.01.0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,078,006,790



Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.2.2.02.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,083,006,790		2.2.2.02.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,078,006,790	
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	444,866,417		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	424,866,417	
2.2.2.02.02.0068 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	444,866,417		2.2.2.02.02.0068 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	424,866,417	
Kec. Sukolilo			7,637,935,519		Kec. Sukolilo			10,215,480,888	
1. Urusan Pemerintahan					1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib					1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar					1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman					1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				2,577,545,369
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,577,545,369	
					1.1.1.04.01.0025 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	382,115,142	
					1.1.1.04.01.0048 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	398,378,475	
					1.1.1.04.01.0049 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Semolowaru	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	383,436,556	
					1.1.1.04.01.0080 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	376,824,605	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0095 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	253,175,347
				1.1.1.04.01.0147 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Keputih	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	399,091,706
				1.1.1.04.01.0148 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	384,523,538
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			653,480,788	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			678,832,788
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	653,480,788	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	678,832,788
1.1.1.05.01.0023 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	653,480,788	1.1.1.05.01.0023 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	678,832,788
1.1.1.06. Sosial			225,343,333	1.1.1.06. Sosial			207,843,333
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	225,343,333	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	207,843,333
1.1.1.06.01.0056 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	225,343,333	1.1.1.06.01.0056 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	207,843,333
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			389,819,993	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			372,319,993
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	389,819,993	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	372,319,993
1.1.2.02.02.0027 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	389,819,993	1.1.2.02.02.0027 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	372,319,993



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			52,507,333	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			57,507,333
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	52,507,333	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	57,507,333
1.1.2.05.02.0037 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	52,507,333	1.1.2.05.02.0037 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	57,507,333
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			486,578,833	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			506,578,833
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	486,578,833	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	506,578,833
1.1.2.06.01.0032 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22442 berkas	486,578,833	1.1.2.06.01.0032 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22442 berkas	506,578,833
1.1.2.16. Kebudayaan			91,975,333	1.1.2.16. Kebudayaan			96,975,333
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	91,975,333	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	96,975,333
1.1.2.16.03.0030 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	91,975,333	1.1.2.16.03.0030 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	96,975,333
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			253,623,333	1.2.2.06. Perdagangan			248,623,333
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	253,623,333	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	248,623,333
1.2.2.06.04.0033 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	253,623,333	1.2.2.06.04.0033 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	248,623,333
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			465,865,790	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			475,865,790



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	465,865,790	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	475,865,790
2.1.2.01.02.0099 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	275,815,790	2.1.2.01.02.0099 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	270,815,790
2.1.2.01.02.0150 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	190,050,000	2.1.2.01.02.0150 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	205,050,000
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,797,123,333	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,817,123,333
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,797,123,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,817,123,333
2.1.2.03.03.0183 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	439 Lembaga	2,797,123,333	2.1.2.03.03.0183 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	439 Lembaga	2,817,123,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,221,617,450	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,176,265,450
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,645,373,277	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,630,373,277
2.2.2.02.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,645,373,277	2.2.2.02.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,630,373,277
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	576,244,173	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	545,892,173
2.2.2.02.02.0069 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	576,244,173	2.2.2.02.02.0069 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	545,892,173



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kec. Sukomanunggal			6,670,199,785	Kec. Sukomanunggal			8,932,447,899
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,262,248,114
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,262,248,114
				1.1.1.04.01.0027 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Simomulyo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	395,296,133
				1.1.1.04.01.0050 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Putat Gede	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	374,159,221
				1.1.1.04.01.0051 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	372,571,383
				1.1.1.04.01.0070 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	373,988,915
				1.1.1.04.01.0120 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	373,299,942
				1.1.1.04.01.0164 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	372,932,520
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			712,302,521	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			712,302,521
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	712,302,521	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	712,302,521



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01.0024 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	712,302,521	1.1.1.05.01.0024 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	712,302,521
1.1.1.06. Sosial			173,074,700	1.1.1.06. Sosial			173,074,700
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	173,074,700	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	173,074,700
1.1.1.06.01.0058 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	173,074,700	1.1.1.06.01.0058 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	173,074,700
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			344,548,429	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			344,548,429
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	344,548,429	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	344,548,429
1.1.2.02.02.0028 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	344,548,429	1.1.2.02.02.0028 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	344,548,429
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			65,024,515	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			65,024,515
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	65,024,515	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	65,024,515
1.1.2.05.02.0038 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	65,024,515	1.1.2.05.02.0038 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	65,024,515
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			326,360,000	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			326,360,000
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	326,360,000	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	326,360,000
1.1.2.06.01.0033 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	26312 berkas	326,360,000	1.1.2.06.01.0033 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	26312 berkas	326,360,000
1.1.2.16. Kebudayaan			86,759,404	1.1.2.16. Kebudayaan			86,759,404



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	86,759,404	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	86,759,404
1.1.2.16.03.0031 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	6 Kali	86,759,404	1.1.2.16.03.0031 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	6 Kali	86,759,404
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan				1.2.2.06. Perdagangan			
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	229,288,460	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	229,288,460
1.2.2.06.04.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	229,288,460	1.2.2.06.04.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	229,288,460
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	434,476,793	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	434,476,793
2.1.2.01.02.0101 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	251,250,583	2.1.2.01.02.0101 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	251,250,583
2.1.2.01.02.0151 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	183,226,210	2.1.2.01.02.0151 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	183,226,210
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,057,270,000	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,057,270,000



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.03.0184 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	323 Lembaga	2,057,270,000	2.1.2.03.03.0184 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	323 Lembaga	2,057,270,000
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,241,094,963	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			2,241,094,963
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,753,248,825	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,753,248,825
2.2.2.02.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,753,248,825	2.2.2.02.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,753,248,825
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	487,846,138	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	487,846,138
2.2.2.02.02.0070 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	487,846,138	2.2.2.02.02.0070 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	487,846,138
Kec. Tambaksari			10,285,670,489	Kec. Tambaksari			13,261,787,358
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,976,116,868
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,976,116,868
				1.1.1.04.01.0029 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Gading	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	396,888,380
				1.1.1.04.01.0033 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tambaksari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	366,820,420



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0041 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Rangkah	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	391,896,840
				1.1.1.04.01.0055 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	372,753,839
				1.1.1.04.01.0071 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	329,468,895
				1.1.1.04.01.0077 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	354,663,131
				1.1.1.04.01.0084 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	389,176,123
				1.1.1.04.01.0086 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Ploso	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	374,449,240
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			627,779,081	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			635,138,081
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	627,779,081	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	635,138,081
1.1.1.05.01.0025 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	627,779,081	1.1.1.05.01.0025 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	635,138,081
1.1.1.06. Sosial			218,231,627	1.1.1.06. Sosial			218,231,627
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	218,231,627	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	218,231,627



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0060 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	218,231,627	1.1.1.06.01.0060 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	218,231,627
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
433,311,477				388,311,477			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	433,311,477	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	388,311,477
1.1.2.02.02.0029 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	433,311,477	1.1.2.02.02.0029 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	388,311,477
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
79,845,478				79,845,478			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	79,845,478	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	79,845,478
1.1.2.05.02.0039 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	8 Kali	79,845,478	1.1.2.05.02.0039 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	8 Kali	79,845,478
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
562,588,773				562,588,773			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	562,588,773	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	562,588,773
1.1.2.06.01.0034 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	39620 berkas	562,588,773	1.1.2.06.01.0034 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	39620 berkas	562,588,773
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
91,960,109				91,960,109			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	91,960,109	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	91,960,109
1.1.2.16.03.0032 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	91,960,109	1.1.2.16.03.0032 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	91,960,109
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			248,736,667	1.2.2.06. Perdagangan			248,736,667
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	248,736,667	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	248,736,667
1.2.2.06.04.0035 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	248,736,667	1.2.2.06.04.0035 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	248,736,667
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	471,060,467	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	476,060,467
2.1.2.01.02.0103 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	287,119,396	2.1.2.01.02.0103 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	292,119,396
2.1.2.01.02.0128 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	183,941,071	2.1.2.01.02.0128 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	183,941,071
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	4,465,943,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	4,465,943,333
2.1.2.03.03.0185 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	748 Lembaga	4,465,943,333	2.1.2.03.03.0185 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	748 Lembaga	4,465,943,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,317,895,502	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	2,323,846,503



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
2.2.2.02.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,317,895,502		2.2.2.02.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2,323,846,503	
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	768,317,975		2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	795,007,975	
2.2.2.02.02.0071 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	768,317,975		2.2.2.02.02.0071 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	795,007,975	
Kec. Tandes			6,945,811,760		Kec. Tandes			9,211,181,569	
1. Urusan Pemerintahan					1. Urusan Pemerintahan				
1.1. Urusan Wajib					1.1. Urusan Wajib				
1.1.1. Pelayanan Dasar					1.1.1. Pelayanan Dasar				
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman					1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				2,265,369,809
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,265,369,809	
					1.1.1.04.01.0056 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	374,859,805	
					1.1.1.04.01.0059 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	388,486,730	
					1.1.1.04.01.0123 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	376,649,082	
					1.1.1.04.01.0124 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tandes	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	379,634,467	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0140 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Karang Poh	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	372,703,327
				1.1.1.04.01.0146 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Balongsari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	373,036,398
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			552,549,211	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			562,549,211
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	552,549,211	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	562,549,211
1.1.1.05.01.0026 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	552,549,211	1.1.1.05.01.0026 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	562,549,211
1.1.1.06. Sosial			225,561,438	1.1.1.06. Sosial			225,561,438
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	225,561,438	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	225,561,438
1.1.1.06.01.0062 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	225,561,438	1.1.1.06.01.0062 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	225,561,438
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			407,333,195	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			392,333,195
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	407,333,195	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	392,333,195
1.1.2.02.02.0030 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	24 Kali	407,333,195	1.1.2.02.02.0030 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	24 Kali	392,333,195
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			86,194,996	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			86,194,996
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	86,194,996	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	86,194,996



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02.0040 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kali	86,194,996	1.1.2.05.02.0040 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kali	86,194,996
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			462,524,073	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			477,524,073
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	462,524,073	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	477,524,073
1.1.2.06.01.0035 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	20944 berkas	462,524,073	1.1.2.06.01.0035 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	20944 berkas	477,524,073
1.1.2.16. Kebudayaan			102,410,175	1.1.2.16. Kebudayaan			102,410,175
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	102,410,175	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	102,410,175
1.1.2.16.03.0033 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	102,410,175	1.1.2.16.03.0033 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	102,410,175
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			268,883,333	1.2.2.06. Perdagangan			253,883,333
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	268,883,333	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	253,883,333
1.2.2.06.04.0036 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	268,883,333	1.2.2.06.04.0036 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	253,883,333
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			493,656,776	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			483,656,776
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	493,656,776	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	483,656,776



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02.0105 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	278,509,415	2.1.2.01.02.0105 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	268,509,415
2.1.2.01.02.0152 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	215,147,361	2.1.2.01.02.0152 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	215,147,361
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,356,503,333	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			2,371,503,333
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,356,503,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,371,503,333
2.1.2.03.03.0186 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	371 Lembaga	2,356,503,333	2.1.2.03.03.0186 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	371 Lembaga	2,371,503,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,990,195,230	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,990,195,230
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,436,334,430	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,436,334,430
2.2.2.02.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,436,334,430	2.2.2.02.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,436,334,430
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	553,860,800	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	553,860,800
2.2.2.02.02.0072 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	553,860,800	2.2.2.02.02.0072 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	553,860,800
Kec. Tegalsari			6,329,012,549	Kec. Tegalsari			8,228,750,083
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,899,737,534
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,899,737,534
				1.1.1.04.01.0118 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Keputran	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	6 Lokasi	374,116,799
				1.1.1.04.01.0121 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tegalsari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	377,700,938
				1.1.1.04.01.0130 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	379,936,626
				1.1.1.04.01.0135 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	385,884,520
				1.1.1.04.01.0136 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Wonorejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	6 Lokasi	382,098,651
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			573,086,373	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			591,086,373
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	573,086,373	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	591,086,373
1.1.1.05.01.0027 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	264 kali	573,086,373	1.1.1.05.01.0027 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	264 kali	591,086,373
1.1.1.06. Sosial			63,063,933	1.1.1.06. Sosial			68,063,933
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	63,063,933	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	68,063,933



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01.0064 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	63,063,933	1.1.1.06.01.0064 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	68,063,933
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
283,299,210				285,299,210			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	283,299,210	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	285,299,210
1.1.2.02.02.0031 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	283,299,210	1.1.2.02.02.0031 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	285,299,210
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
169,061,500				141,561,500			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	169,061,500	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	141,561,500
1.1.2.05.02.0041 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	169,061,500	1.1.2.05.02.0041 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	141,561,500
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
382,260,000				367,260,000			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	382,260,000	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	367,260,000
1.1.2.06.01.0036 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14557 berkas	382,260,000	1.1.2.06.01.0036 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14557 berkas	367,260,000
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
82,487,300				37,487,300			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	82,487,300	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	37,487,300
1.1.2.16.03.0034 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	82,487,300	1.1.2.16.03.0034 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	37,487,300
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.2.2.06. Perdagangan			229,696,922	1.2.2.06. Perdagangan			244,696,922
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	229,696,922	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	244,696,922
1.2.2.06.04.0037 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	229,696,922	1.2.2.06.04.0037 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	244,696,922
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	337,632,837	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	325,132,837
2.1.2.01.02.0107 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	177,485,653	2.1.2.01.02.0107 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	169,985,653
2.1.2.01.02.0153 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	160,147,184	2.1.2.01.02.0153 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	155,147,184
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,298,850,000	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	2,313,850,000
2.1.2.03.03.0187 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	366 Lembaga	2,298,850,000	2.1.2.03.03.0187 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	366 Lembaga	2,313,850,000
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,471,201,941	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,486,201,941



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,471,201,941	2.2.2.02.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,486,201,941
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	438,372,533	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	468,372,533
2.2.2.02.02.0073 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	438,372,533	2.2.2.02.02.0073 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	468,372,533
Kec. Tenggilis Mejoyo			5,034,082,070	Kec. Tenggilis Mejoyo			6,516,282,274
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,482,200,204
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,482,200,204
				1.1.1.04.01.0034 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kendangsari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	371,585,967
				1.1.1.04.01.0035 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Kutisari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	373,120,000
				1.1.1.04.01.0099 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	350,053,340
				1.1.1.04.01.0128 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	387,440,897
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			527,099,457	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			512,099,457



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	527,099,457	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	512,099,457
1.1.1.05.01.0028 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	527,099,457	1.1.1.05.01.0028 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	512,099,457
1.1.1.06. Sosial			182,595,587	1.1.1.06. Sosial			172,595,587
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	182,595,587	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	172,595,587
1.1.1.06.01.0066 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	182,595,587	1.1.1.06.01.0066 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	172,595,587
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			344,373,107	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			314,373,107
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	344,373,107	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	314,373,107
1.1.2.02.02.0032 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 Kali	344,373,107	1.1.2.02.02.0032 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 Kali	314,373,107
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			75,238,864	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			67,738,864
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	75,238,864	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	67,738,864
1.1.2.05.02.0042 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	21 Kali	75,238,864	1.1.2.05.02.0042 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	21 Kali	67,738,864
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			263,180,967	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			255,680,967
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	263,180,967	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	255,680,967

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.06.01.0037 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	17850 berkas	263,180,967	1.1.2.06.01.0037 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	17850 berkas	255,680,967
1.1.2.16. Kebudayaan			67,445,760	1.1.2.16. Kebudayaan			67,445,760
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	67,445,760	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	67,445,760
1.1.2.16.03.0035 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	67,445,760	1.1.2.16.03.0035 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 Kali	67,445,760
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			228,196,589	1.2.2.06. Perdagangan			213,196,589
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	228,196,589	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	213,196,589
1.2.2.06.04.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	228,196,589	1.2.2.06.04.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	213,196,589
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			380,393,403	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			355,393,403
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	380,393,403	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	355,393,403
2.1.2.01.02.0109 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	212,543,670	2.1.2.01.02.0109 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	197,543,670
2.1.2.01.02.0154 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	167,849,733	2.1.2.01.02.0154 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	157,849,733



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,237,296,667	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,227,296,667
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,237,296,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,227,296,667
2.1.2.03.03.0188 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	185 Lembaga	1,237,296,667	2.1.2.03.03.0188 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	185 Lembaga	1,227,296,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,728,261,669	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,848,261,669
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,309,970,769	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,369,970,769
2.2.2.02.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,309,970,769	2.2.2.02.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,369,970,769
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	418,290,900	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	478,290,900
2.2.2.02.02.0074 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	418,290,900	2.2.2.02.02.0074 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	478,290,900
Kec. Wiyung			5,066,410,000	Kec. Wiyung			6,632,227,557
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,565,817,557
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,565,817,557
				1.1.1.04.01.0038 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Wiyung	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	395,981,020



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.1.1.04.01.0113 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	391,727,416
				1.1.1.04.01.0139 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Babatan	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	380,627,010
				1.1.1.04.01.0165 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	397,482,111
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			405,010,773	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			405,010,773
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	405,010,773	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	405,010,773
1.1.1.05.01.0029 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	405,010,773	1.1.1.05.01.0029 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	405,010,773
1.1.1.06. Sosial			172,753,733	1.1.1.06. Sosial			172,753,733
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	172,753,733	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	172,753,733
1.1.1.06.01.0068 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	172,753,733	1.1.1.06.01.0068 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	172,753,733
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			285,306,981	1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			285,306,981
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	285,306,981	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	285,306,981
1.1.2.02.02.0033 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	25 Kali	285,306,981	1.1.2.02.02.0033 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	25 Kali	285,306,981
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			85,205,987	1.1.2.05. Lingkungan Hidup			85,205,987



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	85,205,987	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	85,205,987
1.1.2.05.02.0043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	85,205,987	1.1.2.05.02.0043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	85,205,987
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			351,029,653	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			351,029,653
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	351,029,653	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	351,029,653
1.1.2.06.01.0038 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	7253 berkas	351,029,653	1.1.2.06.01.0038 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	7253 berkas	351,029,653
1.1.2.16. Kebudayaan			103,348,993	1.1.2.16. Kebudayaan			103,348,993
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	103,348,993	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	103,348,993
1.1.2.16.03.0036 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	103,348,993	1.1.2.16.03.0036 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3 Kali	103,348,993
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			197,715,935	1.2.2.06. Perdagangan			197,715,935
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	197,715,935	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	197,715,935
1.2.2.06.04.0039 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	197,715,935	1.2.2.06.04.0039 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	197,715,935
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			342,934,417	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			342,934,417



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	342,934,417	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	342,934,417
2.1.2.01.02.0111 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	188,735,516	2.1.2.01.02.0111 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	188,735,516
2.1.2.01.02.0155 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	154,198,901	2.1.2.01.02.0155 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	154,198,901
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,440,063,333	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			1,440,063,333
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,440,063,333	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,440,063,333
2.1.2.03.03.0189 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	210 Lembaga	1,440,063,333	2.1.2.03.03.0189 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	210 Lembaga	1,440,063,333
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,683,040,195	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,683,040,195
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,290,869,366	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,276,050,166
2.2.2.02.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,290,869,366	2.2.2.02.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,276,050,166
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	392,170,829	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	406,990,029
2.2.2.02.02.0075 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	392,170,829	2.2.2.02.02.0075 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	406,990,029



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Kec. Wonocolo			5,964,334,482	Kec. Wonocolo			7,895,704,682
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,931,370,200
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	1,931,370,200
				1.1.1.04.01.0039 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	2 Lokasi	372,925,539
				1.1.1.04.01.0131 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Margorejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	377,839,968
				1.1.1.04.01.0133 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	386,707,621
				1.1.1.04.01.0134 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	7 Lokasi	411,222,566
				1.1.1.04.01.0166 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sidosermo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	382,674,506
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			586,055,480	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			591,055,480
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	586,055,480	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	591,055,480
1.1.1.05.01.0030 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	586,055,480	1.1.1.05.01.0030 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	591,055,480
1.1.1.06. Sosial			203,780,041	1.1.1.06. Sosial			193,780,041

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			203,780,041	1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			193,780,041
1.1.1.06.01.0070 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	203,780,041	1.1.1.06.01.0070 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	193,780,041
1.1.2. Non Pelayanan Dasar				1.1.2. Non Pelayanan Dasar			
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	374,435,669	1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	379,435,669
1.1.2.02.02.0034 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21 Kali	374,435,669	1.1.2.02.02.0034 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21 Kali	379,435,669
1.1.2.05. Lingkungan Hidup				1.1.2.05. Lingkungan Hidup			
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	55,655,498	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	55,655,498
1.1.2.05.02.0044 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 Kali	55,655,498	1.1.2.05.02.0044 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 Kali	55,655,498
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	375,933,950	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	375,933,950
1.1.2.06.01.0039 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24000 berkas	375,933,950	1.1.2.06.01.0039 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24000 berkas	375,933,950
1.1.2.16. Kebudayaan				1.1.2.16. Kebudayaan			
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	73,889,359	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	73,889,359



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.16.03.0037 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	73,889,359	1.1.2.16.03.0037 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	73,889,359
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan				1.2.2.06. Perdagangan			
243,085,846				243,085,846			
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	243,085,846	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	243,085,846
1.2.2.06.04.0040 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	243,085,846	1.2.2.06.04.0040 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	243,085,846
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			
403,935,369				403,935,369			
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	403,935,369	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	403,935,369
2.1.2.01.02.0113 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	233,521,262	2.1.2.01.02.0113 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	233,521,262
2.1.2.01.02.0156 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	170,414,107	2.1.2.01.02.0156 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	170,414,107
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			
1,830,616,667				1,830,616,667			
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,830,616,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	1,830,616,667
2.1.2.03.03.0190 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	278 Lembaga	1,830,616,667	2.1.2.03.03.0190 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	278 Lembaga	1,830,616,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran				2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			
1,816,946,603				1,816,946,603			
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,394,601,420	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,394,601,420
2.2.2.02.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,394,601,420	2.2.2.02.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,394,601,420
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	422,345,183	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	422,345,183
2.2.2.02.02.0076 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	422,345,183	2.2.2.02.02.0076 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	422,345,183
Kec. Wonokromo				Kec. Wonokromo			
8,461,757,044				10,806,942,644			
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman			
2,345,185,600				2,345,185,600			
1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	61.50%	2,345,185,600
				1.1.1.04.01.0057 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Darmo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	5 Lokasi	380,163,788
				1.1.1.04.01.0060 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Wonokromo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	385,396,967
				1.1.1.04.01.0073 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	1 Lokasi	386,965,027



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					1.1.1.04.01.0089 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	4 Lokasi	397,314,008	
					1.1.1.04.01.0127 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Jagir	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	407,237,412	
					1.1.1.04.01.0161 Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan Ngagel	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah	3 Lokasi	388,108,398	
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			883,955,897		1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			868,955,897	
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	883,955,897		1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	868,955,897	
1.1.1.05.01.0031 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	883,955,897		1.1.1.05.01.0031 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	868,955,897	
1.1.1.06. Sosial			243,182,800		1.1.1.06. Sosial			243,182,800	
1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	243,182,800		1.1.1.06.01 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	60%	243,182,800	
1.1.1.06.01.0072 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	243,182,800		1.1.1.06.01.0072 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	243,182,800	
1.1.2. Non Pelayanan Dasar					1.1.2. Non Pelayanan Dasar				
1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			412,778,380		1.1.2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			412,778,380	
1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	412,778,380		1.1.2.02.02 Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	412,778,380	
1.1.2.02.02.0035 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	25 Kali	412,778,380		1.1.2.02.02.0035 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	25 Kali	412,778,380	
1.1.2.05. Lingkungan Hidup			73,903,067		1.1.2.05. Lingkungan Hidup			78,903,067	



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	73,903,067	1.1.2.05.02 Program pengelolaan kebersihan	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	6.56%	78,903,067
1.1.2.05.02.0045 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	73,903,067	1.1.2.05.02.0045 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	78,903,067
1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			504,122,207	1.1.2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			504,122,207
1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	504,122,207	1.1.2.06.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	504,122,207
1.1.2.06.01.0040 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	32522 berkas	504,122,207	1.1.2.06.01.0040 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	32522 berkas	504,122,207
1.1.2.16. Kebudayaan			103,837,067	1.1.2.16. Kebudayaan			113,837,067
1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	103,837,067	1.1.2.16.03 Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	113,837,067
1.1.2.16.03.0038 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	103,837,067	1.1.2.16.03.0038 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2 Kali	113,837,067
1.2. Urusan Pilihan				1.2. Urusan Pilihan			
1.2.2. Non Pelayanan Dasar				1.2.2. Non Pelayanan Dasar			
1.2.2.06. Perdagangan			259,062,480	1.2.2.06. Perdagangan			259,062,480
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	259,062,480	1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	53%	259,062,480
1.2.2.06.04.0041 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	259,062,480	1.2.2.06.04.0041 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	259,062,480
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			474,697,497	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			474,697,497



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	474,697,497	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	474,697,497
2.1.2.01.02.0126 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	258,609,370	2.1.2.01.02.0126 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	258,609,370
2.1.2.01.02.0127 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	216,088,127	2.1.2.01.02.0127 Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	216,088,127
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			3,516,136,667	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			3,516,136,667
2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	3,516,136,667	2.1.2.03.03 Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	3,516,136,667
2.1.2.03.03.0191 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	574 Lembaga	3,516,136,667	2.1.2.03.03.0191 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	574 Lembaga	3,516,136,667
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,990,080,982	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			1,990,080,982
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,499,664,621	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	1,499,664,621
2.2.2.02.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,499,664,621	2.2.2.02.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,499,664,621
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	490,416,361	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	490,416,361
2.2.2.02.02.0077 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	490,416,361	2.2.2.02.02.0077 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	490,416,361

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
RSUD Bhakti Dharma Husada			128,253,037,308	RSUD Bhakti Dharma Husada			137,716,771,025
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.02. Kesehatan			87,874,409,152	1.1.1.02. Kesehatan			95,981,100,647
1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	74%	24,993,484,756	1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	74%	21,824,327,135
1.1.1.02.06.0004 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	9216 orang	3,599,980,237	1.1.1.02.06.0004 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	11751 orang	3,059,980,237
1.1.1.02.06.0005 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik	2887 orang	2,676,776,136	1.1.1.02.06.0005 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik	2289 orang	2,122,618,515
1.1.1.02.06.0006 Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	96 kali	17,363,103,316	1.1.1.02.06.0006 Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	96 kali	15,363,103,316
1.1.1.02.06.0007 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan	134 kali	992,947,067	1.1.1.02.06.0007 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan	120 kali	917,947,067
1.1.1.02.06.0019 Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan)	Jumlah kegiatan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan) yang dilaksanakan	1 kali	360,678,000	1.1.1.02.06.0019 Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan)	Jumlah kegiatan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan) yang dilaksanakan	1 kali	360,678,000
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90%	32,902,247,237	1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90%	33,164,785,088
	Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	5 hari			Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	5 hari	
	Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	43 menit			Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	43 menit	
1.1.1.02.07.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran	3 jenis	27,976,593,974	1.1.1.02.07.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran	3 jenis	28,243,631,825



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.07.0005 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	4,925,653,263	1.1.1.02.07.0005 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	4,921,153,263
1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	29,978,677,159	1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	40,991,988,424
1.1.1.02.08.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan	2 jenis	29,978,677,159	1.1.1.02.08.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan	2 jenis	40,991,988,424
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			34,873,560	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			34,873,560
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	34,873,560	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	34,873,560
2.1.2.01.02.0117 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	34,873,560	2.1.2.01.02.0117 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	34,873,560
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			40,343,754,596	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			41,700,796,818
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	32,671,455,596	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	34,147,495,818
2.2.2.02.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	32,671,455,596	2.2.2.02.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	34,147,495,818



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	7,672,299,000	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	7,553,301,000
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0078 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	7,672,299,000	2.2.2.02.02.0078 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	7,553,301,000
RSUD Dr. Mohamad Soewandie			191,082,247,702	RSUD Dr. Mohamad Soewandie			231,532,762,354
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.02. Kesehatan			118,743,358,889	1.1.1.02. Kesehatan			147,602,659,331
1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	78%	32,095,729,024	1.1.1.02.06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	78%	46,820,077,801
1.1.1.02.06.0008 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	26000 orang	6,911,686,158	1.1.1.02.06.0008 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	26000 orang	7,417,976,818
1.1.1.02.06.0009 Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan	115 kali	414,208,400	1.1.1.02.06.0009 Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan	115 kali	414,208,400
1.1.1.02.06.0010 Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan	4 jenis	642,600,438	1.1.1.02.06.0010 Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan	4 jenis	5,119,110,444
1.1.1.02.06.0011 Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja	200 orang	24,127,234,028	1.1.1.02.06.0011 Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja	200 orang	33,868,782,139
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	82%	21,647,629,865	1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	82%	27,782,581,530
	Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	45 hari			Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	45 hari	

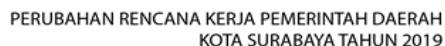


PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.1.1.02.07.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	3 jenis	16,424,225,865	1.1.1.02.07.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	3 jenis	22,894,830,420
1.1.1.02.07.0007 Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	1 jenis	5,223,404,000	1.1.1.02.07.0007 Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	1 jenis	4,887,751,110
1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	65,000,000,000	1.1.1.02.08 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	73,000,000,000
1.1.1.02.08.0002 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan	2 jenis	65,000,000,000	1.1.1.02.08.0002 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan	2 jenis	73,000,000,000
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			34,873,560	2.1.2.01. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan			194,461,740
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	34,873,560	2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	194,461,740
2.1.2.01.02.0118 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	34,873,560	2.1.2.01.02.0118 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	17 dokumen	194,461,740
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			72,304,015,253	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			83,735,641,283
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	61,124,806,072	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	67,309,788,873
2.2.2.02.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	61,124,806,072	2.2.2.02.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	67,309,788,873



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	11,179,209,181	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	16,425,852,410
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0079 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	11,179,209,181	2.2.2.02.02.0079 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	16,425,852,410
Satuan Polisi Pamong Praja			40,119,266,824	Satuan Polisi Pamong Praja			45,181,641,261
1. Urusan Pemerintahan				1. Urusan Pemerintahan			
1.1. Urusan Wajib				1.1. Urusan Wajib			
1.1.1. Pelayanan Dasar				1.1.1. Pelayanan Dasar			
1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			36,030,606,956	1.1.1.05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			40,739,998,125
1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	36,030,606,956	1.1.1.05.01 Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	40,739,998,125
	Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%			Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%			Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
1.1.1.05.01.0032 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	480 kali	2,460,041,695	1.1.1.05.01.0032 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	480 kali	2,420,041,695

V - 235



Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.2.2.02.02.0080 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,400,013,850	2.2.2.02.02.0080 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,485,022,843
Sekretariat DPRD			126,748,453,307	Sekretariat DPRD			138,679,280,025
2. Penunjang Urusan Pemerintahan				2. Penunjang Urusan Pemerintahan			
2.1. Fungsi Manajemen				2.1. Fungsi Manajemen			
2.1.2. Non Pelayanan Dasar				2.1.2. Non Pelayanan Dasar			
2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			102,333,616,639	2.1.2.03. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah			112,062,249,639
2.1.2.03.05 Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	102,333,616,639	2.1.2.03.05 Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	112,062,249,639
	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%			Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%	
2.1.2.03.05.0001 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	38 kali	3,266,537,438	2.1.2.03.05.0001 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	38 kali	3,266,537,438
2.1.2.03.05.0002 Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah jenis media publikasi kegiatan DPRD	5 jenis	16,805,321,275	2.1.2.03.05.0002 Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah jenis media publikasi kegiatan DPRD	5 jenis	17,619,321,275
2.1.2.03.05.0003 Fasilitasi Reses DPRD	Jumlah Fasilitasi Reses	2 kali	8,488,278,747	2.1.2.03.05.0003 Fasilitasi Reses DPRD	Jumlah Fasilitasi Reses	2 kali	8,488,278,747
2.1.2.03.05.0004 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	61,542,102,297	2.1.2.03.05.0004 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	69,456,735,297
2.1.2.03.05.0005 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang dibahas	6 dokumen	2,371,663,901	2.1.2.03.05.0005 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang dibahas	6 dokumen	2,371,663,901
2.1.2.03.05.0006 Penyusunan Dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen kajian/telaah terhadap kebijakan daerah yang disusun	10 dokumen	1,362,828,467	2.1.2.03.05.0006 Penyusunan Dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen kajian/telaah terhadap kebijakan daerah yang disusun	10 dokumen	1,362,828,467
2.1.2.03.05.0007 Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	264 kali	1,269,937,138	2.1.2.03.05.0007 Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	264 kali	1,269,937,138



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
2.1.2.03.05.0008 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	930 kali	2,803,208,462	2.1.2.03.05.0008 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	930 kali	2,803,208,462
2.1.2.03.05.0009 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali	1,857,260,317	2.1.2.03.05.0009 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali	1,857,260,317
2.1.2.03.05.0010 Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi	240 kali	2,566,478,597	2.1.2.03.05.0010 Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi	160 kali	3,566,478,597
2.2. Unsur Manajemen				2.2. Unsur Manajemen			
2.2.2. Non Pelayanan Dasar				2.2.2. Non Pelayanan Dasar			
2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			24,414,836,668	2.2.2.02. Sarana dan Prasarana Perkantoran			26,617,030,386
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	18,643,729,915	2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	20,260,127,050
2.2.2.02.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	18,643,729,915	2.2.2.02.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	20,260,127,050
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	5,771,106,753	2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	6,356,903,336
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
2.2.2.02.02.0081 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	5,771,106,753	2.2.2.02.02.0081 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6,356,903,336
TOTAL			7,166,113,959,195	TOTAL			7,584,431,915,866

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka Ekonomi Daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, rencana program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan Pembangunan Daerah melalui program-program Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

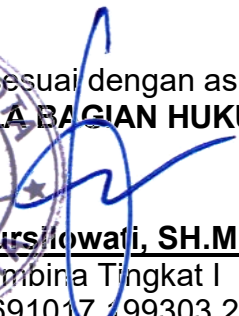
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Dengan kaidah pelaksanaan tersebut diatas, diharapkan Pembangunan di Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya secara menyeluruh dapat terwujud secara efisien dan efektif.

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

